



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN
2016 – 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Badung adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah instrument kebijakan yang bersisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih Tahun 2016-2021.
- (2) RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

Pasal 3

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing daerah
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3 Kerangka Pendanaan
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu Strategis
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 6.1 Strategi
 - 6.2 Arah Kebijakan
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
 - 10.1 Pedoman Transisi
 - 10.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selengkapnya disajikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh perencanaan pembangunan Daerah dan perangkat Daerah lima tahunan dan tahunan yang disusun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI BADUNG,

TTD

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

TTD

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 13

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,
PROVINSI BALI : (13 , 50 / 2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2016 - 2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-4 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen..... | I-5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | I-8 |
| 1.5 Maksud dan Tujuan | I-9 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II- 1 |
| 2.1 Aspek Geografi dan Demografi..... | II-1 |
| 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-13 |
| 2.3 Aspek Pelayanan Umum..... | II-27 |
| 2.4 Aspek Daya Saing daerah | II-32 |
| BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN | III-1 |
| 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-12 |
| 3.3 Kerangka Pendanaan | III-21 |
| BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS | IV-1 |
| 4.1 Permasalahan Pembangunan | IV-1 |
| 4.2 Isu Strategis..... | IV-7 |
| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1 |
| 5.1 Visi | V-2 |
| 5.2 Misi | V-3 |
| 5.3 Tujuan dan Sasaran | V-3 |
| BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | VI-1 |
| 6.1 Strategi | VI-1 |
| 6.2 Arah Kebijakan..... | VI-6 |
| BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | VII-1 |
| BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN | VIII-1 |
| BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH | IX-1 |

| | | |
|-------|---|-----|
| BAB X | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN | X-1 |
| | 10.1 Pedoman Transisi | X-1 |
| | 10.2 Kaidah Pelaksanaan..... | X-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan | II-1 |
| Tabel 2.2 | Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2014..... | II-6 |
| Tabel 2.3 | Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2011-2021 (Ribuan Jiwa) | II-6 |
| Tabel 2.4 | Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2010-2014..... | II-8 |
| Tabel 2.5 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2014..... | II-9 |
| Tabel 2.6 | Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2014 | II-11 |
| Tabel 2.7 | Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014..... | II-12 |
| Tabel 2.8 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung | II-15 |
| Tabel 2.9 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung..... | II-16 |
| Tabel 2.10 | Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Badung | II-18 |
| Tabel 2.11 | Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Kabupaten Badung..... | II-20 |
| Tabel 2.12 | Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung | II-25 |
| Tabel 2.13 | Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung..... | II-25 |
| Tabel 2.14 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung | II-26 |
| Tabel 2.15 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung..... | II-26 |
| Tabel 2.16 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung | II-27 |
| Tabel 2.17 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung | II-28 |

| | |
|--|--------|
| Tabel 2.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d .2014 | |
| Kabupaten Badung | II-28 |
| Tabel 2.19 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014 | |
| Menurut Kecamatan Kabupaten Badung..... | II-29 |
| Tabel 2.20 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar | |
| Tahun 2011 s.d .2014 Kabupaten Badung | II-29 |
| Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014 | |
| Menurut Kecamatan Kabupaten Badung..... | II-30 |
| Tabel 2.22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung | II-31 |
| Tabel 2.23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | II-31 |
| Tabel 2.24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | II-32 |
| Tabel 2.25 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Badung..... | II-33 |
| Tabel 2.26 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | II-33 |
| Tabel 2.27 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | II-34 |
| Tabel 2.28 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | II-34 |
| Tabel 2.29 Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung..... | II-35 |
| Tabel 2.30 Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung | II-36 |
| Tabel 2.31 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian | |
| Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung | II-37 |
| Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah | |
| Tahun 2011 s/d 2014 Kabupaten Badung | III-2 |
| Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2014 Kabupaten Badung..... | III-4 |
| Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d 2014 | |
| Kabupaten Badung | III-5 |
| Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 s/d 2014 | |
| Kabupaten Badung | III-6 |
| Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Badung..... | III-10 |

| | | |
|------------|--|--------|
| Tabel 3.6 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2010 s/d 2014 Kabupaten Badung | III-15 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Badung | III-16 |
| Tabel 3.8 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Badung | III-18 |
| Tabel 3.9 | Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2012-2014 Kabupaten Badung..... | III-19 |
| Tabel 3.10 | Defisit Riil Tahun 2012-2014 Kabupaten Badung..... | III-20 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2012 s/d 2014 Kabupaten Badung | III-21 |
| Tabel 3.12 | Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Badung | III-22 |
| Tabel 3.13 | Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung.. | III-23 |
| Tabel 3.14 | Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021 Kabupaten Badung | III-24 |
| Tabel 3.15 | Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung | III-24 |
| Tabel 3.16 | Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung..... | III-25 |
| Tabel 3.17 | Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung..... | III-27 |
| Tabel 4.1 | Identifikasi Program Prioritas | IV-19 |
| Tabel 4.2 | Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh..... | IV-21 |
| Tabel 4.3 | Analisis Pengaruh Negatif Program 1..... | IV-22 |
| Tabel 4.4 | Analisis Pengaruh Negatif Program 2..... | IV-24 |
| Tabel 4.5 | Analisis Pengaruh Negatif Program 3..... | IV-24 |
| Tabel 4.6 | Analisis Pengaruh Negatif Program 4..... | IV-26 |
| Tabel 4.7 | Analisis Pengaruh Negatif Program 5..... | IV-27 |
| Tabel 4.8 | Analisis Pengaruh Negatif Program 6..... | IV-28 |
| Tabel 4.9 | Analisis Pengaruh Negatif Program 7..... | IV-30 |

| | |
|---|---------|
| Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8..... | IV-31 |
| Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9..... | IV-32 |
| Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD | IV-34 |
| Tabel 4.13 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 | |
| Kabupaten Badung | IV-36 |
| Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung..... | V-9 |
| Tabel 5.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | V-12 |
| Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung | VI-14 |
| Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Badung | VII-6 |
| Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Badung..... | VIII-2 |
| Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 Kabupaten Badung..... | VIII-45 |
| Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021..... | VIII-77 |
| Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung | IX-2 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------------|---|-------|
| Grafik 2.1 | Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2014..... | II-7 |
| Grafik 2.2 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000,2010 dan BPS Tahun 2014..... | II-10 |
| Grafik 2.3 | Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2014..... | II-12 |
| Grafik 2.4 | PDRB Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah) ... | II-13 |
| Grafik 2.5 | PDRB Perkapita Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah) | II-14 |
| Grafik 2.6 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 (%) | II-20 |
| Grafik 2.7 | Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2009-2014..... | II-22 |
| Grafik 2.8 | Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 (Persen) | II-23 |
| Grafik 2.9 | Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015..... | II-24 |
| Grafik 2.10 | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Badung Tahun 2014..... | II-27 |
| Grafik 2.11 | Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2014..... | II-54 |
| Grafik 2.12 | Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK..... | II-54 |
| Grafik 2.13 | Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2014..... | II-56 |
| Grafik 2.14 | Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2014..... | II-56 |
| Grafik 2.15 | Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 | II-58 |
| Grafik 2.16 | Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2014 | II-59 |
| Grafik 2.17 | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional Tahun 2011-2013..... | II-60 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 1.1 Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 | I-2 |
| Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan RPJMD | I-3 |
| Gambar 1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah | I-5 |
| Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya | IV-23 |
| Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan | IV-25 |
| Gambar 4.3 Potensi Agribisnis sekaligus daerah resapan Petang..... | IV-29 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Mengingat RPJMD mencakup berbagai dimensi pembangunan daerah serta merupakan subsistem dari pembangunan provinsi dan nasional, maka proses penyusunan RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan yakni : teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Melalui keempat pendekatan tersebut maka secara substansi dokumen RPJMD dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan pula bahwa perodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilukada adalah Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tahapan penyusunan RPJMD meliputi : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, wajib menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Adapun sasaran pokok dari RPJMD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** yang merupakan implementasi dari **Ajaran Tri Sakti** yaitu : **berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karna* serta *Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*.

Pembangunan bersifat **Semesta** merupakan pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kewilayahan pada semua jenjang yang dilaksanakan secara terpimpin. Sedangkan pembangunan secara **Berencana** merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpola, dapat dilaksanakan tahap demi tahap namun tuntas sesuai dengan irama dan dinamika perubahan lokal, nasional dan global.

Implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

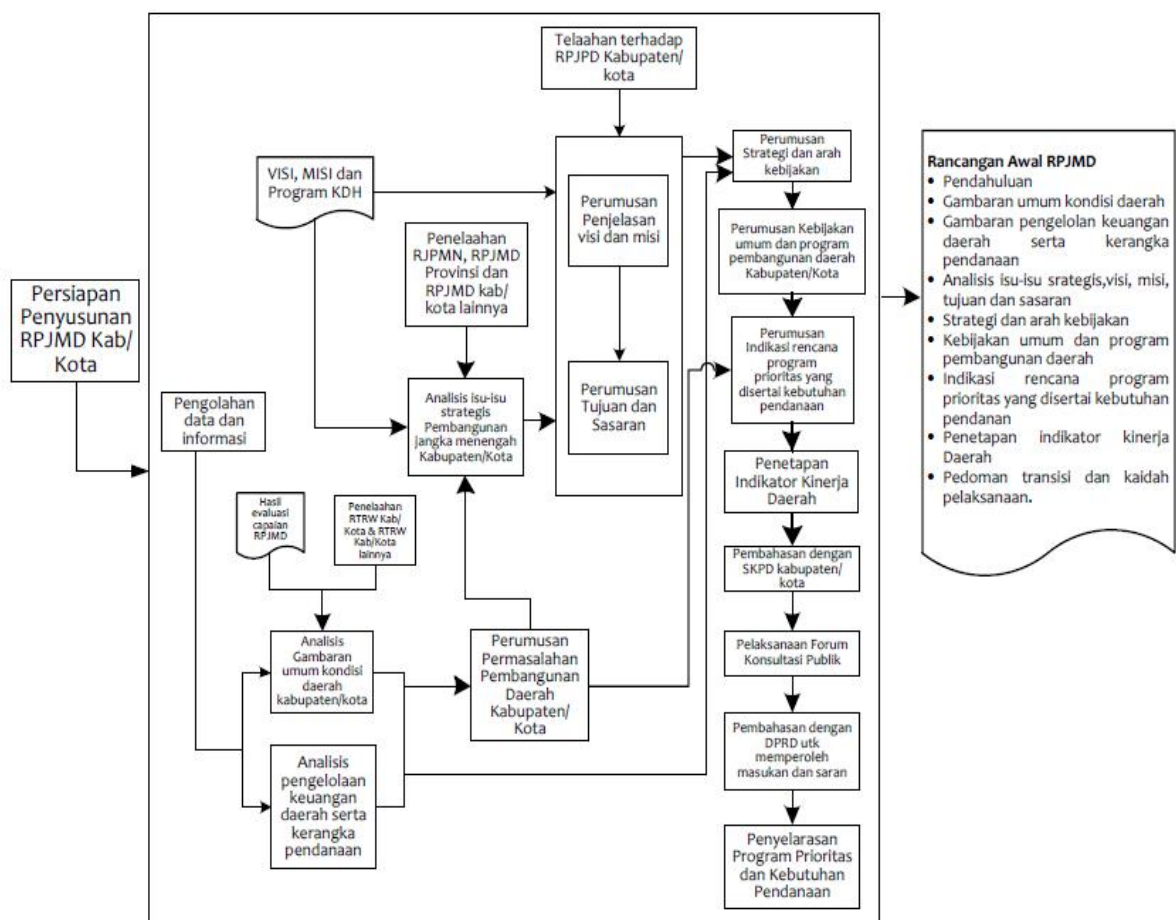
Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dimaksud, maka substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi : 1). Bidang pangan, sandang dan papan; 2). Bidang pendidikan dan kesehatan; 3). Bidang adat, agama dan kebudayaan; 4) Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; serta 5) Bidang pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang Infrastruktur, Legislasi serta Anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain memuat 5 (lima) bidang prioritas tersebut, pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan program-program sesuai prioritas dan urusan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dari berbagai unsur, sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan RPJMD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

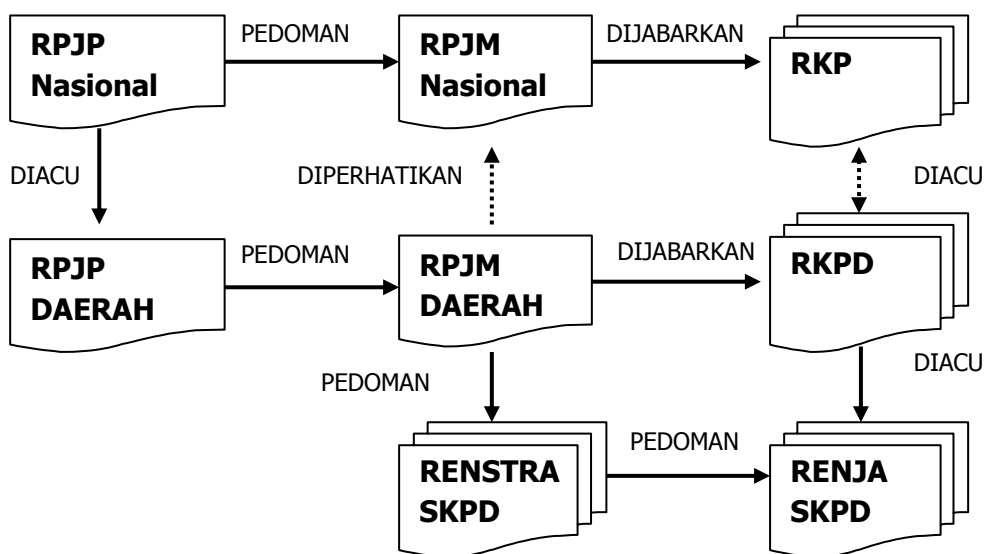
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD yang bersangkutan. Hubungan antar dokumen perencanaan dimaksud disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2010.

Keterangan :

- a. Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- b. Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- d. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Badung. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Bali yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Bali, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Bali, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Bali.

Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Badung yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2015

yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Badung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3 Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.4 Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu-Isu Strategis
- Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - 6.1. Strategi
 - 6.2. Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
 - 10.1. Pedoman Transisi
 - 10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi-misi dan program-program unggulan daerah dengan memperhatikan kondisi terkini dan isu-isu strategis serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;
- b. Menyediakan landasan formal bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai instrumen untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program/kegiatan yang terukur dan berorientasi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lahan dan Wilayah

A. Luas Wilayah Batas Administratif

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Bentuk bentangan wilayah Kabupaten Badung menyerupai sebilah keris yang membujur dari utara ke selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di utara, Samudera Indonesia di sisi selatan, Kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar di sisi timur dan Kabupaten Tabanan di sisi barat.

Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km² (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km² atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km² atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

| No | Kecamatan | Luas Wilayah Km ² | Prosentase Luas Wilayah (%) |
|--------|--------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Kuta Selatan | 101,13 | 24,16 |
| 2. | Kuta | 17,52 | 4,19 |
| 3. | Kuta Utara | 33,86 | 8,09 |
| 4. | Mengwi | 82,00 | 19,59 |
| 5. | Abiansemal | 69,01 | 16,49 |
| 6. | Petang | 115 | 27,48 |
| BADUNG | | 418,52 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

B. Keadaan Iklim

Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Maret), hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air. Curah hujan di bawah normal terjadi pada bulan Pebruari, Maret, April, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember, dan Desember. Curah hujan rata-rata per tahun antara 893,4 - 2.702,6 mm.

Suhu minimum terjadi pada bulan Agustus mencapai 23,4°C dan maksimum pada bulan Oktober mencapai 31,5 °C, sedangkan suhu rata-rata 26,1 °C – 27,9°C. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober mencapai 77% sedangkan tertinggi pada bulan Januari mencapai 84%. Ditinjau dari penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember mencapai 53% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 95%.

C. Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah, Kabupaten Badung berada pada ketinggian antara 0 – 2.075 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Wilayah Kecamatan Petang memiliki topografi paling tinggi antara 275-2.075 DPL, sedangkan terendah berada di wilayah Kecamatan Mengwi 0-350 meter DPL.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, wilayah Kabupaten Badung memiliki kemiringan lereng antara 0 - >40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah ± 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;

- b. Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebagian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemal dengan luas daerah ± 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;
- c. Kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah ± 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;
- d. Kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah ± 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.
- e. Ketinggian di atas permukaan laut adalah 0 – 2.075 Meter

D. Kondisi Morfologi

Pembagian satuan morfologi Kabupaten Badung didasarkan pada bentuk bentang alam dan kemiringan lereng, yang dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yaitu :

- a. Dataran

Merupakan daerah dataran alluvium dan pantai, bentuk lereng datar hingga landai dengan kemiringan lereng umumnya 0-2%, terletak pada ketinggian 0 – 50 m di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir pada satuan morfologi ini kondisi keairannya bersifat permanen (mengalir sepanjang tahun). Bentuk sungai melebar ke arah horizontal dengan tebing yang landai dan dangkal. Batuan penyusun terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan liat.

Penyebarannya di bagian tengah-selatan dengan luas daerah lebih kurang 11,56% dari luas wilayah, meliputi Kuta, Legian, Tuban, Benoa, dan Nusa Dua. Daerah ini umumnya dipergunakan sebagai daerah permukiman, industri, perkantoran, pertokoan, dan obyek wisata.

- b. Perbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng umumnya antara 2–5% dan berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut.

Bentuk morfologi dipengaruhi oleh adanya torehan alur-alur sungai yang membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan lembah yang cukup lebar dan agak dalam serta bentuk sungai mulai mengarah ke bentuk "U". Erosi lateral sudah mulai berjalan lebih intensif dibandingkan dengan erosi vertikal. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Penyebarannya terdapat di bagian tengah dengan luas lebih kurang 43,38% dari luas wilayah yaitu sekitar daerah Mengwi, Kapal, Abiansemal, Blahkiuh, Lukluk dan Sangeh. Penggunaan lahan di daerah ini digunakan untuk kawasan permukiman, pertanian dan obyek wisata.

c. Perbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng umumnya 5–15% dan berada pada ketinggian 7 - 213 meter di atas permukaan laut.

Penyebarannya di bagian selatan wilayah dengan luas lebih kurang 23,94% dari luas daerah, meliputi daerah Pecatu, Petang, Kutuh dan Uluwatu. Penggunaan lahan pada satuan ini umumnya berupa daerah alang-alang, tegalan dan permukiman.

d. Perbukitan Berelief Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 15-40% dan berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungainya umumnya membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan kenampakan tebing-tebing sungai cukup dalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa erosi vertikal lebih intensif dibandingkan dengan erosi lateral. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Sebarannya terdapat di bagian utara dengan luas lebih kurang 19,58% dari luas daerah yaitu sekitar daerah Pangsan, Petang, Sandakan, Nungnung Kiadan dan Pelaga. Penggunaan lahan di daerah ini adalah untuk kawasan perkebunan, permukiman setempat dan persawahan.

e. Perbukitan Berelief Sangat Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng umumnya > 40% dan berada pada ketinggian 1500 – 2096 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungai menunjukkan pola memancar (radial) dengan lembah dalam dan sempit. Sifat sungai umumnya musiman (intermitten) artinya hanya berair pada musim penghujan. Batuannya terbentuk dari hasil kegiatan gunung api kelompok Buyan – Bratan Purba berupa lava dan Breksi (Qvbb).

Sebarannya menempati bagian utara dengan luas lebih kurang 1,53% dari luas daerah, yang meliputi daerah sekitar G. Catur yang umumnya masih ditutupi oleh hutan tropik.

E. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan wilayah Kabupaten Badung terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yakni lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dimaksud berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah seluas 28.465 hektar (68,01%) , sedangkan lahan bukan pertanian berupa jalan, permukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara seluas 13.387 hektar (31,99%).

Sebaran penggunaan lahan pertanian sawah yang terluas terdapat di Kecamatan Mengwi mencapai 4.597 hektar dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 30 hektar, sedangkan di Kecamatan Kuta Selatan tidak terdapat lahan pertanian sawah. Sementara untuk lahan bukan sawah berupa : tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lahan yang tidak diusahakan sementara waktu, dan lainnya (tambak, kolam, empang dan hutan yang diusahakan) terluas terdapat Kecamatan Petang mencapai 8.939 hektar, dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 164 hektar. Secara rinci pola penggunaan lahan Kabupaten Badung dimuat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung
Tahun 2014

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Hektar) | Persen (%) |
|---------------|--|---------------|--------------|
| 1 | Lahan Pertanian | 28.244 | 68,01 |
| 1.1 | Lahan Sawah (irigasi teknis) | 9.984 | 24,23 |
| 1.2 | Lahan bukan sawah | 18.260 | 43,77 |
| | a. Tegal/Kebun | 8.084 | 19,48 |
| | b. Perkebunan | 6.415 | 15,34 |
| | c. Hutan Rakyat | 2.122 | 5,10 |
| | d. Sementara tidak diusahakan | 231 | 0,55 |
| | e. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan) | 1.408 | 3,33 |
| 2 | Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara) | 13.608 | 31,99 |
| Jumlah | | 41.852 | 100 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2015

2.1.2 Demografi

A. Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2016 mencapai sekitar 462,68 ribu jiwa, Tahun 2017 mencapai sekitar 463,33 ribu jiwa, Tahun 2018 mencapai sekitar 463,97 ribu jiwa, Tahun 2019 mencapai sekitar 464,62 ribu jiwa, Tahun 2020 mencapai sekitar 465,28 ribu jiwa, dan pada Tahun 2021 mencapai sekitar 465,93 ribu jiwa. Sedangkan apabila dilihat dari komposisinya, penduduk Kabupaten Badung didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki – laki. Kondisi ini tentu perlu segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk yang padat akan berkonsekwensi pada peningkatan sumber daya penunjang kehidupan antara lain mencakup pangan, sandang dan papan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2021 dimuat pada Tabel 2.3..

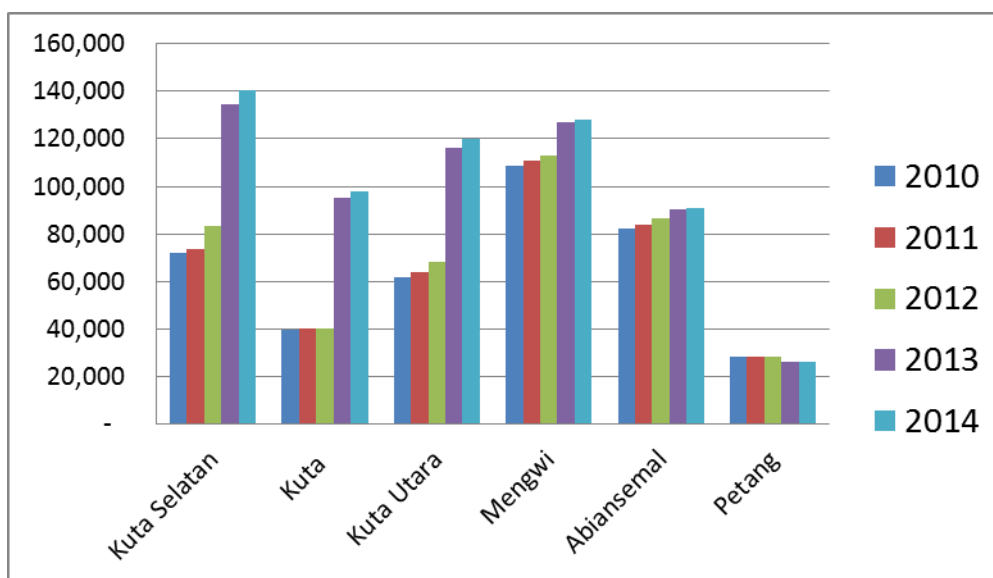
Tabel 2.3
 Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2021 (Ribu Jiwa)

| Jenis Kelamin | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Laki - Laki | 220,48 | 231,08 | 232,82 | 231,55 | 232,30 | 232,22 | 232,54 | 232,87 | 233,19 | 233,52 | 233,85 |
| Perempuan | 212,34 | 223,82 | 225,58 | 229,83 | 229,73 | 230,46 | 230,78 | 231,10 | 231,43 | 231,75 | 232,08 |
| Kab.Badung | 432,82 | 454,90 | 458,40 | 461,38 | 462,03 | 462,68 | 463,33 | 463,97 | 464,62 | 465,28 | 465,93 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Badung per kecamatan pada tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1.
 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung
 Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2010-2015

B. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata dunia memiliki berbagai lapangan usaha sehingga menjadi salah satu tujuan migran di Provinsi Bali. Hal ini membawa dampak terhadap tingginya kepadatan penduduk Kabupaten Badung yakni mencapai 1.440 jiwa/km² pada Tahun 2014. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kuta yang mencapai 5.574 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Petang yang hanya sebesar 227 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Kuta tidak dapat dihindari mengingat Kuta merupakan pusat aktivitas kepariwisataan sehingga lapangan usaha juga terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Wilayah yang memiliki perkembangan kepadatan penduduk cukup tinggi setelah Kecamatan Kuta yakni Kecamatan Kuta Utara yang mencapai 3.538 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh perkembangan sarana kepariwisataan dan permukiman di wilayah Kecamatan Kuta Utara yang berfungsi sebagai *hinterland* dari pusat pariwisata Kuta meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kuta Utara perlu dikendalikan mengingat berdampak pada meningkatnya beban lingkungan, serta rawan timbulnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2010-2014 dimuat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2010-2014

| NO | KECAMATAN | KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²) | | | | |
|---------------|--------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Kuta Selatan | 709 | 729 | 826 | 1,330 | 1,389 |
| 2 | Kuta | 2,272 | 2,287 | 2,301 | 5,428 | 5,576 |
| 3 | Kuta Utara | 1,829 | 1,890 | 2,021 | 3,429 | 3,538 |
| 4 | Mengwi | 1,328 | 1,349 | 1,377 | 1,550 | 1,562 |
| 5 | Abiansemal | 1,191 | 1,211 | 1,254 | 1,306 | 1,313 |
| 6 | Petang | 248 | 248 | 247 | 228 | 227 |
| BADUNG | | 939 | 957 | 1,004 | 1,408 | 1,440 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2010-2015

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha – usaha pemerintah di bidang kependudukan. Semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir rata-rata 3,04% dengan kepadatan penduduk rata-rata 1,440 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tertinggi mulai Tahun 2010-2014 terjadi di Kecamatan Kuta Selatan yang mencapai 6,85%, disusul Kecamatan Kuta Utara mencapai 4,48%, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan Petang yaitu -0,22%.

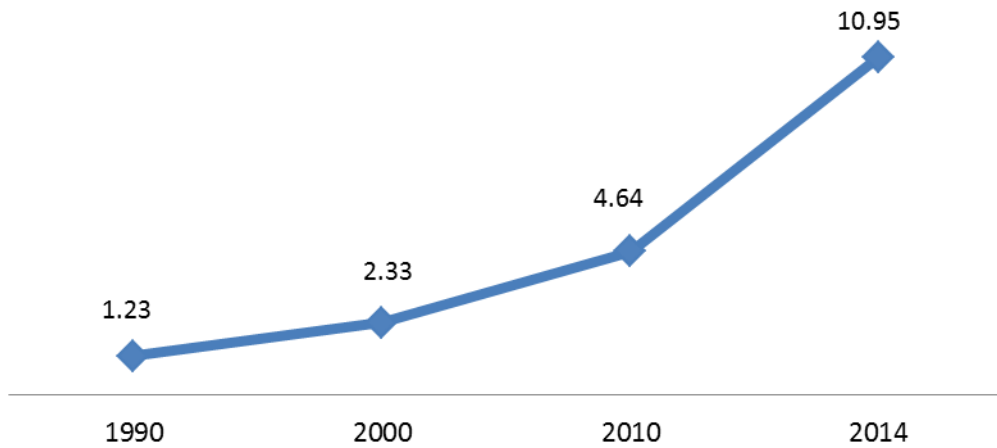
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung perlu dikendalikan secara komprehensif dan lintas wilayah, mengingat fenomena aglomerasi penduduk dan ekonomi semakin menguat yang akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungan, prasarana wilayah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung ditunjukkan pada Tabel 2.5. dan Grafik 2.2.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2010-2014

| NO | KECAMATAN | LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%) | | | RATA-RATA |
|----|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010-2011 | 2011-2012 | 2013-2014 | |
| 1 | Kuta Selatan | 2.79 | 13.31 | 4.46 | 6.85 |
| 2 | Kuta | 0.63 | 0.64 | 2.73 | 1.33 |
| 3 | Kuta Utara | 3.34 | 6.92 | 3.19 | 4.48 |
| 4 | Mengwi | 1.54 | 2.09 | 0.79 | 1.47 |
| 5 | Abiansemal | 1.71 | 3.50 | 0.55 | 1.92 |
| 6 | Petang | 0.05 | (0.34) | (0.38) | (0.22) |
| | BADUNG | 1.89 | 4.90 | 2.33 | 3.04 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2010-2015

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010 dan
BPS Tahun 2014



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, dan 2010
Badung Dalam Angka Tahun 2015

D. Rata – rata Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (*life expectancy rate*) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Rata-rata usia harapan hidup menjadi salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah dan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan.

Seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, rata-rata usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Usia rata-rata harapan hidup masyarakat Kabupaten Badung pada Tahun 2014 mencapai 74,30 tahun sehingga berada di atas rata – rata umur harapan hidup Bali sebesar 71,20 tahun dan nasional sebesar 70,1 tahun.

E. Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan Tahun 2014, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Badung mencapai sekitar 454.358 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak sekitar 324.471 orang di antaranya bekerja dan sebanyak 1558 menganggur. Berdasarkan kondisi tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2014 mencapai 71,41% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0,48 sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung
Tahun 2014

| NO | URAIAN | LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----|--|---------|-----------|---------|
| 1 | Penduduk Usia Kerja (Orang) | 230,952 | 223,406 | 454,358 |
| 2 | Angkatan Kerja (Orang) | 184,059 | 140,412 | 324,471 |
| 3 | Bekerja (Orang) | 182,993 | 139,920 | 322,913 |
| 4 | Pengangguran Terbuka (Orang) | 1,066 | 492 | 1,558 |
| 5 | Bukan Angkatan Kerja (Orang) | 46,893 | 82,994 | 129,887 |
| 6 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | 79.70 | 62.85 | 71.41 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 0.58 | 0.35 | 0.48 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

F. Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Distribusi penduduk Kabupaten Badung berdasarkan lapangan usaha Tahun 2014, menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Badung sebagian besar bergerak pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu mencapai 35,83%, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan mencapai 19,02%, sedangkan yang paling rendah pada lapangan usaha listrik dan air yaitu 0,12%.

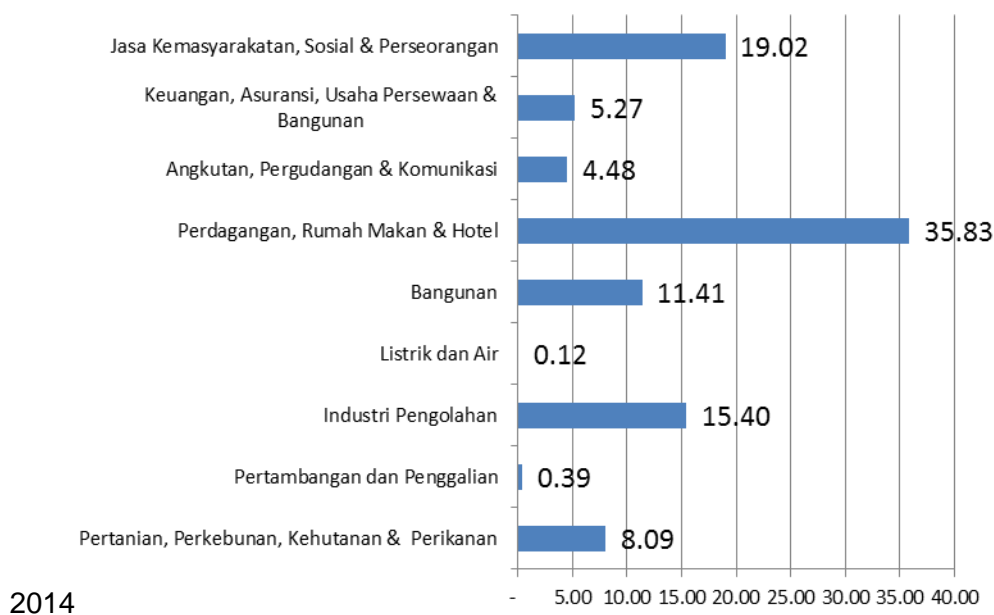
Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Badung dominan bergerak pada lapangan usaha sektor tersier, dan paling sedikit pada lapangan usaha sektor primer. Secara rinci distribusi penduduk berdasarkan lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2014

| NO | LAPANGAN USAHA | JUMLAH | PERSEN |
|----|--|----------------|---------------|
| 1 | Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan | 26,129 | 8.09 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 1,244 | 0.39 |
| 3 | Industri Pengolahan | 49,733 | 15.40 |
| 4 | Listrik dan Air | 396 | 0.12 |
| 5 | Bangunan | 36,839 | 11.41 |
| 6 | Perdagangan, Rumah Makan & Hotel | 115,686 | 35.83 |
| 7 | Angkutan, Pergudangan & Komunikasi | 14,453 | 4.48 |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan | 17,007 | 5.27 |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perseorangan | 61,426 | 19.02 |
| | Total | 322,913 | 100.00 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Grafik 2.3.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015 (data diolah)

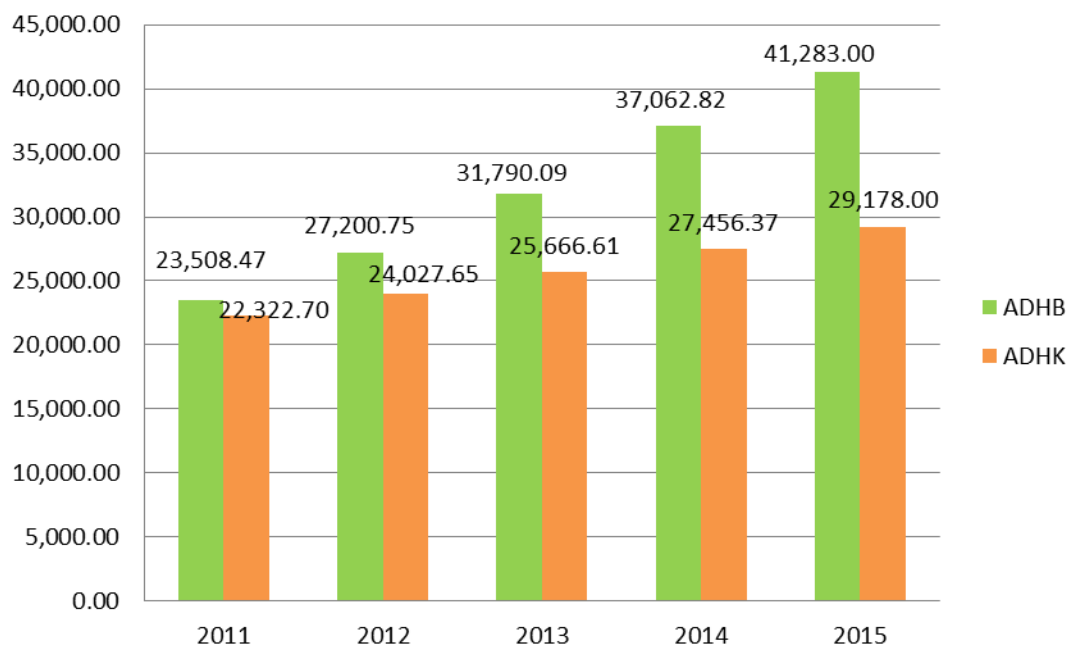
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

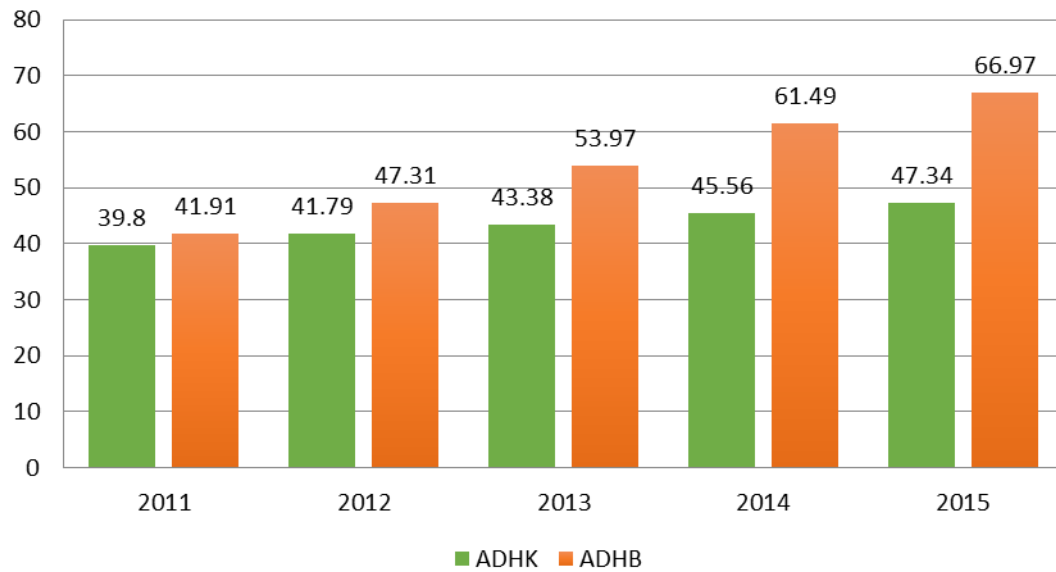
Grafik 2.4
PDRB Kabupaten Badung ADHB
Tahun 2011-2014 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Badung terus meningkat yang diindikasikan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2011, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru mencapai Rp.23.508,47 milyar, meningkat menjadi Rp.41.283,00 milyar pada Tahun 2015. Peningkatan juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) yaitu dari Rp.22.322,70 milyar pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp.29.178,00 milyar pada Tahun 2015.

Grafik 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Peningkatan juga terlihat dari hasil perhitungan PDRB perkapita Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2011, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) Kabupaten Badung baru mencapai Rp.39,80 juta meningkat pada Tahun 2015 menjadi Rp.47,34 juta lebih. Sedangkan pada PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp.41,91 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp.66,97 juta pada Tahun 2015.

Tabel 2.8
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
 Kabupaten Badung

| NO | Sektor | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|----|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.836,40 | 8,23 | 1.954,37 | 8,13 | 1.982,15 | 7,72 | 2.087,31 | 7,60 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 84,58 | 0,38 | 98,02 | 0,41 | 105,14 | 0,41 | 106,35 | 0,39 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.024,52 | 4,59 | 1.074,57 | 4,47 | 1.163,28 | 4,53 | 1.283,50 | 4,67 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 46,21 | 0,21 | 51,32 | 0,21 | 55,45 | 0,22 | 57,75 | 0,21 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 72,21 | 0,32 | 74,59 | 0,31 | 78,64 | 0,31 | 85,52 | 0,31 |
| 6 | Konstruksi | 2.074,42 | 9,29 | 2.478,05 | 10,31 | 2.623,08 | 10,22 | 2.705,93 | 9,86 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.649,39 | 7,39 | 1.749,22 | 7,28 | 1.905,69 | 7,42 | 2.073,02 | 7,55 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 4.292,63 | 19,23 | 4.552,04 | 18,95 | 4.826,61 | 18,81 | 4.985,18 | 18,16 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5.657,14 | 25,34 | 6.117,81 | 25,46 | 6.631,28 | 25,84 | 7.132,96 | 25,98 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.685,97 | 7,55 | 1.824,27 | 7,59 | 1.927,37 | 7,51 | 2.092,93 | 7,62 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 601,69 | 2,70 | 653,92 | 2,72 | 737,53 | 2,87 | 819,73 | 2,99 |
| 12 | Real Estate | 888,02 | 3,98 | 945,47 | 3,93 | 1.010,17 | 3,94 | 115,70 | 0,42 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 181,36 | 0,81 | 185,23 | 0,77 | 202,08 | 0,79 | 220,51 | 0,80 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 988,89 | 4,43 | 999,98 | 4,16 | 998,01 | 3,89 | 1.122,02 | 4,09 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 766,14 | 3,43 | 768,88 | 3,20 | 873,74 | 3,40 | 981,17 | 3,57 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 286,94 | 1,29 | 304,44 | 1,27 | 343,02 | 1,34 | 391,44 | 1,43 |
| 17 | Jasa Lainnya | 186,18 | 0,83 | 195,49 | 0,81 | 203,37 | 0,79 | 222,35 | 0,81 |
| | PDRB | 22.322,70 | 100,00 | 24.027,65 | 100,00 | 25.666,61 | 100,00 | 27.456,37 | 100,00 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.9
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
 atas Dasar Harga Berlaku
 Kabupaten Badung

| No | Sektor | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|----|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 1.894,34 | 8,06 | 2.100,22 | 7,72 | 2.352,69 | 7,40 | 2.516,30 | 6,79 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 88,15 | 0,37 | 105,55 | 0,39 | 120,37 | 0,38 | 128,27 | 0,35 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1.077,02 | 4,58 | 1.186,71 | 4,36 | 1.339,29 | 4,21 | 1.487,96 | 4,01 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 40,37 | 0,17 | 39,91 | 0,15 | 39,06 | 0,12 | 48,85 | 0,13 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 71,82 | 0,31 | 74,26 | 0,27 | 79,65 | 0,25 | 84,48 | 0,23 |
| 6 | Konstruksi | 2.186,85 | 9,30 | 2.802,29 | 10,30 | 3.121,73 | 9,82 | 3.216,49 | 8,68 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.771,43 | 7,54 | 1.926,01 | 7,08 | 2.152,45 | 6,77 | 2.413,11 | 6,51 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 4.769,00 | 20,29 | 5.610,46 | 20,63 | 6.913,40 | 21,75 | 8.831,24 | 23,83 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5.948,21 | 25,30 | 7.186,66 | 26,42 | 8.807,67 | 27,71 | 10.815,28 | 29,18 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 1.682,45 | 7,16 | 1.833,38 | 6,74 | 1.940,83 | 6,11 | 2.065,23 | 5,57 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 628,09 | 2,67 | 753,08 | 2,77 | 896,70 | 2,82 | 997,52 | 2,69 |
| 12 | Real Estate | 915,48 | 3,89 | 999,50 | 3,67 | 1.124,15 | 3,54 | 1.239,79 | 3,35 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 182,86 | 0,78 | 198,61 | 0,73 | 224,19 | 0,71 | 247,84 | 0,67 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 999,95 | 4,25 | 1.025,89 | 3,77 | 1.043,15 | 3,28 | 1.149,85 | 3,10 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 766,55 | 3,26 | 818,67 | 3,01 | 1.004,17 | 3,16 | 1.120,14 | 3,02 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 296,16 | 1,26 | 329,96 | 1,21 | 390,76 | 1,23 | 435,44 | 1,17 |
| 17 | Jasa Lainnya | 296,16 | 1,26 | 329,96 | 1,21 | 390,76 | 1,23 | 435,44 | 1,17 |
| | PDRB | 23.508,47 | 100,00 | 27.200,75 | 100,00 | 31.790,09 | 100,00 | 37.062,82 | 100,00 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Potret kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode Tahun 2011-2014 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh masing-masing lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan memiliki pola yang hampir sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2014 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar Rp. 27,46 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 25,67 triliun. Total nilai tambah yang terbentuk (PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2014 sebesar Rp. 37,06 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 31,79 triliun.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp. 10,82 triliun. Dari seluruh nilai tambah pada lapangan usaha ini, sub kategori penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen, sedangkan sub kategori penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen.

Selain lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar yakni transportasi dan pergudangan yang mencapai Rp. 8,83 triliun pada Tahun 2014. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom ke Bali. Keberadaan Bandara Ngurah Rai mampu menghasilkan nilai tambah hampir 90 persen terhadap nilai tambah di lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Di posisi ketiga terdapat lapangan usaha konstruksi yang menghasilkan nilai tambah terbesar mencapai Rp. 3,22 triliun pada Tahun 2014. Diposisi selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan juga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2014
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Badung

| No | Sektor | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | ABHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK | ADHB | ADHK |
| | | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 8,06 | 8,23 | 7,72 | 8,13 | 7,40 | 7,72 | 6,79 | 7,60 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,39 |
| 3 | Industri Pengolahan | 4,58 | 4,59 | 4,36 | 4,47 | 4,21 | 4,53 | 4,01 | 4,67 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,12 | 0,22 | 0,13 | 0,21 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,31 | 0,32 | 0,27 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | 0,23 | 0,31 |
| 6 | Konstruksi | 9,30 | 9,29 | 10,30 | 10,31 | 9,82 | 10,22 | 8,68 | 9,86 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,54 | 7,39 | 7,08 | 7,28 | 6,77 | 7,42 | 6,51 | 7,55 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 20,29 | 19,23 | 20,63 | 18,95 | 21,75 | 18,81 | 23,83 | 18,16 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 25,30 | 25,34 | 26,42 | 25,46 | 27,71 | 25,84 | 29,18 | 25,98 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,16 | 7,55 | 6,74 | 7,59 | 6,11 | 7,51 | 5,57 | 7,62 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,67 | 2,70 | 2,77 | 2,72 | 2,82 | 2,87 | 2,69 | 2,99 |
| 12 | Real Estate | 3,89 | 3,98 | 3,67 | 3,93 | 3,54 | 3,94 | 3,35 | 0,42 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 0,78 | 0,81 | 0,73 | 0,77 | 0,71 | 0,79 | 0,67 | 0,80 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,25 | 4,43 | 3,77 | 4,16 | 3,28 | 3,89 | 3,10 | 4,09 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 3,26 | 3,43 | 3,01 | 3,20 | 3,16 | 3,40 | 3,02 | 3,57 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,26 | 1,29 | 1,21 | 1,27 | 1,23 | 1,34 | 1,17 | 1,43 |
| 17 | Jasa Lainnya | 1,26 | 0,83 | 1,21 | 0,81 | 1,23 | 0,79 | 1,17 | 0,81 |
| | PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selama periode Tahun 2011 – 2014, struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum serta lapangan usaha transportasi. Sarana kepariwisataan di Kabupaten Badung yang cukup banyak memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Badung. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Kabupaten Badung, mampu memberikan sumbangan terbesar di lapangan usaha transportasi disamping transportasi darat.

Selanjutnya lapangan usaha konstruksi menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 8,68 persen pada Tahun 2014, diikuti oleh lapangan usaha pertanian sebesar 6,79 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sebesar 6,51 persen.

Jenis-jenis investasi yang memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh pembangunan hotel, restoran, toko, ruko dan jasa lainnya. Demikian pula dampak pembangunan mega proyek pada Tahun 2012 diantaranya perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol diatas perairan, serta *underpass* Dewa Ruci memberi kontribusi mencapai 10,30 persen terhadap total PDRB Badung.

Pembangunan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung yang bersumber dari belanja pemerintah daerah turut menjadi stimulan dalam perkembangan lapangan usaha konstruksi. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan nilai tambah lapangan usaha ini bertambah dari sebesar Rp. 2,19 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 3,22 triliun pada tahun 2014. Setelah tahun 2012 peranan sektor ini mulai mengalami penurunan yaitu sebesar 9,82 persen pada Tahun 2013 dan menjadi 8,68 persen pada Tahun 2014.

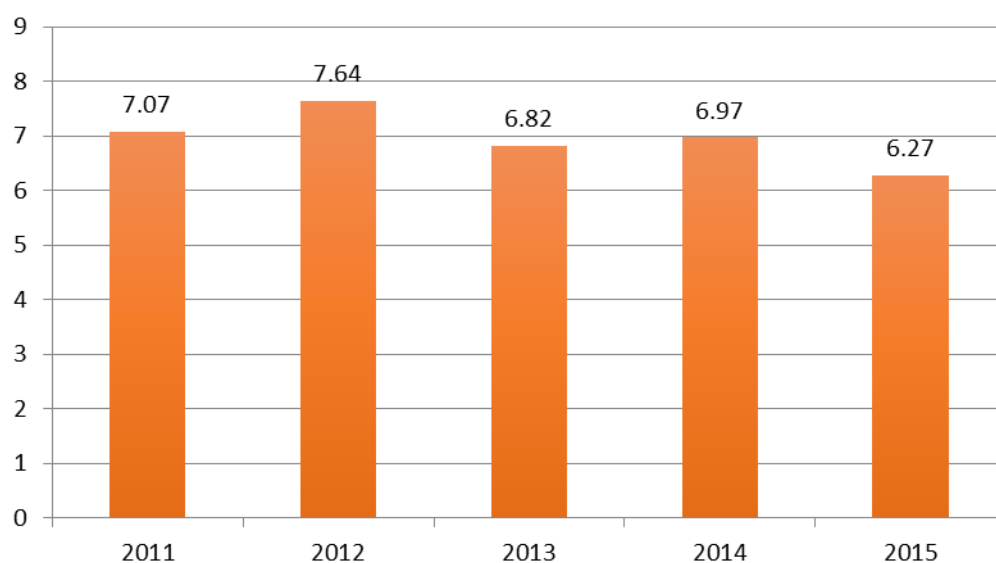
Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, menempati posisi kelima pada Tahun 2014 dengan kontribusi mencapai 6,51 persen. Besarnya keterkaitan antara industri pariwisata dan lapangan usaha perdagangan mengakibatkan nilai tambah di lapangan usaha ini cukup signifikan mencapai Rp. 12,94 triliun. Peranan atau distribusi masing-masing lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 - 2014
 Kabupaten Badung

| No | Sektor | Pertumbuhan | |
|----|--|-------------|-------|
| | | ADHB | ADHK |
| | | % | % |
| 1 | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 9,95 | 4,38 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 13,45 | 8,10 |
| 3 | Industri Pengolahan | 11,38 | 7,83 |
| 4 | Pengadaan Listrik dan Gas | 7,26 | 7,75 |
| 5 | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 5,57 | 5,82 |
| 6 | Konstruksi | 14,19 | 9,49 |
| 7 | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,86 | 7,93 |
| 8 | Transportasi dan Pergudangan | 22,87 | 5,12 |
| 9 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 22,06 | 8,03 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi | 7,08 | 7,48 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi | 16,74 | 10,87 |
| 12 | Real Estate | 10,65 | 7,92 |
| 13 | Jasa Perusahaan | 10,68 | 6,78 |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,84 | 4,45 |
| 15 | Jasa Pendidikan | 13,67 | 8,76 |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 13,76 | 10,96 |
| 17 | Jasa Lainnya | 13,76 | 6,12 |
| | PDRB | 16,39 | 7,14 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Grafik 2.6
 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
 Tahun 2011-2015 (%)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

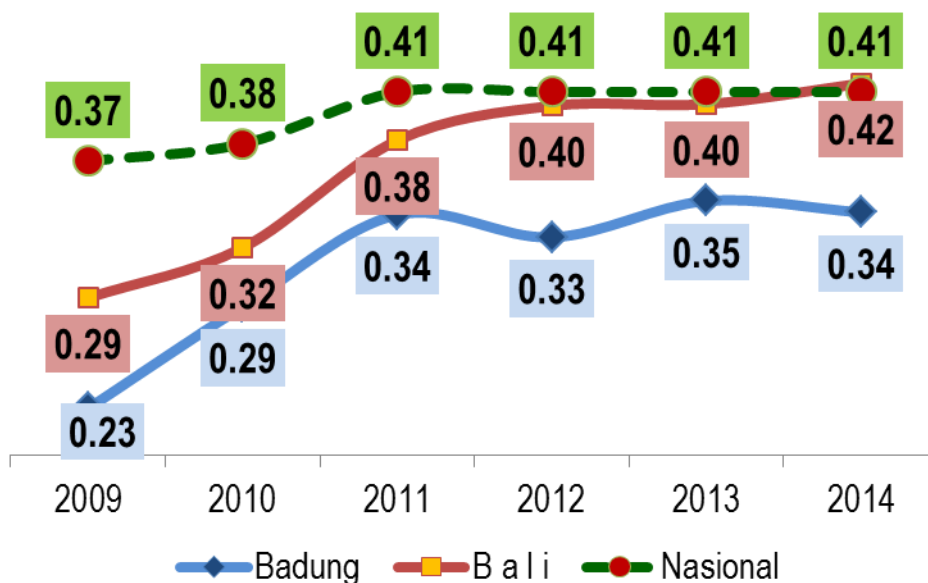
Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, seiring perkembangan perekonomian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya kondisi perekonomian global (ekonomi global yang belum pulih dari krisis dalam 3 tahun terakhir, perekonomian nasional yaitu akibat kenaikan BBM) dan isu-isu lainnya yang berpengaruh terhadap kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami puncaknya pada Tahun 2012 yaitu mencapai 7,64%. Kondisi ini didorong oleh pelaksanaan proyek/investasi skala besar di sektor bangunan pada Tahun 2012 diantaranya proyek *Underpass*, Jalan di atas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai. Selain hal tersebut kondisi ini dipicu oleh adanya berbagai *event* yang berskala internasional yang bertempat di Nusa Dua, Kuta Selatan antara lain KTT *APEC*, KTT *ASEAN*, *Bali Democracy Forum* serta *World Trade Organization (WTO)*. Sedangkan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015 terjadi perlambatan yang disebabkan proyek investasi skala besar telah berakhir pelaksanaannya serta dampak dari perekonomian nasional dan global mengalami perlambatan.

Di samping dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan di suatu daerah juga perlu dilihat dari sisi lain, antara lain aspek kesenjangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan gini rasio. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kisaran nilai indeks gini rasio dari 0 - < 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35 - 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2009 hingga Tahun 2014 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan sedang, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Tentu hal ini yang perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perbandingan gini rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan nasional Tahun 2009 - 2014 dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
 Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
 Tahun 2009-2014



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

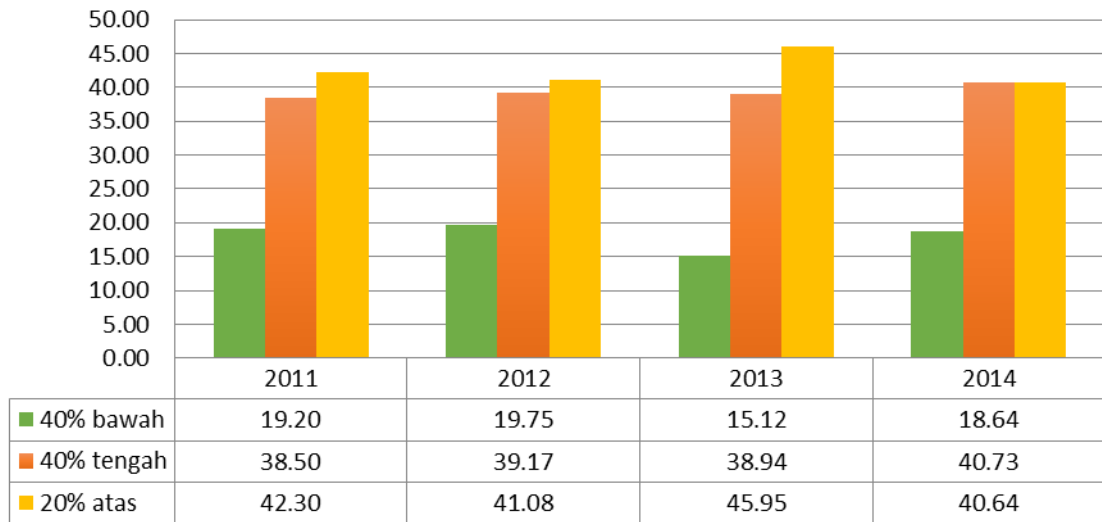
Selain gini rasio, indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengetahui dimensi lain dari kesenjangan adalah indikator distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang diharapkan adalah agar distribusi pendapatan yang dinikmati kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima > 17% dari total pendapatan. Kriteria distribusi pendapatan ini disusun oleh Bank Dunia sebagai berikut:

- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima < 12% total pendapatan: pemerataan rendah/ketimpangan distribusi pendapatan tinggi
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12% - 17% total pendapatan: pemerataan sedang/ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- 40% penduduk berpendapatan terendah menerima > 17% total pendapatan: pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada Tahun 2011 - 2014 ditunjukkan pada grafik 2.8 berikut:

Grafik 2.8

Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2011-2014 (Persen)



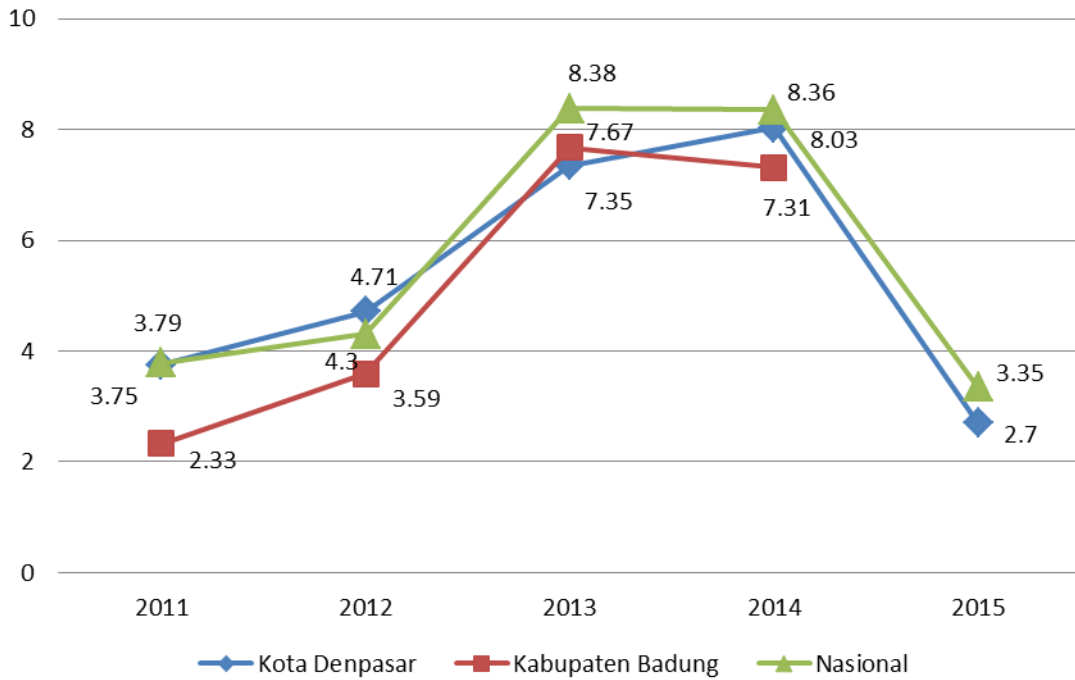
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada Tahun 2014 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 18,64 persen dari total pendapatan sehingga pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun Laju Inflasi Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini :

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2014, tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada di bawah inflasi Kota Denpasar dan Nasional. Namun pada Tahun 2013 tingkat inflasi Kabupaten Badung berada di atas inflasi Kota Denpasar yang juga merupakan kondisi puncak inflasi Kabupaten Badung yang mencapai 7,67 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam empat tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2013 dimana mencapai 7,67 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang telah mendorong peningkatan harga-harga komoditas dan biaya transportasi. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 2,33%.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2015 sebesar 2,70%, lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 3,35%.

Tabel 2.12
 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015
 Kabupaten Badung

| Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-rata Inflasi |
|---------|------|------|------|------|------|-------------------|
| Inflasi | 2,33 | 3,59 | 7,67 | 7,31 | 2,70 | 4,72 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2015

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2011 mencapai 2,33%, dan juga lebih rendah bila dibanding dengan inflasi nasional sebesar 3,79%. Sedangkan untuk Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 8,36%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada Desember 2014 sehingga memicu kenaikan harga-harga barang secara umum. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang, dapat dilihat pada tabel 2.12.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah siswa Kabupaten Badung pada Tahun 2011-2014 untuk jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA/SMK selama 3 tahun. Dengan demikian mulai jenjang SD sampai SMA/SMK angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. Secara rinci rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2014
 Kabupaten Badung

| NO | Jenjang Sekolah | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|-----------------|------|------|------|------|
| 1 | SD | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | SMP | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | SMA/SMK | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Jumlah | 12 | 12 | 12 | 12 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga mempunyai kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan daya saing masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Badung dalam kurun waktu Tahun 2011 - 2014 dapat dilihat dari keberadaan sekaa-sekaa kesenian/ grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan sarana olahraga. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan seni budaya dan olahraga mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya tersebut.

Perkembangan seni, budaya dan olahraga yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel 2.14 dan tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

| No | Capaian Pembangunan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|---|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. | 150 | 152 | 152 | 155 |
| 2 | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 4 | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. | 6 | 6 | 6 | 6 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung dan Disbud Kabupaten Badung

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

| No | Kecamatan | Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk | Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk | Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk | Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk |
|----|------------------------|--|--|--|--|
| 1 | Kecamatan Petang | 50 | - | 2 | - |
| 2 | Kecamatan Abiansemal | 200 | - | 24 | 2 |
| 3 | Kecamatan Mengwi | 200 | - | 24 | 2 |
| 4 | Kecamatan Kuta Utara | 150 | - | 25 | 2 |
| 5 | Kecamatan Kuta | 150 | 1 | 8 | 1 |
| 6 | Kecamatan Kuta Selatan | 150 | 1 | 6 | - |
| | Jumlah | 900 | 2 | 89 | 7 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

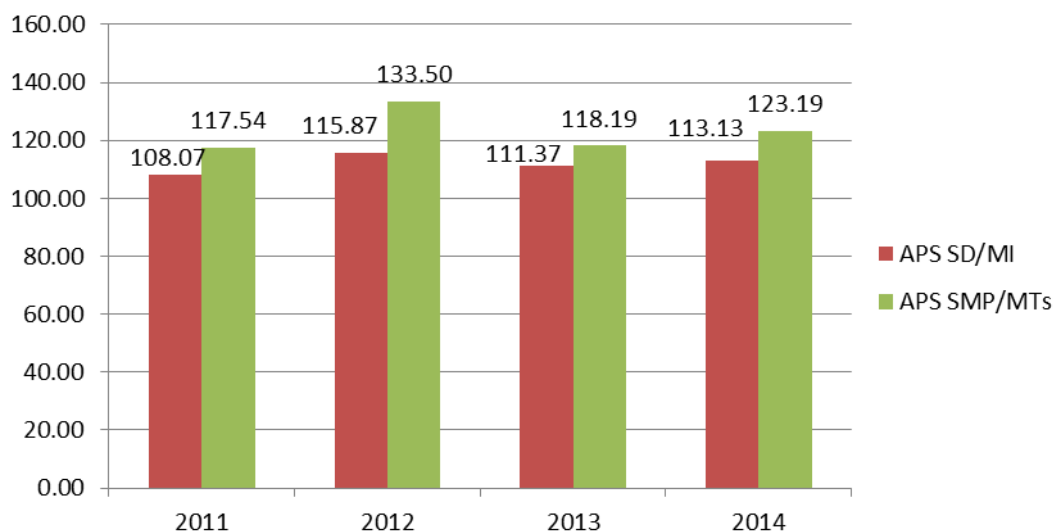
Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

| No | Jenjang Pendidikan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD/MI | | | | |
| 1.1. | jumlah murid usia 7-12 thn | 59.502 | 60.265 | 60.884 | 61.266 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 55.059 | 52.009 | 54.669 | 54.156 |
| 1.3. | APS SD/MI | 108,07 | 115,87 | 111,37 | 113,13 |
| 2 | SMP/MTs | | | | |
| 2.1. | jumlah murid usia 13-15 thn | 23.930 | 24.909 | 25.506 | 26.791 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 20.359 | 18.659 | 21.581 | 21.748 |
| 2.3. | APS SMP/MTs | 117,54 | 133,50 | 118,19 | 123,19 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Badung
Tahun 2014



Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung, Tahun 2011-2014

Angka partisipasi sekolah memberikan informasi tentang daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Kondisi angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami sedikit dinamika namun tetap berada diatas target yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan capaian angka partisipasi sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unsur pembentuk capaian tingkat kabupaten, telah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan. Adapun angka partisipasi sekolah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|----|------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
| | | jumlah murid usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS |
| 1 | Kecamatan Petang | 2.786 | 2.714 | 102,65 | 1.434 | 1.318 | 108,80 |
| 2 | Kecamatan Abiansemal | 9.328 | 8.218 | 113,51 | 4.440 | 3.701 | 119,97 |
| 3 | Kecamatan Mengwi | 12.649 | 10.896 | 116,09 | 5.712 | 4.997 | 114,31 |
| 4 | Kecamatan Kuta Utara | 12.328 | 11.053 | 111,54 | 5.278 | 3.436 | 153,61 |
| 5 | Kecamatan Kuta | 9.720 | 8.583 | 113,25 | 3.882 | 3.273 | 118,61 |
| 6 | Kecamatan Kuta Selatan | 14.455 | 12.692 | 113,89 | 6.045 | 5.023 | 120,35 |
| | Jumlah | 61.266 | 54.156 | 113,13 | 26.791 | 21.748 | 123,19 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.18
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

| No | Jenjang Pendidikan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|---|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD/MI | | | | |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah | 269 | 271 | 272 | 274 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 55.059 | 52.009 | 54.669 | 54.156 |
| 1.3. | Rasio | 49 | 52 | 50 | 51 |
| 2 | SMP/MTs | | | | |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah | 47 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 20.359 | 18.659 | 21.581 | 21.748 |
| 2.3. | Rasio | 23 | 27 | 23 | 23 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|-----|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| | | Jumlah gedung sekolah | Jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kecamatan Petang | 27 | 2.714 | 99 | 4 | 1.318 | 30 |
| 2 | Kecamatan Abiansemal | 64 | 8.218 | 78 | 6 | 3.701 | 16 |
| 3 | Kecamatan Mengwi | 72 | 10.896 | 66 | 12 | 4.997 | 24 |
| 4 | Kecamatan Kuta Utara | 34 | 11.053 | 31 | 10 | 3.436 | 29 |
| 5 | Kecamatan Kuta | 27 | 8.583 | 31 | 6 | 3.273 | 18 |
| 6 | Kecamatan Kuta Selatan | 50 | 12.692 | 39 | 12 | 5.023 | 24 |
| | Jumlah | 274 | 54.156 | 51 | 50 | 21.748 | 23 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Rasio ketersediaan sekolah sebagaimana dalam Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 diatas mencerminkan ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar per 10.000 orang penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia tertentu.

Di kabupaten Badung rasio ketersediaan sekolah pada masing-masing kecamatan sangat berfluktuasi, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada wilayah kecamatan tertentu dengan kisaran untuk tingkat sekolah dasar yaitu terendah kecamatan Kuta dan tertinggi Kecamatan Petang serta untuk jenjang SMP, terendah Kecamatan Abiansemal dan tertinggi Kecamatan Petang.

b. Rasio guru/murid

Tabel 2.20
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s.d .2014
Kabupaten Badung

| No | Jenjang Pendidikan | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | SD/MI | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 3.505 | 3.523 | 3.530 | 3.623 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 60.586 | 61.290 | 61.400 | 61.284 |
| 1.3. | Rasio | 58 | 57 | 57 | 59 |
| 2 | SMP/MTs | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 1.663 | 1.748 | 1.765 | 1.831 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 24.955 | 25.828 | 27.002 | 27.868 |
| 2.3. | Rasio | 67 | 68 | 65 | 66 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini memberikan informasi ketersediaan tenaga pengajar dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan antar waktu rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup statis yaitu antara kisaran 57 sampai dengan 59 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan jumlah guru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa, namun belum signifikan.

Demikian juga halnya dengan perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang berkisar pada angka 67 per 1000 jumlah murid pada tahun 2011 menjadi 66 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan jumlah guru pada jenjang sekolah menengah pertama bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa. Situasi seperti ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang program kegiatan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan ketersediaan guru agar mampu mencapai mutu pengajaran yang optimal.

Selanjutnya, apabila dilihat data per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Tabel 17, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pada tahun 2014 pada jenjang sekolah dasar paling tinggi berada pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru terhadap murid tertinggi pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta Selatan. Keadaat tersebut dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2014
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

| No | Kecamatan | SD/MI | | | SMP/MTs | | |
|-----|------------------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|
| | | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3/4) | (6) | (7) | (8=6/7) |
| 1 | Kecamatan Petang | 260 | 2.739 | 95 | 113 | 1.457 | 78 |
| 2 | Kecamatan Abiansemal | 783 | 9.164 | 85 | 313 | 4.620 | 68 |
| 3 | Kecamatan Mengwi | 811 | 12.341 | 66 | 484 | 6.410 | 76 |
| 4 | Kecamatan Kuta Utara | 624 | 12.788 | 49 | 301 | 4.742 | 63 |
| 5 | Kecamatan Kuta | 462 | 9.807 | 47 | 253 | 4.112 | 62 |
| 6 | Kecamatan Kuta Selatan | 683 | 14.445 | 47 | 367 | 6.527 | 56 |
| | Jumlah | 3.623 | 61.284 | 59 | 1.831 | 27.868 | 66 |

Sumber Data : Disdikpora Kabupaten Badung

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.22
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| Tahun | Uraian | PMDN | PMA | Total |
|-------|-----------------|-------|-----|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) |
| 2011 | Jumlah Investor | 597 | 92 | 689 |
| 2012 | Jumlah Investor | 607 | 170 | 777 |
| 2013 | Jumlah Investor | 528 | 257 | 785 |
| 2014 | Jumlah Investor | 1.264 | 195 | 1.459 |

Sumber Data : Bagian Adm Perekonomian Setda Kabupaten Badung

Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Badung tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari data Tabel 2.22, terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 secara keseluruhan jumlah investor selalu mengalami peningkatan, namun jumlah investor (PMDN) atau investor (PMA) berfluktuasi.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.23
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
|-------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi | Jumlah Proyek | Nilai Investasi |
| 2011 | 611 | 8.536.644.647.061 | 689 | 3.173.814.437.239 |
| 2012 | 762 | 8.808.590.543.488 | 777 | 7.180.810.126.088 |
| 2013 | 667 | 6.297.274.880.989 | 785 | 6.147.499.450.989 |
| 2014 | 1.356 | 3.086.430.085.315 | 1.459 | 2.618.136.988.815 |

Sumber Data : Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Badung

Dari data tabel 1.19 di atas terlihat bahwa jumlah nilai investasi dari tahun 2011 sampai 2014 berfluktuasi. Jumlah investasi terbesar terjadi pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol di Nusa Dua dan meningkatnya investasi di bidang akomodasi pariwisata.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|--|-------|-------|--------|------|
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 2.985 | 6.785 | 17.012 | 9476 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 689 | 777 | 785 | 1459 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 4,33 | 8,73 | 21,67 | 6,49 |

Sumber Data : Disosnaker Kabupaten Badung

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (PMA/PMDN). Dari data Tabel 20 di atas terlihat ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2011 – 2014 berfluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,67. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai dan meningkatnya pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung, sehingga dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|----------------------------------|-------|------|--------|--------|
| 1. | Indeks Yang Diterima Petani (It) | 99,8 | 100 | 110,29 | 157,53 |
| 2. | Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) | 90,52 | 100 | 112,24 | 124,46 |
| 3. | Rasio | 1,103 | 1 | 0,98 | 1,265 |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung

Dari tabel 2.25 terlihat bahwa Nilai tukar petani (NTP) setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan indikator Indeks yang diterima petani 99,8 pada tahun 2011 menjadi 157,53. Sedangkan Indeks yang dibayar petani hanya meningkat pada tahun 2013 yang artinya pengeluaran petani lebih tinggi 1,95 point dibandingkan pendapatannya. Pada tahun 2012 Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar sama, sedangkan tahun 2011 dan 2014 Indeks yang diterima petani lebih besar dari Indeks yang dibayar.

b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.26
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2011 s.d 2014

| NO | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 1. | Total pengeluaran RT non pangan | 617.273 | 728.813 | 827.250 | - |
| 2. | Total pengeluaran | 1.016.725 | 1.211.685 | 1.331.826 | - |
| 3. | Rasio | 60,71 | 60,11 | 62,11 | - |

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung

Pada tabel 2.26. Tabel Pengeluaran RT non pangan terus mengalami peningkatan dari Total Pengeluaran, dengan ratio di kisaran 60,11 s/d 62,11, yang artinya pengeluaran RT untuk kebutuhan pangan pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi non pangan. Indikasi ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.27
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2014

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|--|------|------|------|--------|
| 1. | Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Lindung) | - | - | - | 28,98 |
| 2. | Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Budidaya) | - | - | - | 366,63 |
| 3. | Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Lindung) | - | - | - | 28,82 |
| 4. | Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Budidaya) | - | - | - | 389,69 |
| 5. | Rasio kawasan lindung (1./3.) | - | - | - | 100,5 |
| 6. | Rasio kawasan budidaya (2./4.) | - | - | - | 94,08 |

Sumber Data : Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Rasio ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 untuk pola pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Badung. Sedangkan ketaatan pada pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebesar 94,08% terhadap RTRW Kabupaten Badung.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|-------------------------------|------|------|------|--------|
| 1. | Luas wilayah produktif | - | - | - | 256,70 |
| 2. | Luas Seluruh wilayah budidaya | - | - | - | 389,69 |
| 3. | Rasio (1/2.) | - | - | - | 65,87 |

Sumber Data : Bappeda Litbang Kabupaten Badung

Untuk luas wilayah produktif di Kabupaten Badung sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sebagai kawasan budidaya pertanian dalam arti luas dengan rasio sebesar 65,87% dari total luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka kriminalitas

Tabel 2.29
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | Jenis Kriminal | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah kasus narkoba | 15 | 19 | 25 | 17 |
| 2. | Jumlah kasus pembunuhan | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3. | Jumlah kejahatan seksual | 11 | 8 | 5 | 5 |
| 4. | Jumlah kasus penganiayaan | 80 | 71 | 116 | 97 |
| 5. | Jumlah kasus pencurian | 408 | 310 | 466 | 319 |
| 6. | Jumlah kasus penipuan | 58 | 51 | 79 | 21 |
| 7. | Jumlah kasus pemalsuan uang | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun | 574 | 461 | 696 | 460 |
| 9. | Jumlah penduduk | 506.043 | 524.659 | 533.203 | 460.618 |
| 10. | Angka kriminalitas (8)/(9) | 0,11% | 0,09% | 0,13% | 0,10% |

Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Badung dan Kesbangpolinmas Kabupaten Badung

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Badung yang aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 terjadi 574 kasus, kemudian menurun menjadi 461 kasus pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 696 kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 menurun menjadi 460 kasus. Jenis kriminalitas yang mencolok adalah pencurian dan penipuan.

Tindak kejahatan lainnya yang juga cenderung meningkat adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat dibanding tahun 2011. Namun pada tahun 2014 terdapat kasus narkoba sebanyak 17 kasus menurun sebesar 68 % dibanding tahun 2013 sebanyak 25 kasus.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demonstrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|-----------------------|------|------|------|------|
| 1 | Bidang politik | - | - | - | 1 |
| 2 | Ekonomi | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Kasus pemogokan kerja | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Jumlah unjuk rasa | - | 1 | 2 | 5 |

Sumber Data : Satpol PP Kabupaten Badung dan Kesbangpolinmas Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat pengamanan lainnya melaksanakan tugas pengamanan demo yang dilakukan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang terjadi di areal Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Adapun demo yang diamankan selama kurun waktu dari Tahun 2011 - 2014 terkait dengan bidang politik, ekonomi dan kasus pemogokan kerja sebagai berikut : Tahun 2011 tidak ada Demo oleh masyarakat, Tahun 2012 ada satu kasus pemogokan kerja yang dilakukan oleh Karyawan Hotel Kartika di Kuta, Tahun 2013 terjadi dua kali demo yang dilakukan oleh pegawai taxi di Jimbaran Kuta Selatan dan Demo pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Sedangkan pada Tahun 2014 terjadi demo sebanyak lima kali yang dilakukan oleh penambang galian C, sopir taxi di Jimbaran, Demo oleh mahasiswa Universitas Mahendradata Denpasar, Demo oleh Forum Kaling dan demo oleh masyarakat Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi.

2.5. Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditunjukkan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--|---|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1. | Pertumbuhan PDRB | 7,07 | 7,64 | 6,82 | 6,97 | 6,27 | - | |
| 1.2. | Laju inflasi provinsi | 3,75 | 4,71 | 7,35 | 8,03 | 2,70 | - | |
| 1.3. | PDRB per kapita | 39,80 | 41,79 | 43,58 | 45,56 | 47,34 | - | |
| 1.4. | Indeks Gini | 0,3385 | 0,3258 | 0,3468 | 0,3404 | | - | |
| 1.5. | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia | 19,20 | 19,75 | 15,12 | 18,64 | | - | |
| 1.6. | Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan | 2,62 | 2,16 | 2,46 | 2,54 | 2,49 | 2,00 – 3,00 | Sesuai |
| Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1. | Angka partisipasi kasar | 115,01 | 129,23 | 117,73 | 120,37 | | 100 | Melampaui |
| 1.2. | Angka pendidikan yang ditamatkan | 99,95 | 99,96 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | Belum Tercapai |
| 1.3. | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | |
| 1.3.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 96,87 | 103,67 | 98,62 | 99,12 | 99,30 | 90 - 100 | Melampaui |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.3.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | 91,28 | 101,62 | 91,59 | 92,10 | 93,27 | 90 - 100 | Melampaui |
| 1.3.3. | Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C | 78,04 | 91,09 | 83,69 | 83,72 | 90,02 | 90 - 100 | Belum Tercapai |
| 2. | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1. | Angka kelangsungan hidup bayi | 95,10 | 99,70 | 99,74 | 99,57 | 99,81 | - | |
| 2.2. | Angka usia harapan hidup | 73,91 | 74,05 | 74,19 | 74,30 | 74,61 | - | |
| 2.3. | Prevalensi balita gizi buruk | 0,21 | 0,11 | 0,42 | 0,25 | 0,21 | 3,60 | Belum Tercapai |
| 3. | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 3.1. | Rasio penduduk yang bekerja | 54,53 | 54,49 | 56,18 | 53,58 | 57,11 | - | |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | |
| 1.1. | Pendidikan dasar: | | | | | | | |
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah | 108,07 | 115,87 | 111,37 | 113,13 | 113,13 | 100 | Melampaui |
| 1.1.2. | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah | 49 | 52 | 50 | 51 | 56 | - | |
| 1.1.3. | Rasio guru/murid | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 40 | Belum Tercapai |
| 1.1.4. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 40 | Belum Tercapai |
| 1.2. | Pendidikan menengah: | | | | | | | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------|--|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi sekolah | 117,54 | 133,5 | 118,19 | 123,19 | 124,01 | 100 | Melampaui |
| 1.2.2. | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | 23 | 27 | 23 | 23 | 24 | - | |
| 1.2.3. | Rasio guru terhadap murid | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | Belum Tercapai |
| 1.2.4. | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | 39 | 38 | 37 | 35 | 36 | 21 | Melampaui |
| 1.3. | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | | |
| 1.3.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 269 | 271 | 272 | 274 | 274 | 275 | Belum tercapai |
| 1.3.2. | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 85 | 87 | 87 | 91 | 90 | 91 | Belum Tercapai |
| 1.4. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): | | | | | | | |
| 1.4.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | |
| 1.5. | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | |
| 1.5.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Sesuai |
| 1.5.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Belum Tercapai |
| 1.5.3. | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | Belum Tercapai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------|--|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.6. | Angka Kelulusan: | | | | | | | |
| 1.6.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 99,97 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 100 | Belum tercapai |
| 1.6.3. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | 100 | 100 | 99,98 | 100 | 99,99 | 100 | Sesuai |
| 1.6.4. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 100 | 94,60 | 97,91 | 96,93 | 96,96 | 100 | Belum tercapai |
| 1.6.5. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 89,27 | 94,89 | 98,44 | 100 | 99,21 | 100 | Belum tercapai |
| 1.6.6. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 61,04 | 62,56 | 80,32 | 81,61 | 82,11 | 100 | Belum tercapai |
| 2. | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1. | Rasio posyandu per satuan balita | 80,8 | 53,2 | 59,0 | 60,0 | 71,0 | 1:100 | |
| 2.2. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,9 | 15,9 | - | |
| 2.3. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0,070 | 0,069 | 0,100 | 0,116 | 0,116 | - | |
| 2.4. | Rasio dokter per satuan penduduk | 36,5 | 26,2 | 55,3 | 110,0 | 110,0 | 1 : 40 | Sesuai |
| 2.5. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 78,2 | 73,5 | 73,3 | 61,72 | 61,74 | 1 : 100 | Sesuai |
| 2.6. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 60,3 | 54,9 | 80,6 | 72,99 | 72,99 | 80 | Belum tercapai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 2.7. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 99,09 | 92,0 | 95,7 | 99,72 | 99,73 | 90 | Melampaui |
| 2.8. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai |
| 2.9. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai |
| 2.10. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive | 8,49 | 43 | 45,2 | 51,8 | 51,8 | 85 | Belum Tercapai |
| 2.11. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai |
| 2.12. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sesuai |
| 2.13. | Cakupan kunjungan bayi | 105,87 | 104,3 | 96,77 | 93,86 | 93,86 | 90 | Melampaui |
| 2.14. | Jumlah puskesmas | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | |
| 2.15. | Jumlah pembantu puskesmas | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | |
| 3. | Pekerjaan Umum | | | | | | | |
| 3.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 62,78 5% | 84,21 8% | 89,06 9% | 91,39 2% | 91,392 % | - | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 3.2. | Rasio Jaringan Irigasi | 0,057 | 0,0571 | 0,0567 | 0,0567 | 0,0567 | - | |
| 3.3. | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | Belum Tercapai |
| 3.4. | Panjang jalan dilalui Roda 4 | 565.981 | 628.744 | 628.744 | 628.744 | 628.744 | - | |
| 3.5. | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 355.353 | 529.517 | 560.018 | 574.626 | 574.626 | - | |
| 3.6. | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | - | - | - | 569.554 | 569.554 | - | |
| 3.7. | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | - | - | - | 569.554 | 569.554 | - | |
| 3.8. | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 10.272,39 | 10.345,77 | 10.685,17 | 10.829,64 | 10.829,64 | - | |
| 4. | Perumahan | | | | | | | |
| 4.1. | Rumah tangga pengguna air bersih | 64.025,50 | 63.025,50 | 83.002,67 | 86.667,00 | 97.066,83 | - | |
| 4.2. | Rumahtangga pengguna listrik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 % | |
| 4.3. | Rumahtangga ber-Sanitasi | 86.519 | 868,580 | 89.035 | 105.154 | 105.154 | - | |
| 4.4. | Rumah layak hun | 85.636 | 85.636 | 85.636 | 85.636 | 85.636 | - | |
| 5. | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 5.6. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | sesuai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 5.7. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | sesuai |
| 5.8. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | Sesuai |
| 5.9. | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai |
| 6. | Perhubungan | | | | | | | |
| 6.6. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 372.750 | 1.162.527 | 1.087.571 | 1.279.597 | 1.279.597 | 1.279.597 | Sesuai |
| 6.7. | Rasio ijin trayek | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,0000050 | Sesuai |
| 6.8. | Jumlah uji kir angkutan umum | 7.138 | 10.500 | 12.285 | 13.689 | 13.689 | 13.689 | Sesuai |
| 6.9. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Sesuai |
| 6.10. | Angkutan darat | | | | | | | |
| 6.11. | Kepemilikan KIR angkutan umum | 7.150 | 7.464 | 8.909 | 10.316 | 10.316 | 10.316 | Sesuai |
| 6.12. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 46 menit | 46 menit | 46 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | Sesuai |
| 6.13. | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | Sesuai |
| 6.14. | Pemasangan Rambu-rambu | 4861 | 4969 | 5088 | 5508 | 5508 | 7845 | Belum Tercapai |
| 7. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 7.6. | Persentase penanganan sampah | 72,9 | 89,3 | 97,3 | 97,9 | 97,9 | 100 | Belum Tercapai |
| 7.7. | Pencemaran status mutu air | 85% | 99% | 108% | 112% | 112% | 100% | Melampaui |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 7.8. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai |
| 7.9. | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0,000 50 | 0,000 50 | 0,000 50 | 0,000 50 | 0,0005 0 | 5 | Belum Tercapai |
| 7.10. | Penegakan hukum lingkungan | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Sesuai |
| 8. | Pertanahan | | | | | | | |
| 8.6. | Persentase luas lahan bersertifikat | - | 67,60 | 73,75 | 80,16 | 80,16 | 100% | Belum Tercapai |
| 8.7. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 18 | 22 | 24 | 28 | 28 | 14 | Melampaui |
| 8.8. | Penyelesaian izin lokasi | 31,58 % | 45,83 % | - | - | - | 100% | Belum Tercapai |
| 9. | Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | | |
| 9.6. | Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1 | Belum Tercapai |
| 9.7. | Rasio bayi berakte kelahiran | 0,70 | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 1 | Belum Tercapai |
| 9.8. | Rasio pasangan berakte nikah | 0,74 | 0,77 | 0,60 | 0,104 | 0,104 | 1 | Belum Tercapai |
| 9.9. | Kepemilikan KTP | 99% | 99% | 0,98 | 99% | 99% | 100% | Belum Tercapai |
| 9.10. | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 700 | 800 | 900 | 920 | 920 | 1.000 | Belum Tercapai |
| 9.11. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 100% | Belum Tercapai |
| 10. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 10.6. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 44,69 % | 45,12 % | 44,31 % | 46,56 % | 46,56 % | 100% | Belum Tercapai |
| 10.7. | Rasio KDRT | 0,50 | 0,071 | 0,044 | 0,048 | 0,048 | 0 | Belum Tercapai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 10.8. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 6 Kasus | 13 Kasus | 12 Kasus | 6 Kasus | 6 Kasus | 0 | Belum Tercapai |
| 10.9. | Persentase Penanganan kasus KDRT yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tercapai |
| 11. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | |
| 11.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,14 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,1 | Sesuai |
| 11.2. | Rasio akseptor KB | 85,21 | 85,49 | 85,46 | 84,49 | 84,49 | 74,00 | Melampaui |
| 11.3. | Cakupan peserta KB aktif | 82,21 % (65.88 5) | 85,46 (%) (67.07 0) | 85,57 % (67.1 45) | 88,91 % (70.3 48) | 88,91 % (70.34 8) | 65 % | Melampaui |
| 11.4. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 3577 | 3906 | 3787 | 2827 | 2827 | - | |
| 12. | Sosial | | | | | | | |
| 12.1. | Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
| 12.2. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 2.375 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | - | |
| 12.3. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 297 | 372 | 682 | 782 | 782 | - | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 13. | Ketenagakerjaan | | | | | | | |
| 13.1. | Angka partisipasi angkatan kerja | 2,36 | 1,63 | 2,20 | 3,28 | 3,28 | - | |
| 13.2. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 51 | 54 | 54 | 62 | 62 | - | |
| 13.3. | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 77,8 | 72,92 | 73,04 | 73,05 | 72,92 | - | |
| 13.4. | Pencari kerja yang ditempatkan | 1.251 | 1.396 | 1.312 | 1.128 | 1.128 | - | |
| 13.5. | Tingkat pengangguran terbuka | 2,30 | 1,60 | 0,77 | 0,48 | 0,34 | - | |
| 14. | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| 14.1. | Persentase koperasi aktif | 88,87 % | 90% | 78% | 78,92 % | 78,92 % | 75% | Melampaui |
| 14.2. | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | 14.754 | 15.862 | 17.496 | 18.700 | 18.700 | - | |
| 14.3. | Jumlah BPR/LKM | 607 | 629 | 639 | 663 | 663 | - | |
| 14.4. | Usaha Mikro dan Kecil | 839 | 912 | 338 | 786 | 786 | - | |
| 15. | Penanaman Modal | | | | | | | |
| 15.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 689 | 777 | 785 | 1.459 | 1.459 | - | |
| 15.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 3.173.814.437.239 | 7.180.810.126.088 | 6.147.499.450.989 | 2.618.136.988.815 | 2.618.136.988.815 | 19.032.403.640.000 | Melampaui |
| 15.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | 4,33 | 8,73 | 21,67 | 6,49 | 6,49 | 4,86 | Melampaui |
| 15.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 1,74 | 1,36 | 0,03 | (1,47) | (1,47) | - | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 16. | Kebudayaan | | | | | | | |
| 16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | Sesuai |
| 16.2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai |
| 16.3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | - | 23 Situs | - | - | - | | |
| 17. | Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri | | | | | | | |
| 17.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 60 | 46 | 40 | 40 | 40 | - | |
| 17.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | |
| 18. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 18.1. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 6,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 7 | Belum Tercapai |
| 18.2. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 33,01 | 33,18 | 33,47 | 31,71 | 31,18 | 1 orang / 1 RT | Sudah tercapai |
| 18.3. | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | - | |
| 18.4. | Pertumbuhan ekonomi | 7,07 | 7,64 | 6,82 | 6,97 | 6,27 | - | |
| 18.5. | Kemiskinan | 3.726 RTS-PM | 11.54 2RTS-PM | 10.87 9 RTS-PM | 9.783 RTS-PM | 9.783 RTS-PM | 0 | Belum Tercapai |
| 18.6. | Penegakan PERDA | 105,23 | 113,43 | 104,88 | 106,88 | 106,88 | 100 | Melampaui |
| 18.7. | Cakupan patroli petugas Satpol PP | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali sehari dalam sehari | Sesuai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 18.8. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 100% | Belum tercapai |
| 18.9. | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 1922 orang | 1922 orang | 1922 orang | 1922 orang | 1922 orang | - | |
| 18.10 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 84.20 % | 84.20 % | 295.4 % | 295.4 % | 295.4 % | 25% | Melampaui |
| 18.11 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 84.20 % | 84.20 % | 295.4 % | 295.4 % | 295.4 % | 25% | Melampaui |
| 18.12 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 80.40 % | 88.14 % | 88.32 % | 96.33 % | 96.33 % | 75% | Melampaui |
| 18.13 | Sistim Informasi Manajemen Pemda | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | Sesuai |
| 18.14 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | - | - | - | 74,90 | 79,43 | (62,51–81,25) untuk interval Baik | Memenuhi nilai interval baik |
| 19. | Ketahanan Pangan | | | | | | | |
| 19.1. | Regulasi ketahanan pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 19.2. | Ketersediaan pangan utama | 86,98 % | 85,89 % | 80,47 % | 89,51 % | 89,51 % | - | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 20. | Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | |
| 20.1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 62 Kelompok | Belum Tercapai |
| 20.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 3 kelompok-pok | 3 kelompok-pok | 3 kelompok-pok | 3 kelompok-pok | 3 kelompok-pok | 606 Kelompok-pok | Belum Tercapai |
| 20.3. | Jumlah LSM (yang memiliki SKT) | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | | |
| 20.4. | LPM Berprestasi | 1 kelompok-pok | 1 Kelompok-pok | 1 kelompok-pok | 1 kelompok-pok | 1 Kelompok-pok | 5 kelompok-pok | Belum Tercapai |
| 20.5. | PKK aktif | 606 kelompok-pok | 606 kelompok-pok | 606 kelompok-pok | 606 kelompok-pok | 606 kelompok-pok | 606 kelompok-pok | Sesuai |
| 20.6. | Posyandu aktif | 572 Kelompok-pok | 572 Kelompok-pok | 573 Kelompok-pok | 573 Kelompok-pok | 573 Kelompok-pok | 573 Kelompok-pok | Sesuai |
| 20.7. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 93,5% | 79,4% | 89,3% | 93,9% | 93,9% | 70% | Melampaui |
| 20.8. | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | 62 Kelompok-pok | 62 Kelompok-pok | 62 Kelompok-pok | 62 Kelompok-pok | 62 Kelompok-pok | 62 Kelompok-pok | Sesuai |
| 21. | Statistik | | | | | | | |
| 21.1. | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sesuai |
| 21.2. | Buku "PDRB kabupaten" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Sesuai |
| 22. | Kearsipan | | | | | | | |
| 22.1. | Pengelolaan arsip secara baku | 30 SKPD | 30 SKPD | 15 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 135 SKPD | Belum tercapai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 22.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 40 Orang | 40 Orang | 104 Orang | 132 Orang | 132 Orang | 233 Orang | Terlampau |
| 23. | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 23.1. | Jumlah jaringan komunikasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sesuai |
| 23.2. | Rasio wartel/warnet terhadap penduduk | 227 | 227 | 211 | 211 | 211 | 211 | Belum tercapai |
| 23.3. | Jumlah surat kabar nasional/lokal | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Sesuai |
| 23.4. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sesuai |
| 23.5. | Web site milik pemerintah daerah | | | | 62 | 62 | 62 | Sesuai |
| 23.6. | Pameran/expo | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | Sesuai |
| 24. | Perpustakaan | | | | | | | |
| 24.1. | Jumlah perpustakaan | 336 Perpus takaan | 336 Perpus takaan | 336 Perpus takaan | 440 Perpus takaan | 440 Perpus takaan | Setiap sekolah, desa/Kel urahan memiliki perpusta kaan yang standar nasional perpusta kaan | Sebagian besar belum memenuhi standar perpustakaa n |
| 24.2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 817 Orang | 1.024 Orang | 4.621 Orang | 3.507 Orang | 3.507 Orang | 0,55 perjum- lah pendu- duk | Belum tercapai |
| 24.3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 1.671 Exp | 3.461 Exp | 9.105 Exp | 6.359 Exp | 6.359 Exp | 10 persen dari jumlah koleksi 5 tahun terakhir | Masih perlu penambahan 10 % pertahun |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | |
| 1. Pertanian | | | | | | | | |
| 1.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 62,88 | 63,20 | 64,61 | 62,91 | 62,91 | - | |
| 1.2. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 12,91 M | 13,43 M | 14,21 M | - | - | - | |
| 1.3. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 666,32 M | 693,76 M | 744,55 M | - | - | - | |
| 1.4. | Cakupan bina kelompok petani | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | - | |
| 1.5. | Jumlah Populasi ternak | 1.661.692 | 1.357.001 | 1.366.005 | 1.476.035 | 1.476.035 | - | |
| 2. Kehutanan | | | | | | | | |
| 2.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 137,54 ha | 175,68 ha | 37,62 ha | 82,13 ha | 82,13 ha | - | |
| 2.2. | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | 40 Jt | 40 Jt | 40 Jt | - | - | - | |
| 3. Pariwisata | | | | | | | | |
| 3.1. | Kunjungan wisata | 2.756.579 | 2.892.019 | 3.148.443 | 3.681.342 | 3.681.342 | Pada 2011 target 2.700.000 wisman, bertambah 150.000 wisman setiap tahunnya | Melampaui |
| 3.2. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 5.948.208,92 | 7.186.658,79 | 8.807.667,89 | 10.815.279,76 | 10.815.279,76 | - | |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 4. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| 4.1. | Produksi perikanan | 38.386,30 | 48.563,50 | 49.099 | 6.619,60 | 6.619,60 | 152.494,63 | Belum tercapai |
| 4.2. | Konsumsi ikan | 30,91 | 31,10 | 32,20 | 32,87 | 32,87 | 32,7 | Melampaui |
| 4.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | 150 | 169 | 167 | 167 | 167 | 167 | sesuai |
| 4.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | 4.467,9 | 4.570,3 | 4.748,4 | 6.094,7 | 6.094,7 | 16.523,2 | Melampaui |
| 5. | Perdagangan | | | | | | | |
| 5.1. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 9,30% | 10,30% | 9,82% | 8,68% | 8,68% | - | |
| 5.2. | Ekspor Bersih Perdagangan | 128.296.174,45 | 64.119.363,27 | 57.770.469,90 | 63.675.447,62 | 63.675.447,62 | 117.496.806,53 | Belum Tercapai |
| 6. | Perindustrian | | | | | | | |
| 6.1. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 4,58% | 4,36% | 4,21% | 4,01% | 4,01% | - | |
| 6.2. | Pertumbuhan Industri. | 54 | 41 | 50 | 22 | 22 | - | |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | |
| Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | |
| 1. | Pertanian | | | | | | | |
| 1.1. | Nilai tukar petani | 1,103 | 1 | 0,98 | 1,265 | 1,265 | - | |
| Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | | |
| 1. | Perhubungan | | | | | | | |
| 1.1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 1,77 | 2,04 | 2,70 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | Sesuai |
| 1.2. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 372.750 | 1.162.527 | 1.087.571 | 1.279.597 | 1.279.597 | 1.279.597 | sesuai |

| NO | Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1.3. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | - | 240.740 Orang | 538.011 Orang | 702.032 Orang | 702.032 Orang | 702.032 Orang | sesuai |
| 2. | Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2.1. | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | 75,80% | 73,00% | 76,80% | 76,29% | 76,29% | - | |
| | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | |
| 1.1. | Angka kriminalitas | 0,11% | 0,09% | 0,13% | 0,10% | 0,10% | - | |
| 1.2. | Jumlah demo | - | 1 | 2 | 5 | 5 | - | |

Sumber Data : SKPD Terkait

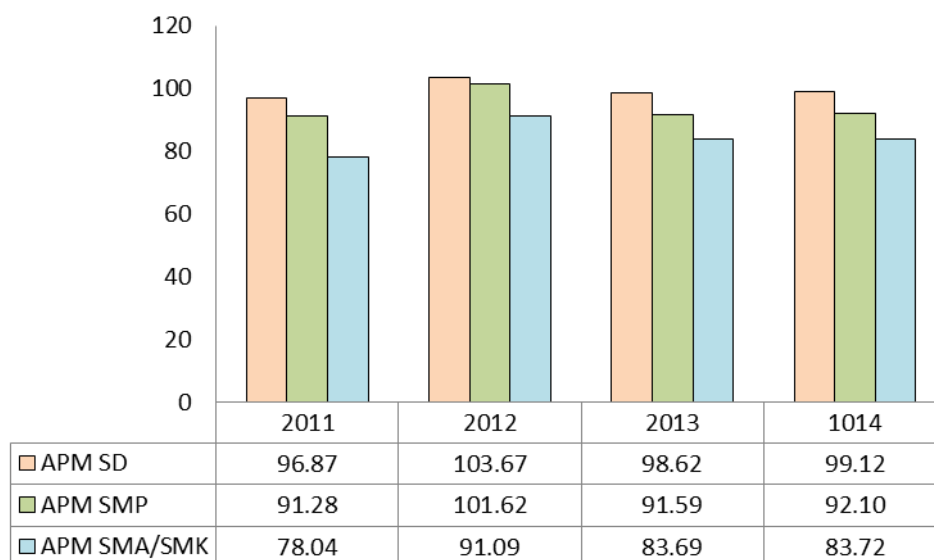
Berdasarkan Tabel 30 tentang hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.5.1 Fokus kesejahteraan rakyat

a) Pendidikan

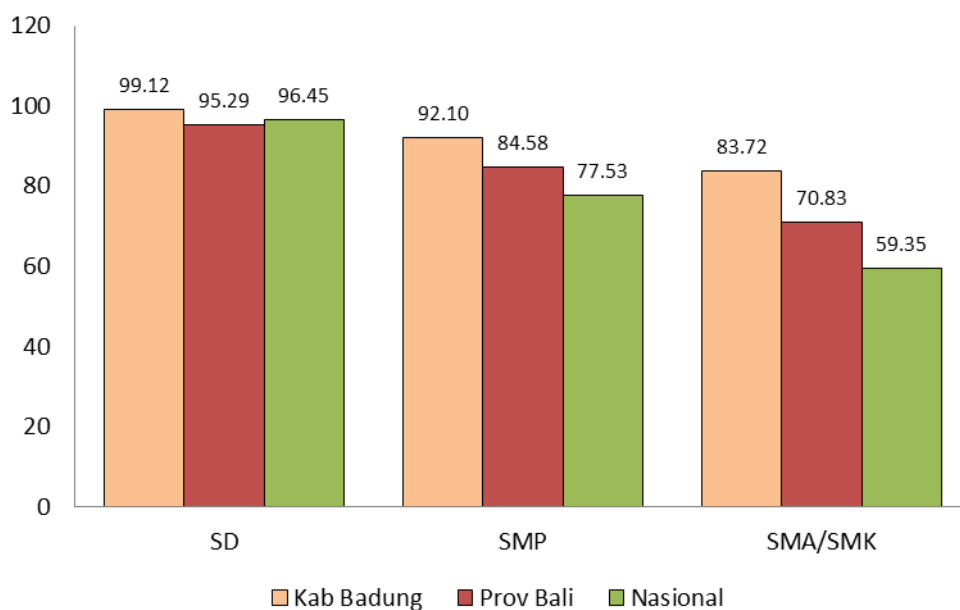
Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2014



Sumber Data: Disdikpora Kab Badung, data diolah

Grafik 2.12
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SD, SMP dan SMA/SMK



Sumber Data: Disdikpora dan BPS Kab Badung, Data Diolah

Apabila dilihat dari posisi relatif capaian indikator angka partisipasi murni Kabupaten Badung dengan Propinsi Bali dan Nasional maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Badung telah berada diatas capaian Propinsi Bali dan Nasional.

1.5.2 Fokus layanan wajib

a) Pendidikan dasar

Ditinjau dari indikator pendidikan dasar maka menunjukkan bahwa terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan terdapat beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

b) Pendidikan menengah

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

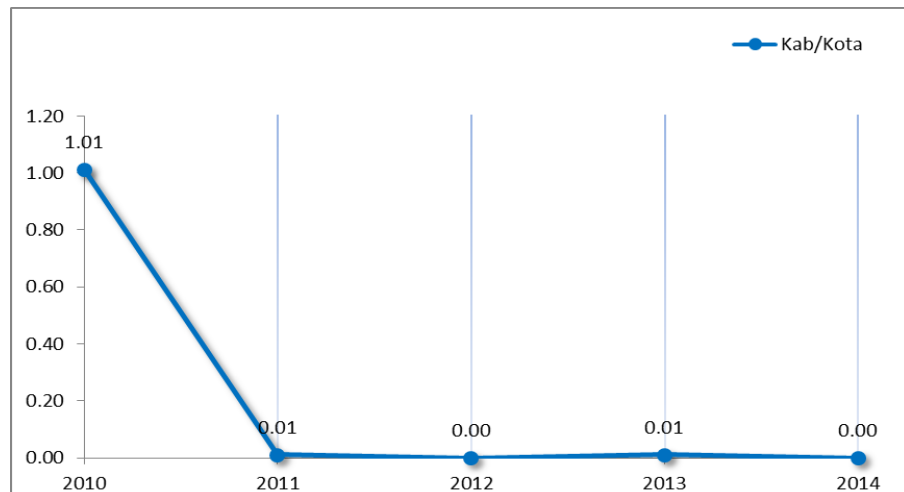
c) Fasilitas pendidikan

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan jenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan pencapaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Mengenai perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami perkembangan yang cukup signifikan, walaupun untuk jenjang sekolah menengah pertama sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, namun kembali mengalami penurunan yang

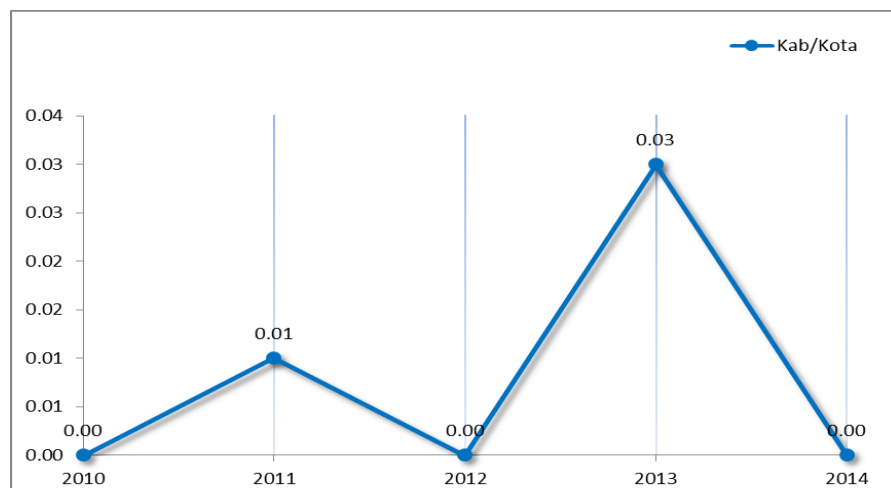
sangat drastic pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun perkembangan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2014



Sumber data : Disdikpora Kabupaten Badung

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2014



Sumber data : Disdikpora Kabupaten Badung

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangan indikator pendukung secara umum menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2014 telah terjadi kemajuan yang berarti. Hal ini antara lain terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas 6,5%. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan tahun dasar 2010 mencapai 7,07% dan kembali meningkat mencapai 7,67% pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi sedikit

pelemahan menjadi 6,82% dan pada tahun 2014 kembali menguat mencapai angka 6,97%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini tentunya diharapkan dapat menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga berimplikasi pada penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

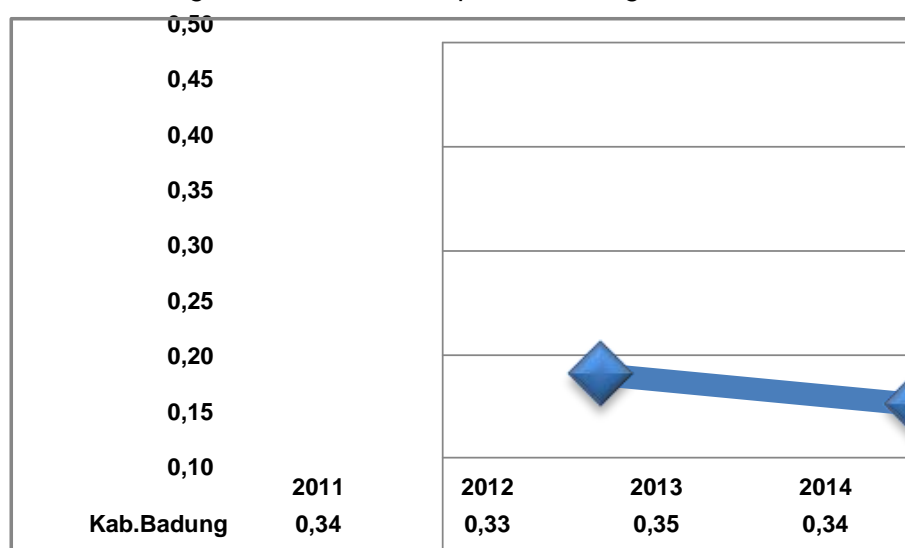
Demikian pula bila dilihat dari indikator pendapatan per kapita, dalam periode yang sama selalu mengalami peningkatan dari rata-rata sebesar Rp 38,90 juta/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi Rp 45,56 juta/kapita/tahun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan per kapita ini, membantu daya beli masyarakat seiring dengan rata-rata laju inflasi di tingkat Provinsi yang cenderung terus bergerak naik dari 3,75% pada tahun 2011 hingga mencapai 8,43% pada tahun 2014. Laju inflasi yang tinggi ini tentunya mempengaruhi tingkat harga komoditi makanan maupun non makanan, yang amat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tentunya menarik pula untuk menyandingkan perkembangan indikator ekonomi tersebut dengan indikator kemiskinan sehingga dapat diperoleh gambaran apakah laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bila dilihat dari indikator kesenjangan, data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gini rasio berkembang secara fluktuatif dari 0,3385 pada tahun 2011 lalu pada tahun 2012 turun menjadi 0,3258. Penurunan indeks gini ini tentunya bermakna positif karena menunjukkan penurunan tingkat kesenjangan. Sekalipun demikian, gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan menjadi 0,3468 dan selanjutnya pada tahun 2014 turun sedikit menjadi 0,3404.

Kondisi yang diharapkan tentunya indikator gini rasio dapat terus mengecil mendekati angka 0 karena menunjukkan menurunnya kesenjangan antar penduduk/pertumbuhan dinikmati secara merata. Dari perkembangan tersebut, kondisi kesenjangan yang rendah ditunjukkan dengan angka gini rasio yang berada pada kisaran 0 - 0,35 sehingga perkembangan angka gini rasio Kabupaten Badung selama kurun waktu tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan rendah.

Bila dilihat dari kondisi di tingkat Provinsi Bali maupun nasional, perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2014 cenderung lebih baik, karena arah perkembangannya menurun. Berbeda halnya dengan gini rasio Provinsi Bali dan nasional yang pada tahun terakhir bergerak naik, yang selama empat tahun terakhir telah berada dalam tingkat ketimpangan sedang, dengan indeks lebih besar dari 0,35. Peningkatan gini rasio tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan kesenjangan pendapatan masyarakat secara umum di tingkat Provinsi Bali dan nasional.

Grafik 2.15
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2014



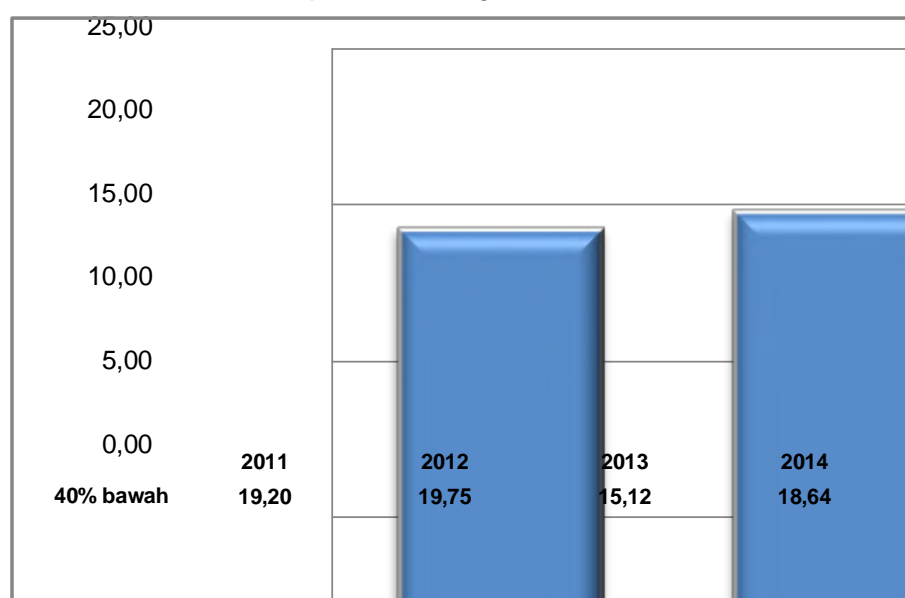
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya bila dilihat dari indikator pemerataan, sepanjang tahun 2011 hingga 2014 distribusi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari kisaran 19% lebih pada tahun 2011 dan tahun 2012, selanjutnya turun menjadi 15,12% pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 18,64% pada tahun 2014. Kondisi peningkatan indikator pemerataan pada tahun 2014 ini menggembirakan karena menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpendapatan terendah. sekaligus menunjukkan berkurangnya tingkat kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia bila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih besar dari 17% pendapatan, maka pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Kondisi Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir memang berfluktuasi, namun kisarannya masih tetap berada di atas 17%. Oleh sebab itu maka perlu

diupayakan agar porsi distribusi pendapatan yang dinikmati oleh 40% terendah ini dapat tetap di atas 17% dan terus meningkat. Grafik distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Badung tahun 2011 hingga 2014 adalah sebagai berikut.

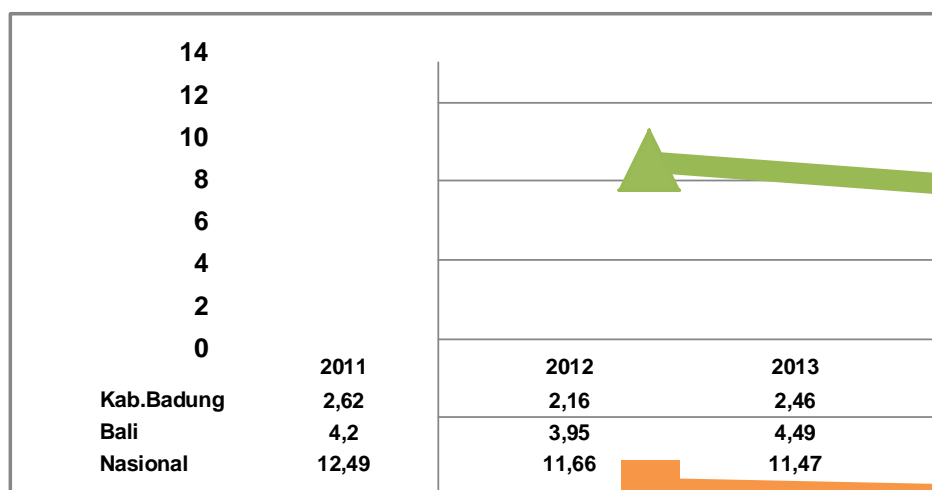
Grafik 2.16
Distribusi Pendapatan Pada Kelompok
40% Penduduk Berpendapatan Rendah
Di Kabupaten Badung Tahun 2011-2014



Di sisi lain bila dilihat dari proporsi penduduk yang tergolong miskin karena daya belinya berada di bawah garis kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Badung hingga tahun 2013 berada pada tingkat 2,46%. Oleh sebab itu dari sudut pandang persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2011 mencapai 97,38% (tingkat kemiskinan 2,62%) dan tahun 2012 naik menjadi 97,84% seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 2,16%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 2,46% sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 97,54%.

Bila tingkat kemiskinan Kabupaten Badung ini dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Bali dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung telah berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali dan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Bali dari tahun 2011 hingga tahun 2013 masih berada pada kisaran 4%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2013 masih sebesar 11,47%. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan nasional dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Badung, Bali dan Nasional
Tahun 2011-2013



Sejauh ini tidak terdapat standar persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan yang dapat menjadi acuan. Namun tentunya kondisi yang diupayakan dan diharapkan dapat terwujud adalah semakin kecilnya tingkat kemiskinan sehingga hampir mencapai 100% penduduk berada di atas garis kemiskinan.

Dari berbagai indikator pendukung Aspek Kesejahteraan Masyarakat nampak bahwa secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami peningkatan, dan untuk memperbaiki capaian aspek kesejahteraan fokus perhatian perlu dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan per kapita agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh sebab itulah indikator gini rasio perlu diarahkan agar terus menurun mendekati nol dan distribusi pendapatan terhadap 40% penduduk berpendapatan terendah perlu terus diarahkan agar menguat, mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,75% (posisi tertinggi selama kurun waktu 2011-2014).

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang

cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Untuk indikator pendidikan dasar terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan ada pula indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan sjenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Kesehatan dari indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pencapaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2014 masih berfluktuasi, dan secara keseluruhan indikator tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan.

Dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian kinerja Dinas Kesehatan dari tahun 2011 hingga 2014 secara keseluruhan telah melampaui standar. Sedangkan pada indikator cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin, pencapaian kinerja pada 4 (empat) indikator tersebut dari tahun 2011 hingga tahun 2014 telah sesuai standar (100%).

Dari indikator cakupan kunjungan bayi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2014 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan standar yang ditetapkan maka pencapaiannya telah melampaui standar.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari indikator rata-rata jumlah anak per keluarga penurunan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Bali dengan rata-rata jumlah anak sebesar 2,3, maka capaian indikator tersebut di Kabupaten Badung telah jauh lebih kecil yaitu 2,14. Bercermin dari perkembangan selama tahun 2011 hingga 2014 tersebut maka tantangan selanjutnya adalah menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2015 menjadi 2,0 sehingga dapat mendukung visi program KB Nasional untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Dari indikator ratio akseptor KB, capaian kinerja BKBKS dari tahun 2011 hingga 2014 secara keseluruhan juga telah menunjukkan terjadinya peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Badung untuk menggunakan alat kontrasepsi yang meningkat. Sebagai gambaran, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 72.123, yang telah menggunakan alat kontrasepsi mencapai 60.937 (84,49 %) dari standar yang ditentukan sebesar 74,00 % dari total PUS. Demikian pula dari indikator cakupan Peserta KB Aktif, peserta KB Aktif di Kabupaten Badung dari tahun 2011 hingga 2014 secara konsisten juga terus mengalami peningkatan, antara lain melalui pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implant, vasektomi dan tubektomi, sehingga cakupan peserta peserta KB Aktif pada tahun 2014. Namun perlu diakui bahwa dari tingginya

cakupan peserta KB Aktif tersebut, nampaknya masih didominasi perempuan, sehingga tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB. Perhatian ke depan juga perlu diperkuat untuk mendorong pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan bila dilihat dari indikator jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014 jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan, dalam artian kualitasnya keluarga yang ada telah mengalami penguatan. Namun mengingat dinamika faktor sosial ekonomi, politik dan lainnya yang amat kompleks dan tidak seluruhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, maka upaya perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sasaran juga perlu dilakukan untuk memastikan mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

Dari dimensi sosial, di Kabupaten Badung terdapat sembilan panti asuhan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama dan juga memperoleh perhatian Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai daerah yang secara sosial ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, berbagai masalah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga dialami oleh Kabupaten Badung, utama keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) serta gelandangan pengemis. Terhadap keberadaan PMKS yang jumlahnya sulit untuk diketahui secara pasti ini telah terus dilakukan penanganan, baik melalui pembinaan dan pemulangan ke daerah asalnya. Demikian pula terhadap PMKS lainnya terus dilakukan pembinaan dan bantuan sosial yang dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupannya.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Badung tentunya berimplikasi terhadap berbagai masalah sosial bahkan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 6,5% telah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menekan angka tingkat pengangguran terbuka dari kondisi awal sebesar 2,30% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,48% pada tahun 2014. Fenomena yang menarik dicermati adalah bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berturut-turut dari 76,38% pada

tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 71,41% pada tahun 2014. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kondisi TPAK Kabupaten Badung yang terus menurun selama kurun waktu 2011-2014 ini selanjutnya tentu perlu ditelusuri kembali penyebabnya, apakah karena sebagian besar pekerja lebih banyak bekerja ke luar wilayah Kabupaten Badung, atau ada penyebab lainnya.

Untuk memperluas peningkatan penempatan para pencari kerja maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bersinergi dengan perusahaan secara berkelanjutan juga melaksanakan layanan bursa kerja. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2014 sebanyak 5000 lebih pencari kerja telah berhasil ditempatkan sehingga diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran. Selanjutnya dari aspek hubungan industrial, berbagai permasalahan menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja. Data tahun 2011 hingga 2014 nampaknya menunjukkan gejala peningkatan jumlah sengketa per tahunnya, dari 51 per tahun pada tahun 2011 menjadi 62 per tahun pada tahun 2014. Berbagai perselisihan tersebut terjadinya dengan derajat yang beragam dari ringan. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan agar dapat ditekan dan derajatnya juga tetap berada pada derajat yang ringan dan tidak berimplikasi pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan

Rasio KDRT belum tercapai sesuai dengan dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Persentase Penanganan Kasus KDRT yang terselesaikan sudah mencapai standar yang telah ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan bahwa pada aspek Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) telah melampaui dari standar yang telah ditetapkan.

Untuk Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD dan PEMDES) dapat dijelaskan bahwa pada cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, PKK aktif, Posyandu aktif, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah melampaui standar yang telah ditetapkan sedangkan pada aspek kemiskinan, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM Berprestasi belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dapat dijelaskan bahwa pada aspek Pengelolaan arsip secara baku belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melampaui sebanyak 83 orang dari standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 233 orang.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dapat dijelaskan bahwa pada aspek jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menjalankan Bidang Ketahanan Pangan menggunakan satu regulasi ketahanan pangan yang telah diatur berdasarkan permentan no 65 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketahanan Pangan berupa ketersediaan bahan pangan utama

telah mampu dipenuhi oleh Pemkab Badung dengan rasio kecukupan 80,47% - 89,51%.

Produktivitas padi memiliki tren yang cukup fluktuatif, terutama di tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 dari 64,61 Kw/ha menjadi 62,91 kw/ha, hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2014 adanya tunda tanam terkait musim kering yang berkepanjangan dan adanya rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani di beberapa subak abian.

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB sebesar 12,913 Milyar tahun 2011 dan tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan tren yang semakin meningkat. Untuk cakupan bina kelompok tani setiap tahunnya telah dilaksanakan pembinaan kelompok tani sebanyak 9 kelompok tani yang di harapkan dapat meningkatkan ketrampilan teknis kelompok tani tersebut.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan luas 137, 545 Ha pada tahun 2011 seluas 175,68 ha tahun 2012 seluas 37,625 ha tahun 2013 dan tahun 2014 seluas 82,13 ha. Tren penanaman sangat fluktuatif hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan permintaan masyarakat pemilik lahan untuk melaksanakan peningkatan kualitas tanam tanaman jenis tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis.

Untuk kerusakan kawasan hutan tidak terjadi kerusakan dalam kawasan hutan. Kondisi Hutan di Kabupaten Badung relatif aman sehingga penebangan liar, perusakan hutan tidak terjadi. Kontribusi sektor kehutanan yang dilaporkan masyarakat secara ekonomi dalam PDRB mencapai rata-rata 40 juta rupiah setiap tahunnya.

Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Secara keseluruhan realisasi produksi perikanan dari tahun 2011 – 2014 sebesar 142.669,3 ton. Jika dibandingkan dengan target produksi perikanan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 152.494,63 ton maka realisasinya baru mencapai 93,56 %. Belum tercapainya target produksi perikanan disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi budidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Kuta Selatan akibat adanya pergeseran peruntukan di Desa Kutuh kecamatan Kuta Selatan yang sebelumnya merupakan sentra pengembangan rumput laut berubah menjadi pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya yang

beralih mata pencaharian dari usaha budidaya rumput laut ke bidang usaha pariwisata sehingga berdampak pada pengurangan jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang semula berjumlah 5 kelompok menjadi 1 kelompok. Ini secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi perikanan karena produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung.

Konsumsi ikan secara keseluruhan dari tahun 2011-2014 setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dari target tingkat konsumsi ikan sebesar 32,40 kg/kapita/tahun sudah terealisasi sebesar 32,87 kg/kapita/tahun atau sebesar 100,93%. Peningkatan konsumsi ikan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kandungan gizi dan manfaat dari ikan terhadap kesehatan.

Pada bidang kelautan dan perikanan terdapat beberapa kelompok binaan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan rumput laut, kelompok pengolah, kelompok pemasar dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Pembinaan terhadap kelompok dilakukan secara kontinyu setiap tahun baik itu yang dilakukan oleh bidang teknis di kabupaten maupun oleh petugas penyuluh kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Badung. Dari target jumlah kelompok yang dibina sebanyak 167 kelompok sudah dapat terlaksana 100 %.

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah lebih dominan kepada produksi perikanan tangkap di laut yang merupakan hasil produksi tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan yang ada di sepnajang wilayah pesisir kabupaten Badung yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi. Produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2011 – 2014 setiap tahun mengalami peningkatan. Dari target produksi sebesar 16.523,2 ton sudah mencapai realisasi sebesar 19.881,8 ton atau 120,33 % dari target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari hasil berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk pembinaan, bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Badung.

Urusan pilihan pada bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dimana salah satu indikator keberhasilan kepariwisataan di Kabupaten Badung ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Badung, dalam hal ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 34, berdasarkan tabel tersebut kita melihat bahwa adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Tentunya peranan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan, yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi primadona destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan Ke Kabupaten Badung tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan secara signifikan pula.

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk / keluar Daerah. Dari data tabel tersebut terlihat jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 - sebanyak 372.750 orang, tahun 2012 sebanyak 1.162.527 orang, tahun 2013 sebanyak 1.087.571 orang, tahun 2014 sebanyak 1.279.597 orang, dan jumlah kenaikan yang paling signifikan adalah pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada bulan juni 2012 terminal Mengwi sudah mulai beroperasi meskipun belum optimal.

Rasio ijin trayek adalah Jumlah ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikali 100. Sesuai dengan Pasal 2, Ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Badung dalam disebutkan :

1. Trayek Mengwi - Mambal - Jagapati
2. Trayek Mengwi - Darmasabha - Mambal - Pendarungan
3. Trayek Mengwi - Puspem - Dalung - Canggu
4. Trayek Mengwi - Balhkiuh - Sangeh
5. Trayek Munggu - Kerobokan - Sentral Parkir
6. Trayek Sentral Parkir - Pantai Kuta
7. Trayek Jimbaran - GWK - Tanjung Benoa
8. Trayek Tuban - GWK Uluwatu

Dari 8 (delapan) trayek yang ada baru terisi 3 (tiga) trayek, sedangkan lagi 5 (lima) trayek lainnya belum terisi, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha untuk menanam modalnya (investasi) di Kabupaten Badung.

Jumlah wajib uji angkutan umum adalah jumlah kendaraan yang bersifat umum, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang yang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga setiap unit kendaraan umum wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan dua kali dalam setahun.. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 s/d 2014 terdapat peningkatan kendaraan bermotor wajib uji yang bersifat umum, khususnya kendaraan umum jenis angkutan sewa dan pariwisata. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang bersifat positif. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam upaya menjamin keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri maupun pelaku lalu lintas lainnya, maka dengan demikian merupakan kewajiban bagi pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Prasarana pendukung sistem transportasi di Kabupaten Badung disamping prasarana jalan juga terdapat beberapa terminal yang digunakan untuk mengatur keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan barang. Terminal yang terdapat di Kabupaten Badung pada tahun 2011 hanya memiliki 2 Terminal tipe C yaitu : terminal Dalung yang berlokasi pada akses masuk Perumahan Dalung Permai dan sentral Parkir yang berlokasi di Kecamatan Kuta . Sedangkan mulai bulan Juni 2012 Kabupaten Badung memiliki 3 terminal yaitu 2 terminal tipe C dan 1 Terminal tipe A. Terminal Tipe A Mengwi yang berlokasi di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi. Terminal Tipe A Mengwi melayani angkutan penumpang Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan pariwisata.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2011 s/d 2013 adalah 46 menit. Sedangkan mulai tahun 2014, dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mulai dari awal penerimaan berkas sampai berkas dikembalikan kepada pemilik kendaraan sehingga diperoleh waktu pengujian yang baru yaitu selama 48 menit.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan maka analisis kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Analisis kinerja keuangan masalah dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan daerah yang terdiri pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kapasitas kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari posisi keuangan daerah yaitu dari neraca daerah. Neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui cerminan posisi aset daerah, kewajiban daerah sampai dengan ekuitas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Badung

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, APBD Kabupaten Badung terdiri atas: (a).Pendapatan Daerah; (b).Belanja Daerah; (c). Pembiayaan Daerah, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011-2014 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No. | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - Rata Pertumbuhan |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1 | PENDAPATAN | 1.851.283.062.358 | 2.609.068.617.374 | 2.954.602.744.485 | 3.444.267.368.967 | 23,6 |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah | 1.406.835.182.181 | 1.872.346.181.796 | 2.279.053.275.955 | 2.722.625.562.621 | 24,8 |
| 1.1.1. | Pajak Daerah | 1.281.695.594.849 | 1.685.559.515.318 | 2.010.554.251.067 | 2.339.332.864.903 | 22,4 |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah | 35.837.593.226 | 68.946.271.044 | 90.414.452.112 | 116.502.660.909 | 50,8 |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan | 36.092.597.140 | 41.756.733.380 | 71.350.739.922 | 125.339.002.878 | 54,1 |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah | 53.209.396.967 | 76.083.662.054 | 106.733.832.854 | 141.451.033.930 | 38,6 |
| 1.2. | Dana Perimbangan | 280.705.583.161 | 515.654.159.310 | 429.797.446.192 | 381.713.595.700 | 18,6 |
| 1.2.1. | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | 123.435.032.161 | 160.747.933.310 | 56.611.263.192 | 56.346.740.700 | -11,7 |
| 1.2.2. | Dana Alokasi Umum | 157.052.376.000 | 353.067.906.000 | 372.625.383.000 | 324.815.695.000 | 39,2 |
| 1.2.3. | Dana Alokasi Khusus | 218.175.000 | 1.838.320.000 | 560.800.000 | 551.160.000 | 223,8 |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 163.742.297.016 | 221.068.276.268 | 245.752.022.338 | 339.928.210.646 | 28,2 |
| 1.3.1 | Hibah | 89.625.000 | 0 | 0 | 54.625.825.956 | |
| 1.3.2 | Dana darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya | 61.903.646.274 | 122.552.870.720 | 102.342.371.338 | 130.253.477.690 | 36,3 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus | 84.655.996.760 | 76.432.769.000 | 113.491.184.000 | 131.532.528.000 | 18,2 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya | 2.015.040.000 | 10.583.569.648 | 960.285.000 | 205.000.000 | 85,2 |
| 1.3.6 | Sumbangan Pihak Ketiga | 7.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 | Dana Jamkesmas | 69.930.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.8 | Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah (LC) | 2.758.963.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - Rata Pertumbuhan |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 1.3.9 | Dana Kapitasi Askes PNS | 681.492.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.10 | Dana Jampersal | 61.410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Dana JKBM | 1.606.290.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.12 | Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) | 9.892.776.000 | 1.606.290.900 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.13 | Dana Insentif Daerah | 0 | 9.892.776.000 | 28.958.182.000 | 23.311.379.000 | 0 |
| 1.3.14 | Pengembalian Kelebihan JKBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Badung

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu di periode tahun 2011 sebesar Rp1.851.283.062.358 sampai dengan periode tahun 2014 sebesar Rp3.444.267.368.967 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 23,6%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011 – 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 24,8 %, Secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 54,1%, Retribusi Daerah sebesar 50,8 %, lain – lain PAD yang sah sebesar 38,6 %, serta pertumbuhan yang terendah adalah Pajak daerah sebesar 14,4%

Pendapatan Kabupaten Badung berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum Kabupaten Badung setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan Periode 2011 – 2014 terakhir sebesar 18,6 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 223,8% serta yang mengalami penurunan adalah Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dengan penurunan sebesar 11,7%, selain dari dana perimbangan dan PAD, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain – lain Pendapatan yang Sah.

Lain – lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Badung dengan rata-rata pertumbuhan 28,2 % terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya sebesar 85,2 % dan pertumbuhan terendah Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 18,2%.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan belanja. Komponen belanja terdiri dari

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada tabel berikut disajikan perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2010-2014, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2011 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - rata pertumbuhan |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| | BELANJA | 1.572.210.487.617 | 2.334.080.297.426 | 2.755.459.722.078 | 3.276.164.109.817 | 28,5 |
| I | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.059.192.474.981 | 1.268.529.842.646 | 1.488.224.176.921 | 1.654.384.787.120 | 16,1 |
| 1 | Belanja Pegawai | 657.803.294.154 | 767.437.703.476 | 881.464.639.348 | 982.021.268.535 | 14,3 |
| 3 | Belanja Subsidi | 540.000.000 | 910.000.000 | 2.090.000.000 | 3.837.400.000 | 93,9 |
| 4 | Belanja Hibah | 43.186.758.790 | 44.320.460.845 | 95.313.468.711 | 93.604.909.624 | 38,6 |
| 5 | Belanja Bantuan Sosial | 32.012.616.500 | 48.119.962.000 | 52.141.750.000 | 33.549.092.500 | 7,7 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa | 126.170.160.128 | 191.156.530.025 | 212.227.730.488 | 272.387.605.145 | 30,3 |
| 7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa | 198.646.101.309 | 216.289.002.899 | 234.132.968.576 | 268.781.366.026 | 10,6 |
| 8 | Belanja Tidak Terduga | 833.544.100 | 296.183.400 | 10.853.619.798 | 203.145.290 | 1134,0 |
| II | BELANJA LANGSUNG | 513.018.012.636 | 1.065.550.454.780 | 1.267.235.545.157 | 1.621.779.322.697 | 51,5 |
| 1 | Belanja Pegawai | 51.806.055.584 | 63.448.806.722 | 75.694.057.565 | 63.427.200.338 | 8,5 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 261.507.743.379 | 374.395.947.727 | 424.829.297.562 | 609.282.785.114 | 33,4 |
| 3 | Belanja Modal | 199.704.213.673 | 627.705.700.331 | 766.712.190.030 | 949.069.337.245 | 86,7 |

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Badung

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2014 bahwa pertumbuhan Belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 28,5%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp.1.059.192.474.981 tahun 2011 hingga Rp.1.654.384.787.120 tahun 2014,

dengan rata-rata kenaikan Belanja Tidak Langsung sebesar 16,1%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp.513.018.012.636 tahun 2011 hingga Rp.1.621.779.322.697 tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan Belanja Langsung sebesar 51,5%.

C. Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Badung

| No | URAIAN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | RATA RATA KENAIKAN |
|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| I | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 497.292.438.596 | 759.887.764.420 | 902.998.736.991 | 893.884.086.627 | 23,5 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 497.292.438.596 | 757.401.951.605 | 901.461.570.467 | 888.147.920.029 | 23,3 |
| 2 | Penarikan kembali pokok dana bergulir | 0 | 2.485.812.815 | 1.537.166.524 | 5.736.166.598 | 0 |
| II | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 18.447.400.000 | 145.200.000.000 | 214.000.000.000 | 154.000.000.000 | 235,5 |
| 1 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 16.500.000.000 | 145.200.000.000 | 214.000.000.000 | 154.000.000.000 | 266,4 |
| 2 | Penguatan Modal Dana Bergulir | 1.947.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 478.845.038.596 | 614.687.764.420 | 688.998.736.991 | 739.884.086.627 | 15,9 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| SISA LEBH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN | 757.401.951.605 | 901.461.570.467 | 888.201.985.529 | 923.705.602.144 | 7,2 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Badung

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,9 %, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dari Rp.497.292.438.596 di tahun 2011 hingga Rp.893.884.086.627 di tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 23,5 %.

Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu Rp.18.447.400.000 di tahun 2011 hingga Rp.154.000.000.000 di tahun 2014, dengan rata-rata kenaikan realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar 235,5 %. Pertumbuhan yang signifikan dari penyertaan modal (Investasi) yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 266,4%. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dari Rp.757.401.951.605 di tahun 2011 hingga Rp.923.705.602.144 di tahun 2014 dengan rata-rata kenaikan SILPA Tahun berjalan sebesar 7,2%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Badung, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2011-2014 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 s.d 2014
Kabupaten Badung

| URAIAN | TAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| ASET | 4.441.186.555.640 | 5.427.956.479.093 | 6.867.820.899.396 | 8.670.320.796.798 | 25 |
| ASET LANCAR | 952.986.034.533 | 1.129.953.342.662 | 1.346.234.012.239 | 1.539.266.057.557 | 17 |
| Kas | 757.786.742.691 | 901.573.078.216 | 888.341.033.175 | 923.958.007.980 | 7 |
| Kas di Kas Daerah | 753.880.735.478 | 894.498.493.069 | 876.201.606.486 | 896.870.005.924 | 6 |

| URAIAN | TAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 164.947.007 | 77.127.207 | 60.207.500 | 86.960.602 | (10) |
| Kas di Bendaha Pengeluaran | 2.010.728.440 | 15.434.978 | 122.995.051 | 789.825.868 | 380 |
| Kas di BLUD | 1.730.331.766 | 6.982.022.962 | 11.956.224.138 | 21.890.602.445 | 153 |
| Investasi jangk Pendek | - | - | - | - | - |
| Piutang | 188.135.989.344 | 220.849.646.034 | 442.093.678.941 | 460.078.354.205 | 41 |
| Piutang Pajak | 116.861.878.920 | 127.497.039.012 | 350.206.481.355 | 419.414.081.906 | 68 |
| Piutang Retribusi | 3.052.957.577 | 3.826.288.179 | 9.098.536.545 | 19.155.272.703 | 91 |
| Piutang Bagi Hasil Provinsi | 19.831.752.282 | 89.828.056 | 19.334.646.192 | 24.113.133.885 | 7.116 |
| Piutang Denda/Bunga Pajak Hotel, Restoran, Hiburan | 59.501.443.930 | 99.770.602.000 | 86.677.237.969 | 103.245.269.884 | 25 |
| Piutang Sanksi Administrasi | - | 1.606.263.216 | 2.271.867.668 | 2.616.424.485 | - |
| Biaya dibayar dimuka | 1.717.724.513 | 356.667.034 | 459.045.522 | 566.648.403 | (9) |
| Piutang JKBM | 45.701.500 | 4.235.012.058 | 1.595.107.526 | - | 3.001 |
| Piutang lain - lain | 2.680.000 | 459.551 | 4.591.779 | - | 239 |
| Penyisihan Piutang Pajak | (8.996.292.041) | (9.014.889.208) | (20.380.696.520) | (70.814.733.737) | 125 |
| Penyisihan Piutang Bunga Pajak | (3.881.857.337) | (7.437.310.704) | (7.059.545.712) | (37.994.825.278) | 175 |
| Penyisihan Piutang Sanksi Administrasi | - | (80.313.161) | (113.593.383) | (222.918.047) | - |
| Piutang Lain-lain | | | 4.591.779 | 129.970.493.097 | |
| Persediaan | 7.063.302.498 | 7.530.618.412 | 15.799.300.122 | 25.259.202.275 | 59 |
| Jumlah Aset Lancar | 952.986.034.533 | 1.129.953.342.662 | 1.346.234.012.239 | 1.539.266.057.557 | 17 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 365.614.050.059 | 527.178.005.241 | 1.024.284.191.780 | 1.240.381.224.393 | 53 |
| Investasi Non Permanen | 37.085.905.753 | 34.600.092.938 | 33.062.926.414 | 25.091.759.816 | (12) |
| Investasi NonPermanan lainnya | 9.337.558.220 | 9.337.558.220 | 9.337.558.220 | 9.337.558.220 | - |
| Invesatasi Dana Bergulir | 33.892.570.000 | 31.406.757.185 | 29.869.590.661 | 24.133.424.063 | (10) |
| Investasi Non Permanen lainnya Diragukan Tertagih | (6.144.222.467) | (6.144.222.467) | (6.144.222.467) | (8.379.222.467) | 12 |
| Invesatasi Permanen | 328.528.144.306 | 492.577.912.303 | 991.221.265.366 | 1.215.289.464.577 | 58 |
| Penyertaan Modal Pemerintah daerah | 328.528.144.306 | 492.577.912.303 | 991.221.265.366 | 1.215.289.464.577 | 58 |
| ASET TETAP | 3.069.082.012.484 | 3.685.666.164.923 | 4.413.348.155.707 | 5.805.955.412.325 | 24 |
| Tanah | 661.834.567.611 | 657.679.167.611 | 654.123.371.611 | 1.169.896.499.611 | 26 |
| Peralatan dan Mesin | 229.374.702.025 | 315.155.931.874 | 409.425.979.659 | 498.051.787.638 | 30 |
| Gedung dan Bangunan | 1.245.152.376.036 | 1.390.782.986.191 | 1.533.277.353.541 | 1.798.326.515.796 | 13 |

| URAIAN | TAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 850.980.004.619 | 1.281.458.804.888 | 1.764.723.882.896 | 2.211.217.421.496 | 38 |
| Aset Tetap Lainnya | 33.306.885.831 | 36.764.862.393 | 41.931.876.291 | 43.543.738.903 | 9 |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 48.433.476.363 | 3.824.411.966 | 9.865.691.708 | 84.919.448.881 | 276 |
| Akumulasi Penyusutan | | | | | |
| Dana Cadangan | | | - | - | |
| Aset lainnya | 53.504.458.565 | 85.158.966.268 | 83.954.539.671 | 84.718.102.523 | 20 |
| Tagihan Penjualan Angsuran | - | - | - | - | - |
| TGR | - | - | - | - | - |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | - | - | - | - | - |
| Aset Tak Berwujud | 1.435.139.625 | 3.155.343.125 | 4.339.751.675 | 6.688.685.475 | 71 |
| Aset Lain-lain | 52.069.318.940 | 82.003.623.143 | 79.614.787.996 | 78.029.417.048 | 18 |
| Jumlah Aset Lainnya | 53.504.458.565 | 85.158.966.268 | 83.954.539.671 | 84.718.102.523 | 20 |
| | | | | | |
| JUMLAH AKTIVA | 4.441.186.555.640 | 5.427.956.479.093 | 6.867.820.899.396 | 8.670.320.796.798 | |
| | | | | | |
| KEWAJIBAN | 9.097.551.425 | 29.799.205.895 | 17.048.429.700 | 72.677.898.157 | 170 |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 9.097.551.425 | 29.799.205.895 | 17.048.429.700 | 72.677.898.157 | 170 |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 219.844.079 | 34.380.542 | 139.050.646 | 145.008.103 | 75 |
| Utang Bunga | - | - | - | - | - |
| Utang denda pajak | - | - | - | - | - |
| Bagian Lancar Jangka Panjang | 0 | - | - | - | - |
| Pendapatan diterima dimuka | 0 | 1.385.683.308 | 978.044.588 | 677.862.003 | |
| Utang jangka Pendek lainnya | 8.877.707.346 | 28.379.142.045 | 16.909.379.054 | 72.532.890.054 | 169 |
| | | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | - | - | - | - | - |
| Utang Dalam Negeri | - | - | - | - | - |
| Utang Luar Negeri | - | - | - | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 9.097.551.425 | 29.799.205.895 | 17.048.429.700 | 72.677.898.157 | 170 |
| | | | | | |
| EKUITAS DANA | 4.432.089.004.215 | 5.398.157.273.199 | 6.850.772.469.696 | 8.597.642.898.641 | 25 |
| EKUITAS DANA LANCAR | 943.888.483.108 | 1.100.154.136.767 | 1.329.185.582.539 | 1.466.588.159.400 | 16 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran | 757.401.951.605 | 901.461.570.467 | 888.201.982.529 | 923.705.992.377 | 7 |
| Cadangan Piutang | 188.135.989.344 | 220.849.646.034 | 442.093.678.941 | 590.048.847.302 | 50 |
| Cadangan Persediaan | 7.063.302.498 | 7.530.618.412 | 15.799.300.122 | 25.259.202.275 | 59 |

| URAIAN | TAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | % |
| Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek | (8.877.707.346) | (29.764.825.353) | (16.909.379.054) | (72.532.890.054) | 174 |
| Pendapatan yang ditangguhkan | 164.947.007 | 77.127.207 | - | - | - |
| JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR | | | | | |
| EKUITAS DANA INVESTASI | 3.488.200.521.108 | 4.298.003.136.431 | 5.521.586.887.157 | 7.131.054.739.241 | 27 |
| Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang | 365.614.050.059 | 527.178.005.241 | 1.024.284.191.780 | 1.240.381.224.393 | 53 |
| Diinvestasikan dalam Aset Tetap | 3.069.082.012.484 | 3.685.666.164.923 | 4.413.348.155.707 | 5.805.955.412.325 | 24 |
| Diinvestasikan dalam Aset Lainnya | 53.504.458.565 | 85.158.966.268 | 83.954.539.671 | 84.718.102.523 | 20 |
| EKUITAS DANA CADANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 4.441.186.555.640 | 5.427.956.479.093 | 6.867.820.899.396 | 8.670.320.796.798 | 25 |

Sumber : Laporan Keuangan kab.Badung

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25 . Aset lancar pemerintah Kabupaten Badung mengalami tren pertumbuhan pada tahun 2011 hingga 2014 dengan rata-rata kenaikan sebesar 17 %. Kas mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar Rp 757.786.742.690 dan sebesar Rp 923.958.007.980 di periode tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7 %. Investasi Jangka Panjang pemerintah Kabupaten Badung mengalami tren pertumbuhan yang signifikan dengan rata-rata sebesar 53%, Serta Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Kabupaten Badung selama tahun 2011-2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 24 %. Total aset tetap Kabupaten Badung pada tahun 2011 adalah Rp 3.069.082.012.483 dan meningkat menjadi Rp 5.805.955.412.325 pada tahun 2014.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan rata-rata 170 %, ini terjadi di karenakan Hutang Jangka Pendek terutama Utang jangka Pendek lainnya kenaikan secara signifikan yaitu di tahun 2012 sebesar Rp 28.379.142.045 serta di tahun 2014 sebesar Rp 72.532.890.054.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Badung selama tahun 2011-2014 tumbuh rata-rata sebesar 25 %, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp 4.432.089.004.215 dan tahun 2014 Rp 8.597.642.898.641 Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan ekuitas dana investasi yaitu dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 27%, Ekuitas dana investasidiperoleh dari pertumbuhanyang signifikan dari Diinvestasikan dalam Investasi Jangka dengan rata rata pertumbuhan sebesar 53%.

Berdasarkan data neraca Kabupaten Badung periode tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kab.Badung. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Tahun 2011-2014 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2014
Kabupaten Badung

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|---|---------|---------|---------|---------|
| A | Rasio Likuiditas | | | | |
| 1. | Rasio lancar (current ratio) | 104,8 | 37,9 | 79,0 | 21,2 |
| 2. | Rasio quick (quick ratio) | 104,0 | 37,7 | 78,0 | 20,8 |
| B | Rasio Solvabilitas | | | | |
| 1 | Rasio total hutang terhadap total asset | 0,00205 | 0,00549 | 0,00248 | 0,00838 |
| 2 | Rasio hutang terhadap modal | 0,00205 | 0,00552 | 0,00249 | 0,00845 |

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kab. Badung yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2011 adalah sebesar 104,8 dan tahun 2014 sebesar 21,2. Hal ini berarti menunjukkan tahun 2014 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 21 kali lebih.

2. Rasio Quicks

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick ratio dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Quick pada Tahun 2011 adalah sebesar 104,0 serta periode tahun 2014 rasio Quicks sebesar 20,8. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvabilitas berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2011 sebesar 0,00205 dan pada tahun 2014 sebesar 0,00838. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 0,00205 serta periode Tahun 2014 sebesar 0,00845. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Badung, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2014 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2015.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- 3) Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya e-governance di bidang Pajak Daerah.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- 6) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.

- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
- 6) Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
- 7) Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
- 8) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010-2014. Belanja Daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
2. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran KabupatenBadungbertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badungpada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah sertauntuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2012 s/d tahun 2014 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Badung, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran BelanjaTahun 2010 s.d 014
Kabupaten Badung

| NO | URAIAN | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | RATA - RATA | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|------|-------------|--|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (%) | ANGGARAN | REALISASI | (%) | ANGGARAN | REALISASI | (%) | | |
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | | (%) | |
| 2 | BELANJA | 2.671.642.814.959 | 2.334.080.297.426 | 87,4 | 3.027.775.911.367 | 2.755.459.722.078 | 91,0 | 3.614.006.551.503 | 3.276.164.109.817 | 90,7 | 89,7 | |
| 2 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.463.878.021.674 | 1.268.529.842.646 | 86,7 | 1.623.136.935.493 | 1.488.224.176.921 | 91,7 | 1.804.201.412.603 | 1.654.384.787.120 | 91,7 | 90,0 | |
| 2 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 920.296.751.682 | 767.437.703.476 | 83,4 | 977.496.630.367 | 881.464.639.348 | 90,2 | 1.093.374.066.148 | 982.021.268.535 | 89,8 | 87,8 | |
| 2 . 1 . 3 | Belanja Subsidi | 910.000.000 | 910.000.000 | 100,0 | 2.090.000.000 | 2.090.000.000 | 100,0 | 3.870.000.000 | 3.837.400.000 | 99,2 | 99,7 | |
| 2 . 1 . 4 | Belanja Hibah | 45.454.215.798 | 44.320.460.845 | 97,5 | 96.874.582.650 | 95.313.468.711 | 98,4 | 100.242.049.336 | 93.604.909.624 | 93,4 | 96,4 | |
| 2 . 1 . 5 | Belanja Bantuan Sosial | 49.363.658.648 | 48.119.962.000 | 97,5 | 57.501.750.000 | 52.141.750.000 | 90,7 | 35.638.500.000 | 33.549.092.500 | - | 62,7 | |
| 2 . 1 . 6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 212.066.068.817 | | 90,1 | 219.855.161.334 | 212.227.730.488 | 96,5 | 284.286.151.505 | 272.387.605.145 | 95,8 | 94,2 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|------|
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 232.787.326.730 | 216.289.002.899 | 92,9 | 255.465.191.345 | 234.132.968.576 | 91,6 | 283.790.645.614 | 268.781.366.026 | 94,7 | 93,1 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000 | 296.183.400 | 9,9 | 13.853.619.798 | 10.853.619.798 | 78,3 | 3.000.000.000 | 203.145.290 | 6,8 | 31,7 |

| NO | URAIAN | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | RATA - RATA | |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------|--|
| | | ANGGARAN | REALISASI | (%) | ANGGARAN | REALISASI | (%) | ANGGARAN | REALISASI | (%) | | |
| | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | | (%) | |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 1.207.764.793.285 | 1.065.550.454.780 | 88,2 | 1.404.638.975.874 | 1.267.235.545.157 | 90,2 | 1.809.805.138.900 | 1.621.779.322.697 | 89,6 | 89,4 | |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 69.182.049.949 | 63.448.806.722 | 91,7 | 79.788.831.923 | 75.694.057.565 | 90,2 | 67.622.576.549 | 63.427.200.338 | 89,6 | 90,5 | |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 430.512.061.957 | 374.395.947.727 | 87,0 | 473.202.533.790 | 424.829.297.562 | 94,9 | 650.599.465.027 | 609.282.785.114 | 93,8 | 91,9 | |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 708.070.681.379 | 627.705.700.331 | 88,7 | 851.647.610.161 | 766.712.190.030 | 89,8 | 1.091.583.097.324 | 949.069.337.245 | 93,6 | 90,7 | |

Sumber : Laporan Bagian Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2014

Berdasarkan Tabel 3.6 Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari Rp 1.268.529.842.646 atau 86,7% periode tahun 2012 hingga Rp 1.654.384.787.120 atau 91,7% pada periode 2014, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 90%. Sertai tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2012 sebesar Rp 1.065.550.454.780 atau 88,2 % sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 1.621.779.322.697 atau 89,6%, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 89,4 % atau lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak Langsung.

B. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Badung tertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012 s.d 2014
Kabupaten Badung

| KODE | URAIAN | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 5. | BELANJA | 1.300.893.221.857 | 1.162.672.843.062 | 1.339.140.965.691 |
| 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 653.818.498.811 | 729.463.006.962 | 796.775.941.269 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 653.818.498.811 | 729.463.006.962 | 796.775.941.269 |

| KODE | URAIAN | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 5.1.1.01 | Gaji Dan Tunjangan | 452.544.105.050 | 473.780.224.737 | 509.017.016.921 |
| 5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS | 195.877.913.761 | 249.656.782.225 | 281.073.549.348 |
| 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 5.396.480.000 | 6.026.000.000 | 6.685.375.000 |
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 647.074.723.046 | 433.209.836.100 | 542.365.024.422 |
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 58.523.118.468 | 72.169.967.565 | 63.427.200.338 |
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 22.542.530.120 | 17.053.300.850 | 16.365.721.549 |
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 34.562.294.848 | 53.888.428.215 | 45.688.120.789 |
| 5.2.1.03 | Uang Lembur | 1.418.293.500 | 1.228.238.500 | 1.373.358.000 |
| 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 545.780.874.101 | 295.101.232.228 | 421.491.287.808 |
| 5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 374.395.947.727 | 99.933.210.041 | 165.056.496.349 |
| 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 75.756.332.643 | 98.688.016.956 | 148.534.925.792 |
| 5.2.2.04 | Belanja Premi Asuransi Kesehatan | 6.256.260.200 | 10.754.154.679 | 11.021.659.152 |
| 5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.992.821.432 | 1.393.333.872 | 1.942.631.702 |
| 5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.339.608.000 | 5.960.926.855 | 6.107.302.000 |
| 5.2.2.10 | Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor | 1.491.773.430 | 2.271.205.952 | 3.151.887.000 |
| 5.2.2.11 | Belanja Makanan Dan Minuman | 21.377.173.010 | 24.362.717.809 | 21.149.594.577 |
| 5.2.2.11 | Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya | 766.915.080 | 4.818.645.248 | 7.759.748.800 |
| 5.2.2.13 | Belanja Pakaian Kerja | 2.415.932.050 | 3.660.344.115 | 3.898.760.550 |
| 5.2.2.14 | Belanja Pakaian Khusus Dan Hari- Hari Tertentu | 13.441.059.715 | 5.274.252.232 | 9.457.629.500 |
| 5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 38.094.466.274 | 32.175.122.417 | 34.536.286.671 |
| 5.2.2.16 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1.395.905.200 | 1.108.500.000 | 1.043.500.000 |
| 5.2.2.17 | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 4.056.679.340 | 4.700.802.052 | 3.785.401.164 |
| 5.2.2.38 | Honorarium PNS | | | 4.045.464.551 |

| KODE | URAIAN | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 5.2.3. | Belanja Modal | 42.770.730.477 | 65.938.636.308 | 57.446.536.276 |
| 5.2.3.03 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor | 12.681.226.198 | 25.274.148.236 | 20.052.210.016 |
| 5.2.3.10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 2.324.327.200 | 2.031.717.589 | 2.478.311.898 |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor | 2.891.692.235 | 5.268.796.725 | 6.146.427.878 |
| 5.2.3.11 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 9.821.153.350 | 13.901.494.526 | 12.350.326.682 |
| 5.2.3.13 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair | 10.855.577.040 | 17.599.549.232 | 15.206.497.317 |
| 5.2.3.17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi | 4.196.754.454 | 1.862.930.000 | 1.212.762.485 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2012 – 2013 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut di karenakan terjadinya penurunan Belanja langsung . Pada tahun 2013 – 2014 cenderung mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan Belanja barang dan jasa pada Belanja langsung , juga berkenaan dengan peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung

| NO | URAIAN | BELANJA | TOTAL PENGELUARAN | PROSENTASE |
|----|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | (UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR) | (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) | |
| | | (a) | (b) | |
| 1 | Tahun Anggaran 2012 | 1.300.893.221.857 | 2.479.280.297.426 | 52,5 |
| 2 | Tahun Anggaran 2013 | 1.162.672.843.062 | 2.969.459.722.078 | 39,2 |
| 3 | Tahun Anggaran 2014 | 1.339.140.965.691 | 3.430.164.109.817 | 39,0 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh Prosentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2012 prosentasenya sebesar 52,5 persen dan tahun 2014 prosentasenya menurun menjadi sebesar 39,0 persen. Dari prosentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat

disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun telah dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

C. PengeluaranWajib Dan MengikatSerta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab.Badung pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2012-2014
KabupatenBadung

| NO | URAIAN | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - rata Kenaikan |
|----|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| I. | BELANJA | 918.274.803.342 | 1.030.241.267.230 | 1.156.903.081.112 | 12,2 |
| A. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 845.693.610.112 | 942.379.009.790 | 1.069.877.328.310 | 12,5 |
| 1 | Gaji Dan Tunjangan | 452.544.105.050 | 473.780.224.737 | 509.017.016.921 | 6,1 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 195.877.913.761 | 249.656.782.225 | 281.073.549.348 | 20,0 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 5.396.480.000 | 6.026.000.000 | 6.685.375.000 | 11,3 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 169.531.940.000 | 192.212.017.000 | 251.682.036.500 | 22,2 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 9.281.086.750 | 14.379.279.375 | 17.589.948.875 | 38,6 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa | 12.343.503.275 | 5.636.434.113 | 3.115.619.770 | -49,5 |
| 7 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 718.581.275 | 688.272.340 | 713.781.897 | -0,3 |
| B. | BELANJA LANGSUNG | 72.581.193.230 | 87.862.257.440 | 87.025.752.802 | 10,1 |
| 1 | Honorarium PNS | 22.542.530.120 | 17.053.300.850 | 16.365.721.549 | -14,2 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 34.562.294.848 | 53.888.428.215 | 45.688.120.789 | 20,3 |
| 3 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 1.992.821.432 | 1.393.333.872 | 1.942.631.702 | 4,7 |
| 4 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 4.339.608.000 | 1.393.333.872 | 6.107.302.000 | 135,2 |
| 5 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 1.395.905.200 | 1.108.500.000 | 1.043.500.000 | -13,2 |
| 6 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1.491.773.430 | 2.271.205.952 | 3.151.887.000 | 45,5 |

| NO | URAIAN | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - rata Kenaikan |
|--------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | % |
| 7 | Belanja Premi Asuransi | 6.256.260.200 | 10.754.154.679 | 12.726.589.762 | 45,1 |
| JUMLAH | | 918.274.803.342 | 1.030.241.267.230 | 1.156.903.081.112 | 12,2 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan. Hasil Analisis pembiayaan tertuang pada Tabel 3.10, sbagai berikut :

Tabel 3.10
Defisit Riil Tahun 2012-2014
Kabupaten Badung

| NO | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | Rata - rata |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) | (%) |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | .620.854.103.474 | 2.954.662.970.616 | 3.459.985.625.334 | 14,9 |
| 2 | BELANJA DAERAH | .334.080.297.426 | 2.755.459.722.078 | 3.276.164.109.817 | 18,5 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 145.200.000.000 | 214.000.000.000 | 154.000.000.000 | 9,7 |
| A. | Defisit Riil | 141.573.806.048 | (14.796.751.462) | 29.821.515.517 | -206,0 |
| Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan : | | | | | |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA) | 757.401.951.605 | 901.461.570.467 | 888.147.920.029 | 8,8 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 2 | Penarikan Dana Bergulir | 2.485.812.815 | 1.537.166.524 | 5.736.166.598 | 117,5 |
| B. | Total Realisasi Penerimaan | 759.887.764.420 | 902.998.736.991 | 893.884.086.627 | 8,9 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | | 901.461.570.467 | 888.201.985.529 | 923.705.602.144 | 1,3 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun 2012 s/d 2014
Kabupaten Badung

| No. | Uraian | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|-----|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA | Rp | % dari SiLPA |
| 1. | Jumlah SiLPA | 901.461.570.467 | | 888.201.985.529 | | 923.705.602.144 | |
| 2. | Pelampauan penerimaan PAD | 250.913.724.425 | 28 | 141.699.867.776 | 16 | 249.951.305.853 | 27,1 |
| 3. | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 36.078.991.250 | 4 | 73.338.487.849 | 8 | (5.322.249.175) | -0,6 |
| 4. | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 4.398.787.199 | 0,5 | (4.878.217.596) | -1 | (7.997.461.626) | -0,9 |
| 5. | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 240.460.520.356 | 27 | 328.102.166.857 | 37 | 272.323.389.289 | 29,5 |
| 6. | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 7. | Kegiatan lanjutan | 0 | 0 | 9.460.350.676 | 1,1 | 0 | 0 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Badung 2012– 2014

Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah bahwa dari tahun 2012 – 2014 SILPA Tahun Berjalan cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,3 %, Kabupaten Badung untuk menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan dalam penentuan SILPA harus cermat dalam Penyusunan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Periode tahun 2013 sampai dengan 2014 terjadi Penurunan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran

periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2011-2014, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Gambaran tentang rata-rata pertumbuhan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Badung yang diperoleh dari pengolahan data dari periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tertuang pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Badung

| No | Uraian | Rata-rata Pertumbuhan |
|----|---|-----------------------|
| | | (%) |
| A | Belanja Tidak Langsung | 12,5 |
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 12,2 |
| 2 | Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH | 11,3 |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH | 11,3 |
| 4 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 22,2 |
| 5 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 38,6 |
| 6 | Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa | -49,5 |
| 7 | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | -0,3 |
| B | Belanja Langsung | 10,1 |
| 1 | Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. | 20,3 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 20,3 |
| 3 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 4,7 |
| 4 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 135,2 |
| 5 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | -13,2 |
| 6 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 45,5 |
| 7 | Belanja Premi Asuransi | 45,1 |

Berdasarkan Tabel 3.12, diperoleh Prosentase Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas UtamaKabupaten Badung untuk belanja tidak langsung pertumbuhan rata–rata kenaikan sebesar 12,5 %, serta untuk belanja langsung terkait Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 10,1%, dari hasil analisis tersebut dapat dicerminkan bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung lebih besar di dibandingkan dengan pertumbuhan rata Belanja langsung terkait dengan pengeluaran periodik, wajib dan mengikat.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021 menggunakan tahun dasar 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

| Uraian | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Pendapatan | 4.070.868 | 4.339.149 | 4.509.503 | 4.787.644 | 5.070.101 | 5.366.990 |
| Pendapatan Asli Daerah | 3.180.495 | 3.568.142 | 3.695.861 | 3.978.709 | 4.261.556 | 4.544.404 |
| Dana Perimbangan | 650.396 | 570.873 | 549.066 | 531.131 | 516.850 | 506.043 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 239.977 | 200.133 | 264.574 | 277.803 | 219.693 | 316.542 |

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA tahun 2016 dan 2020 dimana diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari periode tahun 2011 sampai dengan periode tahun 2015 mengalami peningkatan namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5,1 % dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 – 2021
 Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

| URAIAN | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | 2019 (Rp) | 2020 (Rp) | 2021 (Rp) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 913.821 | 671.374 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan Kab.Badung untuk mendanai pembangunan Kabupaten Badung dalam jangka waktu lima tahun 2016-2020, disajikan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Tahun 2016 – 2021
 Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

| NO | URAIAN | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI | PROYEKSI |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| 1 | Pendapatan | 4.070.868 | 4.339.149 | 4.509.503 | 4.787.644 | 5.070.101 | 5.366.990 |
| 2 | Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran | 913.821 | 671.374 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| KAPASITAS KEMAMPUAN KEUDA | | 4.984.689 | 5.010.523 | 4.759.503 | 5.087.644 | 5.370.101 | 5.666.990 |

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2014. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16

Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

| No | Uraian | Proyeksi | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| I | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 4.984.689 | 5.010.523 | 4.759.503 | 5.087.644 | 5.370.101 | 5.666.990 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas I | | | | | | |
| II.a | Belanja Langsung | 2.217.539 | 2.358.209 | 2.054.360 | 2.175.555 | 2.574.847 | 2.742.579 |
| II.b | Pembentukan dana cadangan | - | - | - | - | - | - |
| | Dikurangi: | | | - | - | - | - |
| II.c | Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | - | - | - | - | - | - |
| II.d | Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama | - | - | - | - | - | - |
| II | Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d) | 2.217.539 | 2.358.209 | 2.054.360 | 2.175.555 | 2.574.847 | 2.742.579 |
| | Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) | 2.767.150 | 2.652.314 | 2.705.143 | 2.912.089 | 2.795.254 | 2.924.410 |
| | Rencana alokasi pengeluaran prioritas II | | | - | - | - | - |
| III.a | Belanja Tidak Langsung | 2.331.349 | 2.652.313 | 2.630.901 | 2.835.646 | 2.831.146 | 2.948.099 |
| | Dikurangi: | | | | | | |
| III.b | Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama | - | - | - | - | - | - |
| III | Total rencana pengeluaran prioritas III (III.a-III.b) | 2.331.349 | 2.652.313 | 2.630.901 | 2.835.646 | 2.831.146 | 2.948.099 |
| | Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)* | 435.801 | 1 | 74.242 | 76.443 | (35.892) | (23.689) |

C. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, total pada tabel untuk masing-

masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100 persen. total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasikapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

| JENIS DANA | Alokasi | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| | PROYEKSI | | PROYEKSI | | PROYEKSI | | PROYEKSI | | PROYEKSI | | PROYEKSI | |
| | TA 2016 | | TA 2017 | | TA 2018 | | TA 2019 | | TA 2020 | | TA 2021 | |
| | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (Rp) |
| PRIORITAS I | 52 | 4.984.689 | 50 | 5.010.523 | 50 | 4.759.503 | 50 | 5.087.644 | 50 | 5.370.101 | 50 | 5.666.990 |
| PRIORITAS II | 23 | 2.217.539 | 24 | 2.358.210 | 22 | 2.054.361 | 22 | 2.175.556 | 24 | 2.574.847 | 26 | 2.742.580 |
| PRIORITAS III | 26 | 2.331.349 | 26 | 2.652.314 | 28 | 2.630.901 | 28 | 2.835.647 | 26 | 2.831.146 | 26 | 2.948.100 |
| JUMLAH | 100 | 9.533.577 | 100 | 10.021.047 | 100 | 9.444.765 | 100 | 10.098.847 | 100 | 10.776.094 | 100 | 11.357.670 |

BAB IV

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
- 2) Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- 3) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- 5) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- 2) Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- 5) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- 7) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- 8) Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 9) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- 10) Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir dan menjaga level air agar sungai terlihat lebih bersih saat kemarau.
- 2) Masih adanya pembuangan air limbah secara langsung ke pantai.
- 3) Masih kurangnya instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan perumahan.
- 4) Belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah terpadu di Kabupaten Badung terutama di kawasan Badung Selatan.
- 5) Belum tertanganinya beberapa badan jalan khususnya pada kawasan *Land Consolidation* (LC).
- 6) Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastruktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata antara lain : jalan lingkar selatan dan lingkar barat di Kuta Selatan.
- 7) Masih kurangnya infrastruktur penunjang pada jalur-jalur menuju objek wisata, antara lain : Lampu Penerangan Jalan, jaringan telepon, trotoar dan drainase.
- 8) Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyambungkan limbahnya ke sistem jaringan air limbah terpusat DSDP.
- 9) Belum jelasnya referensi pembangunan infrastruktur.
- 10) Belum adanya perangkat hukum tentang bangunan gedung yang mengatur ketentuan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan publik.

d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
- 3) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana masih kurang.
- 4) Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- 5) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat.
- 6) Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- 7) Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- 8) Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- 9) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- 10) Terbatasnya paket individu masyarakat Kabupaten Badung yang terdampak bencana belum dapat diwujudkan.
- 11) Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

e. Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.
- 3) Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.

4.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Tenaga Kerja

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kerjasama Tripartit dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Masih terdapat tenaga kerja yang belum mengikuti sertifikasi uji kompetensi .
- 3) Masih terbatasnya jumlah assessor.
- 4) Rendahnya jiwa wirausaha.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
- 3) Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap penyakit kanker, HIV-AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

c. Lingkungan Hidup

- 1) Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
- 2) Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
- 3) Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
- 4) Belum adanya masterplan pertamanan.
- 5) Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan catatan sipil.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.

f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

- 1) Tingginya angka pernikahan dini.
- 2) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.
- 3) Rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
- 4) Belum optimalnya peran Tribina KB.

g. Perhubungan

- 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan prasarana jalan.
- 2) Terkonsentrasinya kegiatan/ aktivitas/ mobilitas di wilayah Badung Selatan menyebabkan beban lalu-lintas dan permasalahan kemacetan lalu-lintas bertumpu di wilayah Badung Selatan.
- 3) Belum optimalnya pelayanan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Badung.

h. Komunikasi dan Informatika.

- 1) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung.
- 2) Kurang tersedianya lahan parkir di luar badan jalan di wilayah padat aktivitas.

i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk.
- 2) Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.
- 3) Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya.
- 4) Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha.
- 5) Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM.
- 6) Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.

j. Kebudayaan

- 1) Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
- 3) Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
- 4) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

k. Perpustakaan

- 1) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar.
- 2) Kurangnya minat baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Penataan peruntukan sektor perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik.
- 2) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 3) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.
- 4) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan.

- 5) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan.
- 2) Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
- 3) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
- 4) Perlunya penataan perizinan sarana akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 5) Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 6) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu ditingkatkan.
- 7) Daya Tarik Wisata (DTW) yang belum tertata secara optimal.
- 8) Belum maksimalnya pengembangan potensi Daya Tarik Wisata baru
- 9) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- 10) Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti.
- 11) Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada Daya Tarik Wisata.
- 12) Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana penunjang kepariwisataan.
- 13) Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan.
- 14) Belum adanya data base industri pariwisata.

c. Pertanian

- 1) Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
- 2) Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
- 3) Pesatnya alih fungsi lahan.
- 4) Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
- 5) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian.
- 6) Rendahnya adopsi inovasi pertanian.
- 7) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
- 8) Penataan peruntukan sektor peternakan belum terwujud dengan baik.
- 9) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 10) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali.
- 11) Kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana RPH Mambal untuk mewujudkan swasembada daging sapi, serta untuk menghasilkan BOB.

d. Perdagangan

- 1) Adanya kecenderungan semakin meningkatnya jumlah *mini market* dan makanan siap saji yang masuk ke kawasan pedesaan.
- 2) Kurangnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Lainnya

- 1) Belum optimalnya pelayanan perizinan.
- 2) Belum maksimalnya analisis jabatan dan rasio kebutuhan pegawai.
- 3) Belum optimalnya disiplin aparatur pemerintah.
- 4) Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah.
- 5) Belum ditetapkannya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.2 Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis ditunjukkan dari kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang berkembang akibat pengaruh kondisi global, regional dan nasional yang perlu mendapat perhatian dan fokus penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu lima tahun kedepan meliputi :

4.2.1 Isu-isu Strategis Global, Regional dan Nasional

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global pada periode Tahun 2016-2021. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.

2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.
3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

4.2.2 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah meliputi :

a. Pendidikan

- 1) Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- 2) Memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik
- 4) Restrukturisasi satuan pendidikan dasar menuju satuan pendidikan berbasis Hindu
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar
- 6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 8) Peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegritas
- 9) Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan
- 10) Peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini
- 11) Pembentukan sekolah PAUD/TK berbasis Agama Hindu dan Bahasa Bali
- 12) Peningkatan manajemen guru dan pendidikan kejuruan
- 13) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal

b. Kesehatan

- 1) Perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang berkualitas
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan
- 3) Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat
- 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 5) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 6) Peningkatan kesehatan perempuan, ibu hamil, anak, remaja hingga lanjut usia (*continuum of care*)
- 7) Percepatan perbaikan status gizi masyarakat
- 8) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 9) Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan

- 10) Integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat (*universal coverage*)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pengkajian mengenai pemanfaatan muara Tukad Mati sebagai Daerah Tujuan Wisata baru
- 2) Pembangunan utilitas terpadu
- 3) Peningkatan infrastruktur terkait penambahan jumlah penduduk

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan PMKS
- 2) Perluasan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin/rentan
- 3) Optimalisasi jangkauan pelayanan air bersih dan sistem pelayanan air minum
- 4) Pengembangan sistem utilitas terpadu
- 5) Pengembangan sistem pengolahan sampah / limbah terpadu
- 6) Perluasan akses kredit kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 7) Pengolahan air laut menjadi air minum atau air bersih untuk mengantisipasi kekurangan air baku pada kawasan Badung Selatan
- 8) Pengamanan daerah tangkapan air
- 9) Pengendalian alih fungsi lahan
- 10) Pembangunan IPAL pada kawasan Badung Selatan untuk menanggulangi air limbah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
- 3) Pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan terutama di lingkungan masyarakat perkotaan
- 4) Pengurangan resiko bencana
- 5) Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif terhadap penanggulangan bencana.
- 6) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 7) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan dengan merealisasikan pos siaga bencana di masing-masing kecamatan
- 8) Peningkatan cakupan pelayanan tanggap darurat dengan penambahan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- 9) Peningkatan jaminan kehidupan korban bencana dengan merealisasikan paket bantuan logistik

- 10) Pemberian santunan kepada individu dan kelompok masyarakat terdampak bencana
- 11) Optimalisasi penanganan pasca bencana dengan membuat dan mensinergikan peraturan/payung hukum pada saat pasca bencana.

f. Sosial

- 1) Perluasan jangkauan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan
- 2) Peningkatan intensitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Peningkatan sinergitas antar pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial dan kemiskinan.

4.2.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui instrumen Upah Minimum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
- 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja dan pencari kerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 4) Memberi pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
- 5) Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
- 6) Perluasan penyerapan tenaga kerja berbasis wirausaha mandiri
- 7) Kurang optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mempersiapkan tenaga kerja terlatih

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Peningkatan pengarusutamaan gender
- 2) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- 3) Penanggulangan lebih intensif penyakit kanker dan HIV-Aids
- 4) Peningkatan antisipasi terhadap daerah rawan *trafficking*

c. Pangan

- 1) Perubahan iklim (climate change) yang mengganggu suplai air, pola tanam dan produktivitas hasil pertanian
- 2) Terancamnya ketahanan pangan
- 3) Belum tersedianya peta potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Badung
- 4) Terancamnya ketahanan pangan
- 5) Penurunan kualitas sumber daya alam pertanian
- 6) Pesatnya alih fungsi lahan pertanian
- 7) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 8) Rendahnya adopsi inovasi pertanian
- 9) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
- 10) Belum optimalnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
- 11) Belum optimalnya database potensi sumberdaya pertanian
- 12) Menurunnya rumah tangga petani dan kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 13) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani

d. Lingkungan Hidup

- 1) Penanganan kawasan resapan air hujan
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 3) Mempertahankan ruang Daya terbuka hijau
- 4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
- 5) Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) 10 sungai

e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Belum Sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.

f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

- 1) Pengendalian angka kelahiran anak untuk menekan tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga (di atas 2 anak)
- 2) Peningkatan motivasi masyarakat terhadap pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
- 3) Peningkatan usia remaja kawin pertama diatas 20 tahun
- 4) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
- 5) Penyebarluasan informasi (KIE) tentang program KB
- 6) Peningkatan peran Tri Bina KB dan UPPKS
- 7) Perluasan dukungan dari berbagai sektor untuk meraih bonus demografi

g. Perhubungan

- 1) Isu keamanan Global dan Regional menuntut Kabupaten Badung sebagai destinasi Internasional meningkatkan keamanan wilayahnya

h. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Peningkatan motivasi dan kapasitas kewirausahaan
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri tenun lokal
- 3) Peningkatan bantuan permodalan kepada UMKM
- 4) Penyertaan modal pemerintah untuk peningkatan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pasar tradisional
- 5) Penguatan promosi potensi industri tenun lokal
- 6) Penguatan sumber bahan baku dan penggunaan bahan baku tenun lokal

i. Kebudayaan

- 1) Penguatan peran lembaga adat/tradisional sebagai wadah pelestarian adat, seni dan budaya.
- 2) Pelestarian kesenian, budaya serta lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya ditengah dinamika kehidupan modern.
- 3) Peningkatan perlindungan asset budaya daerah
- 4) Pemantapan dan peningkatan kualitas kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
- 5) Mulai mudarnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- 7) Lemahnya perlindungan hak cipta dan kurangnya penghargaan (*kerthi budaya*) bagi seniman, sastrawan dan budayawan
- 8) Kekurangan guru agama Hindu.
- 9) Peningkatan srada bhakti bagi generasi muda
- 10) Kurangnya minat generasi muda mendalami tentang Budaya Bali
- 11) Gangguan keamanan terhadap pura dan pratima
- 12) Beralihnya kepemilikan asset pura (pelaba pura)
- 13) Kerancuan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang sakral.

j. Perpustakaan

- 1) Peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Badung untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah.
- 2) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar

k. Kearsipan

- 1) Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4.2.3 Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan serta pengembangan teknologi
- 2) Peningkatan daya saing produk hasil perikanan
- 3) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor perikanan dan kelautan
- 4) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan yang sangat tinggi
- 5) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk ramah lingkungan
- 2) Diversifikasi produk pariwisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata baru
- 3) Belum tergarapnya secara maksimal potensi kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 4) Kurang optimalnya pengelolaan wisata pedesaan
- 5) Belum optimalnya sinergi pertanian, perikanan, kelautan, UMKM dan pelaku pariwisata
- 6) Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
- 7) Lemahnya daya saing SDM kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 8) Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.

c. Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 2) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kebencanaan

d. Pertanian

- 1) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
- 2) Pemanfaatan teknologi dalam penghijaun untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas

- 3) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan serta pengembangan teknologi
- 4) Peningkatan daya saing produk hasil peternakan
- 5) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor peternakan
- 6) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi
- 7) Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali
- 8) Kurangnya sarana maupun prasarana untuk mewujudkan swasembada daging sapi

4.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Fungsi Lainnya

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
- 2) Optimalisasi analisis jabatan dan pengembangan karir PNS
- 3) Optimalisasi pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintah
- 4) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 5) Peningkatan penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- 7) Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkelanjutan
- 8) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
- 9) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 10) Optimalisasi pembinaan terhadap disiplin aparatur pemerintah
- 11) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah
- 12) Penetapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;
- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

| Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas | Pencemaran Air dan Polusi Udara | Degradasi Lahan/hutan | Permasalahan Sampah | Degradasi Pantai | Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| 1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah |
| 2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah |
| 3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah |

| Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Program Prioritas | Pencemaran Air dan Polusi Udara | Degradasi Lahan/hutan | Permasalahan Sampah | Degradasi Pantai | Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|
| 4. Pengembangan Agropolitan Petang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1. Pembangunan terminal 2. Pembangunan Pasar |
| 5. Pembangunan jalan bebas hambatan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Pengembangan kawasan |
| 6. Pengembangan dan pembangunan terminal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan kawasan |
| 7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Pengembangan kawasan |
| 8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1. Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan |
| 9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. Perluasan permukiman 2. Pembangunan jalan |
| 10. Pengembangan kawasan pariwisata | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. Pembangunan jalan 2. Pembangunan akomodasi wisata |
| 11. Pengembangan kawasan pertanian modern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1. Pembangunan jalan 2. Pengembangan pasar |
| 12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1. Pengembangan permukiman 2. Pembangunan jalan |
| 13. Pengembangan kawasan perikanan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1. Pengembangan pasar ikan |

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

| Program Prioritas | Daftar Isu-Isu PB | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|--|----------------|---|-------------------|--|
| | Pencemaran Sungai/Pantai | | Degradasi lahan/hutan | | Masalah Sampah | | Degradasi pantai- | |
| | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi |
| 1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita | - | Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan | - | Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan | + | Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk | + | Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai |
| 2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura | + | Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan | - | Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan | + | Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan | 0 | Kemungkinan tidak berpengaruh |
| 3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Bena, dan Tanjung Bena | + | Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata | + | Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata | + | Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata | + | Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata |
| 4. Pengembangan Agropolitan Petang | - | Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah | + | Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana | + | Penataan kawasan | 0 | Tidak berdampak penting |
| 5. Pembangunan jalan bebas hambatan | 0 | Tidak berdampak penting | - | Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif | 0 | Tidak berdampak penting | 0 | Tidak berdampak penting |
| 6. pengembangan dan pembangunan terminal | - | Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal | + | Alih fungsi lahan disekitarnya | - | Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal | 0 | Tidak berdampak penting |
| 7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet | ++ | Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai | + | Menghindari alih fungsi DAS | + | Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai | + | Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai |
| 8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu | ++ | Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai | 0 | Tidak berdampak penting | + | Tidak berdampak penting | ++ | Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut |
| 9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa | 0 | Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa | - | Alih fungsi lahan disekitar kawasan | 0 | Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa | 0 | Tidak berdampak penting |
| 10. Pengembangan kawasan pariwisata | 0 | Air limbah dari akomodasi wisata | + | Penataan kawasan pariwisata | 0 | Sampah dari aktivitas pariwisata | 0 | Ancaman sepadan dan ekosistem pantai |
| 11. pengembangan kawasan pertanian modern | -- | Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia | + | Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak | 0 | Tidak berdampak penting | 0 | Tidak berdampak penting |

| Program Prioritas | Daftar Isu-Isu PB | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|---|
| | Pencemaran Sungai/Pantai | | Degradasi lahan/hutan | | Masalah Sampah | | Degradasi pantai- | |
| | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi | Nilai | Deskripsi |
| 12.pengembangan kawasan industri kerajinan dan UMKM | -- | Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan | 0 | Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan kawasan permukiman | -- | Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri | 0 | Penurunan kualitas air laut disekitar-nya |
| 13.Pengembangan kawasan perikanan | -- | Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan | 0 | Tidak berdampak penting | - | Sampah dari aktivitas pasar ikan | -- | Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan |

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai | | |
|---|--|--|
| Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu |

Pengaruh kumulatif

1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut.
2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

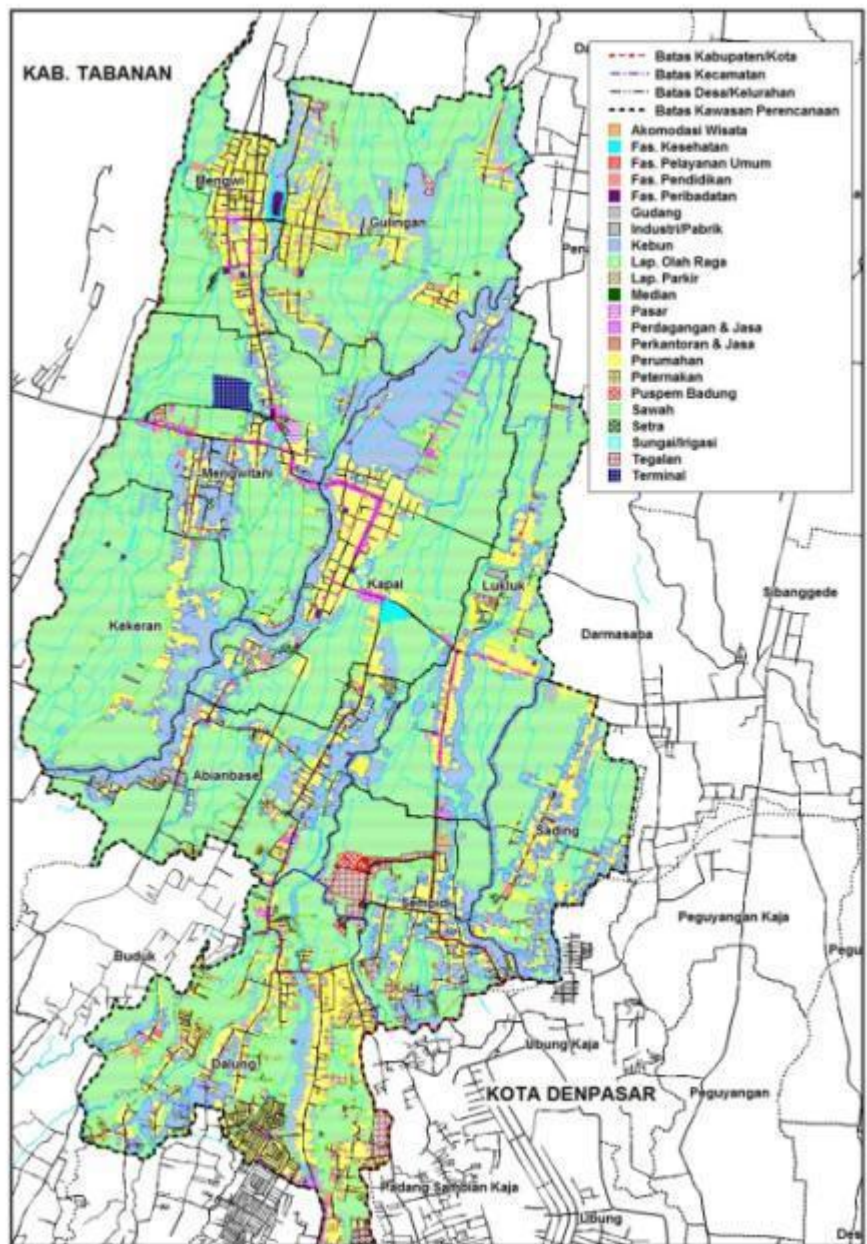
| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan | | |
|---|---|---|
| Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 4. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk. | | |

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan | | |
|---|--|--|
| Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi RTH. |

| | | |
|---|--|--|
| | 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau. | |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintahan dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presentase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir.</p> <p>2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.</p> | | |

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai | | |
|--|---|--|
| Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Pengembangan Agropolitan Petang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia. 2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas. 3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. | Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak. 2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir. | | |

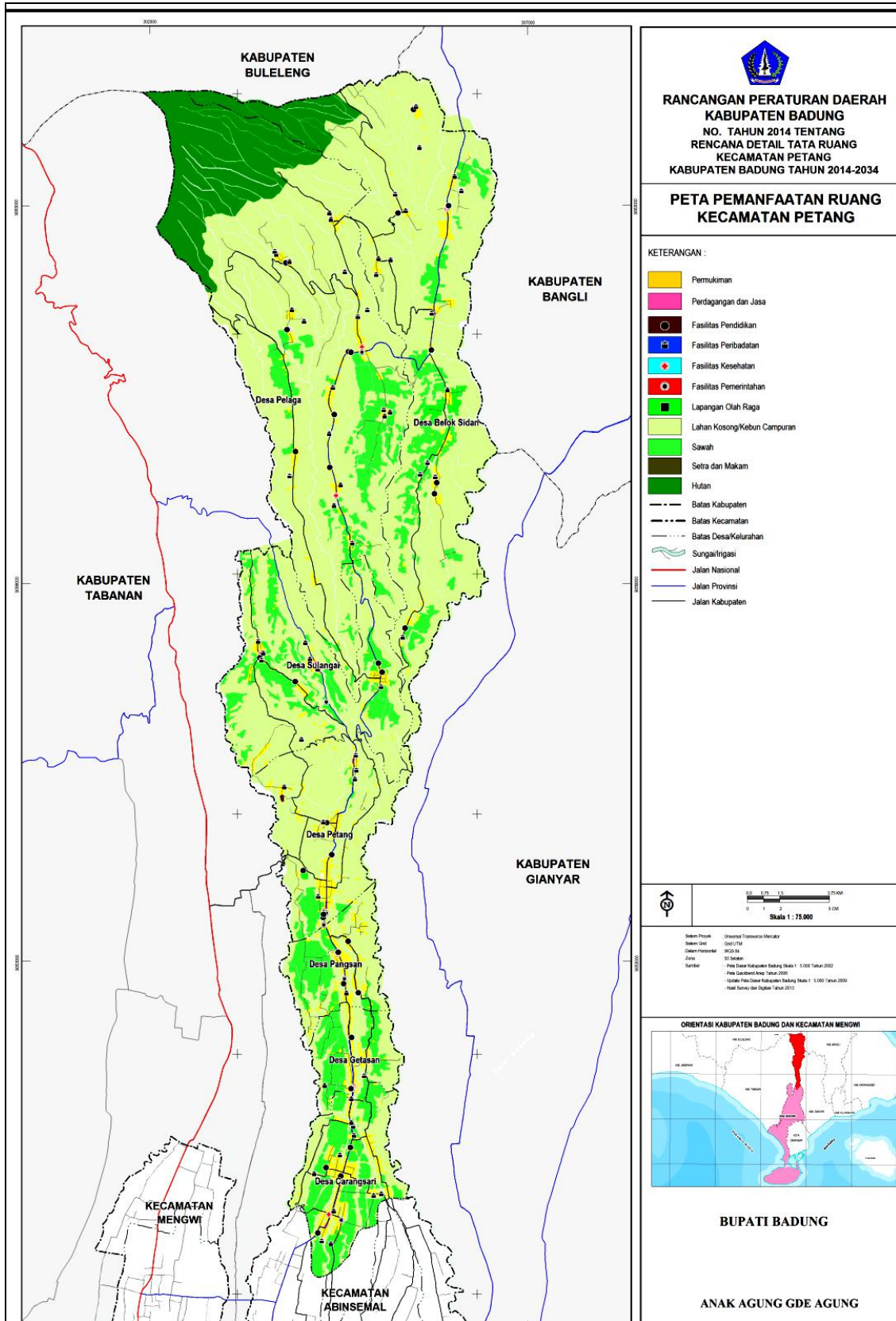
Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

| | | |
|--|--|--|
| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan | | |
| Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Pembangunan jalan bebas hambatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Cangu - Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. | | |

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

| | | |
|---|---|--|
| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan | | |
| Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Perkembangan pusat perdagangan dan jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan. 3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya. 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan. | | |

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

| | | |
|--|--|---|
| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai | | |
| Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Pengembangan Agropolitan Petang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku mutu yang ditentukan. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. 2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya. | | |

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

| | | |
|--|--|--|
| Isu Pembangunan Berkelanjutan : | | |
| Masalah Sampah | | |
| Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan. 2. Penyebabnya adalah aktivitas industri yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif. |
| Pengaruh kumulatif | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industry yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan. | | |

2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

| Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran air dan Masalah Sampah | | |
|---|--|--|
| Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan | | |
| Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan | | |
| Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 | Perkiraan Pengaruh | Uraian Adaptasi Mitigasi |
| Pengembangan kawasan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai 2. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar. 3. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi. 4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam. | Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan). |

Pengaruh kumulatif

3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.
4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Mitigasi | Alternatif |
| 1 | Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut). 4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/dayaampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan 4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. Penetapan ruang terbuka hijau |
| 2 | Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah. 2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. 3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan 4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan sawah abadi. 2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas 3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha 4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan |

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | |
|----|---|---|---|---|
| | | | Mitigasi | Alternatif |
| 3 | Pengembangan Agropolitan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap alih fungsi lahan 2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air 3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi. 4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas 2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan). 3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan. 4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani | <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat 2. Pengembangan pertanian organik |
| 4 | Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Menutup/mbatasi akses percabangan jalan TOL. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak. |
| 5 | Pengembangan Kawasan Industri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. penetapan kawasan industri khusus |

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| | | | Mitigasi | Alternatif |
| 6 | Pengembangan Kawasan Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan kawasan perikanan khusus |

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | | Rekomendasi |
|----|--|--|--|---|---|
| | | | Mitigasi | Alternatif | |
| 1 | Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan/pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau | Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya |

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | | Rekomendasi |
|----|--|---|---|--|---|
| | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | | <p>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p> | <p>3.Mendorong kepatuhan/ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4.Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p> | | |
| 2 | Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura | <p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p> | <p>1.Penetapan sawah abadi.</p> <p>2.Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3.Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga,perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4.Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p> | <p>1.integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p> | <p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p> |
| 3 | Pengembangan Agropolitan | <p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> | <p>1.Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> | <p>1.peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata</p> | <p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan</p> |

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | | Rekomendasi |
|----|---|---|--|--|--|
| | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | | <p>2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p> <p>4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif</p> | <p>2.penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3.penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4.integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p> | <p>pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2.pengembangan pertanian organik</p> | <p>iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p> |
| 4 | Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama | <p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak</p> | <p>1.Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> <p>2.menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.</p> | <p>1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.</p> | <p>Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung</p> |
| 5 | Pengembangan Kawasan Industri | <p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah</p> | <p>1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran</p> | <p>1.penetapan kawasan industri khusus</p> | <p>Penetapan kawasan industry khusus dengan kajian daya</p> |

| No | Rumusan Program Pembangunan | Dampak Program | Rumusan Mitigasi/Alternatif | | Rekomendasi |
|----|--------------------------------|---|---|---|--|
| | | | Mitigasi | Alternatif | |
| | | <p>2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.</p> <p>3. Dampak terhadap gangguan sistem subak.</p> <p>4. Dampak pencemaran lingkungan</p> <p>5. Dampak sosial-kemasyarakatan</p> | <p>2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.</p> <p>3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan</p> <p>4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.</p> | | <p>tamping dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat</p> |
| 6 | Pengembangan Kawasan Perikanan | <p>1. Dampak terhadap pencemaran pantai.</p> <p>2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya</p> <p>3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.</p> | <p>1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai.</p> <p>2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan</p> <p>3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai</p> <p>4. Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat</p> | 1. Pembangunan kawasan perikanan khusus | <p>Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.</p> |

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana*
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- 3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.
- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :
- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
 - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai "*dresta*", yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **9 (Sembilan) agenda Nawacita**.
- Nawacita** merupakan sembilan (9) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :
- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
- b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
- d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
- g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
- h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
- b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
- c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
- e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*
- f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama, dengan tujuan :

Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya toleransi hidup beragama
- b) Meningkatnya eksistensi adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- b) Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
- c) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan *clean government*, dengan tujuan :

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan professional, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
- b) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- c) Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
- d) Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, dengan tujuan :

1) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
- b) Meningkatnya kompetensi guru
- c) Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik
- d) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- e) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

2) Terwujudnya perlindungan sosial, dengan sasaran :

Terpenuhi akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :

Meningkatnya UMKM yang aktif, dengan sasaran :

Meningkatnya Koperasi yang sehat.

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda, dengan sasaran :

Meningkatnya penegakan perda

2) Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM
- b) Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah, dengan sasaran :

- a) Menurunnya Luas lahan kritis
- b) Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan
- c) Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d) Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran :

Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah, dengan tujuan :

1) Meningkatnya daya saing tenaga kerja, dengan sasaran :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

2) Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah, dengan sasaran :

Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah.

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya., dengan tujuan :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan**, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya produksi beras dan palawija
 - b) Meningkatnya produksi hasil peternakan
 - c) Meningkatnya produksi hasil perikanan
- 2) Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan**,
 - a) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
 - b) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
 - c) Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 3 – 5)

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 6 – 16)

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

| | |
|---|--|
| Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera | |
| Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya | 1. Meningkatnya toleransi hidup beragama |
| | 2. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya |
| Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 1. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat |
| | 2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah |
| | 3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat |
| | 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik |
| Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten |
| | 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah |
| | 3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN |
| | 4. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah |
| Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas. | 1. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar |
| | 2. Meningkatnya kompetensi guru |
| | 3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik |
| | 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat |
| | 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk |
| 2. Terwujudnya perlindungan sosial | 1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran |
| Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan | |
| Tujuan | Sasaran |

| | |
|---|--|
| 1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan | 1. Meningkatnya UMKM yang aktif |
| | 2. Meningkatnya Koperasi yang sehat |
| Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda | 1. Meningkatnya penegakan perda |
| 2. Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM | 1. Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM |
| | 2. Meningkatnya pengarusutamaan gender |
| Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan | 1. Menurunnya Luas lahan kritis |
| | 2. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan |
| | 3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |
| | 4. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis |
| 2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu | 1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana |
| Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja | 1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja |
| 2. Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah | 1. Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah |
| Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya | |
| Tujuan | Sasaran |
| 1. Meningkatnya ketersediaan pangan | 1. Meningkatnya produksi beras dan palawija |
| | 2. Meningkatnya produksi hasil peternakan |
| | 3. Meningkatnya produksi hasil perikanan |

| | |
|--|---|
| 2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan | 1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing |
| | 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung |
| | 3. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian |
| | 4. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari |

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka telah dirumuskan indikator kinerja tujuan dan sasaran beserta target selama kurun waktu lima tahun sebagaimana dituangkan pada Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

| Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---|---|--|--------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------|
| Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya | 1. Keamanan dan kenyamanan beribadah | 1. Jumlah agama yang dapat melaksanakan kegiatan keagamaan | 6 Agama | 1. Meningkatnya toleransi hidup beragama | 1. Jumlah Konflik SARA | Jumlah Konflik SARA | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | Disbud, Badan Kesbangpolinmas |
| | 2. Penguatan adat dan budaya | 1. Jumlah lembaga adat / tradisional yang dibina | 122 Desa Adat | 1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya | 1. Persentase awig-awig yang disempurnakan | Jumlah awig-awig yang disempurnakan -----x100% Jumlah awig-awig | 65.56% | 100.00% | - | - | - | Disbud |
| | | | | | 2. Persentase sekaa/ kelompok kesenian yang aktif | ■(Jumlah sekaa/kelompok@kesenian | 99.23% | 99.44% | 99.57% | 99.70 % | 99.87 % | Disbud |
| | | | | | 3. Jumlah sekaa kesenian baru yang terbentuk | Jumlah seka kesenian baru yang terbentuk | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Disbud |
| | | | | | 4. Persentase sanggar tari yang berijin | ■(Jumlah sanggar tari yang @ berijin)/(Jumlah sanggar | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | Disbud |
| | | | 214 Subak | | 5. Persentase lembaga subak yang masih aktif | ■(Jumlah lembaga subak@ yang masih aktif)/(Jumlah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dispenda |
| Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 1. Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | 1. Interpretasi Hasil Rata rata Nilai SKM Perangkat Daerah | Sangat Baik | 1. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | 1. Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Interpretasi Hasil Rata-rata Nilai SKM Perangkat Daerah | Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Bag. Ortal |
| | | | | 2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah | 1. Persentase penyelenggara pelayanan publik berkategori baik | Jumlah Penyelenggara pelayanan publik berkategori baik -----x100% Jumlah penyelenggara pelayanan publik | 50% | 59% | 68% | 77% | 86% | Bag. Ortal |
| | 2. Persentase Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan | 1. Jumlah Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan -----x100% jenis pelayanan dasar | 100% | 3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat | 1. Persentase capaian indikator SPM yang dipenuhi | Jumlah pernyataan standar SPM yg dipenuhi -----x 100% jumlah pernyataan standar SPM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Bag. Ortal |
| | | | | | 2. Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | 1. ■(Jumlah yang dilayani @akta capil)/■(Jumlah yang wajib dilayani @akta capil)x100% | 72% | 75% | 80% | 95% | 99% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------|--------------------------|---------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| | | | | | 2. | ■(Jumlah yang dilayani@ adm kependudukan)/■(Jumlah penduduk yang wajib@ dilayani | 87% | 90% | 93% | 96% | 99% | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | | | 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik | 1. Persentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK | ■(Jumlah pelayanan publik @berbasis TIK)/■(Jumlah | 40% | 65% | 75% | 90% | 100% | Dishub |

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|--|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1 Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional | 1 Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten | 1 Interpretasi AKIP Kabupaten | A (Memuaskan) | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten | 1 Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten | Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Tahun Ke - N | BB (Sangat Baik) | BB (Sangat Baik) | A (Memuaskan) | A (Memuaskan) | A (Memuaskan) | Bag. Ortal |
| | | | | | 2 Persentase SKPD yang Memperoleh Nilai AKIP Minimal BB | Jumlah SKPD yang Memperoleh nilai AKIP minimal BB -----x 100% | 73% | 75% | 77% | 80% | 85% | Bag. Ortal |
| | | | | 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah | 1. Opini BPK | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Bag. Keuangan |
| | | | | | 2. Persentase Laporan BMD SKPD yang akurat dan akuntabel | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang akurat dan akuntabel ----- x 100 % | 91% | 93% | 95% | 98% | 100% | Bag. Perlengkapan dan Aset Daerah |
| | | | | | 3. Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana hibah | Jumlah LPJ hibah yg diterima -----x100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Bag. Adm. Kesra |
| | | | | 3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN | 1. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah | ■(Jumlah THP yang berindikasi@ kerugian material)/■(Jumlah Temuan | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | Inspektorat |
| | | | | | 2. Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai WBK dan WBBM | 5 SKPD | 5 SKPD | 5 SKPD | 5 SKPD | 5 SKPD | Inspektorat |
| | | | | | 3. Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | Nilai Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | B | B | A | A | A | Inspektorat |

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|---|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| | | | | 4. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah | 1. Kapasitas Fiskal Daerah | Kategori Kapasitas Fiskal Daerah | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Dispenda |
| | | | | | 2. Persentase penetapan Peraturan Daerah | ■(Jumlah Perda yang @ditetapkan)/■(Jumlah Program @Legislasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Setwan, Bag. Hukum |
| | | | | | 3. Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya | Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya -----x100% Jumlah seluruh pegawai | 6% | 6.50% | 7% | 7.50% | 8% | BKD, Diklat |
| Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas. | 1. Tingkat kualitas pendidikan | 1. Tingkat Kelulusan Siswa Jenjang Pendidikan Dasar | 100% | 1. Meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar | 1 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar | ■(Jumlah siswa usia @(7 s.d. 12 tahun) +@(13 s.d. 15 tahun))/■(Jumlah penduduk usia @(7 s.d. 12 tahun) + @(13 s.d. 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Disdikpora |
| | | | | 2. Meningkatkan kompetensi guru | 1 Persentase guru yang bersertifikasi | ■(Jumlah guru yang @bersertifikasi @)/(Total | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | Disdikpora |
| | | | | 3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik | 1 Persentase gedung sekolah berkondisi baik | ■(Jumlah gedung sekolah@ berkondisi baik)/(Jumlah | 78% | 81% | 85% | 90% | 95% | Disdikpora |
| | 2. Angka Umur Harapan Hidup (UHH) | 1. Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidupnya. | 75 Tahun | 1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1 Persentase kekurangan gizi pada anak balita | ■(Jumlah Balita 0 – 59 bulan @yang mengalami gizi kurang | 12.3% | 12.10% | 11% | 10% | 10% | Diskes, RSUD |
| | | | | | 2 Angka kematian balita (AKABA) | ■(Jumlah kematian penduduk@ usia 0–59 bulan@)/■(Jumlah penduduk@ usia 0–59 bulan | 3.74 per 1000 Kelahiran Hidup | 3.37 per 1000 Kelahiran Hidup | 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup | 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup | 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup | Diskes, RSUD |
| | | | | | 3 Angka kematian Ibu Melahirkan (AKI) | ■(Jumlah kematian ibu @melahirkan)/(Jumlah | 93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 85.00 per 100.000 Kelahiran Hidup | 85.00 per 100.000 Kelahiran Hidup | Diskes, RSUD |
| | | | | | 4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) | Jumlah penderita DBD dibagi Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama kali 100.000 | 275 per 100.000 penduduk | 250 per 100.000 penduduk | 225 per 100.000 penduduk | 200 per 100.000 penduduk | 200 per 100.000 penduduk | Diskes, RSUD |
| | 3. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | 1. Jumlah peserta KB aktif -----x100% Jumlah Pasangan Usia Subur | 77.24% | 1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | 1 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita pada usia suburnya (15-49 tahun) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.00 | BKBKS |

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|---|--|-----------------------|--|--|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 2. Terwujudnya perlindungan sosial | 1. Cakupan perlindungan sosial | 1. Cakupan RTS yang mendapatkan perlindungan sosial | 100% | 1 Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran | 1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan bantuan rumah sehat | Jumlah RTS yang menerima bantuan rumah sehat -----x100% Jumlah total RTS yang seharusnya menerima bantuan rumah sehat | 66,05% | 74,54% | 83,04% | 91,51% | 100% | Disosnaker |
| Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1 Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan | 1 Persentase UMKM yang aktif | ■(Jumlah UMKM@yang aktif @)/■(Jumlah UMKM@yang ada | 100% | 1 Meningkatnya UMKM yang aktif | 1 Persentase UMKM yang aktif | (Jumlah UMKM yang aktif)/(Jumlah UMKM yang ada | 47,56% | 56,01% | 65,51% | 75,72% | 86,99% | Diskoperindag |
| | 2 Persentase Koperasi yang sehat | (Jumlah Koperasi yang sehat)/(Jumlah Koperasi yang ada)x100% | 100% | 1 Meningkatnya Koperasi yang sehat | 1 Persentase Koperasi yang Sehat | (Jumlah Koperasi yang sehat)/(Jumlah Koperasi yang | 82,77% | 83,44% | 84,06% | 84,64% | 85,17% | Diskoperindag |
| Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda | 1 Persentase pelanggaran Perda | 1 Persentase pelanggaran Perda | 10% | 1 Meningkatnya penegakan perda | 1 Persentase penegakan perda | ■(Jumlah penyelesaian @penegakan perda)/(Jumlah pelanggaran perda)x100% | 45% | 55% | 65% | 75% | 90% | Satpol PP |
| 2 Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM | 1 Persentase Permasalahan Hukum dan HAM yang tertangani | 1 Jumlah permasalahan Hukum yang ditangani pada akhir RPJM -----x100% Jumlah permasalahan hukum yang masuk pada akhir RPJM | 100% | 1 Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | 1 Persentase penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | Jumlah permasalahan Hukum yang ditangani pada tahun ke-n -----x100% Jumlah permasalahan hukum yang masuk pada tahun ke-n | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPP, Bag. Hukum dan HAM |
| | 2 Indeks Pembangunan Gender | 1 Nilai IPG | 75,53% | 1 Meningkatnya pengarusutamaan gender | 1 Indeks Pembangunan Gender | (Xede(1) + Xede(2) + linc-dis) ----- 3 Xede(1) = Xede untuk usia harapan hidup Xede(2) = Xede untuk pengetahuan/pendidikan linc-dis = indeks distribusi pendapatan | 75,49 | 75,5 | 75,51 | 75,52 | 75,53 | KPP |

| Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan | 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 1 Nilai IKLH | >47 | 1 Menurunnya Luas lahan kritis | 1 Persentase Luas lahan kritis | $(\text{Luas lahan kritis}) / (\text{Total luas lahan}) \times 100\%$ | 10,42 % | 10,18 % | 9,94 % | 9,70 % | 9,46 % | Distanbunhut |
| | | | | 2 Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan | 1 Indeks pencemaran air | Nilai Indeks Pencemaran Air | > 37 | > 37 | > 37 | > 37 | > 37 | BLH |
| | | | | | 2 Indeks pencemaran udara | Nilai Indeks Pencemaran Udara | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | BLH |
| | | | | | 3 Indeks tutupan lahan | Nilai Indeks Tutupan Hutan | >22 | >22 | >22 | >22 | >22 | BLH |
| | | | | 3 Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 Persentase Cakupan pelayanan sampah | $\frac{\text{Cakupan wilayah yang terlayani}}{\text{Luas wilayah pelayanan}} \times 100\%$ | 37% | 42% | 47% | 52% | 57% | DKP |
| | | | | | 2 Persentase Sampah yang Tertangani | $\frac{\text{Jumlah volume sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah produksi sampah}} \times 100\%$ | 89.8% | 91.1% | 92.1% | 93.3% | 94.4% | DKP |
| | | | | 4 Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1 Persentase RTR kawasan strategis | $\frac{(\text{Jumlah RTR kawasan strategis})}{(\text{Jumlah Kawasan strategis})}$ | 68,51% | 72,01% | 75,51% | 79,01% | 82,51% | Bappeda Litbang |
| 2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu | 1 Cakupan penanggulangan bencana | 1 Persentase penanggulangan bencana | 100% | 1 Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana | 1 Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | $\frac{\text{Kapasitas yang tersedia}}{\text{Kapasitas yang dibutuhkan}} \times 100\%$ | 55.45% | 69.37% | 79.40% | 89.13% | 100% | BPBD |
| Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah | | | | | | | | | | | | |
| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja | 1 Tingkat partisipasi angkatan kerja | 1 $\frac{(\text{Jumlah @penduduk@ angkatan@ kerja})}{(\text{Jumlah @penduduk@ usia kerja})}$ | 75.00% | 1 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja | 1 Persentase tenaga kerja pariwisata yang mendapatkan sertifikasi uji kompetensi | $\frac{(\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata @yang memperoleh sertifikasi @uji})}{(\text{Total tenaga kerja pariwisata @yang memenuhi syarat @uji})}$ | 35,74% | 41,39% | 47,48% | 54,00% | 60,96% | Disosnaker |
| 2 Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah | 1 Infrastruktur wilayah yang handal | 1 Cakupan layanan infrastruktur wilayah | 100% | 1 Meningkatkan komponen infrastruktur dasar wilayah | 1 Persentase Ruas Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | $\frac{(\text{Panjang ruas jalan kabupaten @dalam kondisi baik@})}{(\text{Total panjang ruas@ jalan})}$ | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | DBMP |

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|---|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| | | | | | 2 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ | 91.90% | 92.90% | 94.40% | 96.50% | 97.20% | DCK |
| | | | | | 3 Persentase Penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik | $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ | 87.43% | 90.43% | 93.43% | 96.43% | 100.00% | DCK |
| | | | | | 4 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana | $\frac{\text{Jumlah rehab rumah}}{\text{Jumlah Korban}} \times 100\%$ | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | DCK |
| | | | | | 5 Persentase jaringan irigasi berkondisi baik | $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi}} \times 100\%$ | 95,78% | 96,83% | 97,89% | 98,94% | 100.00% | DBMP |
| | | | | | 6 Persentase zona rawan banjir dan genangan | $\frac{\text{Luas zona rawan banjir dan genangan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Badung}} \times 100\%$ | 0,48% | 0,36% | 0,24% | 0,12% | - | DBMP |

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 1 Meningkatnya ketersediaan pangan | 1 Persentase ketersediaan pangan | $1 \frac{\text{Jumlah @persediaan @efektif@ pangan}}{\text{Jumlah}} \times 100\%$ | 100% | 1 Meningkatnya produksi beras dan palawija | 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Beras | $\frac{\text{Jumlah Produksi Beras}}{\text{Jumlah Kebutuhan Beras}} \times 100\%$ | 87,50% | 90,00% | 93,00% | 97,00% | 100% | Distanbunhut |
| | | | | | 2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Palawija | $\frac{\text{Jumlah Produksi Palawija}}{\text{Jumlah Kebutuhan Palawija}} \times 100\%$ | 88,00% | 91,00% | 94,00% | 97,50% | 100% | Distanbunhut |
| | | | | 2 Meningkatnya produksi hasil peternakan | 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan daging sapi | $\frac{\text{Jumlah Produksi Daging sapi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Daging}} \times 100\%$ | 34.00% | 36.00% | 38.00% | 40.00% | 42.00% | Disnakanlut |
| | | | | 3 Meningkatnya produksi hasil perikanan | 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan ikan | $\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Ikan}} \times 100\%$ | 32.15% | 32.20% | 32.25% | 32.30% | 32.35% | Disnakanlut |

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Formula | Target Kinerja Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Formula | Target Kinerja Sasaran / Utama | | | | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---|--------------------------|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------|
| | | | | | | | Th. 2017 | Th. 2018 | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 | |
| 2 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan | 1 Kunjungan wisatawan | 1 Jumlah kunjungan wisatawan | 36 DTW | 1 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing | 1 Persentase DTW yang ditata | $(\text{Jumlah DTW yang tertata}) / (\text{Jumlah total DTW}) \times 100\%$ | 61% | 64% | 66% | 69% | 72% | Diparda |
| | | | | 2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung | 1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung | $\frac{\text{Jumlah kunjungan tahun } n-(n-1)}{\text{Jumlah kunjungan tahun } (n-1)} \times 100\%$ | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Diparda |
| | | | | 3 Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian | 1 Persentase desa wisata yang aktif | $\frac{\text{Jumlah desa wisata yang aktif}}{\text{Jumlah desa wisata yang ada}} \times 100\%$ | 36.36% | 45.45% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | Diparda |
| | | | | 4 Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari | 1 Persentase kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari | $\frac{\text{Jumlah kawasan yang ditata}}{\text{Jumlah kawasan yang ada}} \times 100\%$ | 16,67% | 32,33% | 50% | 66,67% | 100% | Disnakanlut |

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi pembangunan daerah.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Strategi :

- a. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama.
- b. Meningkatkan peran subak dalam mengembangkan nilai budaya.
- c. Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- d. Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya.
- e. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima.
- f. Melindungi aset pura (pelaba pura)
- g. meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terkomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk.
- c. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK).
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan.
- e. Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.
- f. Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- g. Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat.
- h. Meningkatkan Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu .

- i. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan.
 - j. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik.
 - k. Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran.
 - l. Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran.
 - m. Mempercepat penerapan SPM di daerah.
 - n. Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik.
 - o. Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak.
 - q. Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - r. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Strategi :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik.
- b. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- c. Membuat perencanaan yang baik.
- d. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .
- f. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD.
- g. Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah .
- h. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.
- i. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- j. Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).
- k. Mewujudkan PNS yang berkualitas.
- l. Mengkomunikasikan secara komperehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan.
- m. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Strategi :

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - b. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar
 - c. Penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
 - d. Peningkatan guru yang bersertifikasi.
 - e. Penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
 - f. Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik.
 - g. Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan.
 - h. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
 - i. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - j. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
 - k. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - l. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - m. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - n. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - o. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
 - p. Meningkatkan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS).
 - q. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat.
 - r. Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin.
 - s. Memperluas Akses Perlindungan Sosial.
 - t. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial.
 - u. Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial
5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Strategi :

- a. Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM.
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Strategi :

- a. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.
- b. Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM.
- d. Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan.
- e. Memasyarakatkan kesetaraan gender.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Strategi :

- a. Menggalakkan budaya menanam pohon.
- b. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan.
- c. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- d. Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup.
- f. Peningkatan Pengelolaan kebersihan.
- g. Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- h. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Strategi :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- b. Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Assesor.
- c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
- d. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
- e. Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
- f. Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
- g. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- h. Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)

- i. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - j. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.
 - k. Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.
 - l. Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Strategi :

- a. Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian
- b. Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung
- c. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan
- d. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi
- e. Melaksanakan pemupukan berimbang
- f. Menyediakan sarana produksi yang bermutu.
- g. Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
- h. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- i. Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian
- j. Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi.
- k. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis
- l. Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.
- m. Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
- o. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung
- p. Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya.
- r. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi
- s. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.

- t. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi
- u. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.
- v. Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- w. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani
- x. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- y. Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- z. Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- aa. Pengembangan Teknologi Peternakan
- bb. Memetakan potensi peternakan di kabupaten badung
- cc. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan
- dd. Memetakan potensi perikanan dan kelautan di kabupaten badung
- ee. Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif
- ff. Melaksanakan penataan DTW.
- gg. Memantapkan kelembagaan pengelola DTW.
- hh. Meningkatkan pemasaran pariwisata.
- ii. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
- jj. Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata.
- kk. Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari

6.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama..

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- b. Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- c. Revitalisasi adat, dan karya seni .
- d. Restorasi warisan budaya daerah.
- e. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.

- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
 - h. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
 - i. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral
2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
 - b. Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif.
 - d. Mempercepat proses pelayanan.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.
 - f. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - g. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
 - h. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan .
 - i. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan.
 - j. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
 - k. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - l. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - m. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - n. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
 - o. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
 - q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek.
 - b. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- c. Meningkatkan integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
 - d. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan.
 - e. Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
 - f. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - h. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
 - i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
 - j. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.
 - k. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
 - l. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 - m. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
 - n. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung.
 - o. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
 - p. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
- Arah Kebijakan :
- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
 - b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
 - c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
 - d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
 - e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
 - f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
 - h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
 - i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
 - j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.

- k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- l. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- n. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- o. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- p. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- q. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- r. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- s. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- t. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- u. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- v. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- w. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
- x. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- y. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- z. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- aa. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
- bb. Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi.
- cc. Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja.
- dd. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- ee. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
- ff. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- gg. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- hh. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
- b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
- c. Penegakan Hukum dan HAM.
- d. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- n. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- o. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

- p. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
 - q. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
 - r. Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
 - s. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
 - b. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
 - c. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor.
 - d. Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama
 - e. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
 - f. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
 - g. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
 - h. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
 - i. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
 - j. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - k. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
 - l. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
 - m. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a. Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung
- b. Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah
- c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
- d. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air
- e. Mempertahankan kesuburan tanah
- f. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
- h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.

- i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- j. Meningkatkan kesejahteraan petani
- k. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- l. Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.
- m. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga
- o. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka
- p. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian
- r. Meningkatkan produksi beras dan palawija
- s. Memantapkan program Badung go organik
- t. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- u. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani
- v. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani
- w. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- x. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- y. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
- z. Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- aa. Meningkatkan produksi ikan
- bb. Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah
- cc. Mengembangkan pariwisata alternatif
- dd. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- ee. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- ff. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW.
- gg. Peningkatan SDM Pengelola DTW.
- hh. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- ii. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- jj. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- kk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- ll. Penataan desa wisata.
- mm. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- nn. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- oo. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Badung

(HAL 12 – 24)

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Badung

| Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|------|------|------|------|
| Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya | 1 Meningkatkan toleransi hidup beragama | 1 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama | 1. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Meningkatkan eksistensi adat dan budaya | 1 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya | 1 Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah | 1 Revitalisasi adat, dan karya seni | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Restorasi warisan budaya daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya | 1. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima | 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 5 Melindungi aset pura (pelaba pura) | 1 Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral | 1 meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------|------|------|------|------|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | 1 Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah | 1 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk | 1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) | 1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Meningkatkan kualitas pelayanan | 1 Menciptakan suatu kondisi yang kondusif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Mempercepat proses pelayanan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat | 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan | 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 6 Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat | 1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 7 Meningkatkan Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu | 1. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan | 1 Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan | √ | √ | √ | √ | √ | | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--------|---|---|---|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 9 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik | 1 Terselenggaranya pelayanan publik yang prima | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3 Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat | 1 Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran | 1 Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran | 1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Mempercepat penerapan SPM di daerah | 1 Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 4 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik | 1 Menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik | 1 Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan | 1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak | 1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah | 1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi | 1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi | √ | √ | √ | √ | √ |

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|---|---|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten | 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik | 1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 1. Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Membuat perencanaan yang baik | Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--|---|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah | 1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah . | 1. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD | 1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah | 1. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah. | 1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
| | 3 Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN | 1 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan | 1. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 4 Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah | 1 Memaksimalkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (<i>sustainable development</i>) | 1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 Mewujudkan PNS yang berkualitas | | | 1. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan | | | 1 Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 4 Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan | 1 Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik | √ | √ | √ | √ | √ |
| Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas | 1 Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar | 1. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal | 1. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 5 Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar | 1 Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu | 1 Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | 2 Meningkatnya kompetensi guru | 1 Peningkatan guru yang bersertifikasi | 1 Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik | 1 pemenuhan sarana prasaran workshop tenaga pendidik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3 Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik | 1 Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik | 1 Pemenuhan kualitas gedung pendidikan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 4 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan | 1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi 2 Menerapkan ISO 9001 : 2008 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--------|---------|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas | 1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (<i>continuum of care</i>). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat | 1 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas | 1 Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile</i>), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|---|--|---|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 6 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 7 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis. | 1 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 8 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi. | 1 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (<i>evidence based</i>). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 5 Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk | 1 Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas | 1. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS) | 1 Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2 Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat | 1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 Terwujudnya perlindungan sosial | 1 Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran | 1 Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin | 1 Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Memperluas Akses Perlindungan Sosial | 1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial | 1 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial | 1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial | √ | √ | √ | √ | √ |
| Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan | 1. Meningkatnya UMKM yang aktif | 1. Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM | 1. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|---|---|---|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 2 Meningkatkan Koperasi yang sehat | 1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi | 1 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda | 1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah | 1. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah | 1. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa | 1 Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM | 1. Meningkatnya Penanganan permasalahan Hukum dan HAM | 1. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | 1. Penegakan Hukum dan HAM | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Meningkatnya pengarusutamaan gender | 1 Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan | 1. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Memasyarakatkan kesetaraan gender | 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan | √ | √ | √ | √ | √ |
| Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana | | | | | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan | 1. Menurunnya luas lahan kritis | 1. Menggalakkan budaya menanam pohon | 1. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan | 1 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan | 1 Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup | | 2 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3 Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup | | 1. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 1. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | | |
|--|--|---|--|---|------|------|------|------|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 4. Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup | 1. Peningkatan sistem informasi lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2. Meningkatkan kualitas database lingkungan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1. Peningkatan Pengelolaan kebersihan | 1. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2. Meningkatkan pengelolan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 4. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1. Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 1. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | 1. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu | 1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana | 1. Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | 2. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 3. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat | | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5. Penanganan pasca bencana yang komprehensif | | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana | | | | - | √ | √ | √ | √ | |

| Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|------|------|------|------|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja | 1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja | 1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja | 1. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor | 1. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis | 1 Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Mengembangkan potensi kewirausahaan | 1 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri | 1 Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 6 Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri | 1 Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 7 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | 1 Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat) | 1 Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat) | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 2 Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah | 3 Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah | 1. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. | 1. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--------|---------|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 2. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur. | 1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman | 1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas | 1. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas | √ | √ | √ | √ | √ |

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Meningkatnya ketersediaan pangan | 1 Meningkatkan produksi beras dan palawija | 1. Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian | 1. Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung | | √ | | | |
| | | 2 Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung | 1 Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan | 1 Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 4 Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi | 1 Optimalisasi ketersediaan sumber daya air | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 5 Melaksanakan pemupukan berimbang | 1 Mempertahankan kesuburan tanah | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 6 Menyediakan sarana produksi yang bermutu. | 1 Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 7 Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian. | 1 Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 8 Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. | 1 Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 9 Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian | 1 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 10 Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi. | 1 Meningkatkan kesejahteraan petani | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 11 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis | 1 Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani. | √ | √ | √ | √ | √ |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | |
|--------|---------|--|---|-------|------|------|------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 12 Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata. | 1 Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata. | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 13 Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah. | 1 Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah. | | √ | | | |
| | | 14 Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi. | 1 Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 15 Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung | 1. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 16 Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan | 1. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan | | √ | √ | √ | √ |
| | | 17 Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. | 1. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 18 Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi | 1. Meningkatkan produksi beras dan palawija | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 19 Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. | 1. Memantapkan program Badung go organik | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 20 Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming). | 1. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming). | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 21 Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani | 1. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 22 Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | 1 Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani | √ | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---|
| | | 23 Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian | 1 Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Tahun | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2 Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan | 2 Meningkatnya produksi hasil peternakan | 24 Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi. | 1 Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi. | | | | | √ | |
| | | 1 Pengembangan Teknologi Peternakan | 1. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 2 Memetakan potensi Peternakan di Kabupaten Badung | 1 Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 3 Meningkatnya produksi hasil perikanan | 1 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan | 1. Meningkatkan produksi ikan | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 3 Meningkatnya produksi hasil perikanan | 2 Memetakan potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Badung | 1 Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 1 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing | 1 Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif | 1 Mengembangkan pariwisata alternatif | √ | √ | √ | √ | √ |
| | 2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten badung | 1 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing | 2 Melaksanakan penataan DTW | 1. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | 3 Memantapkan kelembagaan pengelola DTW | 2 Penataan fasilitas penunjang DTW | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | | | 1 Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW | √ | √ | √ | √ | √ |
| | | 2 Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten badung | 1 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing | 2 Peningkatan SDM Pengelola DTW | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 Meningkatkan pemasaran pariwisata | | | | 1 Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 Meningkatkan kualitas industri pariwisata | | | 2 Publikasi pariwisata dalam berbagai media | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian | 1 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing | 1 Meningkatkan pemasaran pariwisata | 1 pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | 3 Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata | 1 Penataan desa wisata | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 2 peningkatan SDM pengelola desa wisata | √ | √ | √ | √ | √ | |
| | | | 3 mengembangkan paket wisata berbasis pertanian | √ | √ | √ | √ | √ | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | 4 Meningkatnya Jumlah kawasan pesisir yang lestari mendukung pariwisata bahari | 1 Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari | 1 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir | √ | √ | √ | √ | √ |
|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan arahan yang lebih jelas dan nyata dari setiap strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung, sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Bali dan sasaran pembangunan jangka menengah Nasional.

Program-Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pengembangan Nilai budaya.
- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- c. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- b. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- e. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik.
- f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- g. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- h. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal.

- j. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.
- k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Penataan Daerah Otonomi Baru.
- b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan.
- c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat.
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik di Wilayah Kab. Badung.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- h. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- c. Program Pendidikan Non Formal.
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi Dan Teknologi
- f. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- g. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
- h. Program Pengelolaan Blud Rsud
- i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
- j. Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak.
- k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- m. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- n. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- o. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
- p. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- q. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- r. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu Dan Jaringannya.
- s. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- t. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- u. Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.
- v. Program Pengawasan Obat Dan Makanan.
- w. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- x. Program Keluarga Berencana.
- y. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- z. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga.
- aa. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
- bb. Program Pembinaan Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga.
- cc. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- dd. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- ee. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM.
- b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM.
- d. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif.
- e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi
- g. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- h. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- i. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Program Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan.
- d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- e. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
- f. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan.
- b. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- d. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Perusakan Lingkungan Hidup.
- f. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- g. Program Pembangunan Infrastruktur Persampahan.
- h. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Program Perencanaan Tata Ruang.
- j. Program Pencegahan Dini Dan Kesiapsiagaan.
- k. Program Penanganan Darurat Bencana.
- l. Program Pemulihan Pasca Bencana.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya.
- e. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- f. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- h. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- i. Program Penyehatan Lingkungan.
- j. Program Pengembangan Kawasan Permukiman.
- k. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- l. Program peningkatan pelayanan angkutan.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- b. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.
- c. Program Pengembangan Agribisnis.

- d. Program Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh/ Perkebunan Lapangan.
- f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- i. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
- j. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertenakan.
- k. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
- l. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH.
- m. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- n. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
- o. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- p. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- q. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- r. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.
- s. Program Pemanfaatan Ruang.
- t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- u. Program Pengembangan Kemitraan.
- v. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- w. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata.
- x. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.
- y. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata.

Keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Badung

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya toleransi hidup beragama | 1 Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama | 1 Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan | 1 Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan 2 Desa Adat yang dibina 3 Kehadiran tokoh agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan | 108 upacara keagamaan 10 Desa Adat 100% | 114 upacara keagamaan 122 Desa Adat 100% | 1 Program Pengembangan Nilai Budaya | Kebudayaan | Disbud |
| 2. | Meningkatnya eksistensi adat dan budaya | 1 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya 2 Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah 3 Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya | 1 Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal 1 Revitalisasi adat, dan karya seni 2 Restorasi warisan budaya daerah 1 Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya | Persentase lembaga subak yang masih aktif 1 Karya Seni yang di revitalisasi 1 Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2 Situs cagar budaya yang teridentifikasi 1 Jumlah sekaa tabuh yang dibina | 100% 86 karya seni 70 cakep 52 situs 5 Sekaa | 100% 123 karya seni 615 cakep 58 situs 25 sekaa | 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Nilai Budaya | Fungsi Lainnya Kebudayaan Fungsi Lainnya | Dispenda Disbud Kecamatan Abiansemal, Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan, Mengwi, Petang |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|--|--|---|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba | 1 Jumlah kegiatan seni yang mengikuti lomba 2 Jumlah prestasi di tingkat kabupaten di bidang seni dan budaya yang berhasil diraih 3 Jumlah prestasi dibidang seni dan kebudayaan yang berhasil diraih di tingkat kabupaten 4 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya 5 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya 6 Jumlah Prestasi yang diperoleh di Tingkat Kabupaten di Bidang Seni dan Budaya | 10 | 10 | 1 Program Pengembangan Nilai Budaya | Fungsi Lainnya | 1 Kecamatan Abiansemal |
| | | | | | 20 | 60 | 2 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Fungsi Lainnya | 2 Kecamatan Kuta |
| | | | | | 9 | 50 | 3 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Fungsi Lainnya | 3 Kecamatan Kuta |
| | | | | | 14 | 22 | 4 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Fungsi Lainnya | 4 Kecamatan Kuta Selatan |
| | | | | | 6 | 30 | 5 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Fungsi Lainnya | 5 Kecamatan Mengwi |
| | | | | | 15 | 20 | 5 Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Fungsi Lainnya | 6 Kecamatan Petang |
| | | 5 Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima | 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima | 1 Desa Adat yang dibina | 10 Desa adat | 122 Desa adat | 1 Program Pengelolaan kekayaan budaya | Kebudayaan | 1 Disbud |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6 Melindungi aset pura (pelaba pura) | 1 Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura) | 1 Desa Adat yang dibina | 10 Desa adat | 122 Desa adat | 1 Program Pengembangan Nilai budaya | Kebudayaan | 1 Disbud |
| | | 7 Meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral | 1 meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral | 1 Desa Adat yang dibina | 10 Desa adat | 122 Desa adat | 1 Program Pengembangan Nilai budaya | Kebudayaan | 1 Disbud |
| 3 | Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | 1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif | 1 Inteprestasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Baik | Sangat Baik | Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 4 | Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah | 1 Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk | 1 Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | 93,12% | 99% | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | 2 Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) | Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan | 93,12% | 99% | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | 1 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| | | 3 Meningkatkan kualitas | 1 Menciptakan suatu | 1 Tingkat kepuasan | 79,76 | 90% | 1 Program Peningkatan | Urusan | 1 Kantor |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <p>elayanan</p> <p>4 Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat</p> <p>5 Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan</p> <p>6 Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat</p> | <p>kondisi yang kondusif</p> <p>2 Mempercepat proses pelayanan</p> <p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain</p> <p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain</p> <p>1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan</p> | <p>masyarakat</p> <p>1 Prosentase penggunaan angkutan umum</p> <p>1 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>2 IKM</p> <p>3 IKM</p> | <p>37.54%</p> <p>81</p> <p>80</p> <p>81.73</p> | <p>48.85%</p> <p>90</p> <p>81,55</p> <p>-</p> | <p>Pengembangan Sistem</p> <p>Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan</p> <p>1 Program peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>1 Program peningkatan pelayanan angkutan</p> <p>1 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</p> <p>2 Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>3 Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> | <p>Perpustakaan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> <p>Fungsi Lainnya</p> <p>Fungsi Lainnya</p> <p>Fungsi Lainnya</p> | <p>Perpustakaan</p> <p>Daerah</p> <p>1 Dishub</p> <p>1 Dishub</p> <p>1 Kecamatan Abiansemal</p> <p>2 Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>3 Kecamatan Kuta Utara</p> <p>4 Kecamatan Petang</p> |
| | | | | 4 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) | 80,50 | 81.55 | Program Peningkatan PengembanganSistim | Fungsi Lainnya | 4 Kecamatan Petang |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|---|---|---|-----------------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat | 7 Meningkatkan Persentase Izin dan Non Non Izin yang terbit tepat waktu | 1 Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) | 1 Persentase Izin dan non izin yang terbit tepat waktu | 90% | 98% | Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik | Fungsi Lainnya | 1 BPPT |
| | | | 2 Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan | 2 Persentase Izin dan non izin yang dapat diproses melalui sistem informasi | 5% | 40% | 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Fungsi Lainnya | 1 BPPT |
| | | 8 Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan | 1 Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan | 1 Prosentase pengaduan yang dapat ditangani | 100% | 100% | 1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | Fungsi Lainnya | 1 BPPT |
| | | 9 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara pelayanan publik | 1 Terselenggaranya pelayanan publik yang prima | 1 Persentase penyelenggara pelayanan publik yang berkategori baik | 44% | 86% | 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| | | 1 Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran | 1 Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran | 1 Persentase capaian indikator SPM yang dilaksanakan | 79% | 92.25% | 1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 Dinas Pemadam Kebakaran |
| | 2 Meningkatkan kualitas aparatur Pemadam Kebakaran | 1 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur | | | | | | | |
| | 3 Mempercepat penerapan SPM di Daerah | 1 Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar | 1 Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi | 75% | 100% | 2 Program Peningkatan kualitas pelayanan minimal | Fungsi Lainnya | 1 Bappeda dan Pengampu SPM | |
| 6 | Meningkatnya pemanfaatan | 1 Menerapkan teknologi informasi komunikasi | 1 Meningkatkan SDM dan sarana prasarana | 1 Jumlah layanan yang berbasis TIK | 4 | 9 | 1 Penataan administrasi kependudukan | Fungsi Lainnya | 1 Kecamatan Abiansemal |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|---|---|--|-----------------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | teknologi informasi dalam pelayanan publik | dalam pelayanan publik | berbasis teknologi informasi | <p>2 Jumlah layanan berbasis TIK</p> <p>3 Jumlah ijin UMKM yang dikeluarkan tepat waktu</p> <p>4 Jumlah layanan berbasis TIK</p> | 9 | 9 | 2 Program Penataan Administrasi kependudukan | Fungsi Lainnya | 2 Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, Kuta Selatan, Mengwi |
| | | 2 Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan | 1 Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan | 1 IKM | 30 | 105 | 3 Program Penataan Administrasi kependudukan | Fungsi Lainnya | 3 Kecamatan Kuta Selatan |
| | | 3 Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak | 1 Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat | 1 Terpublikasinya berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan | 7 | 8 | 4 Program Penataan Administrasi kependudukan | Fungsi Lainnya | 4 Kecamatan Petang |
| | | | | | 80 | 81,55 | 1. Program Peningkatan PengembanganSistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Fungsi Lainnya | 1 Kecamatan Kuta |
| | | | | | 3036 adv | 3800 adv | 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Humas dan protokol |
| | | | | 2 Terlatihnya Tenaga Kehumasan/PPID yang Profesional Di Kabupaten Badung | 28 orang | 30 orang | 2 Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Humas dan protokol |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|---|---|-------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten | 4 Melayani permintaan informasi masyarakat mengenai program dan kegiatan pemerintah daerah | Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang ceper, tepat dan akurat | 1 Terlaksananya peliputan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan | 250 liputan 3 lipsus | 300 Liputan 3 Liputan Khusus 12 Dialog Interaktif 15 Greeting | 1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Humas dan protokol |
| | | 5 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi | 1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi | 1 Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK | 0% | 100 % | 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Komunikasi dan Informatika | 1 Dishub |
| | | | | 2 Jumlah objek wisata yang menyediakan Wifi gratis | 0 | 32 | 2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Komunikasi dan Informatika | 2 Dishub |
| | | | | 3 Jumlah CCTV yang terpasang pada tempat-tempat strategis | 15 | 529 | 3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Komunikasi dan Informatika | 3 Dishub |
| | | 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik | 1 Menigkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek | 1 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung | 2,5 | 3,3 | 1 Penataan Daerah Otonomi Baru | Fungsi Lainnya | 1 Bagian APU |
| | | | 2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung | 2,5 | 3,3 | 1 Penataan Daerah Otonomi Baru | Fungsi Lainnya | 2 Bagian APU |
| | | 2 Meningkatkan kapasitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) | 1. Meningkatkan Inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten | 1. Inteprestasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten | BB | A | 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | Fungsi Lainnya | 1 Seluruh perangkat daerah |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|---|--|---|-----------------|---------------|--|----------------------------|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah | 3 Membuat perencanaan yang baik 1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah . 3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Barang di Masing-masing SKPD | Badung | 2 Persentase SKPD yang memperoleh nilai AKIP minimal BB | 70% | 85% | 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | Fungsi Lainnya | 1 Seluruh perangkat daerah |
| | | | 1 Meningkatkan kinerja | 1 Evaluasi LKJIP | 67,68 | 75 | 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan | Urusan Perpustakaan | 1 Kantor Perpustakaan Daerah |
| | | | 1 Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah) | 1 Opini BPK | WTP | WTP | 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daeah | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Keuangan |
| | | | Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku | 1 Data Barang Milik Daerah yang akurat dan akuntabel. | 74 Unit Kerja | 74 Unit Kerja | 2 Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah | Fungsi Lainnya | 2 Bagian Keuangan Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung |
| | | | Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur | 1 SDM yang terampil menyusun Neraca Barang Milik Daerah | 159 Orang | 159 Orang | 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah | Fungsi Lainnya | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung |
| | | 4 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah | 1 Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah | 1 Proposal yang diverifikasi administratif | 100% | 100% | 1 Peningkatan kesejahteraan rakyat | Fungsi Lainnya | 1 Bag. Adm. Kesra |
| | | 5 Peningkatan akuntabilitas | 1 Memfasilitasi penyusunan laporan | 1 Laporan Pertanggungjawaban | 100% | 100% | | | 1 Bag. Adm. Kesra |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|---|-----------------|---------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN | 1 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan | 1 Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal 2 Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN | 1 Pemanfaatan dana hibah yang sesuai ketentuan 2 Penerima hibah yang dimonitoring 1 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang menyebabkan kerugian daerah 2 Jumlah Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 3 Nilai Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 100% | 100% | 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Fungsi Lainnya | 2 Bag. Adm. Kesra 1 Inspektorat |
| 10 | Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah | 1 Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) | 1 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah | 1 Kapasitas Fiskal Daerah | 4 SKPD | 29 SKPD | 1 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik di Wilayah Kab. Badung 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Fungsi Lainnya Fungsi Lainnya | 2 Inspektorat 3 Inspektorat 1 Dispenda 2 Dispenda |
| | | 2 Mewujudkan PNS yang berkualitas | 1 Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan Bintek/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung | 1 Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek/sejenisnya di pemerintah Kabupaten Badung $\frac{\text{Jumlah seluruh pegawai}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$ | 5% | 14% | 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Fungsi Lainnya | 1 BKD, Diklat |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|-----|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar | 3 Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan | 1 Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD | 1 Persentase penetapan Peraturan Daerah | 100% | 100% | 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Fungsi Lainnya | 1 Setwan, Bag. Hukum dan HAM | |
| | | 4 Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan | 1 Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik | | | | | 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | Fungsi Lainnya | 1 Setwan, Bag. Hukum dan HAM |
| | | 1 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal | 1 Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% | 1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan | 98.83% | 100 % | 1. Pendidikan anak usia dini | Pendidikan | 1 Disdikpora | |
| | | | 2 Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi | 1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan Persentase kelulusan SD Persentase kelulusan SMP | APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 % | APK SD 100 % APK SMP 100 % | 1 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun | Pendidikan | 2 Disdikpora | |
| | | | 3 Memantapkan mutu | 1 Persentase Warga | - | 100 % | 1 Pendidikan non formal | Pendidikan | 1 Disdikpora | |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun | Kabupaten Badung buta aksara (niraksara) usia > 15 Tahun mampu membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan | | | | | |
| | | | | 2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C | 60 % | 100 % | 1 Pendidikan non formal | Pendidikan | 2 Disdikpora |
| | | | 4 Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu | 1 Pengelola pendidikan non formal yang terlatih 2 Tenaga pendidik yang bersertifikasi | 60 % 47 % | 100 % 75 % | 1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidikan | 1 Disdikpora |
| | | | 5 Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif | 1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan | APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 % | APK SD 100 % APK SMP 100 % | 1 Wajib belajar pendidikan dasar | Pendidikan | 1 Disdikpora |
| | | 2 Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar | 1 Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun | 1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan | APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 % | APK SD 100 % APK SMP 100 % | 1 Wajib belajar pendidikan dasar | Pendidikan | 1 Disdikpora |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Meningkatnya kompetensi guru | 3 penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu | 1 Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu | 1 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan | APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 % | APK SD 100 % APK SMP 100 % | 1 Wajib belajar pendidikan dasar | Pendidikan | 1 Disdikpora |
| | | 1 Peningkatan guru yang bersertifikasi | 1 Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi | 1 Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi | 0 satuan pendidikan | 1 satuan pendidikan | 1 Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi | Pendidikan | 1 Disdikpora |
| | | 2 penyediaan sarana prasarana workshop tenaga pendidik | 1 pemenuhan sarana prasaran workshop tenaga pendidik | 1 Tenaga pendidik yang bersertifikasi | 47 % | 75 % | 1 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Pendidikan | 1 Disdikpora |
| 13 | Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik | 1 Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik | 1 Pemenuhan kualitas gedung pendidikan | 1 Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional | 60 % | 80 % | 1 Peningkatan peran serta kepemudaan | Kepemudaan dan Olahraga | 1 Disdikpora |
| | | | | 2 Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional | 11 Cabang | 16 Cabang | 2 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga | Kepemudaan dan Olahraga | 2 Disdikpora |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|-----|---|--|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan | 1 Peningkatan pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi | 1 Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat | 90% | 96% | 1 Program Pengelolaan BLUD RSUD | Kesehatan | 1 RSUD | |
| | | | | 2 Menerapkan ISO 9001 : 2008 | 1 Indeks Kinerja Pelayanan | 65% | 80% | Program Pengelolaan BLUD RSUD | Kesehatan | 1 RSUD |
| | | | 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | 2 Indeks Kinerja Keuangan | 76.50% | 85% | Program Pengelolaan BLUD RSUD | Kesehatan | 2 RSUD | |
| | | | | 1 Prosentase Sarana prasarana sesuai standar kelas Rumah Sakit | 80.00% | 100% | 1 Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata | Kesehatan | 1 RSUD | |
| | | | 2 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas | 1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). | 1 Angka Kematian Ibu (AKI) | 96,83/100.000 KH | 85/100.000 KH | 1 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | | | | 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih | 94.24% | 97% | | | 2 Dinas Kesehatan |
| | | 3 Angka Kematian Balita (AKABA) | | | 3.87/1000 KH | 2.99/1000 KH | 2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Kesehatan | 3 Dinas Kesehatan | |
| | | 4 Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita | | | 80% | 85% | | Kesehatan | 4 Dinas Kesehatan | |
| | | 5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia | 50% | | 60% | 3 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia | Kesehatan | 5 Dinas Kesehatan | | |
| | | | 2 Peningkatan peran serta | 1 Cakupan ibu hamil | 18,2% | 50% | 1 Program peningkatan | Kesehatan | 1 Dinas | |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|-----|---------|----------|---|---|---|--------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia. | mendapat pelayanan P4K (berstiker) | | | kesehatan ibu melahirkan dan anak | | Kesehatan | | |
| | | | | 2 Cakupan Deteksi Ibu Hamil oleh masyarakat | 54,86% | 62,50% | 2 Program peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak | | Kesehatan | 2 Dinas Kesehatan | |
| | | | | 3 Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif | 35% | 100% | 3 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | Kesehatan | 3 Dinas Kesehatan | |
| | | 3 | Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat | 1 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi. | 1 Persentase Balita Kekurangan gizi | 12.50% | 10% | 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | | | | 2 Angka kematian Ibu (AKI) | 99.83 | 40.00 | 2 Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | | Kesehatan | 2 RSUD |
| | | 4 | Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan | 1 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. | 1 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) | 300 per 100.000 penduduk | 200 per 100.000 penduduk | 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | | | | 2 Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) | 30% | 50% | 2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | Kesehatan | 2 Dinas Kesehatan |
| | | | | 2 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah | 1 Rata-rata waktu epidemiologi KLB/Wabah | 24 jam | 12 jam | 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | | 3 | Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku | 1 Persentase desa yang melaksanakan STBM | 20.97 | 100% | 1 Program Pengembangan | | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 5 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas | <p>hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.</p> <p>1 Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.</p> <p>2 Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan</p> <p>3 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta</p> <p>4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.</p> | <p>1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Persentase Kepesertaan JKN</p> <p>1 Persentase Puskesmas Terakreditasi</p> <p>1 Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam</p> <p>2 Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap</p> | <p>54 Pustu 13 Puskesmas 2 RS</p> <p>71%</p> <p>0</p> <p>46.15</p> <p>50%</p> | <p>66 Pustu 17 Puskesmas 3 RS</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> | <p>Lingkungan Sehat</p> <p>1 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</p> <p>1 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>1 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p> <p>2 Program Upaya Kesehatan masyarakat</p> | <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> | <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>1 Dinas Kesehatan</p> <p>2 Dinas Kesehatan</p> |
| | | 6 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan | 1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui | 1 Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri | 4,8% | 53% | 1 Program Upaya Kesehatan masyarakat | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | masyarakat | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) | 2 Cakupan PHBS | 80,16 | 86.00 | 2 Program Upaya Kesehatan masyarakat | Kesehatan | 2 Dinas Kesehatan |
| | | 7 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis. | 1 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis. | 1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 100% | 100% | 1 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | 8 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi. | 1 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based). | 2 Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar | 85% | 100% | 2 Program Pengawasan Obat dan Makanan | Kesehatan | 2 Dinas Kesehatan |
| | | 2 Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas | 1 Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang | 1 Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) | 85% | 100% | 1 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Kesehatan | 1 Dinas Kesehatan |
| | | 3 Meningkatkan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada generasi muda dan pasangan usia subur (PUS) | 1 Meningkatkan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang | 1 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif | 75.05% | 77.24% | 1 Program Keluarga Berencana | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 BKBKS |
| | | | 1 Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi | 1 Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th | 0.22% | 0.15% | 1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 BKBKS |
| | | | 2 Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja | 1 Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 51.99% | 59.12% | 1 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 BKBKS |
| | | | | 2 Persentase PPKBD dan Sub | 39.14% | 100% | 2 Program Pembinaan | Pengendalian | 2 BKBKS |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|---|---|--|-----------------|---------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran | <p>4 Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat</p> <p>1 Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin</p> <p>2 Memperluas Akses Perlindungan Sosial</p> <p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial</p> | <p>1 Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS</p> <p>1 Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin</p> <p>1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial</p> <p>1 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya</p> | <p>PPKBD yang mendapatkan KIE</p> <p>3 Persentase Banjar yang menjadi sasaran KIE program KB</p> <p>1 Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif</p> <p>1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial</p> | 0 | 100% | Peran Serta Masyarakat | Penduduk dan Keluarga Berencana | 3 BKBKS |
| | | | | <p>1 Persentase Kelurahan Tribina dan UPPKS yang aktif</p> <p>1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial</p> | 100% | 100% | 1 Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 BKBKS |
| | | | | <p>1 Persentase rumah tangga sasaran yang mendapatkan perlindungan sosial</p> | 100% | 100% | 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa | 1 BPMD dan Pempdes |
| | | | | 1 Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat | 56.34% | 100% | 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Sosial | 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 1 Cakupan penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0% | 100% | 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Sosial | 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 2 Cakupan anak diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0% | 100% | 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Sosial | 2 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 3 Cakupan Lanjut usia terlantar | 0% | 100% | 1 Program Pelayanan | Sosial | 3 Dinas Sosial |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|------------------------------|---|---|---|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Meningkatnya UMKM yang aktif | <p>4 Maksimalisasi sarana prasarana perlindungan sosial</p> <p>1 Pemberdayaan dan Penguatan sektor UMKM</p> | <p>1 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>1 Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing</p> | diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0% | 100% | dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Sosial | dan Tenaga Kerja |
| | | | | 4 Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | | | 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | 4 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 5 Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana. | | | 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | 5 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 1 Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan | | | 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | | 1 Meningkatnya UMKM yang aktif, kreatif dan berdaya saing | | | 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM | | 1 Diskoperindag |
| | | | | | | | 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Perdagangan | 2 Diskoperindag |
| | | | | | | | 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM | Industri | 3 Diskoperindag |
| | | | | | | | 4 Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif | Industri | 4 Diskoperindag |
| | | | | | | | 5 Program Peningkatan | Perdagangan | 5 Diskoperindag |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|---|--|-----------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | Meningkatnya Koperasi yang sehat | 1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi | 1 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi | 1 Meningkatnya Koperasi Yang Sehat | 64,83% | 100% | Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 6 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi 7 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Perdagangan Industri Industri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | 6 Diskoperindag 7 Diskoperindag 8 Diskoperindag 1 Diskoperindag |
| 19 | Meningkatnya penegakan Perda | 1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah 2 Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa | 1 Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan 2 Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM | 1 Menurunnya pelanggaran Perda | 70% | 95% | 1. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 1 Satpol PP 2 Satpol PP |
| 20 | Meningkatnya Penanganan permasalahan Hukum dan HAM | 1. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | 1. Penegakan Hukum dan HAM | 1 Prosentase penanganan Permasalahan Hukum dan HAM | 100% | 100% | 1 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Fungsi Lainnya | 1 Bagian Hukum dan HAM |
| 21 | Meningkatnya pengarusutamaan gender | 1 Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap | 1 Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan | 1 Angka IPG | 75.47 | 75.53 | 1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 KPP |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | perempuan dan anak di Desa/Kelurahan | terhadap perempuan dan anak | | | | 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2 KPP |
| | | 2 Memasyarakatkan kesetaraan gender | 1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan | | | | 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 KPP |
| | | | | | | | 4 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4 KPP |
| 22 | Menurunnya luas lahan kritis | 1 Menggalakkan budaya menanam pohon | 1. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup | 1 Persentase lahan kritis | 10,66 % | 9,46 % | 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | Kehutanan Kehutanan | 1 Distanbunhut 2 Distanbunhut |
| 23 | Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan | 1 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan | 1 Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan 2 Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan | 1 Jumlah izin lingkungan yang diterbitkan 2 Jumlah usaha dan kegiatan yang dibina dan diawasi yang memiliki dokumen lingkungan | 600 dokumen 80 usaha | 3625 dokumen 500 usaha | 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup | 1 BLH 2 BLH |
| | | 2 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup | 1. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. 2. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam | 1 Nilai Indek kualitas lingkungan hidup 1 Jumlah Teknologi Tepat Guna dibidang lingkungan hidup 2 Luasan taman keanekaragaman hayati | > 47 40 unit 0 ha | > 48 150 unit 4 ha | 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Reahabilitasi dan Pemulihan Perusakan Lingkungan Hidup 3 Program Reahabilitasi dan Pemulihan | Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup | 1 BLH 1 BLH 2 BLH |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 3 Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup | <p>1. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup</p> <p>2. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>3. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan</p> | <p>1 Jumlah usaha dan kegiatan yang diawasi</p> <p>1 Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>1 Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan</p> | <p>40 Perusahaan 10 Desa Proklam</p> <p>12 desa adat, 18 sekolah, 50 saka kalpataru 12 Perusahaan 6 orang</p> <p>50 kasus</p> | <p>220 Perusahaan 50 Desa Proklam</p> <p>100 desa adat 90 sekolah 50 saka kalpataru 100 Perusahaan 6 orang</p> <p>250 Kasus</p> | <p>Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1 Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> | <p>Lingkungan Hidup</p> <p>Lingkungan Hidup</p> <p>Lingkungan Hidup</p> | <p>1 BLH</p> <p>2 BLH</p> <p>3 BLH</p> |
| | | 4 Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup | <p>1. Peningkatan sistem informasi lingkungan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas database lingkungan</p> | <p>1 tersedianya informasi lingkungan hidup</p> <p>1 tersedianya data lingkungan hidup</p> | <p>14 sistem informasi lingkungan</p> <p>14 Data</p> | <p>16 sistem informasi lingkungan</p> <p>16 Data</p> | <p>1 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kualitas lingkungan hidup</p> <p>1 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan</p> | <p>Lingkungan Hidup</p> <p>Lingkungan Hidup</p> | <p>1 BLH</p> <p>2 BLH</p> |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1 Peningkatan Pengelolaan kebersihan | 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan 2 Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 1. Prosentase Cakupan Pelayanan Sampah 2. Prosentase Sampah yang tertangani 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik | 30% 78,5% 0.0291 % | 57% 94,40% 0,1967 % | Lingkungan Hidup kualitas lingkungan hidup 1. Program Pembangunan Infrastruktur Persampahan 1 Program Pengelolaan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup | 1 DKP 2 DKP |
| 25 | Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1 Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis | 1 jumlah rancangan kerja rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten | 14,55 % | 30,91 % | program perencanaan tata ruang | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 bappeda |
| 26 | Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana | 1 Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | 1. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan | 1 Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | 50% | 100% | 1. Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat | 1 BPBD |
| | | | 2. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan 3. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai 4. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat | | | | 2. Program penanganan darurat bencana 3. Program pemulihan pasca bencana | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenteraman, | 2 BPBD 3 BPBD 4 BPBD |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|-----|--------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 27 | Meningkatnya kompetensi tenaga kerja | 1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2 Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Assesor | 5. Penanganan pasca bencana yang komprehensif 6. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana | 1 Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi 1 Melaksanakan akreditasi terhadap LPK 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas Assesor | 1 Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi 1 Persentase Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh pembinaan 2 Persentase Assesor instruktur latihan Swasta yang memperoleh pelatihan | 35.74% 76% 9% | 60.96% 100% 100% | 1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan | 5 BPBD 6 BPBD 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| | | | 3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis 4 Mengembangkan potensi kewirausahaan 5 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan | 1 Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama 1 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan 1 Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha | 1 Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama 1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan 1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan | 50% 50% 50% | 60% 50% 50% | 1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan | 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---|--|--|---|-----------------|---------------|--|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <p>dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri</p> <p>6 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri</p> <p>7 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</p> | <p>dan industri, baik dalam maupun luar negeri</p> <p>1 Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri</p> <p>1 Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah</p> | <p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p> <p>1 Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan</p> | 50% | 50% | <p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p> | <p>Ketenagakerjaan</p> <p>Ketenagakerjaan</p> | <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> |
| 28 | Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah | <p>8 Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)</p> <p>1 Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan</p> | <p>1 Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)</p> <p>1 Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</p> | <p>1 Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja sama</p> <p>1 Prosentase zona rawan banjir dan genangan</p> | 50% | 60% | <p>1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p> <p>Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya</p> | <p>Ketenagakerjaan</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> | <p>1 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p> <p>1 DBMP</p> |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|--|--|--|-----------------|---------------|--|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <p>pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.</p> <p>2. Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.</p> <p>3 Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman</p> | <p>1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis</p> <p>1 Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman</p> | <p>1 Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik</p> <p>1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman</p> | 94.50% | 100.00% | <p>1 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan</p> <p>2 Program Rehabilitas / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1 Program Lingkungan Sehat Perumahan</p> | <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> | <p>1 DBMP</p> <p>2 DBMP</p> <p>3 DBMP</p> <p>1 DCK</p> |
| | | <p>4 Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas</p> | <p>1. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas</p> | <p>2 Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik</p> <p>3 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana</p> <p>1 Prosentase Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Berfungsi Baik</p> <p>2 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan</p> | 84.43% | 100% | <p>2 Program Penyehatan Lingkungan</p> <p>3 Program Penataan Kawasan Permukiman</p> <p>1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas</p> | <p>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Perhubungan</p> <p>Perhubungan</p> | <p>2 DCK</p> <p>3 DCK</p> <p>1 Dishub</p> <p>2 Dishub</p> |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|-----|--|---|---|---|-----------------|---------------|--|----------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 29 | Meningkatnya produksi beras dan palawija | 1 Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian | 1 Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung | 3 Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) | 0,61 | 0,45 | Perhubungan | Perhubungan | 3 Dishub | |
| | | | | 4 Prosentase pelanggaran lalu lintas | 2,60% | 1,2% | 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | 4 Dishub |
| | | | | 5 Prosentase kecelakaan lalu lintas | 34,80% | 16,00% | 4 Program peningkatan pelayanan angkutan | | | 5 Dishub |
| | | | | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 5 Program peningkatan pelayanan angkutan | | | 1 Peningkatan produksi Pertanian/perkebunan |
| | | 2 Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung | 2 Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Pengembangan sistem data / informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | Pertanian | 1 Distanbunhut | |
| | | 3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan | 3 Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pertanian | 1 Distanbunhut | |
| | | 4 Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi | 4 Optimalisasi ketersediaan sumber daya air | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pertanian | 1 Distanbunhut | |
| | | 5 Melaksanakan pemupukan berimbang | 5 Mempertahankan kesuburan tanah | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut | |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|---|--|---|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6 Menyediakan sarana produksi yang bermutu. | 6 Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu. | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 7 Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian. | 7 Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian. | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | | | | | | 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | 2 Distanbunhut |
| | | 8 Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. | 8 Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya. | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija | 86.12% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pangan | 1 Distanbunhut |
| | | | | | | | 2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | 2 Distanbunhut |
| | | 9 Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian | 9 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian | 1 meningkatkan Kualitas SDM Petani | 0% | 100% | 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | | | | | | 2 Program Peningkatan Ketahanan (Pertanian / Perkebunan) | Pangan | 2 Distanbunhut |
| | | | | | | | 3 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | 3 Distanbunhut |
| | | | | | | | 4 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Pertanian | 4 Distanbunhut |
| | | 10 Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi. | 10 Meningkatkan kesejahteraan petani | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pangan | 1 Distanbunhut |
| | | | | | | | 2 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | Pertanian | 2 Distanbunhut |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|---|--|---|-----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | <p>11 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis</p> <p>12 Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.</p> | <p>11 Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.</p> <p>12 Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.</p> | <p>1 Penguatan lembaga Agribisnis</p> <p>1 Tersalurkannya hasil Pertanian lokal</p> | <p>6 kecamatan</p> <p>0</p> | <p>6 kecamatan</p> <p>1 Pasar Agro</p> | <p>1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</p> <p>1 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan</p> <p>2 Program Pengembangan Agribisnis</p> | <p>Pangan</p> <p>Pertanian</p> <p>Pertanian</p> | <p>1 Distanbunhut</p> <p>1 Distanbunhut</p> <p>1 Distanbunhut</p> |
| | | <p>13 Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.</p> | <p>13 Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.</p> | <p>1 tersedianya data jineng yang difungsikan sebagai pengaman stok pangan</p> | <p>0</p> | <p>1 Jenis laporan</p> | <p>1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)</p> | <p>Pangan</p> | <p>1 Distanbunhut</p> |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|--|--|---|-----------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 14 Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi. | 14 Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija | 86.12% | 100.0% | 1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan) 3 Pemberdayaan penyuluh/ perkebunan lapangan | Pertanian Pangan Pertanian | 1 Distanbunhut 2 Distanbunhut 3 Distanbunhut |
| | | 15 Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung | 15 Pelestarian plasma nutfah tanaman langka | 1 Tersedianya tempat pelestarian plasma nutfah tanaman langka | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|---------|--|--|---|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 16 Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan | 16 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 17 Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya. | 17 Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian | 1 Tersalurkannya hasil Pertanian lokal | 0 | 1 Pasar Agro | 1 Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian / Perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 18 Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi | 18 Meningkatkan produksi beras dan palawija | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Pengembangan Agribisnis | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 19 Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. | 19 Memantapkan program Badung go organik | 2 Persentase pemenuhan kebutuhan palawija | 86.12% | 100.0% | | | |
| | | | | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 20 Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming). | 20 Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming). | 1 Pengembangan pertanian hidroponik | 1 kecamatan | 6 kecamatan | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pangan | 1 Distanbunhut |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|---|--|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | Meningkatnya produksi hasil peternakan | 21 Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani | 21 Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 2 Pemberdayaan penyuluh/ perkebunan lapangan | Pertanian | 2 Distanbunhut |
| | | 22 Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani | 22 Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pangan | 1 Distanbunhut |
| | | 23 Membentuk Peraturan Bupati tentang perlindungan, penampungan, pemasaran, pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan pertanian organik. | 23 Menyusun regulasi tentang perlindungan, penampungan, pemasaran, pemanfaatan hasil-hasil pertanian dan pertanian organik. | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 24 Membentuk Peraturan bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi. | 24 Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi. | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan beras | 85.85% | 100.0% | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) | Pertanian | 1 Distanbunhut |
| | | 1 Pengembangan Teknologi Peternakan | 1. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging sapi | 1 Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi | 31.42% | 42.00% | 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Pertanian | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | | 2 Disnakanlut |
| | | | | | | | 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan | | 3 Disnakanlut |
| | | | | | | | 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | 4 Disnakanlut |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|---------------------------------------|---|---|---|-----------------|---------------|---|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | Meningkatnya produksi hasil perikanan | 2 Memetakan potensi Peternakan di Kabupaten Badung 1 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan kelautan | 1 Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah 1. Meningkatkan produksi ikan | 1 Prosentase potensi pengembangan peternakan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan ikan | 0% | 100.00% | 5 Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH | Pertanian | 5 Disnakanlut |
| | | | | | | | 1 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan | | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir | | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan | | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | 1 Disnakanlut |
| 4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1 Disnakanlut | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan | Kelautan dan Perikanan | 1 Disnakanlut |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|---|--|-----------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing | 2 Memetakan potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Badung | 1 Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah | Prosentase potensi pengembangan perikanan dan kelautan | 0% | 100.00% | 6 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat | Kelautan dan Perikanan | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 7 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan | Kelautan dan Perikanan | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 1 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan | Urusan Kelautan dan Perikanan | 1 Disnakanlut |
| | | | | | | | 1 Program Pemanfaatan Ruang | Pekerjaan Umum | 1 Dinas Cipta Karya |
| 32 | Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing | 1 Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif | 1 Mengembangkan pariwisata alternatif | 1 Jumlah DTW alternatif | 0 | 1 | 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pariwisata | 1 Diparda |
| | | | | | | | 2 Program pengembangan kemitraan | Pariwisata | 1 Diparda |
| 32 | Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing | 2 Melaksanakan penataan DTW | 1. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW 2 Penataan fasilitas penunjang DTW | 1 Persentase DTW yang ditata | 55% | 72% | 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pariwisata | 1 Diparda |
| | | | | | | | 2 Program pengembangan kemitraan | Pariwisata | 2 Diparda |
| 33 | Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke | 1 Meningkatkan pemasaran pariwisata | 1 Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar | 1 peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara | 4,000,000 | 5,105,126 | 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Pariwisata | 1 Diparda |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Indikator Kinerja (Outcome) | Capaian Kinerja | | Program Pembangunan Daerah | Bidang Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----|--|--|--|--|-----------------|---------------|---|--|------------------------------------|
| | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir | | | |
| | | | | | (Tahun 2015) | (Tahun 2021) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Kabupaten Badung | | negeri 2 Publikasi pariwisata dalam berbagai media | | | | | | 2 Diparda |
| | | 2 Meningkatkan kualitas industri pariwisata | 1 Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat 2 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata | | | | 1 Program pengembangan kemitraan 2 Program Pengembangan dan pengelolaan produk wisata | Pariwisata Pariwisata | 1 Diparda 2 Diparda |
| 34 | Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian | 1 Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata | 1 Penataan desa wisata 2 Peningkatan SDM pengelola desa wisata 3 Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian | 1 Jumlah Desa Wisata yang berbasis pertanian | 1 | 6 | 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pariwisata | 1 Diparda 1 Diparda |
| 35 | Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari | 1 Peningkatan kawasan pesisir yang lestari | 1 Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir | 1 Jumlah kawasan desa pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari | 0% | 100.00% | 1 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 2 Program pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata | Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan | 1 Disnakanlut 2 Disnakanlut |

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Pada Tabel 8.1 dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh Perangkat Daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2017-2021) yang dikelompokkan atas : (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, serta (4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping Tabel 8.1, pada RPJMD Kabupaten Badung ini ditambahkan pula Program-Program Prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah khusus Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel 8.2 berikut ini. Penyajian Program-Program Prioritas Tahun 2016 tersebut merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

Sedangkan Tabel 8.3 hanya memuat program-program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu selama kurun waktu 2017-2021 yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Badung

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Indikasi Rencana Program Strategis Yang Disertai Dengan
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Badung

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|---------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | 2,050,057.53 | | 2,480,159.43 | | 2,542,027.47 | | 2,814,295.58 | | 3,263,801.19 | | 12,323,828.66 | |
| 1.1 | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 1,867,139.26 | | 2,297,241.16 | | 2,359,109.20 | | 2,631,377.31 | | 3,080,882.92 | | 12,140,910.39 | |
| 01 | URUSAN PENDIDIKAN | | | | 377,932.91 | | 393,274.67 | | 472,187.00 | | 524,626.26 | | 588,911.80 | | 2,332,197.73 | |
| | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA | | | | 377,932.91 | | 393,274.67 | | 472,187.00 | | 524,626.26 | | 588,911.80 | | 2,332,197.73 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 21.384.00 | 100% | 4.412.96 | 100% | 21.073.36 | 100% | 21.253.19 | 100% | 21.440.01 | 100% | 89.563.52 | Disdikpora |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 958.79 | 100% | 1.555.28 | 100% | 1.411.11 | 100% | 1.552.02 | 100% | 1.706.82 | 100% | 7.184.02 | Disdikpora |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 369.76 | 100% | 462.91 | 100% | 508.80 | 100% | 559.18 | 100% | 614.50 | 100% | 2.515.15 | Disdikpora |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renia SKPD denoan RKPD | 100% | 100% | 10.68 | 100% | 12.10 | 100% | 13.31 | 100% | 14.64 | 100% | 16.11 | 100% | 66.84 | Disdikpora |
| 15 | PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Persentase warga Kab. Badung usia 1-6 Tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan | 100% | 100% | 6.095.36 | 100% | 5.246.09 | 100% | 5.457.27 | 100% | 785.18 | 100% | 14.477.19 | 100% | 32.061.09 | Disdikpora |
| 16 | PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan | 100% | 100% | 229,495.04 | 100% | 363,986.70 | 100% | 435,505.45 | 100% | 491,864.39 | 100% | 541,646.03 | 100% | 2,041,483.28 | Disdikpora |
| | | Angka Lulusan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| 18 | PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyeteraan Paket C | 60% | 80% | 573.24 | 85% | 4.364.27 | 90% | 706.86 | 95% | 775.94 | 100% | 852.54 | 100% | 3.552.27 | Disdikpora |
| | | Pengelola pendidikan non formal yang terlatih | 60% | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tenaga pendidik yang bersertifikasi | 47% | 55% | 4.282.03 | 60% | 2.939.37 | 65% | 3.227.85 | 70% | 3.538.71 | 75% | 3.875.61 | 75% | 17.863.57 | Disdikpora |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI | Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi | - | 271 sekolah | 114,764.00 | 271 sekolah | 10,295.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 137,908.00 | Disdikpora |
| 02 | URUSAN KESEHATAN | | | | 378,256.64 | | 484,752.01 | | 523,072.58 | | 584,370.76 | | 515,230.60 | | 2,496,142.76 | |
| | DINAS KESEHATAN | | | | 213,941.06 | | 254,449.01 | | 277,158.58 | | 270,406.76 | | 278,201.60 | | 1,304,617.18 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase kecukupan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 10,143.39 | 100% | 9,954.35 | 100% | 10,102.07 | 100% | 10,268.31 | 100% | 9,938.41 | 100% | 53,930.79 | Diskes |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 19,399.10 | 100% | 3,941.25 | 100% | 4,374.01 | 100% | 4,594.87 | 100% | 4,390.10 | 100% | 50,706.96 | Diskes |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai evaluasi LKJP Dinas Kesehatan Kab. Badung | BB | BB | 345.41 | A | 319.78 | A | 319.78 | A | 319.78 | A | 319.78 | A | 1,624.54 | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|----------|----------------------------------|--------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) | 80% | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Persentase penyerapan anggaran dalam DPA untuk Belanja Lanosuno dan BTL | 84,15% | 87% | | 88% | | 89% | | 90% | | 0.900 | | 0.900 | | Diskes | |
| | 15 | PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 78,70% | 100% | 3,777.50 | 100% | 4,042.94 | 100% | 4,045.34 | 100% | 4,047.04 | 100% | 4,049.54 | 100% | 19,962.37 | Diskes |
| | 16 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Kepesertaan JKN | 70,97% | 80% | 103,377.12 | 90% | 150,159.86 | 100% | 166,329.70 | 100% | 185,959.49 | 100% | 201,044.71 | 100% | 806,614.58 | Diskes |
| | | Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam | 46,15% | 46,15 % | | 46,15% | | 46,66% | | 46,66% | | 52,94% | | 52,95 | | Diskes | |
| | | Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap | 50% | 50% | | 50% | | 66,67% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri | 5% | 25% | | 35% | | 45% | | 50% | | 55% | | 55% | | Diskes | |
| | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat | 80,16 % | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | 86% | | 86% | | Diskes | |
| | | Prosentase siswa sehat | 85% | 90% | | 92% | | 94% | | 96% | | 96% | | 96% | | Diskes | |
| | | Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 62,70% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Cakupan penjarangan pendidikan dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 0% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | | Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar | 75% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes | |
| | 17 | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar | 85% | 90% | 88.95 | 95% | 97.76 | 97% | 106.59 | 100% | 115.95 | 100% | 126.25 | 100% | 535.50 | Diskes |
| | 20 | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | Persentase Kekurangan gizi pada balita | 12,5% (Riskasdas) | 12,3% | 1,295.02 | 12,1% | 487.19 | 11,0% | 553.02 | 10,0% | 614.07 | 10,00% | 614.07 | 10,00% | 2,335.63 | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | Persentase desa yang melaksanakan STBM | 20,97% | 58,25% | 546.29 | 62,35% | 637.84 | 65,40% | 679.13 | 68,12% | 724.54 | 68,12% | 774.49 | 68,12% | 3,362.29 | Diskes |
| 22 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) | 0.27% | 0.25% | 17,744.74 | 0.24% | 18,481.03 | 0.23% | 20,356.12 | 0.22% | 22,439.03 | 0.22% | 24,237.58 | 0.22% | 103,258.49 | Diskes |
| | | Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) | 25% | 35% | | 40% | | 45% | | 50% | | 50% | | | | Diskes |
| | | Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah | 24 Jam | 21 Jam | | 17 Jam | | 14 Jam | | 12 Jam | | 12 Jam | | 12 Jam | | Diskes |
| | | Cakupan penganan penderita hipertensi | 30% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan penanganan penderita diabetes | 30% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan penemuan penderita TB Paru | 52,73% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan kesembuhan penderita TB Paru | 87,82% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan | 75% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 23 | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | Persentase Puskesmas Terakreditasi | 7.69% | 100,0% | 3,743.27 | 100,0% | 2,859.54 | 100,0% | 3,193.99 | 100,0% | 4,989.89 | 100,0% | 3,618.72 | 100,0% | 18,405.41 | Diskes |
| 25 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 2 | Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 3 Unit | 42,965.00 | Pustu 58, Puskesmas 15 dan RS 3 Unit | 53,342.67 | Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 Unit | 56,439.95 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 Unit | 24,731.00 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 Unit | 16,829.00 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 unit | 191,297.43 | Diskes |
| | | Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) | 80% | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 28 | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif | 35% | 50% | 41.90 | 65% | 46.05 | 75% | 54.13 | 85% | 59.54 | 100% | 60.91 | 100% | 262.52 | Diskes |
| 29 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA | Angka Kematian Balita (AKABA) | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 3,74 per 1000 Kelahiran Hidup | 54.40 | 3,37 per 1000 Kelahiran Hidup | 58.04 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 58.04 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 389.85 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 92.10 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 652.43 | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita | 80% | 81% | | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | 85% | | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 30 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA | Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan | 50% | 54% | 1,581.14 | 56% | 1,897.21 | 58% | 2,028.60 | 60% | 2,105.20 | 60% | 2,105.20 | 60% | 8,136.21 | Diskes |
| 32 | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK | Angka Kematian Ibu Melahirkan | 99.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,162.20 | 90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,121.04 | 87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 968.03 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,008.12 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,476.66 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 4,739.70 | Diskes |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih | 98,66% | 92% | | 93% | | 94% | | 95% | | 97% | | 97% | | Diskes |
| | | Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker) | 18,2% | 25% | | 30% | | 35% | | 40% | | 50% | | 50% | | Diskes |
| | | Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat | 54,86 | 56% | | 58% | | 60% | | 61% | | 62,5% | | 62,5% | | Diskes |
| | | Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) | 99% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|---|--|---|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih | 95% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan Kesehatan Bawi | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | Diskes |
| | 36 | PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS | Persentase kecukupan bahan penunjang medis | 100% | 100% | 7,425.65 | 100% | 6,727.10 | 100% | 7,250.07 | 100% | 7,690.08 | 100% | 8,174.09 | 100% | 37,266.99 | Diskes |
| | 37 | PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN | Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik | 100% | 100% | 249.98 | 100% | 275.35 | 100% | 300.00 | 100% | 350.00 | 100% | 350.00 | 100% | 1,525.34 | Diskes |
| | | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | | | 164,315.58 | | 230,303.00 | | 245,914.00 | | 313,964.00 | | 237,029.00 | | 1,191,525.58 | | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | Belum semua layanan administrasi kantor terpenuhi | 1 pkt. 12 bln. 140 orq | 17,675.31 | 1 pkt. 12 bln. 140 orq | 19,103.00 | 1 pkt. 12 bln. 140 orq | 21,014.00 | 1 pkt. 12 bln. 140 orq | 23,114.00 | 1 pkt. 12 bln. 140 orq | 25,424.00 | 6 pkt. 72 bln. 831 orq | 106,330.31 | RSUD |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | Masih kurangnya sarana prasarana aparatur rumah sakit | 2 paket | 228.13 | 2 paket | 3,700.00 | 2 paket | 1,000.00 | 2 paket | 350.00 | 2 paket | 305.00 | 14 paket | 5,583.13 | RSUD |
| | 26 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA | Terperuhnya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit | 80% | 82% | 31,412.14 | 85% | 87,500.00 | 90% | 98,900.00 | 95% | 150,500.00 | 100% | 61,300.00 | 100% | 429,612.14 | RSUD |
| | 40 | PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD | Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat | 75% | 76% | 115,000.00 | 77% | 120,000.00 | 78% | 125,000.00 | 79% | 140,000.00 | 80% | 150,000.00 | 80% | 650,000.00 | RSUD |
| | | | Indeks Kinerja Pelayanan | 65% | 76% | | 77% | | 78% | | 79% | | 80% | 80% | | | |
| | | | Indeks Kinerja Keuangan | 76.50% | 80% | | 81% | | 82% | | 83% | | 85% | 80% | | | |
| | 03 | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | 850,472.75 | | 1,185,568.00 | | 1,108,111.14 | | 1,241,692.57 | | 1,659,322.97 | | 6,004,200.50 | | |
| | | PEKERJAAN UMUM | | | 813,350.21 | | 1,145,385.22 | | 1,065,225.09 | | 1,194,291.71 | | 1,607,387.62 | | 5,785,947.93 | | |
| | | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN | | | 415,934.40 | | 832,855.70 | | 721,731.02 | | 816,726.63 | | 1,192,355.44 | | 4,053,281.11 | | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Prasarana Administrasi Perkantoran Untuk Pelaksanaan Tugas | 100% | 100% | 22,054.07 | 100% | 4,307.13 | 100% | 4,715.84 | 100% | 5,175.42 | 100% | 5,669.97 | 100% | 23,826.43 | DBMP |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik | 100% | 100% | 1,127.01 | 100% | 1,239.72 | 100% | 1,363.69 | 100% | 1,500.06 | 100% | 1,650.06 | 100% | 6,880.53 | DBMP DBMP |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Administrasi Keuangan dengan Baik dan Lancar | 100% | 100% | 808.09 | 100% | 888.90 | 100% | 977.79 | 100% | 1,075.57 | 100% | 1,183.12 | 100% | 4,933.47 | DBMP |
| | 07 | PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 94,5 % | 96,75 % | 270,523.56 | 98,00% | 309,665.48 | 99,25% | 340,632.02 | 100,00% | 374,695.22 | 100,00% | 412,164.75 | 100% | 1,720,379.03 | DBMP |
| | 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Perencanaan dan Penanganan SKPD | 100% | 100% | 9.99 | 100% | 10.99 | 100% | 12.09 | 100% | 13.29 | 100% | 14.62 | 100% | 60.98 | DBMP |
| | 15 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Baru Yang Terbangun | 100% | 100% | 1,419.40 | 100% | 280,004.89 | 100% | 131,512.34 | 100% | 152,247.28 | - | 481,135.89 | 100% | 1,045,320.65 | DBMP |
| | 18 | PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 94,5 % | 96,75 % | 26,919.82 | 98,00% | 124,008.04 | 99,25% | 136,408.84 | 100,00% | 150,049.72 | 100,00% | 165,054.70 | 100% | 688,255.87 | DBMP |
| | 23 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai | 100% | 100% | 1,179.20 | 100% | 1,455.54 | 100% | 1,601.10 | 100% | 1,761.20 | 100% | 1,937.33 | 100% | 8,268.42 | DBMP |
| | 24 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA | Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik | 94,72 % | 96% | 91,893.26 | 96,83% | 111,275.03 | 97,89% | 104,507.32 | 98,94% | 130,208.86 | 100,00% | 123,545.01 | 100% | 555,355.74 | DBMP |
| | 02 | DINAS CIPTA KARYA | | | 397,415.81 | | 312,529.52 | | 343,494.07 | | 377,565.08 | | 415,032.19 | | 1,732,666.82 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI | Terpenuhinya sarana pra sarana pelayanan adminis | 19 paket | 100% | 1.367.08 | 100% | 1.386.25 | 100% | 1.406.88 | 100% | 1.439.56 | 100% | 1.464.52 | 100% | 7.059.29 | DCK |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya fasilitas pelayanan yang represen tatif | 10 Paket | 100% | 720.22 | 100% | 1.081.00 | 100% | 1.081.00 | 100% | 1.081.00 | 100% | 1.081.00 | 100% | 5.044.22 | DCK |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN | Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja | 3 Paket | 100% | 642.17 | 100% | 606.00 | 100% | 606.00 | 100% | 606.00 | 100% | 606.00 | 100% | 3.066.17 | DCK |
| 12 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD | Tersedianya dokumen perencanaan | 1 Paket | 5 dokumen | 10.00 | 5 dokumen | 10.00 | 5 dokumen | 10.00 | 5 dokumen | 10.00 | 5 dokumen | 10.00 | 25 dokumen | 50.00 | DCK |
| 17 | PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Terpantaunya kondisi dantai | 1 Paket | 1 laporan | 3.05 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 5 laporan | 31.05 | DCK |
| 35 | PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN | Persentase Penduduk Terlalani air minum aman dan akses limbah domestik | 87.67% | 89.67% | 121.791.71 | 91.67% | 128.470.88 | 93.92% | 141.317.97 | 96.47% | 155.449.77 | 98.60% | 170.994.74 | 98.60% | 713.025.08 | DCK |
| 37 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG | Peningkatan performance gedung | 7 Paket | 49% | 272.881.56 | 53% | 180.968.39 | 57% | 199.065.23 | 61% | 218.971.75 | 65% | 240.868.92 | 65% | 1.004.391.00 | DCK |
| 38 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL | Meningkatnya sistem pnaawasan internal | 1 Paket | 100% | 11.92 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 71.92 | DCK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05 | URUSAN PENATAAN RUANG | | | | 37.122.54 | | 40.182.78 | | 42.886.05 | | 47.400.86 | | 51.935.35 | | 218.252.57 | |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | | 36.322.54 | | 38.572.78 | | 42.416.05 | | 46.640.86 | | 51.295.35 | | 213.972.57 | |
| 01 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | Peningkatan fasilitas umum/ publik | 1 Paket | 16 kegiatan | 35.959.34 | 10 kegiatan | 38.152.78 | 7 kegiatan | 41.968.05 | 6 kegiatan | 46.164.86 | 5 kegiatan | 50.781.35 | 44 kegiatan | 211.751.38 | DCK |
| 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung | 2 Paket | 4 laporan | 363.20 | 4 laporan | 420.00 | 4 laporan | 448.00 | 4 laporan | 476.00 | 4 laporan | 514.00 | 20 laporan | 2.221.20 | DCK |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 800.00 | | 1.610.00 | | 470.00 | | 760.00 | | 640.00 | | 4.280.00 | |
| 01 | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 14.55% | 16.36% | 800.00 | 0.20 | 1.610.00 | 0.24 | 470.00 | 0.27 | 760.00 | 0.31 | 640.00 | 0.31 | 4.280.00 | Bappeda Litbang |
| 04 | URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | 243.128.18 | | 211.264.21 | | 232.591.51 | | 254.831.21 | | 280.508.79 | | 1.182.761.40 | |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | | 220.122.34 | | 202.129.10 | | 222.302.01 | | 244.482.21 | | 268.870.43 | | 1.120.264.74 | |
| 01 | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik | 1 paket | 70.02% | 219,015.03 | 77.51% | 199,355.74 | 85% | 219,251.32 | 92.49% | 241,126.45 | 100% | 265,179.09 | 100% | 1,104,872.37 | DCK |
| 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai | - | 100% | 103.28 | 100% | 113.61 | 100% | 124.97 | 100% | 137.47 | 100% | 151.22 | 100% | 630.56 | DCK |
| 03 | PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN | Tercapainya sarana yang memadai | - | 100% | 1.004.02 | 100% | 2.659.74 | 100% | 2.925.71 | 100% | 3.218.29 | 100% | 3.540.11 | 100% | 14.761.80 | DCK |
| | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | | | | 23,005.84 | | 9,135.11 | | 10,289.50 | | 10,349.00 | | 11,638.36 | | 62,496.66 | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 2.039.87 | 100% | 2.516.86 | 100% | 2.701.80 | 100% | 2.908.93 | 100% | 3.132.08 | 100% | 13.524.54 | Disdamkar |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 931.17 | 100% | 368.15 | 100% | 941.39 | 100% | 427.99 | 100% | 1.061.69 | 100% | 1.946.18 | Disdamkar |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 93.60 | 100% | 102.36 | 100% | 112.00 | 100% | 122.60 | 100% | 134.26 | 100% | 564.81 | Disdamkar |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN | Cakupan pelayanan kebakaran | 100% | 100% | 19.931.20 | 100% | 6.137.75 | 100% | 6.524.32 | - | 6.879.49 | 100% | 7.300.34 | 100% | 46.411.13 | Disdamkar |
| 5 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 3 Dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 50.00 | Disdamkar |
| 05 | URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 11.163.54 | | 15.555.74 | | 15.663.55 | | 17.636.00 | | 27.898.33 | | 87.881.88 | |
| | BADAN KESBANG. POLITIK DAN LINMAS | | | | 1.850.56 | | 2.030.61 | | 2.211.67 | | 2.420.84 | | 2.639.92 | | 11.153.59 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 620.54 | 100% | 677.58 | 100% | 723.34 | 100% | 783.68 | 100% | 839.05 | 100% | 3,644.19 | Kesbang |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 120.88 | 100% | 132.97 | 100% | 146.27 | 100% | 160.89 | 100% | 176.98 | 100% | 738.00 | Kesbang |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 99.67 | 100% | 109.64 | 100% | 120.60 | 100% | 132.66 | 100% | 145.93 | 100% | 608.49 | Kesbang |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) | 100% | 100% | 282.20 | 100% | 310.42 | 100% | 341.46 | 100% | 375.61 | 100% | 413.17 | 100% | 1.722.87 | Kesbang |
| 19 | PRGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | pengawasan terhadap orang asing dalam meniaga ketertiban dan keamanan | 31 orang | 31 orang | 233.03 | 31 orang | 256.34 | 31 orang | 281.97 | 31 orang | 310.17 | 31 orang | 341.18 | 31 orang | 1.422.68 | Kesbang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASA PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) | Persentase pemberantasan penyakit masyarakat | 100% | 100% | 164.44 | 100% | 180.88 | 100% | 198.97 | 100% | 218.86 | 100% | 240.75 | 100% | 1.003.89 | Kesbang |
| 21 | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT | Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 112.87 | 4 kegiatan | 124.15 | 4 kegiatan | 136.57 | 4 kegiatan | 150.23 | 4 kegiatan | 165.25 | 4 kegiatan | 689.07 | Kesbang |
| 37 | PROGRAM Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 216.93 | 7 kegiatan | 238.63 | 7 kegiatan | 262.49 | 7 kegiatan | 288.74 | 7 kegiatan | 317.61 | 7 kegiatan | 1.324.40 | Kesbang |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | 5.185.84 | 8.980.92 | 8.486.40 | 9.754.28 | 19.286.69 | 51.658.83 | | | | | | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 1.001.20 | 100% | 1.110.82 | 100% | 1.285.68 | 100% | 2.195.89 | 100% | 10.972.46 | 100% | 16.799.88 | BPBD |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 244.45 | 100% | 908.90 | 100% | 570.79 | 100% | 627.87 | 100% | 690.66 | 100% | 3.042.67 | BPBD |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 131.02 | 100% | 144.12 | 100% | 158.54 | 100% | 174.39 | 100% | 191.83 | 100% | 799.90 | BPBD |
| 34 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | Cakupan Layanan Informasi titik rawan bencana Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan | 55% | 9.43% | 752.99 | 42.95% | 3.751.33 | 59.80% | 3.099.07 | 79.80% | 3.046.58 | 100% | 3.351.24 | 100% | 14.001.21 | BPBD |
| 42 | PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA | Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani | 100% | 100% | 3.016.58 | 100% | 3.022.20 | 100% | 3.324.42 | 100% | 3.656.86 | 100% | 4.022.54 | 100% | 16.773.46 | BPBD |
| 43 | PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA | Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi | 100% | 100% | 39.59 | 100% | 43.55 | 100% | 47.91 | 100% | 52.70 | 100% | 57.97 | 100% | 241.71 | BPBD |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | 4.127.15 | 4.544.21 | 4.965.49 | 5.460.88 | 5.971.72 | 25.069.46 | | | | | | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 990.37 | 100% | 1.083.76 | 100% | 1.169.98 | 100% | 1.274.83 | 100% | 1.379.17 | 100% | 5.898.11 | SATPOL PP |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 265.64 | 100% | 292.21 | 100% | 321.43 | 100% | 353.57 | 100% | 388.93 | 100% | 1.621.78 | SATPOL PP |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Tingkat kepatuhan aparatur | - | 100% | 306.00 | 100% | 336.60 | 100% | 370.26 | 100% | 407.29 | 100% | 448.01 | 100% | 1.868.16 | SATPOL PP |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 77.14 | 100% | 84.85 | 100% | 93.34 | 100% | 102.67 | 100% | 112.94 | 100% | 470.93 | SATPOL PP |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 94.64 | 100% | 104.10 | 100% | 114.52 | 100% | 125.97 | 100% | 138.56 | 100% | 577.79 | SATPOL PP |
| 07 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI | Cakupan kualitas dan penyebarluasan informasi | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 11.00 | 100% | 11.00 | 100% | 12.00 | 100% | 21.00 | SATPOL PP |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dan RKPD | 100% | 100% | 9.88 | 100% | 10.87 | 100% | 11.96 | 100% | 13.15 | 100% | 14.47 | 100% | 60.33 | SATPOL PP |
| 44 | PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban | 65% | 75% | 2.383.47 | 80% | 2.621.82 | 85% | 2.884.00 | 90% | 3.172.40 | 95% | 3.489.64 | 95% | 14.551.35 | SATPOL PP |
| 01 URUSAN SOSIAL | | | | | 6.185.24 | 6.826.52 | 7.483.42 | 8.220.51 | 9.010.43 | 37.726.11 | | | | | | |
| DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | | | | | 6.185.24 | 6.826.52 | 7.483.42 | 8.220.51 | 9.010.43 | 37.726.11 | | | | | | |
| 02 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan perkantoran | 100% | 100% | 938.52 | 100% | 1.023.12 | 100% | 1.099.68 | 100% | 1.193.90 | 100% | 1.286.54 | 100% | 5.541.77 | Disosnaker |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA | Cakupan pelayanan sarana | 100% | 100% | 493.56 | 100% | 569.42 | 100% | 626.36 | 100% | 689.00 | 100% | 757.90 | 100% | 3.136.23 | Disosnaker |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PRASARANA APARATUR | dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 2.273.89 | 100% | 2.501.27 | 100% | 2.751.40 | 100% | 3.026.54 | 100% | 3.329.20 | 100% | 13.882.30 | Disosnaker |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 148.58 | 100% | 162.41 | 100% | 178.15 | 100% | 195.47 | 100% | 214.51 | 100% | 899.12 | Disosnaker |
| 08 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI | Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi | 100% | 100% | 79.27 | 100% | 87.20 | 100% | 95.92 | 100% | 105.51 | 100% | 107.18 | 100% | 475.08 | Disosnaker |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Kesesuaian Renja SKPD RKPD | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 50.00 | Disosnaker |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) | Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat | 56.34% | 68.81% | 289.41 | 76.61% | 318.35 | 84.41% | 350.18 | 92.20% | 385.20 | 100% | 423.72 | 100% | 1.766.87 | Disosnaker |
| 16 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | 1.678.83 | 100% | 1.854.25 | 100% | 2.041.17 | 100% | 2.251.29 | 100% | 2.481.42 | 100% | 10.306.95 | Disosnaker |
| | | Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|----------|----------------------------------|------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | | Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanoap darurat dan pasca bencana | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | 21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan | 100% | 100% | 273.18 | 100% | 300.50 | 100% | 330.55 | 100% | 363.60 | 100% | 399.97 | 100% | 1.667.80 | | Disosnaker |

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 182,918.27 | | 298,096.28 | | 475,783.46 | | 296,404.29 | | 471,524.04 | | 1,741,227.77 | |
| 01 | URUSAN TENAGA KERJA | | | | 6,017.13 | | 8,152.46 | | 9,019.82 | | 9,824.48 | | 10,879.25 | | 43,729.33 | |
| | 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi | 35.74% | 35.74% | 4,433.37 | 41.39% | 4,797.33 | 47.48% | 5,329.17 | 54.00% | 5,764.77 | 60.96% | 6,413.56 | 60.96% | 26,738.20 | Disosnaker |
| | | Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan | 9% | 23% | | 39% | | 57% | | 77% | | 100% | | 100% | | Disosnaker |
| | 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Persentase calon wirasahawan yang memperoleh pelatihan | 50% | 50% | 719.56 | 50% | 2,569.78 | 50% | 2,826.76 | 50% | 3,109.44 | 50% | 3,420.38 | 50% | 12,645.93 | Disosnaker |
| | 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama | 50% | 52% | 864.20 | 54% | 785.35 | 56% | 863.88 | 58% | 950.27 | 60% | 1,045.30 | 60% | 4,345.20 | Disosnaker |
| 02 | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 2,547.80 | | 2,619.87 | | 2,823.25 | | 3,062.83 | | 3,305.41 | | 14,359.15 | |
| | KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 2,547.80 | | 2,619.87 | | 2,823.25 | | 3,062.83 | | 3,305.41 | | 14,359.15 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 367.64 | 100% | 391.14 | 100% | 400.48 | 100% | 420.76 | 100% | 432.07 | 100% | 2,012.10 | KPP |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 70.17 | 100% | 76.94 | 100% | 84.38 | 100% | 92.57 | 100% | 101.58 | 100% | 425.64 | KPP |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 65.10 | 100% | 71.01 | 100% | 77.51 | 100% | 84.66 | 100% | 92.53 | 100% | 390.81 | KPP |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 145 buku | 70 buku | 10.00 | 70 buku | 10.00 | 70 buku | 10.00 | 70 buku | 10.00 | 70 buku | 10.00 | 70 buku | 50.00 | KPP |
| | 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan | 85.71% | 100% | 768.19 | 100% | 764.99 | 100% | 821.29 | 100% | 889.42 | 100% | 954.77 | 100% | 4,198.67 | KPP |
| | 16 PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) | Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif | 100% | 100% | 922.83 | 100% | 1,008.64 | 100% | 1,102.72 | 100% | 1,205.86 | 100% | 1,318.96 | 100% | 5,559.02 | KPP |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat | 1 paket | 1 paket | 249.27 | 1 paket | 193.08 | 1 paket | 212.39 | 1 paket | 233.63 | 1 paket | 256.99 | 1 paket | 1,145.36 | KPP |
| | 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN | Perempuan di lembaga pemerintah | 11.32 | 30% | 94.60 | 30% | 104.06 | 30% | 114.47 | 30% | 125.92 | 30% | 138.51 | 30% | 577.56 | KPP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | URUSAN PANGAN | | | | 1,536.39 | | 3,832.98 | | 3,657.78 | | 3,712.75 | | 3,766.50 | | 16,506.40 | |
| | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 1,536.39 | | 3,832.98 | | 3,657.78 | | 3,712.75 | | 3,766.50 | | 16,506.40 | |
| | 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) | Jumlah luas tanam padi pertahun | 17.245 Ha | 17.500 Ha | 1,536.39 | 17.750 Ha | 3,832.98 | 18.000 Ha | 3,657.78 | 18.250 Ha | 3,712.75 | 18.500 Ha | 3,766.50 | 18.500 Ha | 16,506.40 | Distanbunhut |
| 04 | URUSAN PERTANAHAN | | | | 260.29 | | 277.47 | | 305.22 | | 335.74 | | 368.57 | | 1,547.29 | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | | 260.29 | | 277.47 | | 305.22 | | 335.74 | | 368.57 | | 1,547.29 | |
| | 01 PROGRAM PENATAAN , PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah | 100% | 100% | 233.31 | 100% | 247.97 | 100% | 272.77 | 100% | 300.05 | 100% | 329.31 | 100% | 1,383.41 | BAGIAN APU |
| | 02 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN | Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | 100% | 100% | 26.98 | 100% | 29.50 | 100% | 32.45 | 100% | 35.69 | 100% | 39.26 | 100% | 163.88 | BAGIAN APU |
| 05 | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 51,779.62 | | 71,405.81 | | 78,261.21 | | 99,937.73 | | 67,308.01 | | 368,653.03 | |
| | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | | | | 47,455.94 | | 54,603.09 | | 61,563.87 | | 78,820.12 | | 61,671.42 | | 303,944.27 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 3,324.15 | 100% | 3,457.15 | 100% | 3,541.13 | 100% | 3,610.43 | 100% | 3,696.70 | 100% | 17,459.38 | DKP |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | prosentase sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 1,810.03 | 100% | 1,303.47 | 100% | 1,060.59 | 100% | 1,149.20 | 100% | 1,194.18 | 100% | 6,517.47 | DKP |
| | 03 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 191.62 | 100% | 194.00 | 100% | 196.00 | 100% | 198.00 | 100% | 200.00 | 100% | 979.62 | DKP |
| | 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase Penanganan Sampah | 78,5 % | 89,8 % | 33,923.26 | 91,1 % | 36,145.56 | 92,1 % | 38,511.93 | 93,3% | 41,095.84 | 94,4 % | 43,238.01 | 94,4 % | 192,914.60 | DKP |
| | 05 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau | 123.087,14 m2 | 126.597,14 m2 (0,0171%) | 8,196.88 | 127.283,84 m2 (0,0172 %) | 13,492.91 | 130.844,40 m2 (0,1777%) | 18,244.22 | 140.364,44 m2 (0,1899%) | 32,756.65 | 145.364,44 m2 (0,1967%) | 13,332.54 | 145.364,44 m2 (0,1967%) | 86,023.20 | DKP |
| | 06 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA) | Prosentase dokumen perencanaan SKPD | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 50.00 | DKP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 4,323.68 | | 16,802.71 | | 16,697.34 | | 21,117.60 | | 5,636.59 | | 64,708.76 | BLH |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 730.35 | 100% | 713.30 | 100% | 727.30 | 100% | 737.30 | 100% | 751.30 | 100% | 3,659.55 | BLH |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | prosentase sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 477.59 | 100% | 870.26 | 100% | 237.60 | 100% | 247.61 | 100% | 257.96 | 100% | 2,091.02 | BLH |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 95.20 | 100% | 101.20 | 100% | 101.20 | 100% | 101.20 | 100% | 101.20 | 100% | 500.00 | BLH |
| 04 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pencajukan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 2.045.31 | 100% | 2.200.70 | 100% | 2.411.00 | 100% | 2.676.08 | 100% | 2.969.06 | 100% | 12.302.16 | BLH |
| 05 | PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM | Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi | 100% | 100% | 267.14 | 100% | 12.309.80 | 100% | 12.349.57 | 100% | 16.380.15 | 100% | 480.00 | 100% | 41.940.36 | BLH |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup | 9 paket | 10 paket | 532.63 | 8 paket | 418.12 | 8 paket | 650.22 | 8 paket | 717.33 | 8 paket | 793.40 | 42 paket | 3,088.82 | BLH |
| 07 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup | 100% | 100% | 165.45 | 100% | 178.33 | 100% | 208.44 | 100% | 244.94 | 100% | 269.68 | 100% | 1,066.84 | BLH |
| 08 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD | Prosentase dokumen perencanaan SKPD | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 11.00 | 100% | 12.00 | 100% | 13.00 | 100% | 14.00 | 100% | 60.00 | BLH |
| 06 | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 5,157.04 | | 5,123.50 | | 5,608.22 | | 6,151.41 | | 6,737.92 | | 28,277.98 | |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | 5,157.04 | | 5,123.50 | | 5,608.22 | | 6,151.41 | | 6,737.92 | | 28,277.98 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 1,368.81 | 100% | 1,494.41 | 100% | 1,616.22 | 100% | 1,760.21 | 100% | 1,907.60 | 100% | 8,147.24 | Disduk |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 1,284.40 | 100% | 1,631.98 | 100% | 1,795.17 | 100% | 1,974.69 | 100% | 2,172.16 | 100% | 9,057.61 | Disduk |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 120 laporan | 28 laporan | 98.10 | 28 laporan | 107.91 | 28 laporan | 118.70 | 28 laporan | 130.57 | 28 laporan | 143.63 | 140 laporan | 598.91 | |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SKPD | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD | 40 buku | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 11.00 | 3 dokumen | 12.10 | 3 dokumen | 13.31 | 3 dokumen | 14.64 | 3 dokumen | 50.00 | Disduk |
| 15 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan | 90.02% | 92% | 2,395.73 | 94% | 1,878.21 | 95% | 2,066.03 | 97% | 2,272.63 | 98% | 2,499.89 | 98% | 10,424.22 | Disduk |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07 | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 3.873.45 | | 4.970.17 | | 6.143.05 | | 7.349.75 | | 5.565.12 | | 27.901.53 | |
| | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 3.873.45 | | 4.970.17 | | 6.143.05 | | 7.349.75 | | 5.565.12 | | 27.901.53 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 775.38 | 100% | 831.03 | 100% | 854.23 | 100% | 888.65 | 100% | 915.52 | 100% | 4.264.81 | BPMD dan Pemdes |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 137.59 | 100% | 610.54 | 100% | 418.60 | 100% | 460.46 | 100% | 506.50 | 100% | 2.133.69 | BPMD dan Pemdes |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 116.10 | 100% | 127.11 | 100% | 139.22 | 100% | 152.54 | 100% | 167.20 | 100% | 702.17 | BPMD dan Pemdes |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 50.00 | BPMD dan Pemdes |
| 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif | 32 Pasar, 13 BUMDesa | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 33.89 | 7 Pasar, 10 BUMDesa | 119.00 | 7 Pasar, 8 BUMDesa | 129.80 | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 128.80 | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 145.68 | 32 Pasar, 46 BUMDesa | 557.17 | BPMD dan Pemdes |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik | 262 orang | 210 orang | 430.26 | 200 orang | 693.64 | 200 orang | 1.803.77 | 200 orang | 2.694.89 | 200 orang | 558.72 | 1.010 orang | 6.181.28 | BPMD dan Pemdes |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan | 62 Desa/Kelurahan | 62 ds/kel. | 1.635.79 | 62 ds/kel. | 1.807.37 | 62 ds/kel. | 1.977.04 | 62 ds/kel. | 2.163.12 | 62 ds/kel. | 2.367.23 | 62 ds/kel. | 9.950.56 | BPMD dan Pemdes |
| x | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN | Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan | 0 | 100% | 287.49 | 100% | 301.87 | 100% | 316.96 | 100% | 332.81 | 100% | 349.45 | 100% | 1.588.57 | BPMD dan Pemdes |
| 23 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 9.883 RTS-PM | 9.041 | 168.31 | 9.041 RTS-PM | 176.73 | 9.041 RTS-PM | 185.56 | 9.041 RTS-PM | 194.84 | 9.041 RTS-PM | 204.58 | 9.041 RTS-PM | 930.02 | BPMD dan Pemdes |
| 24 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah kelompok posyandu aktif | 68 kelompok | 12 kelompok | 278.64 | 12 kelompok | 292.88 | 12 kelompok | 307.87 | 12 kelompok | 323.64 | 10 kelompok | 340.24 | 58 kelompok | 1.543.27 | BPMD dan Pemdes |
| 08 | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 4.577.25 | | 3.827.14 | | 3.955.64 | | 4.098.60 | | 4.254.28 | | 20.002.95 | |
| | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | | | | 4.577.25 | | 3.827.14 | | 3.955.64 | | 4.098.60 | | 4.254.28 | | 20.002.95 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 920.77 | 100% | 936.47 | 100% | 951.18 | 100% | 967.36 | 100% | 985.16 | 100% | 4.760.95 | KBKS |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Aparatur | 100% | 100% | 261.88 | 100% | 274.35 | 100% | 289.62 | 100% | 306.43 | 100% | 324.91 | 100% | 1.457.18 | KBKS |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 100% | 20.10 | 100% | 20.10 | 100% | 20.10 | 100% | 20.10 | 100% | 20.10 | 100% | 100.52 | KBKS |
| 04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 98.78 | 100% | 98.80 | 100% | 98.80 | 100% | 98.80 | 100% | 98.80 | 100% | 462.07 | KBKS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 50.00 | KBKS |
| 06 | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) | 75.05 | 75,26 | 1,937.78 | 75,52 | 1,025.36 | 76,03 | 1,037.94 | 76,40 | 1,053.39 | 77,24 | 1,068.81 | 77,24 | 5,391.40 | KBKS |
| 07 | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun | 0,22 % | 0,19 % | 645.09 | 0,18 % | 711.00 | 0,17 % | 727.40 | 0,16 % | 745.44 | 0,15 % | 765.29 | 0,15 % | 3,648.06 | KBKS |
| 08 | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 51.99% | 53.62% | 218.16 | 55.14% | 239.90 | 56.56% | 258.32 | 57.88% | 278.58 | 59.12% | 300.87 | 59.12% | 1,295.82 | KBKS |
| 10 | PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA | Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif | 100% | 100% | 464.69 | 100% | 511.15 | 100% | 562.27 | 100% | 618.50 | 100% | 680.35 | 100% | 2,836.95 | KBKS |
| 09 | URUSAN PERHUBUNGAN | | | | 29,180.68 | | 92,934.27 | | 74,347.83 | | 70,645.74 | | 70,787.46 | | 355,991.98 | |
| | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA | | | | 29,180.68 | | 92,934.27 | | 74,347.83 | | 70,645.74 | | 70,787.46 | | 355,991.98 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai | 94.05% | 100% | 7,737.42 | 100% | 27,208.83 | 100% | 28,629.93 | 100% | 30,127.95 | 100% | 31,696.38 | 100% | 143,496.52 | Dishub |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai | 85.61% | 100% | 2,182.17 | 100% | 4,833.35 | 100% | 10,675.88 | 100% | 5,178.32 | 100% | 2,773.58 | 100% | 25,643.30 | Dishub |
| 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia | 95.01% | 100% | 61.05 | - | - | 100% | 67.15 | - | - | 100% | 73.87 | 100% | 202.07 | Dishub |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 96.58% | 100% | 324.81 | 100% | 370.96 | 100% | 371.60 | 100% | 372.30 | 100% | 373.47 | 100% | 1,813.14 | Dishub |
| 15 | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | Terwujudnya Pemanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 89.39% | 100% | 12,532.48 | 100% | 53,497.10 | 100% | 26,876.84 | 100% | 26,468.10 | 100% | 26,521.17 | 100% | 145,895.69 | Dishub |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal | 99.34% | 100% | 6,332.76 | 100% | 7,013.02 | 100% | 7,714.33 | 100% | 8,485.76 | 100% | 9,334.34 | 100% | 38,880.21 | Dishub |
| 23 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang baik | 98.87% | 100% | 10.00 | 100% | 11.00 | 100% | 12.10 | 100% | 13.31 | 100% | 14.64 | 100% | 61.05 | Dishub |
| 10 | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 9,215.81 | | 23,363.10 | | 3,853.24 | | 4,025.87 | | 3,312.76 | | 43,770.78 | |
| | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA | | | | 9,215.81 | | 23,363.10 | | 3,853.24 | | 4,025.87 | | 3,312.76 | | 43,770.78 | |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif | 62.76% | 100% | 9,215.81 | 100% | 23,363.10 | 100% | 3,853.24 | 100% | 4,025.87 | 100% | 3,312.76 | 100% | 43,770.78 | Dishub |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | 3.906.72 | | 4.409.79 | | 4.828.77 | | 5.299.65 | | 5.487.18 | | 23.932.12 | |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 3.906.72 | | 4.409.79 | | 4.828.77 | | 5.299.65 | | 5.487.18 | | 23.932.12 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 3 telepon 11 mobil dan 19 sepeda motor 650 materai 2.100 buah 850 lembar, 5 buku 372 bulan 92 jenis 6 paket 35.472 exp/bulan 687 kotak 36 kg 768 galon 1 LS 152.215 liter 30 unit 2 Orang 9 dus | 12 bulan | 768.34 | 12 bulan | 839.68 | 12 bulan | 901.64 | 12 bulan | 979.81 | 12 bulan | 1,054.79 | 60 bulan | 4,544.26 | Diskopperindag |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 11 mobil 88 unit 48 bulan 1 LS 15 sepeda motor 1 paket | 12 bulan | 747.90 | 12 bulan | 940.59 | 12 bulan | 1,034.64 | 12 bulan | 1,138.11 | 12 bulan | 932.48 | 60 bulan | 4,793.71 | Diskopperindag |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tercapainya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 42 ortang 48 bulan 141 buku | 12 bulan | 139.72 | 12 bulan | 153.69 | 12 bulan | 169.06 | 12 bulan | 185.97 | 12 bulan | 204.57 | 60 bulan | 853.01 | Diskopperindag |
| 15 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tercapainya rencana kerja secara terprogram sesuai aturan | 159 buku | 12 bulan | 5.86 | 12 bulan | 6.45 | 12 bulan | 7.09 | 12 bulan | 7.80 | 12 bulan | 8.58 | 60 bulan | 35.79 | Diskopperindag |
| 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM | Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM | 200 UKM | 30 UMKM | 11.53 | 30 UMKM | 12.69 | 30 UMKM | 13.95 | 30 UMKM | 15.35 | 30 UMKM | 16.88 | 150 UMKM | 70.40 | Diskopperindag |
| 15 | PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF | Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif | 2 koperasi | 2 koperasi | 474.40 | 2 koperasi | 521.84 | 2 koperasi | 574.02 | 2 koperasi | 631.42 | 2 koperasi | 694.57 | 2 koperasi | 2.896.25 | Diskopperindag |
| 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah | 8 UMKM 4 koperasi | 13 UMKM | 541.40 | 13 UMKM | 595.54 | 13 UMKM | 655.10 | 13 UMKM | 720.61 | 13 UMKM | 792.67 | 65 UMKM | 3,305.32 | Diskopperindag |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 3.920 orang 1.271 koperasi | 12 bulan | 1.192.40 | 12 bulan | 1.311.64 | 12 bulan | 1.442.80 | 12 bulan | 1.587.08 | 12 bulan | 1.745.79 | 60 bulan | 7.279.72 | Diskopperindag |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI | Tercapainya pengembangan sistem data/informasi | 156 buku | 62 buku | 25.17 | 62 buku | 27.69 | 62 buku | 30.45 | 62 buku | 33.50 | 62 buku | 36.85 | 310 buku | 153.66 | Diskopperindag |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | 174.41 | | 191.86 | | 211.04 | | 232.15 | | 255.36 | | 1,064.82 | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 174.41 | | 191.86 | | 211.04 | | 232.15 | | 255.36 | | 1,064.82 | |
| 17 | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Tersedianya Informasi Produk Unqgulan Daerah | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 42.47 | 6 Kecamatan | 46.71 | 6 Kecamatan | 51.39 | 6 Kecamatan | 56.53 | 6 Kecamatan | 62.18 | 6 Kecamatan | 259.27 | Bag.Adm Perekonomian |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI | Tersedianya Informasi Peluang Investasi | - | 6 Kecamatan | 104.89 | 6 Kecamatan | 115.38 | 6 Kecamatan | 126.91 | 6 Kecamatan | 139.61 | 6 Kecamatan | 153.57 | 6 Kecamatan | 640.35 | Baq.Adm Perekonomian |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | Tersedianya informasi peluang investasi | - | 6 Kecamatan | 27.06 | 6 Kecamatan | 29.76 | 6 Kecamatan | 32.74 | 6 Kecamatan | 36.01 | 6 Kecamatan | 39.62 | 6 Kecamatan | 165.19 | Baq.Adm Perekonomian |
| 13 | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 14,991.32 | | 10,980.30 | | 11,578.39 | | 12,486.13 | | 13,485.44 | | 63,496.08 | |
| | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | 14,991.32 | | 10,980.30 | | 11,578.39 | | 12,486.13 | | 13,485.44 | | 63,496.08 | |
| 1 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional | 60% | 70% | 743.18 | 75% | 855.40 | 80% | 938.96 | 80% | 1,032.86 | 80% | 1,136.14 | 80% | 4,706.54 | Disdikpora |
| 2 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA | Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan nasional | 11 Cabang | 16 Cabang | 14,248.14 | 16 Cabang | 10,124.90 | 16 Cabang | 10,639.43 | 16 Cabang | 11,453.27 | 16 Cabang | 12,349.30 | 16 Cabang | 58,789.54 | Disdikpora |
| 01 | URUSAN KEBUDAYAAN | | | | 42,916.88 | | 60,758.83 | | 266,146.61 | | 63,605.43 | | 270,168.13 | | 703,251.64 | |
| | DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG | | | | 42,916.88 | | 60,758.83 | | 266,146.61 | | 63,605.43 | | 270,168.13 | | 703,251.64 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 2,014.02 | 100% | 1,988.55 | 100% | 2,075.33 | 100% | 2,160.75 | 100% | 2,247.03 | 100% | 10,485.68 | Disbud |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan Layanan sarana prasarana aparatur | 100% | 100% | 520.00 | 100% | 473.33 | 100% | 510.93 | 100% | 548.53 | 100% | 586.13 | 100% | 2,638.92 | Disbud |
| 04 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 134.52 | 100% | 133.19 | 100% | 147.29 | 100% | 161.39 | 100% | 175.49 | 100% | 751.88 | Disbud |
| 05 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100% | 100% | 10.01 | 100% | 11.00 | 100% | 12.00 | 100% | 13.00 | 100% | 14.00 | 100% | 60.01 | Disbud |
| 06 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | 1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keaqamaan 2. Desa Adat yang dibina 3. kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keaqamaan 4. Karya seni yang di revitalisasi | 108 upacara keaqamaan | 114 upacara keaqamaan | 38,885.78 | 114 upacara keaqamaan | 56,482.99 | 114 upacara keaqamaan | 262,007.70 | 114 upacara keaqamaan | 59,199.28 | 114 upacara keaqamaan | 265,662.76 | 114 upacara keaqamaan | 682,238.51 | Disbud |
| | | | 10 Desa Adat | 40 Desa Adat | | 40 Desa Adat | | 42 Desa Adat | | 0 | | 0 | | 122 Desa Adat | | |
| | | | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | | 98 karya seni | 104 sekaa | | 110 sekaa | | 114 sekaa | | 118 sekaa | | 123 sekaa | | 123 sekaa | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|--|--|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 07 | PROGRAM PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA | 1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi | 70 cakep 52 situs | 90 cakep - | 1,352.55 - | 110 cakep 54 situs | 1,669.77 - | 125 cakep - | 1,393.36 - | 140 cakep 56 situs | 1,522.48 - | 150 cakep 58 situs | 1,482.71 - | 615 cakep 58 situs | 7,076.64 | Disbud |
| 17 | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | 1,740.67 | | 2,122.40 | | 1,912.64 | | 2,077.16 | | 2,233.34 | | 10,005.49 | | |
| | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | | | | 1,740.67 | | 2,122.40 | | 1,912.64 | | 2,077.16 | | 2,233.34 | | 10,005.49 | | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 556.29 | 100% | 616.64 | 100% | 668.04 | 100% | 736.41 | 100% | 800.49 | 100% | 3,377.87 | Kantor Perpusda |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 363.92 | 100% | 719.22 | 100% | 405.65 | 100% | 445.71 | 100% | 489.78 | 100% | 2,424.28 | Kantor Perpusda |
| | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 300 Orang | 60 Orang | 37.73 | 60 Orang | 39.61 | 60 Orang | 41.59 | 60 Orang | 43.67 | 60 Orang | 45.85 | 300 Orang | 208.45 | Kantor Perpusda |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 63.60 | 100% | 69.36 | 100% | 75.70 | 100% | 82.67 | 100% | 90.33 | 100% | 381.65 | Kantor Perpusda |
| | 19 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Kunjungan ke Perpustakaan | 12,305 Orang | 5,100 Orang | 709.14 | 5,600 Orang | 667.57 | 6,200 Orang | 711.67 | 6,800 Orang | 758.71 | 7,500 Orang | 796.88 | 31,200 Orang | 3,563.23 | Kantor Perpusda |
| | # | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 10.00 | 3 Dokumen | 50.00 | Kantor Perpusda |
| 24 | URUSAN KEARSIPAN | | | | 5,042.80 | | 3,126.34 | | 3,130.75 | | 3,558.87 | | 3,609.31 | | 18,737.20 | | |
| | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | 5,042.80 | | 3,126.34 | | 3,130.75 | | 3,558.87 | | 3,609.31 | | 18,737.20 | | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 521.78 | 100% | 601.39 | 100% | 626.00 | 100% | 666.84 | 100% | 700.77 | 100% | 3,116.79 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaturnya | 100% | 100% | 3,255.37 | 100% | 838.30 | 100% | 651.03 | 100% | 854.54 | 100% | 668.89 | 100% | 6,268.12 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Sumber daya Aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya | 323 orang | 139 orang | 86.94 | 139 orang | 95.63 | 139 orang | 105.19 | 139 orang | 115.71 | 139 orang | 127.29 | 695 orang | 530.76 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 66.00 | 100% | 72.00 | 100% | 78.60 | 100% | 85.86 | 100% | 93.85 | 100% | 396.31 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 30 buku, 3 dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 15 dokumen | 50.00 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 15 | PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN | Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku | 98 SKPD/Desa | 86 SKPD/Desa | 87.71 | 86 SKPD/Desa | 96.48 | 86 SKPD/Desa | 106.12 | 86 SKPD/Desa | 116.74 | 86 SKPD/Desa | 128.41 | 98 SKPD/Desa | 535.45 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH | Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan | 5 jenis arsip | 5 jenis arsip | 387.69 | 5 jenis arsip | 722.50 | 5 jenis arsip | 794.75 | 5 jenis arsip | 874.22 | 5 jenis arsip | 961.64 | 5 jenis arsip | 4,009.93 | Ktr. Arsip Daerah |
| | 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI | Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan | 5 Materi | 5 Materi | 627.32 | 5 Materi | 690.05 | 5 Materi | 759.06 | 5 Materi | 834.96 | 5 Materi | 918.46 | 5 Materi | 3,829.84 | Ktr. Arsip Daerah |

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | URUSAN PILIHAN | | | | 53,837.94 | | 62,911.50 | | 73,468.92 | | 76,566.10 | | 85,411.83 | | 352,196.29 | |
| 01 | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 9,014.36 | | 12,520.15 | | 13,498.73 | | 21,402.44 | | 23,495.43 | | 79,931.11 | |
| | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | 9,014.36 | | 12,520.15 | | 13,498.73 | | 21,402.44 | | 23,495.43 | | 79,931.11 | |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | Jumlah produksi perikanan | 155.646,48 ton | 7.021.00 ton | 36.89 | 7.154.00 ton | 37.96 | 7.293.0 ton | 41.76 | 7.433.0 ton | 45.94 | 7.575.0 ton | 50.53 | 36.476.00 ton | 213.08 | Dinas PPK |
| 16 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN | Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan | 5 kelompok | 4 kelompok | 82.26 | 3 kelompok | 90.48 | 3 kelompok | 99.53 | 3 kelompok | 109.49 | 3 kelompok | 120.43 | 16 kelompok | 502.19 | Dinas PPK |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT | Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim | 5 kali | 1 kali | 1.689.85 | 1 kali | 3.500.00 | 1 kali | 4.000.00 | 1 kali | 4.400.00 | 1 kali | 4.840.00 | 5 kali | 18.429.85 | Dinas PPK |
| 20 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | Produksi perikanan budidaya | 586.80 ton | 598 ton | 402.87 | 603.00 ton | 424.69 | 611.00 ton | 447.77 | 617.00 ton | 472.20 | 623.00 ton | 519.42 | 3.052.00 ton | 2.266.94 | Dinas PPK |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi perikanan tangkap | 6.890,70 ton | 6,423.00 ton | 646.00 | 6,551.00 ton | 728.75 | 6,682.00 ton | 801.63 | 6,816.00 ton | 7,509.18 | 6,952.00 ton | 8,260.10 | 33,424.00 ton | 17,945.66 | Dinas PPK |
| 23 | PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 4.866.22 ton | 5.062 ton | 8.78 | 5.164 ton | 24.65 | 5.267 ton | 26.62 | 5.372 ton | 27.68 | 5.480 ton | 29.85 | 26.345 ton | 117.58 | Dinas PPK |
| 30 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN | Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan | 155 exp | 105 exp | 271.67 | 105 exp | 100.30 | 105 exp | 105.33 | 105 exp | 110.87 | 105 exp | 116.95 | 525 exp | 705.13 | Dinas PPK |
| 34 | PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 4.866,22 ton | 5,062.820 ton | 5.46 | 5,164.076 ton | 6.00 | 5,267.358 ton | 6.60 | 5,372.705 ton | 7.26 | 5,480.159 ton | 7.99 | 5,480.159 ton | 33.32 | Dinas PPK |
| xx | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL | Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan | - | - | 0.00 | 20 kelompok | 455.00 | 20 kelompok | 460.00 | 20 kelompok | 460.00 | 20 kelompok | 465.00 | 100 kelompok | 1,840.00 | Dinas PPK |
| xx | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA | Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari | - | 1 kawasan | 5.870.59 | 1 kawasan | 7.152.30 | 1 kawasan | 7.509.48 | 1 kawasan | 8.259.83 | 2 kawasan | 9.085.16 | 6 kawasan | 37.877.36 | Dinas PPK |
| 02 | URUSAN PARIWISATA | | | | 18,766.11 | | 22,291.61 | | 23,922.42 | | 23,788.84 | | 26,195.46 | | 114,964.45 | |
| | DINAS PARIWISATA | | | | 18,766.11 | | 22,291.61 | | 23,922.42 | | 23,788.84 | | 26,195.46 | | 114,964.45 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 2,074.64 | 100% | 2,096.97 | 100% | 2,533.03 | 100% | 2,252.35 | 100% | 2,361.95 | 100% | 11,318.94 | Dinas Pariwisata |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | prosentase sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 1.467.13 | 100% | 839.15 | 100% | 881.11 | 100% | 925.16 | 100% | 971.42 | 100% | 5.083.97 | Dinas Pariwisata |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 148.85 | 100% | 155.99 | 100% | 163.49 | 100% | 171.37 | 100% | 179.64 | 100% | 819.34 | Dinas Pariwisata |
| 03 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD | Prosentase dokumen perencanaan SKPD | 100% | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 50.00 | Dinas Pariwisata |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara | 3.934.384 | 5% | 11.172.51 | 5% | 14.952.36 | 5% | 15.968.59 | 5% | 15.668.67 | 5% | 17.068.01 | 25% | 74.830.14 | Dinas Pariwisata |
| 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | Prosentase DTW yang ditata | 58% | 64% | 3.241.13 | 66% | 3.707.37 | 69% | 3.648.85 | 72% | 4.178.62 | 72% | 4.814.34 | 72% | 19.590.30 | Dnas Pariwisata |
| 03. | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN | jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan | 488 orang | 245 orang | 435.54 | 170 orang | 302.27 | 235 orang | 478.85 | 170 orang | 333.25 | 220 orang | 527.16 | 1,210 orang | 2,077.07 | Dnas Pariwisata |
| 04. | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA | jumlah produk wisata yang dibina | 180 usaha + 4 obyek | 255 usaha + 6 obyek | 216.33 | 255 usaha + 6 obyek | 227.50 | 255 usaha + 6 obyek | 238.50 | 255 usaha + 6 obyek | 249.42 | 255 usaha + 6 obyek | 262.94 | 1.500 usaha + 36 obyek | 1.194.69 | Dnas Pariwisata |
| 03 | URUSAN PERTANIAN | | | | 22,301.08 | | 24,615.78 | | 28,547.23 | | 28,077.54 | | 32,099.23 | | 135,640.85 | |
| | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 10,424.79 | | 11,518.29 | | 13,329.23 | | 12,640.96 | | 15,202.29 | | 63,115.55 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran | 60 bulan | 12 bulan | 2,674.35 | 12 bulan | 2,949.81 | 12 bulan | 3,215.29 | 12 bulan | 3,517.32 | 12 bulan | 3,838.55 | 60 bulan | 16,195.305 | Distanbunhut |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 60 bulan | 12 bulan | 1,322.84 | 12 bulan | 1,825.82 | 12 bulan | 2,008.41 | 12 bulan | 2,209.25 | 12 bulan | 2,430.17 | 60 bulan | 9,796.485 | Distanbunhut |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN APARATUR | Jumlah capaian kinerja dan keuangan SKPD | 60 bulan | 12 bulan | 210.20 | 12 bulan | 230.45 | 12 bulan | 253.49 | 12 bulan | 278.84 | 12 bulan | 306.73 | 60 bulan | 1,279.705 | Distanbunhut |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Jumlah peserta pelatihan pertanian | 280 orang | 345 orang | 444.83 | 345 orang | 401.91 | 345 orang | 419.65 | 345 orang | 503.30 | 345 orang | 563.62 | 1.725 orang | 2,333.319 | Distanbunhut |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan | 15 kali | 4 Kali | 1,452.18 | 5 kali | 1,568.36 | 5 kali | 1,760.93 | 5 kali | 1,979.91 | 5 kali | 2,229.35 | 24 Kali | 8,990.730 | Distanbunhut |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN | Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun | 120.972 ton | 122.500 ton | 2,735.22 | 125.000 ton | 4,092.52 | 127.500 ton | 4,047.54 | 130.000 ton | 3,607.80 | 132.500 ton | 3,868.07 | 132.500 ton | 18,351.149 | Distanbunhut |
| 20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN | Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan | 52 orang | 52 orang | 1,267.27 | 52 orang | 247.49 | 52 orang | 1,401.47 | 52 orang | 299.46 | 52 orang | 1,695.78 | 52 orang | 4,911.459 | Distanbunhut |
| 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun | 3 jenis | 2 jenis | 6.70 | 2 jenis | 7.10 | 2 jenis | 7.81 | 2 jenis | 8.59 | 2 jenis | 9.45 | 2 jenis | 39.653 | Distanbunhut |
| 27 | PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS | Jumlah komoditi yang dibina | 5 komoditi | - | 0.00 | 5 komoditi | 12.04 | 5 komoditi | 13.57 | 5 komoditi | 15.31 | 5 komoditi | 17.28 | 25 komoditi | 58.207 | Distanbunhut |
| 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | jumlah data yang informatif | 3 jenis | 5 jenis | 311.21 | 3 jenis | 182.79 | 3 jenis | 201.07 | 3 jenis | 221.18 | 3 jenis | 243.29 | 3 jenis | 1,159.538 | Distanbunhut |
| | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | 11,876.29 | | 13,097.49 | | 15,217.99 | | 15,436.58 | | 16,896.95 | | 72,525.30 | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 5 tahun | 1 tahun | 2,089.50 | 1 tahun | 2,326.03 | 1 tahun | 2,528.47 | 1 tahun | 2,761.15 | 1 tahun | 3,006.10 | 5 tahun | 12,711.25 | Dinas PPK |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional | 5 tahun anggaran | 1 tahun anggaran | 574.23 | 1 tahun anggaran | 631.65 | 1 tahun anggaran | 1,194.82 | 1 tahun anggaran | 764.30 | 1 tahun anggaran | 840.73 | 5 tahun anggaran | 4,005.74 | Dinas PPK |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun | 6 jenis dokumen | 6 jenis dokumen | 200.54 | 6 jenis dokumen | 207.92 | 6 jenis dokumen | 218.01 | 6 jenis dokumen | 228.61 | 6 jenis dokumen | 239.74 | 6 jenis dokumen | 1,094.82 | Dinas PPK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit | 65.427 ekor | 65500 ekor | 2.354.33 | 66300 ekor | 2.589.76 | 67300 ekor | 2.848.74 | 68800 ekor | 3.133.61 | 70000 ekor | 3.446.97 | 71000 ekor | 14.373.40 | Dinas PPK |
| 22 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN | Jumlah Populasi ternak | 1.486.869 ekor | 1501775 ekor | 6.090.34 | 1509284 ekor | 6.929.58 | 1516831 ekor | 7.471.91 | 1524914 ekor | 8.061.60 | 15320361 ekor | 8.238.56 | 15320361 ekor | 36.791.98 | Dinas PPK |
| 23 | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN | Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan | 4.579 ton | 4764 ton | 51.00 | 4859,28 ton | 56.10 | 4,956.466 ton | 61.07 | 5,055.595 ton | 66.50 | 5,156.707 ton | 73.15 | 2,04732224 ton | 307.82 | Dinas PPK |
| 25 | PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN | Jumlah Populasi ternak | 1.494.309 ekor | 1.501.775 ekor | 24.40 | 1.509.284 ekor | 26.84 | 1.516.831 ekor | 29.52 | 1.524.914 ekor | 32.48 | 1.532.036 ekor | 31.94 | 1.532.036 ekor | 145.18 | Dinas PPK |
| 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan SKPD | 3 jenis | 3 jenis | 8.33 | 3 jenis | 9.16 | 3 jenis | 10.08 | 3 jenis | 11.09 | 3 jenis | 11.64 | 3 jenis | 50.31 | Dinas PPK |
| 30 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN | Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 308.12 | 1 jenis dokumen | 185.45 | 1 jenis dokumen | 199.00 | 1 jenis dokumen | 213.90 | 1 jenis dokumen | 213.90 | 1 jenis dokumen | 1.120.38 | Dinas PPK |
| 31 | PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH | Jumlah produksi daging | 16.037 ton | 16.679 ton | 97.56 | 16.694 ton | 107.31 | 16.728 ton | 118.04 | 16.862 ton | 129.85 | 16.947 ton | 142.83 | 83,911 | 595.60 | Dinas PPK |
| 20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN | Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja | 39 orang | 33 orang | 77.94 | 33 orang | 27.68 | 33 orang | 538.33 | 33 orang | 33.49 | 33 orang | 651.38 | 33 orang | 1,328.83 | Dinas PPK |
| 04 | URUSAN KEHUTANAN | | | | 73.00 | | 218.14 | | 238.65 | | 259.21 | | 279.82 | | 1,068.81 | |
| | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 73.00 | | 218.14 | | 238.65 | | 259.21 | | 279.82 | | 1,068.81 | |
| 15 | PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | Jumlah kelompok penghijauan | 22 kelompok | 16 kelompok | 61.38 | 21 kelompok | 213.07 | 21 kelompok | 233.07 | 21 kelompok | 253.07 | 21 kelompok | 273.07 | 105 kelompok | 1,033.660 | Distanbunhut |
| 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN | Luas hutan yang masyarakatnya perlu dibina | 1.779.87 Ha | 1.779.87 Ha | 11.62 | 1.779.87 Ha | 5.07 | 1.779.87 Ha | 5.58 | 1.779.87 Ha | 6.14 | 1.779.87 Ha | 6.75 | 1.779.87 Ha | 35.151 | Distanbunhut |
| 02 | URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | 300.55 | | 150.18 | | 165.20 | | 181.72 | | 199.89 | | 997.52 | |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | | 300.55 | | 150.18 | | 165.20 | | 181.72 | | 199.89 | | 997.52 | |
| 15 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN | Terlaksananya pembinaan Usaha SDA | 6 Paket | 16.38% | 290.57 | 25.74% | 139.20 | 35.05% | 153.12 | 44.36% | 168.43 | 53.62% | 185.28 | 53.62% | 936.60 | DCK |
| 17 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN | Terlaksananya pembinaan Usaha Energi | 1 Paket | 44.50% | 9.98 | 49.50% | 10.98 | 54.50% | 12.07 | 59.50% | 13.28 | 64.50% | 14.61 | 64.50% | 60.92 | DCK |
| 06 | URUSAN PERDAGANGAN | | | | 2,303.42 | | 1,986.49 | | 3,854.64 | | 1,490.11 | | 1,639.12 | | 11,273.78 | |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 2,303.42 | | 1,986.49 | | 3,854.64 | | 1,490.11 | | 1,639.12 | | 11,273.78 | |
| 15 | PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | Tercapainya peningkatan perlindungan terhadap konsumen | 5.600 timbangan | 3500 UTPP | 1.343.35 | 3500 UTPP | 934.03 | 3500 UTPP | 257.44 | 3500 UTPP | 283.18 | 3500 UTPP | 311.50 | 3500 UTPP | 3.129.51 | Diskopperindaq |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri | 480 perusahaan 192 kali 113 perajin 4.500 rumah tangga 3 pameran | 12 bulan | 960.06 | 12 bulan | 1.052.46 | 12 bulan | 3.597.20 | 12 bulan | 1.206.93 | 12 bulan | 1,327.62 | 60 bulan | 8,144.27 | Diskopperindaq |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 07 | URUSAN INDUSTRI | | | | 1,079.42 | | 1,129.14 | | 3,242.06 | | 1,366.26 | | 1,502.89 | | 8,319.76 | |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 1,079.42 | | 1,129.14 | | 3,242.06 | | 1,366.26 | | 1,502.89 | | 8,319.76 | |
| | 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah | 1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha | 408 IKM | 982.18 | 408 IKM | 1,022.18 | 408 IKM | 3,124.40 | 408 IKM | 1,236.84 | 408 IKM | 1,360.53 | 2.040 IKM | 7,726.14 | Diskopperindag |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI | Mendayagunakan secara maksimal proses produksi | 17 ququs 40 orang | 1 ququs | 97.23 | 1 ququs | 106.96 | 1 ququs | 117.65 | 1 ququs | 129.42 | 1 ququs | 142.36 | 5 ququs | 593.62 | Diskopperindag |

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 254,302.38 | | 275,770.25 | | 305,348.30 | | 331,899.63 | | 362,343.22 | | 1,512,274.73 | |
| 01 | FUNGSI PERENCANAAN | | | | 7,842.00 | | 6,810.55 | | 7,457.50 | | 8,236.53 | | 9,024.63 | | 39,257.63 | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 7,842.00 | | 6,810.55 | | 7,457.50 | | 8,236.53 | | 9,024.63 | | 39,257.63 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 14 kegiatan | 13 kegiatan | 933.24 | 13 kegiatan | 1,115.53 | 13 kegiatan | 1,227.09 | 13 kegiatan | 1,349.81 | 13 kegiatan | 1,484.78 | 13 kegiatan | 6,110.45 | Bappeda Litbang |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 483.83 | 100% | 560.13 | 100% | 596.14 | 100% | 635.76 | 100% | 679.33 | 100% | 2,955.18 | Bappeda Litbang |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 laporan | 1 laporan | 356.82 | 1 laporan | 431.11 | 1 laporan | 474.22 | 1 laporan | 521.65 | 1 laporan | 573.82 | 1 laporan | 2,357.62 | Bappeda Litbang |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPDP | 100% | 100% | 38.59 | 100% | 11.14 | 100% | 12.25 | 100% | 13.48 | 100% | 14.82 | 100% | 90.28 | Bappeda Litbang |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | TERSEDINYA DATA DAN INFORMASI YANG MEMADAI | 1 paket | 1 paket | 241.72 | 1 paket | 265.887 | 1 paket | 292.476 | 1 paket | 321.723 | 1 paket | 353.896 | 1 paket | 1,475.698 | Bappeda Litbang |
| 21 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian antara RKPDP dengan RPJMD | 100% | 100% | 5,067.82 | 100% | 3,648.40 | 100% | 3,999.14 | 100% | 4,384.25 | 100% | 4,807.13 | 100% | 21,793.15 | Bappeda Litbang |
| 22 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 594.572 | 6 Kecamatan | 640.39 | 6 Kecamatan | 704.43 | 6 Kecamatan | 774.87 | 6 Kecamatan | 852.36 | 6 Kecamatan | 3,566.63 | Bappeda Litbang |
| 24 | PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 1 paket | 1 paket | 125.42 | 4 paket | 137.96 | 3 paket | 151.75 | 3 paket | 235.00 | 2 paket | 258.50 | 15 paket | 908.63 | Bappeda Litbang |
| 02 | FUNGSI KEUANGAN | | | | 35,871.99 | | 42,446.51 | | 46,665.42 | | 51,316.21 | | 56,421.08 | | 232,721.21 | |
| | DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG | | | | 25,686.53 | | 31,242.50 | | 34,341.00 | | 37,759.35 | | 41,508.54 | | 170,537.92 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Waktu pelayanan administrasi perkantoran | 60 bln | 12 bln | 2,382.99 | 12 bln | 2,612.04 | 12 bln | 2,847.50 | 12 bln | 3,116.50 | 12 bln | 3,401.40 | 60 bln | 14,360.42 | Dispenda |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 60 bln | 12 bulan | 1,630.86 | 12 bulan | 1,366.60 | 12 bulan | 1,503.26 | 12 bulan | 1,653.58 | 12 bulan | 1,818.94 | 60 bulan | 7,973.24 | Dispenda |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 60 bulan | 12 bulan | 176.39 | 12 bulan | 194.03 | 12 bulan | 213.43 | 12 bulan | 234.78 | 12 bulan | 258.25 | 60 bulan | 1,076.89 | Dispenda |
| 08 | PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Berkembangnya nilai budaya | 60 bulan | 214 Subak | 13,536.92 | 214 Subak | 14,890.61 | 214 Subak | 16,379.67 | 214 Subak | 18,017.64 | 214 Subak | 19,819.40 | 214 Subak | 82,644.23 | Dispenda |
| 09 | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD | 12 bulan | 12 bulan | 8.31 | 12 bulan | 9.14 | 12 bulan | 10.06 | 12 bulan | 11.07 | 12 bulan | 12.17 | 60 bln | 50.75 | Dispenda |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|--|--|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | 60 bulan | 10 Jenis Pajak | 7,951.05 | 10 Jenis Pajak | 12,170.08 | 10 Jenis Pajak | 13,387.08 | 10 Jenis Pajak | 14,725.79 | 10 Jenis Pajak | 16,198.37 | 10 Jenis Pajak | 64,432.38 | Dispenda |
| | | BAGIAN KEUANGAN | | | | 10,185.47 | | 11,204.01 | | 12,324.41 | | 13,556.86 | | 14,912.54 | | 62,183.29 | |
| | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 58.44 | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 64.28 | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 70.71 | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 77.78 | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 85.56 | 53 SKPD dan 12 puskesmas | 356.78 | Bag. Keuangan |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel | 1610 bk | 495 bk | 302.20 | 495 bk | 332.42 | 495 bk | 365.66 | 495 bk | 402.23 | 495 bk | 442.45 | 2475 bk | 1,844.95 | Bag. Keuangan |
| | 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah | 20,635 bk | 4,679 bk | 9,690.88 | 4,679 bk | 10,659.97 | 4,679 bk | 11,725.97 | 4,679 bk | 12,898.56 | 4,679 bk | 14,188.42 | 23,395 bk | 59,163.81 | Bag. Keuangan |
| | 18 | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA | Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung | 6900 SPM/UP/ GU/TU | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 133.95 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 147.34 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 162.07 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 178.28 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 196.11 | 7860 SPM/UP/ GU/TU | 817.75 | Bag. Keuangan |
| 03 | | FUNGSI KEPEGAWAIN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 7,798.03 | | 8,957.83 | | 9,630.61 | | 10,394.26 | | 11,640.59 | | 48,416.33 | |
| | | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIKLAT | | | | 7,798.03 | | 8,957.83 | | 9,630.61 | | 10,394.26 | | 11,640.59 | | 48,416.33 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 16 kegiatan | 16 kegiatan | 883.83 | 16 kegiatan | 939.12 | 16 kegiatan | 983.52 | 16 kegiatan | 1,042.79 | 16 kegiatan | 1,095.27 | 16 kegiatan | 4,944.52 | BKD,DIKLAT |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 468.66 | 2 paket | 460.86 | 2 paket | 349.40 | 2 paket | 240.34 | 2 paket | 539.82 | 2 paket | 2,059.08 | BKD,DIKLAT |
| | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja | 80% | 81% | 36.41 | 83% | 36.41 | 85% | 36.41 | 87% | 36.41 | 88% | 36.41 | 88% | 182.06 | BKD,DIKLAT |
| | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung | 5% | 12% | 5,305.69 | 12.5% | 6,139.95 | 13% | 6,753.94 | 13.5% | 7,429.33 | 14% | 8,172.27 | 14% | 33,801.17 | BKD,DIKLAT |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai akuntabilitas kinerja | 70 | 71 | 127.20 | 72 | 127.20 | 73 | 133.26 | 74 | 139.62 | 75 | 146.30 | 75 | 673.59 | BKD,DIKLAT |
| | 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 3 dokumen | 2 dokumen | 10.00 | 2 dokumen | 10.00 | 2 dokumen | 10.00 | 2 dokumen | 10.00 | 2 dokumen | 10.00 | 12 dokumen | 50.00 | BKD,DIKLAT |
| | 40 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR | Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi | 80% | 81% | 801.84 | 83% | 1,056.36 | 85% | 1,162.00 | 87% | 1,278.20 | 88% | 1,406.02 | 88% | 5,704.42 | BKD,DIKLAT |
| | 69 | PROGRAM PENINGKATAN SDM | Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 113.06 | 100% | 130.44 | 100% | 137.95 | 100% | 146.22 | 100% | 155.31 | 100% | 682.98 | BKD,DIKLAT |
| | 96 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 51.35 | 2 kegiatan | 57.49 | 2 kegiatan | 64.14 | 2 kegiatan | 71.35 | 2 kegiatan | 79.18 | 2 kegiatan | 318.51 | BKD,DIKLAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|---|--|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 168.22 | | 185.04 | | 203.55 | | 223.90 | | 246.29 | | 1,027.01 | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 168.22 | | 185.04 | | 203.55 | | 223.90 | | 246.29 | | 1,027.01 | |
| 26 | PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan | 12 Bulan. | 12 Bulan. | 83.51 | 12 Bulan. | 91.86 | 12 Bulan. | 101.04 | 12 Bulan. | 111.15 | 12 Bulan. | 122.26 | | 509.82 | Bappeda Litbang |
| 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | 12 Bulan. | 12 Bulan. | 84.71 | 12 Bulan. | 93.19 | 12 Bulan. | 102.50 | 12 Bulan. | 112.75 | 12 Bulan. | 124.03 | 12 Bulan. | 517.19 | Bappeda Litbang |
| 05 | FUNGSI LAINNYA | | | | 202,622.14 | | 217,370.31 | | 241,391.22 | | 261,728.74 | | 285,010.63 | | 1,190,852.55 | |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | 103,520.97 | | 111,806.73 | | 126,472.48 | | 136,339.95 | | 148,021.01 | | 607,045.04 | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | | 552.02 | | 516.03 | | 562.70 | | 613.13 | | 775.87 | | 3,019.74 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah pembavaran iuran anggota APKASI | 1 kali | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 125.38 | Bagian APU |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR | - Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan - Jumlah kecamatan yang | 3 Hari besar 6 Kecamatan | 3 Hari besar 6 Kec. | 107.26 | 3 Hari besar 6 Kec. | 67.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 72.87 | 3 Hari besar 6 Kecamatan | 77.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 82.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 408.73 | |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah | 100% | 100% | 23.23 | 1.000 | 21.60 | 100% | 23.60 | 100% | 25.60 | 100% | 27.60 | 100% | 121.64 | Bagian APU |
| 27 | PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU | Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung | 100% | 100% | 396.45 | 100% | 401.49 | 100% | 441.15 | 100% | 484.59 | 100% | 640.32 | 100% | 2,364.00 | Bagian APU |
| | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 10,667.69 | | 10,723.67 | | 10,786.08 | | 10,855.67 | | 10,933.26 | | 53,966.37 | |
| 01 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Proposal yang diverifikasi administratif | 100% | 100% | 10,667.69 | 100% | 10,723.67 | 100% | 10,786.08 | 100% | 10,855.67 | 100% | 10,933.26 | 100% | 53,966.37 | |
| | BAGIAN HUKUM DAN HAM | | | | 2,657.40 | | 2,930.72 | | 3,247.23 | | 3,598.68 | | 3,958.54 | | 16,392.58 | |
| 01 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 2.537 Produk Hukum Daerah (Perda, Perbup, Kep.Bupati) | 2000 Produk Hukum Daerah | 2,657.40 | 2000 Produk Hukum Daerah | 2,930.72 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,247.23 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,598.68 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,958.54 | 10.000 Produk Hukum Daerah | 16,392.58 | Hukum dan HAM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | 4,803.60 | | 4,803.60 | | 4,803.60 | | 4,803.60 | | 4,803.60 | | 4,803.60 | |
| 01 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna | 3 paket | 3 paket | 4,425.27 | 3 paket | 4,791.77 | 3 paket | 5,270.94 | 3 paket | 5,798.04 | 3 paket | 6,377.84 | 3 paket | 26,663.86 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH | 1 paket | 1 paket | 99.75 | 1 paket | 108.70 | 1 paket | 119.58 | 1 paket | 131.53 | 1 paket | 144.69 | 1 paket | 604.25 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 2 paket | 2 paket | 259.56 | 2 paket | 253.86 | 2 paket | 279.25 | 2 paket | 307.17 | 2 paket | 337.89 | 2 paket | 1,437.73 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| 04 | PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah | 1 Paket | 1 Paket | 19.03 | 1 Paket | 20.45 | 1 Paket | 22.49 | 1 Paket | 24.74 | 1 Paket | 27.22 | 1 Paket | 113.94 | Bagian Administrasi Pembangunan |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 655.64 | | 823.48 | | 677.31 | | 860.09 | | 1,068.84 | | 4,085.36 | |
| 56 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa | 122 LPD | 122 LPD | 301.07 | 122 LPD | 331.18 | 122 LPD | 364.30 | 122 LPD | 400.73 | 122 LPD | 440.80 | LPD | 1,838.08 | Bagian Adm. Perekonomian |
| 75 | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Terkoordinasinya Ketahanan Pangan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 232.74 | 6 Kecamatan | 358.30 | 6 Kecamatan | 165.61 | 6 Kecamatan | 297.22 | 6 Kecamatan | 449.68 | Kecamatan | 1,503.54 | Bagian Adm. Perekonomian |
| 00 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA | 180 orang KTNA | 60 orang KTNA | 40.51 | 60 orang KTNA | 44.56 | 60 orang KTNA | 49.01 | 60 orang KTNA | 53.91 | 60 orang KTNA | 59.31 | 300 orang KTNA | 247.30 | Bagian Adm. Perekonomian |
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Terkoordinasinya Pengendalian Inflasi Daerah | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 24.19 | 6 Kecamatan | 26.61 | 6 Kecamatan | 29.27 | 6 Kecamatan | 32.20 | 6 Kecamatan | 35.42 | 6 Kecamatan | 147.68 | Bagian Adm. Perekonomian |
| 12 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung | 12 Bulan | 2 Prsh Daerah | 57.13 | 2 Prsh Daerah | 62.84 | 2 Prsh Daerah | 69.12 | 2 Prsh Daerah | 76.03 | 2 Prsh Daerah | 83.64 | 2 Prsh Daerah | 348.76 | Bagian Adm. Perekonomian |
| | BAGIAN UMUM | | | | 60,679.72 | | 66,840.69 | | 73,503.56 | | 80,832.72 | | 88,894.79 | | 370,805.31 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 49,485.66 | 100% | 54,527.23 | 100% | 59,958.76 | 100% | 65,933.43 | 100% | 72,505.57 | 100% | 302,464.47 | Bagian Umum |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 2,929.27 | 100% | 3,222.20 | 100% | 3,544.42 | 100% | 3,898.86 | 100% | 4,288.74 | 100% | 17,883.48 | Bagian Umum |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Tingkat kepatuhan aparatur | 100% | 100% | 7,276.22 | 100% | 8,003.85 | 100% | 8,804.23 | 100% | 9,684.65 | 100% | 10,653.12 | 100% | 44,422.07 | Bagian Umum |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 688.56 | 100% | 757.42 | 100% | 833.16 | 100% | 916.48 | 100% | 1,008.13 | 100% | 4,203.75 | Bagian Umum |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | 36 kunjungan | 36 kunjungan | 300.00 | 36 kunjungan | 330.00 | 36 kunjungan | 363.00 | 36 kunjungan | 399.30 | 36 kunjungan | 439.23 | 180 kunjungan | 1,831.53 | Bagian Umum |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|------------|------------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH | | | | 14.385.06 | | 15.370.24 | | 22.681.89 | | 24.147.58 | | 26.432.98 | | 103.094.63 | |
| 01 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH | Jumlah SKPD dan UPT yang melakukan Rekonsiliasi | 73 Unit Keria | 74 Unit Keria | 800.58 | 74 Unit Keria | 963.86 | 74 Unit Keria | 1.058.86 | 74 Unit Keria | 1.163.31 | 74 Unit Keria | 1.278.17 | 74 Unit Keria | 5.341.67 | Bagian Perengkapan dan Aset Daerah |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 4 Paket | 4 Paket | 9,965.31 | 4 Paket | 10,690.43 | 4 Paket | 17,803.09 | 4 Paket | 19,053.30 | 4 Paket | 21,105.27 | 24 Paket | 78,617.40 | Bagian Perengkapan dan Aset Daerah |
| 03 | PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH | Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan | 55 Gedung dan Bangunan | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.68 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 10,000.68 | Bagian Perengkapan dan Aset Daerah |
| 04 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Jumlah Informasi E-Proc. Melalui LPSE | 459 Paket | 482 Paket | 1,618.48 | 506 Paket | 1,715.95 | 531 Paket | 1,819.95 | 558 Paket | 1,930.96 | 586 Paket | 2,049.54 | 2,663 Paket | 9,134.87 | Bagian Perengkapan dan Aset Daerah |
| | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | | 7.720.69 | | 8.891.58 | | 9.213.71 | | 9.562.21 | | 9.939.41 | | 45.295.21 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 21 jenis koran dan 4 majalah | 21 jenis koran dan 4 majalah | 942.37 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 955.47 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1.003.24 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1.053.40 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1.106.07 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 5.028.16 | Bagian Humas & Protokol |
| 02 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA | Jumlah Jumpa Pers | 12 Kali | 12 Kali | 692.80 | 12 Kali | 736.94 | 12 Kali | 784.22 | 12 Kali | 834.92 | 12 Kali | 889.30 | 60 kali | 3.938.18 | Bagian Humas & Protokol |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI | Jumlah Pelayanan Media Elektronik | 253 Liputan | 340 Liputan | 1.267.23 | 350 Liputan | 1.393.95 | 350 Liputan | 1.533.35 | 350 Liputan | 1.686.68 | 350 Liputan | 1.855.35 | 350 Liputan | 7.736.55 | Bagian Humas & Protokol |
| 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Jumlah Berita pada media massa | 3036 Advetorial | 3600 Adv. | 4,022.52 | 3650 adv | 4,521.31 | 3700 adv | 4,522.38 | 3750 adv | 4,523.50 | 3800 adv | 4,524.67 | 18500 adv | 22,114.38 | Bagian Humas & Protokol |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA | Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang keprotokolan | 1 paket | 1 paket | 795.77 | 1 paket | 835.55 | 1 paket | 877.33 | 1 paket | 921.20 | 1 paket | 967.26 | 5 Paket | 4,397.11 | Bagian Humas & Protokol |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah tenaga protokol yang meningkat kemampuannya | - | - | - | 30 orang | 448.36 | 30 orang | 493.20 | 30 orang | 542.52 | 30 orang | 596.77 | 150 orang | 2.080.84 | Bagian Humas & Protokol |
| | BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | | | 1.399.15 | | 906.71 | | 996.38 | | 1.066.27 | | 1.213.72 | | 5.582.23 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah pembayaran iuran FORSESDASI | 1 kali | 1 kali | 10.00 | 1 kali | 10.00 | 1 kali | 10.00 | 1 kali | 10.00 | 1 kali | 10.00 | 5 kali | 50.00 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai Hasil evaluasi Lakip Kabupaten | 75.89 | 77.00 | 199.91 | 78.00 | 178.09 | 79.00 | 195.90 | 80.00 | 215.48 | 81.00 | 278.85 | 81.00 | 1,068.23 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 28 | PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya | 53 SKPD | 53 SKPD | 1,145.79 | 53 SKPD | 670.83 | 53 SKPD | 737.91 | 53 SKPD | 782.95 | 53 SKPD | 861.25 | 53 SKPD | 4,198.73 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 39 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL | Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi | - | 100% | 18.74 | 100% | 20.62 | 100% | 22.68 | 100% | 24.95 | 100% | 27.44 | 100% | 114.44 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya | 53 SKPD | 53 SKPD | 24.71 | 53 SKPD | 27.18 | 53 SKPD | 29.89 | 53 SKPD | 32.88 | 53 SKPD | 36.17 | 53 SKPD | 150.83 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | 50,678.04 | | 55,096.55 | | 60,577.61 | | 66,626.77 | | 73,258.85 | | 306,237.82 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 3,869.70 | 100% | 4,257.17 | 100% | 4,655.89 | 100% | 5,114.47 | 100% | 5,596.92 | 100% | 23,494.15 | Sekretariat DPRD |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 3,239.96 | 100% | 2,915.65 | 100% | 3,207.21 | 100% | 3,527.94 | 100% | 3,880.73 | 100% | 16,771.50 | Sekretariat DPRD |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 175.27 | 100% | 191.32 | 100% | 208.85 | 100% | 228.13 | 100% | 249.35 | 100% | 1,052.92 | Sekretariat DPRD |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah | 100% | 100% | 43,157.57 | 100% | 47,473.33 | 100% | 52,220.67 | 100% | 57,442.73 | 100% | 63,187.00 | 100% | 263,481.31 | Sekretariat DPRD |
| 26 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui | 100% | 100% | 235.53 | 100% | 259.09 | 100% | 285.00 | 100% | 313.50 | 100% | 344.85 | 100% | 1,437.96 | Sekretariat DPRD |
| | INSPEKTORAT | | | | 3,491.20 | | 3,405.27 | | 3,715.30 | | 4,066.33 | | 4,676.31 | | 19,354.41 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 100% | 714.26 | 100% | 774.94 | 100% | 825.18 | 100% | 890.45 | 100% | 951.25 | 100% | 4,156.09 | Inspektorat |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR | Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 100% | 500.50 | 100% | 135.54 | 100% | 146.84 | 100% | 159.28 | 100% | 407.80 | 100% | 1,349.96 | Inspektorat |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 199.79 | 100% | 219.77 | 100% | 241.75 | 100% | 265.92 | 100% | 292.51 | 100% | 1,219.74 | Inspektorat |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 3 dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 50.00 | Inspektorat |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDAL PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Persentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa | 5% | 4% | 1,531.10 | 3% | 1,675.93 | 2% | 1,843.52 | 2% | 2,027.87 | 1% | 2,230.66 | 1% | 9,309.07 | Inspektorat |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional | 100% | 100% | 139.44 | 100% | 153.38 | 100% | 168.72 | 100% | 185.60 | 100% | 204.16 | 100% | 851.30 | Inspektorat |
| 22 | PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | Persentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan | 90% | 100% | 396.10 | 100% | 435.71 | 100% | 479.29 | 100% | 527.21 | 100% | 579.94 | 100% | 2,418.25 | Inspektorat |
| | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | | | | 2,887.35 | | 2,740.95 | | 2,677.23 | | 2,878.53 | | 3,106.26 | | 14,290.32 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | presentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 842.10 | 100% | 869.49 | 100% | 951.49 | 100% | 1,008.00 | 100% | 1,076.46 | 100% | 4,747.55 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | presentase sarana prasarana aparatur | 100% | 100% | 917.65 | 100% | 535.71 | 100% | 285.33 | 100% | 313.61 | 100% | 344.73 | 100% | 2,397.03 | BPPT KABUPATEN BADUNG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----------------------|--|--|--|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK | prosentase kapasitas pelayanan publik | 100% | 100% | 781.77 | 100% | 809.24 | 100% | 888.80 | 100% | 977.68 | 100% | 1,075.44 | 100% | 4,532.94 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 84.80 | 100% | 84.80 | 100% | 84.800 | 100% | 84.800 | 100% | 84.80 | 100% | 424.00 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 12 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD | prosentase dokumen perencanaan SKPD | 100% | 100% | 9.89 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 10.00 | 100% | 49.89 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 24 | PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | prosentase Pengaduan yang tertangani Oleh BPPT | 100% | 100% | 70.86 | 100% | 77.95 | 100% | 85.73 | 100% | 94.31 | 100% | 103.74 | 100% | 432.60 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 37 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung | 100% | 100% | 180.28 | 100% | 353.76 | 100% | 371.07 | 100% | 390.13 | 100% | 411.08 | 100% | 1,706.32 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| KECAMATAN KUTA | | | | | | 3,059.60 | | 3,384.51 | | 3,708.91 | | 4,075.75 | | 4,468.27 | | 18,712.03 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran. | 17 kegiatan | 17 kegiatan | 1,541.89 | 17 kegiatan | 1,698.52 | 17 kegiatan | 1,854.33 | 17 kegiatan | 2,035.71 | 17 kegiatan | 2,224.23 | 17 kegiatan | 9,354.68 | Kec. Kuta |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | 2 paket | 2 paket | 261.39 | 2 paket | 304.03 | 2 paket | 334.43 | 2 paket | 367.88 | 2 paket | 404.67 | 2 paket | 1,687.40 | Kec. Kuta |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik | 9 Orang | 9 Orang | 7.93 | 2 orang | 8.72 | 2 orang | 9.59 | 3 orang | 10.55 | 2 orang | 11.61 | 18 Orang | 48.41 | Kec. Kuta |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 82.25 | 2 jenis | 90.47 | 2 jenis | 99.52 | 2 jenis | 109.47 | 2 jenis | 120.42 | 2 jenis | 502.11 | Kec. Kuta |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya | 12 jenis | 12 jenis | 340.28 | 12 jenis | 374.31 | 12 jenis | 411.74 | 12 jenis | 452.91 | 12 jenis | 498.20 | 60 jenis | 2,077.45 | Kec. Kuta |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 9.38 | 3 jenis | 10.31 | 3 jenis | 11.35 | 3 jenis | 12.48 | 3 jenis | 13.73 | 3 jenis | 57.25 | Kec. Kuta |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 48.15 | 1 dokumen | 52.96 | 1 dokumen | 58.26 | 1 dokumen | 64.09 | 1 dokumen | 70.49 | 1 dokumen | 293.95 | Kec. Kuta |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH | Jenis dokumen Data | 2 jenis | 2 jenis | 24.02 | 2 jenis | 26.42 | 2 jenis | 29.06 | 2 jenis | 31.97 | 2 jenis | 35.17 | 2 jenis | 146.64 | Kec. Kuta |
| 78 | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 95.83 | 5 kelurahan | 105.41 | 5 kelurahan | 115.95 | 5 kelurahan | 127.54 | 5 kelurahan | 140.30 | 5 kelurahan | 585.03 | Kec. Kuta |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 17.91 | 3 kegiatan | 19.70 | 3 kegiatan | 21.67 | 3 kegiatan | 23.84 | 3 kegiatan | 26.22 | 15 kegiatan | 109.34 | Kec. Kuta |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah hari besar yang diperingati | 7 hari besar | 7 hari besar | 167.89 | 7 hari besar | 184.68 | 7 hari besar | 203.15 | 7 hari besar | 223.46 | 7 hari besar | 245.81 | 7 hari besar | 1,024.99 | Kec. Kuta |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 jenis | 1 jenis | 369.16 | 1 jenis | 406.07 | 1 jenis | 446.68 | 1 jenis | 491.35 | 1 jenis | 540.48 | 5 jenis | 2,253.74 | Kec. Kuta |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 85.23 | 7 jenis | 93.76 | 7 jenis | 103.13 | 7 jenis | 113.44 | 7 jenis | 124.79 | 7 jenis | 520.36 | Kec. Kuta |
| 90 | PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan | 106 RTM, 101 RTS | 106 RTM, 101 RTS | 3.82 | 106 RTM, 101 RTS | 4.20 | 106 RTM, 101 RTS | 4.62 | 106 RTM, 101 RTS | 5.09 | 106 RTM, 101 RTS | 5.59 | 106 RTM, 101 RTS | 23.33 | Kec. Kuta |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 4.48 | 5 kelurahan | 4.93 | 5 kelurahan | 5.42 | 5 kelurahan | 5.97 | 5 kelurahan | 6.56 | 5 kelurahan | 27.37 | Kec. Kuta |
| | KELURAHAN KUTA | | | | 2,067.84 | | 2,034.71 | | 2,207.46 | | 2,361.95 | | 2,566.07 | | 11,238.03 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 960.59 | 15 kegiatan | 1060.91 | 15 kegiatan | 1141.48 | 15 kegiatan | 1237.05 | 15 kegiatan | 1340.58 | 15 kegiatan | 5740.61 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 555.68 | 2 paket | 368.68 | 2 paket | 401.24 | 2 paket | 401.24 | 2 paket | 437.06 | 2 paket | 2163.89 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 58.74 | 2 jenis | 64.00 | 2 jenis | 70.50 | 2 jenis | 71.00 | 2 jenis | 71.50 | 2 jenis | 335.74 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD PADA TAHUN N | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 50.00 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 21.94 | 1 jenis dokumen | 24.13 | 1 jenis dokumen | 26.55 | 1 jenis dokumen | 29.20 | 1 jenis dokumen | 32.12 | 1 jenis dokumen | 133.95 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 41.54 | 2 jenis | 45.69 | 2 jenis | 50.26 | 2 jenis | 55.29 | 2 jenis | 60.81 | 2 jenis | 253.59 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Jumlah lingkungan yang mendapat pelayananan fogging | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 33.90 | 13 lingkungan | 37.29 | 13 lingkungan | 41.02 | 13 lingkungan | 45.13 | 13 lingkungan | 49.64 | 13 lingkungan | 206.99 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 42.32 | 13 lingkungan | 46.56 | 13 lingkungan | 51.21 | 13 lingkungan | 56.33 | 13 lingkungan | 61.97 | 13 lingkungan | 258.40 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 lembaga | 5 lembaga | 132.54 | 5 lembaga | 145.80 | 5 lembaga | 160.38 | 5 lembaga | 176.42 | 5 lembaga | 194.06 | 5 lembaga | 809.19 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 6.66 | 1 Tahun | 7.32 | 1 Tahun | 30.53 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 148.84 | 13 lingkungan | 163.72 | 13 lingkungan | 180.09 | 13 lingkungan | 198.10 | 13 lingkungan | 217.91 | 13 lingkungan | 908.67 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 56.75 | 7 jenis | 62.43 | 7 jenis | 68.67 | 7 jenis | 75.54 | 7 jenis | 83.09 | 7 jenis | 346.49 | Kel.Kuta |
| | KELURAHAN LEGIAN | | | | 1,341.00 | | 1,486.10 | | 1,629.21 | | 1,796.63 | | 1,969.80 | | 8,222.74 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 436.76 | 15 kegiatan | 491.43 | 15 kegiatan | 535.08 | 15 kegiatan | 593.08 | 15 kegiatan | 645.89 | 15 kegiatan | 2702.25 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 212.72 | 2 paket | 233.99 | 2 paket | 257.39 | 2 paket | 283.13 | 2 paket | 311.45 | 2 paket | 1298.69 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 58.12 | 2 jenis | 63.93 | 2 jenis | 70.32 | 2 jenis | 77.35 | 2 jenis | 85.09 | 2 jenis | 354.82 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jenis Pengembangan Nilai Budaya | 2 Jenis | 2 Jenis | 217.40 | 2 Jenis | 239.14 | 2 Jenis | 263.05 | 2 Jenis | 289.36 | 2 Jenis | 318.29 | 2 Jenis | 1327.25 | Kel Legian |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.96 | 3 jenis | 12.06 | 3 jenis | 13.26 | 3 jenis | 14.59 | 3 jenis | 16.05 | 3 jenis | 66.91 | Kel Legian |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 16.92 | 1 jenis dokumen | 18.61 | 1 jenis dokumen | 20.47 | 1 jenis dokumen | 22.52 | 1 jenis dokumen | 24.77 | 1 jenis dokumen | 103.28 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 16.25 | 2 jenis | 17.88 | 2 jenis | 19.66 | 2 jenis | 21.63 | 2 jenis | 23.79 | 2 jenis | 99.21 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 3 lingkungan | 3 lingkungan | 42.09 | 3 lingkungan | 46.30 | 3 lingkungan | 50.93 | 3 lingkungan | 56.02 | 3 lingkungan | 61.62 | 3 lingkungan | 256.97 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 jenis | 5 jenis | 138.57 | 5 jenis | 152.43 | 5 jenis | 167.67 | 5 jenis | 184.44 | 5 jenis | 202.88 | 5 jenis | 845.98 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 2 jenis | 2 jenis | 17.88 | 2 jenis | 19.67 | 2 jenis | 21.64 | 2 jenis | 23.80 | 2 jenis | 26.18 | 2 jenis | 109.16 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 8 hari besar | 8 hari besar | 5.00 | 8 hari besar | 5.50 | 8 hari besar | 6.05 | 8 hari besar | 6.66 | 8 hari besar | 7.32 | 8 hari besar | 30.53 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 3 lingkungan | 3 lingkungan | 153.37 | 3 lingkungan | 168.71 | 3 lingkungan | 185.58 | 3 lingkungan | 204.14 | 3 lingkungan | 224.55 | 3 lingkungan | 936.34 | Kel. Leqian |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 14.96 | 7 jenis | 16.46 | 7 jenis | 18.11 | 7 jenis | 19.92 | 7 jenis | 21.91 | 7 jenis | 91.36 | Kel. Leqian |
| | KELURAHAN SEMINYAK | | | | 1,133.72 | | 1,220.27 | | 1,247.26 | | 1,376.48 | | 1,507.63 | | 6,485.36 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 447.89 | 15 kegiatan | 503.67 | 15 kegiatan | 548.54 | 15 kegiatan | 607.90 | 15 kegiatan | 662.19 | 15 kegiatan | 2,770.18 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 Paket | 2 Paket | 224.12 | 2 Paket | 246.54 | 2 Paket | 181.65 | 2 Paket | 199.82 | 2 Paket | 219.80 | 2 Paket | 1,071.92 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 1 paket | 61.90 | 1 paket | 68.09 | 1 paket | 74.90 | 1 paket | 82.39 | 1 paket | 90.63 | 2 jenis | 377.91 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 11.00 | 3 jenis | 12.10 | 3 jenis | 13.31 | 3 jenis | 14.64 | 3 jenis | 61.05 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 paket | 20.85 | 1 paket | 22.94 | 1 paket | 25.23 | 1 paket | 27.76 | 1 paket | 30.53 | 1 jenis dokumen | 127.31 | Kel. Seminyak |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis dokumen | 2 dokumen | 13.87 | 2 dokumen | 15.25 | 2 dokumen | 16.78 | 2 dokumen | 18.46 | 2 dokumen | 20.30 | 2 jenis dokumen | 84.66 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 2 lingkungan | 2 lingkungan | 41.93 | 2 lingkungan | 46.13 | 2 lingkungan | 50.74 | 2 lingkungan | 55.81 | 2 lingkungan | 61.39 | 2 lingkungan | 256.00 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 4 jenis | 4 jenis | 130.80 | 4 jenis | 106.06 | 4 jenis | 116.66 | 4 jenis | 128.33 | 4 jenis | 141.16 | 4 jenis | 623.02 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 6.66 | 1 Tahun | 7.32 | 5 Tahun | 30.53 | Kel. Seminyak |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 2 lingkungan | 2 lingkungan | 148.56 | 2 lingkungan | 163.41 | 2 lingkungan | 179.76 | 2 lingkungan | 197.73 | 2 lingkungan | 217.50 | 2 lingkungan | 906.97 | Kel. Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 28.80 | 7 jenis | 31.68 | 7 jenis | 34.85 | 7 jenis | 38.33 | 7 jenis | 42.16 | 7 jenis | 175.82 | Kel. Seminyak |
| | KELURAHAN TUBAN | | | | 1,171.20 | | 1,193.84 | | 1,302.28 | | 1,430.04 | | 1,536.37 | | 6,633.74 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI | Cakupan Pelayanan Kebutuhan | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 527.42 | 15 kegiatan | 578.96 | 15 kegiatan | 620.85 | 15 kegiatan | 675.56 | 15 kegiatan | 724.69 | 15 kegiatan | 3127.48 | Kel. Tuban |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PERKANTORAN | Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 182.55 | 2 paket | 119.15 | 2 paket | 106.63 | 2 paket | 129.39 | 2 paket | 131.38 | 2 paket | 669.10 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan Capaian Kinerja Keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 57.10 | 2 jenis | 57.10 | 2 jenis | 66.50 | 2 jenis | 67.00 | 2 jenis | 67.50 | 2 jenis | 315.20 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 50.00 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.84 | 1 jenis dokumen | 20.73 | 1 jenis dokumen | 22.80 | 1 jenis dokumen | 25.08 | 1 jenis dokumen | 27.59 | 1 jenis dokumen | 115.03 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 22.24 | 2 jenis | 24.46 | 2 jenis | 26.91 | 2 jenis | 29.60 | 2 jenis | 32.56 | 2 jenis | 135.75 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 4 lingkungan | 4 lingkungan | 43.96 | 4 lingkungan | 48.35 | 4 lingkungan | 53.19 | 4 lingkungan | 58.51 | 4 lingkungan | 64.36 | 4 lingkungan | 268.37 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 3 jenis | 3 Jenis | 91.82 | 3 jenis | 96.60 | 3 Jenis | 133.06 | 3 Jenis | 146.37 | 3 Jenis | 161.01 | 3 Jenis | 628.87 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah hari besar yang diperingati nasional | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.00 | 1 Tahun | 6.50 | 1 Tahun | 28.00 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang | 4 lingkungan | 4 lingk | 155.74 | 4 lingkungan | 171.31 | 4 lingkungan | 188.45 | 4 lingkungan | 207.29 | 4 lingkungan | 228.02 | 4 lingkungan | 950.81 | Kel.tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan | 7 jenis | 7 jenis | 56.53 | 7 jenis | 62.18 | 7 jenis | 68.40 | 7 jenis | 75.24 | 7 jenis | 82.77 | 7 jenis | 345.13 | Kel.Tuban |
| | KELURAHAN KEDONGANAN | | | | 1,121.91 | | 1,284.68 | | 1,299.28 | | 1,371.07 | | 1,543.42 | | 6,425.01 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 632.43 | 15 kegiatan | 703.17 | 15 kegiatan | 732.59 | 15 kegiatan | 779.38 | 15 kegiatan | 850.82 | 15 kegiatan | 3,488.04 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana | 2 paket | 2 paket | 46.38 | 2 paket | 101.38 | 2 paket | 136.13 | 2 paket | 161.13 | 2 paket | 220.04 | 2 paket | 680.06 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 57.85 | 2 jenis | 57.85 | 2 jenis | 64.04 | 2 jenis | 64.04 | 2 jenis | 70.74 | 2 jenis | 314.52 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.96 | 3 jenis | 10.96 | 3 jenis | 12.06 | 3 jenis | 53.98 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.50 | 1 jenis dokumen | 20.35 | 1 jenis dokumen | 18.21 | 1 jenis dokumen | 18.21 | 1 jenis dokumen | 20.03 | 1 jenis dokumen | 95.30 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 18.73 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 22.66 | 2 jenis | 103.19 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 6 lingk. | 6 lingk. | 68.84 | 6 lingk. | 75.73 | 6 lingk. | 36.97 | 6 lingk. | 36.97 | 6 lingk. | 40.67 | 6 lingk. | 259.18 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 3 jenis | 3 jenis | 96.79 | 3 jenis | 106.47 | 3 jenis | 98.05 | 3 jenis | 98.05 | 3 jenis | 104.20 | 3 jenis | 503.55 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 7.00 | 1 Tahun | 7.00 | 1 Tahun | 10.00 | 1 Tahun | 34.00 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 6 lingkungan | 6 lingkungan | 145.41 | 6 lingkungan | 159.95 | 6 lingkungan | 150.54 | 6 lingkungan | 150.54 | 6 lingkungan | 165.59 | 6 lingkungan | 772.03 | Kelurahan Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 21.99 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 26.61 | 7 jenis | 121.16 | Kelurahan Kedonganan |
| | KECAMATAN KUTA UTARA | | | | 2,783.67 | | 2,954.78 | | 3,236.51 | | 3,556.41 | | 3,897.30 | | 16,428.68 | |
| 01 | PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 16 kegiatan | 16 kegiatan | 1,285.18 | 16 kegiatan | 1,416.45 | 16 kegiatan | 1,544.34 | 16 kegiatan | 1,695.03 | 16 kegiatan | 1,849.78 | 16 kegiatan | 7,790.78 | Kecamatan Kuta Utara |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR | Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2 paket | 2 paket | 289.55 | 2 paket | 208.51 | 2 paket | 229.36 | 2 paket | 252.29 | 2 paket | 277.52 | 2 paket | 1,257.23 | Kecamatan Kuta Utara |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah kepala lingkungan yang dilantik | - | 7 kaling | 3.30 | 7 kaling | 3.63 | 5 kaling | 3.99 | 9 kaling | 4.39 | 1 kaling | 4.83 | 29 kaling | 20.12 | Kecamatan Kuta Utara |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 3 dokumen | 3 dokumen | 80.10 | 3 dokumen | 88.11 | 3 dokumen | 96.92 | 3 dokumen | 106.61 | 3 dokumen | 117.27 | 3 dokumen | 489.02 | Kecamatan Kuta Utara |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya | - | 4 jenis | 347.95 | 4 jenis | 382.75 | 4 jenis | 421.02 | 4 jenis | 463.12 | 4 jenis | 509.44 | 20 jenis | 2,124.28 | Kecamatan Kuta Utara |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 11.00 | 3 Jenis | 12.10 | 3 Jenis | 13.31 | 3 Jenis | 14.64 | 3 Jenis | 61.05 | Kecamatan Kuta Utara |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 Dokumen | 1 dokumen | 40.09 | 1 dokumen | 44.10 | 1 dokumen | 48.51 | 1 dokumen | 53.37 | 1 dokumen | 58.70 | 1 dokumen | 244.78 | Kecamatan Kuta Utara |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.35 | 2 Jenis | 25.68 | 2 Jenis | 28.25 | 2 Jenis | 31.07 | 2 Jenis | 34.18 | 2 Jenis | 142.53 | Kecamatan Kuta Utara |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 6 desa/kel | 6 Desa/Kel | 79.44 | 6 Desa/Kel | 87.39 | 6 Desa/Kel | 96.13 | 6 Desa/Kel | 105.74 | 6 Desa/Kel | 116.31 | 6 Desa/Kel | 485.00 | Kecamatan Kuta Utara |
| 79 | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 6 desa & kel | 3 desa | 47.02 | 3 desa | 51.72 | 3 desa | 56.89 | 3 desa | 62.58 | 3 desa | 68.84 | | 287.03 | Kecamatan Kuta Utara |
| 82 | PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperhatikan | 7 hari besar | 8 hari besar | 128.40 | 8 hari besar | 141.24 | 8 hari besar | 155.37 | 8 hari besar | 170.90 | 8 hari besar | 187.99 | 8 hari besar | 783.91 | Kecamatan Kuta Utara |
| 83 | PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 1 Jenis | 3 Jenis | 391.15 | 3 Jenis | 430.26 | 3 Jenis | 473.29 | 3 Jenis | 520.62 | 3 Jenis | 572.68 | 3 Jenis | 2,387.99 | Kecamatan Kuta Utara |
| 85 | PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 48.73 | 7 Jenis | 53.60 | 7 Jenis | 58.96 | 7 Jenis | 64.85 | 7 Jenis | 71.34 | 7 Jenis | 297.48 | Kecamatan Kuta Utara |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah RTM yang Didata | 462 RTM | 462 RTM | 4.95 | 462 RTM | 5.44 | 462 RTM | 5.99 | 462 RTM | 6.58 | 462 RTM | 7.24 | 462 RTM | 30.20 | Kecamatan Kuta Utara |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | 6 desa/Kel | 6 desa/Kelurahan | 4.47 | 6 desa/Kelurahan | 4.91 | 6 desa/Kelurahan | 5.40 | 6 desa/Kelurahan | 5.95 | 6 desa/Kelurahan | 6.54 | 6 desa/Kelurahan | 27.27 | Kecamatan Kuta Utara |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN KEROBOKAN | | | | 1,424.26 | | 1,584.34 | | 1,733.09 | | 1,862.19 | | 2,003.49 | | 8,607.36 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administratif perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 621.32 | 15 kegiatan | 694.45 | 15 kegiatan | 758.39 | 15 kegiatan | 838.73 | 15 kegiatan | 916.10 | 15 kegiatan | 3828.99 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 Paket | 2 Paket | 226.66 | 2 Paket | 311.16 | 2 Paket | 365.55 | 2 Paket | 370.39 | 2 Paket | 376.43 | 2 Paket | 1650.19 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 62.10 | 2 Jenis | 68.31 | 2 Jenis | 75.14 | 2 Jenis | 82.66 | 2 Jenis | 90.92 | 2 Jenis | 379.13 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah Jenis Pengembangan Nilai Budaya | 0 | 1 Jenis | 21.85 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 jenis | 21.85 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 Jenis | 3 Jenis | 10.00 | 2 Jenis | 11.00 | 2 Jenis | 12.10 | 2 Jenis | 13.31 | 3 Jenis | 14.64 | 3 Jenis | 61.05 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 21.08 | 1 jenis | 21.52 | 1 jenis | 24.40 | 1 jenis | 28.40 | 1 jenis | 33.50 | 1 jenis | 128.90 | Kelurahan Kerobokan |
| | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 24.39 | 2 jenis | 26.50 | 2 jenis | 27.20 | 2 jenis | 29.40 | 2 jenis | 30.20 | 2 jenis | 137.69 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lingkungan Yang Dijaga ketertibannya | 10 lingkungan | 10 lingkungan | 83.73 | 10 lingkungan | 92.10 | 10 lingkungan | 87.40 | 10 lingkungan | 92.00 | 10 lingkungan | 98.80 | 10 lingkungan | 454.03 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam | 3 jenis | 4 jenis | 144.44 | 4 jenis | 149.70 | 4 jenis | 160.80 | 4 jenis | 172.70 | 4 jenis | 187.30 | 4 jenis | 814.94 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | 2 jenis | 2 jenis | 15.27 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 15.27 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan Hari besar Nasional | 1 tahun | 1 tahun | 5.00 | 1 tahun | 6.00 | 1 tahun | 6.50 | 1 tahun | 7.00 | 1 tahun | 7.50 | 1 tahun | 32.00 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah Lingkungan Yang bersih | 10 Lingkungan | 10 Lingkungan | 155.64 | 10 Lingkungan | 171.20 | 10 Lingkungan | 180.80 | 10 Lingkungan | 192.20 | 10 Lingkungan | 210.60 | 10 Lingkungan | 910.44 | Kelurahan Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 32.78 | 7 jenis | 32.40 | 7 jenis | 34.80 | 7 jenis | 35.40 | 7 jenis | 37.50 | 7 jenis | 172.88 | Kelurahan Kerobokan |
| | KELURAHAN KEROBOKAN KAJA | | | | 1,746.27 | | 2,017.12 | | 2,192.83 | | 2,396.12 | | 2,565.88 | | 10,918.22 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran. | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 1,104.12 | 15 Kegiatan | 1,225.53 | 15 Kegiatan | 1,342.59 | 15 Kegiatan | 1,481.35 | 15 Kegiatan | 1,622.98 | 15 Kegiatan | 6,776.57 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur kantor | 2 paket | 2 paket | 105.61 | 2 paket | 239.23 | 2 paket | 242.65 | 2 paket | 246.41 | 2 paket | 250.55 | 2 paket | 1,084.45 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 59.70 | 2 Jenis | 65.67 | 2 Jenis | 72.24 | 2 Jenis | 79.46 | 2 Jenis | 87.41 | 2 Jenis | 364.47 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 10.00 | 2 Jenis | 11.00 | 2 Jenis | 12.10 | 2 Jenis | 13.31 | 3 Jenis | 14.64 | 3 Jenis | 61.05 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Jenis Dokumen | 1 Jenis Dokumen | 21.67 | 1 Jenis Dokumen | 23.83 | 1 Jenis Dokumen | 26.21 | Paket | 28.84 | 1 Jenis Dokumen | 31.72 | 1 Jenis Dokumen | 132.27 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INPORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah data informasi statistik daerah disusun | 2 Jenis | 2 Jenis | 45.52 | 2 Jenis | 50.07 | 2 Jenis | 55.08 | 2 Jenis | 60.59 | 2 Jenis | 66.65 | 2 Jenis | 277.91 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah Lokasi Yang Dipantau diaaga ketertibannya | 23 Lingkungan | 23 lingkungan | 83.03 | 23 lingkungan | 91.33 | 23 lingkungan | 100.46 | 23 lingkungan | 110.51 | 23 lingkungan | 78.71 | 23 lingkungan | 464.03 | Kel. Kerobokan Kaja |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 4 Jenis | 4 Jenis | 132.91 | 4 Jenis | 108.37 | 4 Jenis | 119.21 | 4 Jenis | 131.13 | 4 Jenis | 144.25 | 4 Jenis | 635.87 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 6.66 | 1 Tahun | 7.32 | 1 Tahun | 30.53 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah Lingkungan Yang Bersih | 23 Lingkungan | 23 Lingkungan | 155.23 | 23 Lingkungan | 170.76 | 23 Lingkungan | 187.83 | 23 Lingkungan | 206.62 | 23 Lingkungan | 227.28 | 23 Lingkungan | 947.72 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 23.48 | 7 Jenis | 25.83 | 7 Jenis | 28.41 | 7 Jenis | 31.25 | 7 Jenis | 34.38 | 7 Jenis | 143.35 | Kel. Kerobokan Kaja |
| | KELURAHAN KEROBOKAN KELOD | | | | 1,369.75 | 1,400.47 | 1,529.52 | 1,592.08 | 1,739.29 | 7,631.12 | | | | | | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 739.53 | 15 kegiatan | 797.98 | 15 kegiatan | 872.27 | 15 kegiatan | 934.84 | 15 kegiatan | 1.021.82 | 15 kegiatan | 4.366.44 | Kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 83.72 | 2 paket | 84.22 | 2 paket | 87.14 | 2 paket | 87.14 | 2 paket | 90.36 | 2 paket | 432.59 | Kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 45.35 | 2 jenis | 45.35 | 2 jenis | 49.89 | 2 jenis | 49.89 | 2 jenis | 54.87 | 2 jenis | 245.34 | Kel. Krb Kelod |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | jumlah pengembangan nilai budaya | 1 jenis | 1 jenis | 28.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 jenis | 28.23 | |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 11.00 | 2 jenis | 11.00 | 3 jenis | 12.10 | 3 jenis | 54.10 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 19.75 | 1 jenis dokumen | 19.75 | 1 jenis dokumen | 21.73 | 1 jenis dokumen | 21.73 | 1 jenis dokumen | 23.90 | 1 jenis dokumen | 106.85 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 33.24 | 2 jenis | 33.24 | 2 jenis | 36.57 | 2 jenis | 36.57 | 2 jenis | 40.23 | 2 jenis | 179.85 | kel krb kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 82.29 | 13 lingkungan | 82.29 | 13 lingkungan | 90.52 | 13 lingkungan | 90.52 | 13 lingkungan | 99.57 | 13 lingkungan | 445.18 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 3 jenis | 3 jenis | 112.72 | 3 jenis | 112.72 | 3 jenis | 123.99 | 3 jenis | 123.99 | 3 jenis | 136.39 | 3 jenis | 609.81 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan promosi kesehatan dan | 3 jenis | 3 jenis | 24.28 | 3 jenis | 24.28 | 3 jenis | 26.70 | 3 jenis | 26.70 | 3 jenis | 29.37 | 3 jenis | 131.33 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | jenis hari besar yang diperingati | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 27.05 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Kebersihan wilayah lingkungan | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 158.96 | 13 lingkungan | 158.96 | 13 lingkungan | 174.86 | 13 lingkungan | 174.86 | 13 lingkungan | 192.34 | 13 lingkungan | 859.99 | kel. Krb kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jenis pelayanan adminitrasi kependudukan | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 26.68 | 13 lingkungan | 26.68 | 13 lingkungan | 29.35 | 13 lingkungan | 29.35 | 13 lingkungan | 32.29 | 13 lingkungan | 144.35 | kel krb. Kelod |
| | KECAMATAN KUTA SELATAN | | | | 2,606.07 | 2,903.46 | 3,134.11 | 3,423.80 | 3,737.24 | 15,804.67 | | | | | | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 974.44 | 15 Kegiatan | 1,074.63 | 15 Kegiatan | 1,168.35 | 15 Kegiatan | 1,281.43 | 15 Kegiatan | 1,394.82 | 15 Kegiatan | 5,893.67 | Kec. Kuta Selatan |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 2 Paket | 2 Paket | 302.80 | 2 Paket | 373.08 | 2 Paket | 395.39 | 2 Paket | 419.93 | 2 Paket | 446.92 | 10 Paket | 1,938.11 | Kec. Kuta Selatan |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 84.00 | 2 Jenis | 92.40 | 2 Jenis | 101.64 | 2 Jenis | 111.80 | 2 Jenis | 122.98 | 10 Jenis | 512.83 | Kec. Kuta Selatan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------------------------|--|---|--|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 2 dokumen | 11.00 | 2 dokumen | 12.10 | 2 dokumen | 13.31 | 2 dokumen | 14.64 | 11 dokumen | 61.05 | Kec. Kuta Selatan |
| 09 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah Kegiatan | 11 Jenis | 11 Jenis | 341.53 | 11 Jenis | 375.68 | 11 Jenis | 413.25 | 11 Jenis | 454.57 | 11 Jenis | 500.03 | 11 Jenis | 2,085.05 | Kec. Kuta Selatan |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.94 | 1 Dokumen | 48.34 | 1 Dokumen | 53.17 | 1 Dokumen | 58.49 | 1 Dokumen | 64.34 | 5 dokumen | 268.28 | Kec. Kuta Selatan |
| 38 | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah Dokumen Data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.93 | 2 Jenis | 26.32 | 2 Jenis | 28.95 | 2 Jenis | 31.85 | 2 Jenis | 35.03 | 10 jenis | 146.08 | Kec. Kuta Selatan |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Lokasi Yang Dipantau | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 112.55 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 123.81 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 136.19 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 149.81 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 164.79 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 687.13 | Kec. Kuta Selatan |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 66.20 | 3 kegiatan | 72.82 | 3 kegiatan | 39.76 | 3 kegiatan | 43.73 | 3 kegiatan | 48.10 | 15 kegiatan | 270.61 | Kec. Kuta Selatan |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Peringatan Hari Besar | 7 hari besar | 7 hari besar | 126.18 | 7 hari besar | 138.80 | 7 hari besar | 152.68 | 7 hari besar | 167.95 | 7 hari besar | 184.74 | 7 hari besar | 770.35 | Kec. Kuta Selatan |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya | 1 jenis | 1 Jenis | 407.27 | 1 Jenis | 448.00 | 1 Jenis | 492.80 | 1 Jenis | 542.07 | 1 Jenis | 596.28 | 1 Jenis | 2,486.42 | Kec. Kuta Selatan |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis Pelayanan Admistrasi Kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 101.64 | 7 Jenis | 111.80 | 7 Jenis | 122.98 | 7 Jenis | 135.28 | 7 Jenis | 148.81 | 7 Jenis | 620.51 | Kec. Kuta Selatan |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah Desa/kelurahan yang dilaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | 6 desa/ kel | 6 desa/ kel | 6.17 | 6 desa/ kel | 6.79 | 6 desa/ kel | 7.46 | 6 desa/ kel | 8.21 | 6 desa/ kel | 9.03 | 6 desa/ kel | 37.66 | Kec. Kuta Selatan |
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Kepala Lingkungan yang dilantik | 5 Kaling | 4 Kaling | 5.42 | 0 | 0.00 | 7 Kaling | 9.41 | 4 Kaling | 5.38 | 5 Kaling | 6.72 | 20 Kaling | 26.92 | Kec. Kuta Selatan |
| KELURAHAN BENOA | | | | | 1,636.89 | 2,152.65 | 1,976.42 | 2,175.19 | 2,355.55 | 10,289.95 | Kelurahan Benoa | | | | | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 1,031.41 | 15 Kegiatan | 1,145.56 | 15 Kegiatan | 1,254.61 | 15 Kegiatan | 1,384.57 | 15 Kegiatan | 1,489.23 | 15 Kegiatan | 6,305.38 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 67.82 | 2 paket | 417.18 | 2 paket | 73.89 | 2 paket | 79.47 | 2 paket | 85.60 | 2 paket | 717.21 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 60.68 | 2 jenis | 66.75 | 2 jenis | 73.42 | 2 jenis | 80.76 | 2 jenis | 88.84 | 2 jenis | 370.44 | Kelurahan Benoa |
| | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 50.00 | Kelurahan Benoa |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.90 | 1 jenis dokumen | 20.78 | 1 jenis dokumen | 22.86 | 1 jenis dokumen | 25.15 | 1 jenis dokumen | 27.66 | 1 jenis dokumen | 115.36 | Kelurahan Benoa |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data / informastatistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 81.34 | 2 jenis | 89.47 | 2 jenis | 98.42 | 2 jenis | 108.26 | 2 jenis | 119.09 | 2 jenis | 496.57 | Kelurahan Benoa |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 16 Lingkungan | 16 Lingkungan | 37.66 | 16 Lingkungan | 41.42 | 16 Lingkungan | 45.57 | 16 Lingkungan | 50.12 | 16 Lingkungan | 55.14 | 16 Lingkungan | 229.91 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 115.18 | 4 jenis | 126.70 | 4 jenis | 139.37 | 4 jenis | 153.30 | 4 jenis | 168.63 | 4 jenis | 703.18 | Kelurahan Benoa |
| | PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 8 hari besar | 5.00 | 8 hari besar | 5.00 | 8 hari besar | 5.50 | 8 hari besar | 5.50 | 8 hari besar | 5.50 | 8 hari besar | 26.50 | Kelurahan Benoa |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Kebersihan Lingkungan wilayah | 16 Lingkungan | 16 Lingkungan | 147.06 | 16 Lingkungan | 161.77 | 16 Lingkungan | 177.94 | 16 Lingkungan | 195.74 | 16 Lingkungan | 215.31 | 16 Lingkungan | 897.82 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan kependudukan | 8 jenis | 8 jenis | 61.85 | 8 jenis | 68.03 | 8 jenis | 74.83 | 8 jenis | 82.32 | 8 jenis | 90.55 | 8 jenis | 377.57 | Kelurahan Benoa |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN TANJUNG BENOA | | | | 1,519.04 | | 1,563.13 | | 1,713.94 | | 1,889.83 | | 2,072.32 | | 8,758.26 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran | 15 kegiatan | 16 kegiatan | 709.23 | 15 kegiatan | 758.16 | 15 kegiatan | 828.47 | 15 kegiatan | 915.82 | 15 kegiatan | 1,000.90 | 15 kegiatan | 4,212.59 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 209.14 | 2 paket | 144.23 | 2 paket | 158.66 | 2 paket | 174.52 | 2 paket | 191.97 | 2 paket | 878.52 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 70.30 | 2 jenis | 77.33 | 2 jenis | 85.06 | 2 jenis | 93.57 | 2 jenis | 102.93 | 2 jenis | 429.19 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 11.00 | 2 jenis | 12.10 | 2 jenis | 13.31 | 3 jenis | 14.64 | 3 jenis | 61.05 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 19.13 | 1 jenis | 21.04 | 1 jenis | 23.14 | 1 jenis | 25.46 | 1 jenis | 28.00 | 1 jenis | 116.76 | Kel. Tanjung Benoa |
| | Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah | jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 18.46 | 2 jenis | 20.31 | 2 jenis | 22.34 | 2 jenis | 24.58 | 2 jenis | 27.03 | 2 jenis | 112.72 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lokasi yang dipantau | 6 lingkungan | 6 lingkungan | 41.80 | 6 lingkungan | 45.98 | 6 lingkungan | 50.58 | 6 lingkungan | 55.64 | 6 lingkungan | 61.20 | 6 lingkungan | 255.20 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 157.59 | 4 jenis | 173.34 | 4 jenis | 190.68 | 4 jenis | 209.75 | 4 jenis | 230.72 | 4 jenis | 962.07 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 jenis | 1 jenis | 87.07 | 1 jenis | 95.77 | 1 jenis | 105.35 | 1 jenis | 115.88 | 1 jenis | 127.47 | 1 jenis | 531.54 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 8 hari besar | 5.00 | 8 hari besar | 5.50 | 8 hari besar | 6.05 | 8 hari besar | 6.66 | 8 hari besar | 7.32 | 8 hari besar | 30.53 | Kel. Tanjung Benoa |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 6 lingkungan | 6 lingkungan | 153.92 | 6 lingkungan | 169.31 | 6 lingkungan | 186.25 | 6 lingkungan | 204.87 | 6 lingkungan | 225.36 | 6 lingkungan | 939.71 | Kel. Tanjung Benoa |
| | Program Peningkatan Administrasi Kependudukan | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 37.41 | 7 jenis | 41.15 | 7 jenis | 45.26 | 7 jenis | 49.79 | 7 jenis | 54.77 | 7 jenis | 228.37 | Kel. Tanjung Benoa |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN JIMBARAN | | | | 1,778.92 | | 1,707.95 | | 1,873.24 | | 1,939.85 | | 2,127.34 | | 9,419.53 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 908.97 | 15 kegiatan | 970.75 | 15 kegiatan | 1,062.33 | 15 kegiatan | 1,128.94 | 15 kegiatan | 1,235.33 | 15 kegiatan | 5,306.32 | Kel. Jimbaran |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 319.12 | 2 paket | 186.37 | 2 paket | 205.00 | 2 paket | 205.00 | 2 paket | 225.51 | 2 paket | 1,133.25 | Kel. Jimbaran |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 56.70 | 2 jenis | 56.70 | 2 jenis | 62.37 | 2 jenis | 62.37 | 2 jenis | 68.61 | 2 jenis | 306.75 | Kel. Jimbaran |
| | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 11.00 | 2 jenis | 11.00 | 3 jenis | 12.10 | 3 jenis | 54.10 | Kel. Jimbaran |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 17.32 | 1 jenis dokumen | 17.32 | 1 jenis dokumen | 19.05 | 1 jenis dokumen | 19.05 | 1 jenis dokumen | 20.95 | 1 jenis dokumen | 93.68 | Kel. Jimbaran |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik | 2 jenis | 2 jenis | 34.18 | 2 jenis | 34.18 | 2 jenis | 37.60 | 2 jenis | 37.60 | 2 jenis | 41.36 | 2 jenis | 184.91 | Kel. Jimbaran |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang diajaga ketertibannya | 14 lingkungan | 14 lingkungan | 38.82 | 14 lingkungan | 38.81 | 14 lingkungan | 42.69 | 14 lingkungan | 42.69 | 14 lingkungan | 46.96 | 14 lingkungan | 209.97 | Kel. Jimbaran |
| | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 lembaga | 5 lembaga | 121.90 | 5 lembaga | 121.90 | 5 lembaga | 134.09 | 5 lembaga | 134.09 | 5 lembaga | 147.50 | 5 lembaga | 659.49 | Kel. Jimbaran |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 jenis | 1 jenis | 52.49 | 1 jenis | 52.49 | 1 jenis | 57.74 | 1 jenis | 57.74 | 1 jenis | 63.51 | 1 jenis | 283.96 | Kel. Jimbaran |
| | PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 27.05 | Kel. Jimbaran |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 14 lingkungan | 14 lingkungan | 142.19 | 14 lingkungan | 142.19 | 14 lingkungan | 156.41 | 14 lingkungan | 156.41 | 14 lingkungan | 172.05 | 14 lingkungan | 769.23 | Kel. Jimbaran |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 72.24 | 7 jenis | 72.24 | 7 jenis | 79.46 | 7 jenis | 79.46 | 7 jenis | 87.41 | 7 jenis | 390.81 | Kel. Jimbaran |
| | KECAMATAN MENGWI | | | | 3,421.68 | | 3,453.82 | | 3,907.38 | | 4,100.60 | | 4,302.15 | | 19,185.63 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran. | 17 Kegiatan | 17 Kegiatan | 1,026.45 | 17 Kegiatan | 1,095.33 | 17 Kegiatan | 1,295.94 | 17 Kegiatan | 1,324.57 | 17 Kegiatan | 1,345.07 | 17 Kegiatan | 6,087.36 | Kec. Mengwi |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah Paket Pengadaan dan Pe,eliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 Paket | 2 Paket | 1,006.73 | 2 Paket | 833.97 | 2 Paket | 937.29 | 2 Paket | 937.29 | 2 Paket | 937.29 | 2 Paket | 4,652.56 | Kec. Mengwi |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersediannya Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 88.00 | 2 Jenis | 96.80 | 2 Jenis | 106.48 | 2 Jenis | 117.13 | 2 Jenis | 128.84 | 2 Jenis | 537.25 | Kec. Mengwi |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 11.00 | 3 Jenis | 12.10 | 3 Jenis | 13.31 | 3 Jenis | 14.64 | 3 Jenis | 61.05 | Kec. Mengwi |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan Pengembangan Nilai Budaya | 13 Jenis | 13 Jenis | 437.84 | 13 Jenis | 481.62 | 13 Jenis | 529.79 | 13 Jenis | 582.76 | 13 Jenis | 641.04 | 13 Jenis | 2,673.06 | Kec. Mengwi |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------------------------|--|---|--|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.02 | 1 Dokumen | 58.32 | 1 Dokumen | 64.15 | 1 Dokumen | 70.57 | 1 Dokumen | 77.62 | 1 Dokumen | 323.67 | |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah Dokumen data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.37 | 2 Jenis | 23.71 | 2 Jenis | 24.08 | 2 Jenis | 24.49 | 2 Jenis | 24.94 | 2 Jenis | 120.60 | Kec. Mengwi |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi Yang dipantau | 20 Desa/Kel | 20 Desa/Kel | 95.23 | 20 Desa/Kel | 104.75 | 20 Desa/Kel | 115.22 | 20 Desa/Kel | 126.75 | 20 Desa/Kel | 139.42 | 20 Desa/Kel | 581.37 | Kec. Mengwi |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah Jenis Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 3 Jenis | 3 Jenis | 119.53 | 3 Jenis | 130.66 | 3 Jenis | 142.90 | 3 Jenis | 156.37 | 3 Jenis | 171.18 | 3 Jenis | 720.64 | Kec. Mengwi |
| 82 | PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jenis Hari Besar Yang diperingati | 8 Hari Besar | 8 Hari Besar | 129.17 | 8 Hari Besar | 142.08 | 8 Hari Besar | 156.29 | 8 Hari Besar | 171.92 | 8 Hari Besar | 189.11 | 8 Hari Besar | 788.57 | Kec. Mengwi |
| 83 | PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis-jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 Jenis | 3 Jenis | 393.90 | 3 Jenis | 433.29 | 3 Jenis | 476.62 | 3 Jenis | 524.28 | 3 Jenis | 576.71 | 3 Jenis | 2,404.80 | Kec. Mengwi |
| 85 | PENATAAN ADMINISTRASI KPPFN/INDUKAN | jenis pelayanan administrasi | 7 Jenis | 7 Jenis | 15.89 | 7 Jenis | 17.48 | 7 Jenis | 19.23 | 7 Jenis | 21.16 | 7 Jenis | 23.27 | 7 Jenis | 97.04 | Kec. Mengwi |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan | 3701 RTM | 3701 RTM | 11.28 | 3701 RTM | 12.41 | 3701 RTM | 13.65 | 3701 RTM | 15.02 | 3701 RTM | 16.52 | 3701 RTM | 68.88 | Kec. Mengwi |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN | Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kel | 20 desa / kelurahan | 20 desa / kelurahan | 11.27 | 20 desa / kelurahan | 12.39 | 20 desa / kelurahan | 13.63 | 20 desa / kelurahan | 15.00 | 20 desa / kelurahan | 16.50 | 20 desa / kelurahan | 68.79 | Kec. Mengwi |
| KELURAHAN SEMPIDI | | | | | 1,553.01 | | 1,798.76 | | 1,973.14 | | 2,174.95 | | 2,385.94 | | 9,885.80 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 657.53 | 15 kegiatan | 688.73 | 15 kegiatan | 752.11 | 15 kegiatan | 831.82 | 15 kegiatan | 908.50 | 15 kegiatan | 3,838.69 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 293.39 | 2 paket | 487.38 | 2 paket | 536.12 | 2 paket | 589.73 | 2 paket | 648.70 | 2 paket | 2,555.32 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 61.70 | 2 jenis | 67.87 | 2 jenis | 74.66 | 2 jenis | 82.12 | 2 jenis | 90.33 | 2 jenis | 376.68 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 11.00 | 2 jenis | 12.10 | 2 jenis | 13.31 | 3 jenis | 14.64 | 3 jenis | 61.05 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 35.53 | 2 jenis dokumen | 39.08 | 2 jenis dokumen | 42.99 | 2 jenis dokumen | 47.28 | 2 jenis dokumen | 52.01 | 2 jenis dokumen | 216.89 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 16.18 | 2 jenis | 17.79 | 2 jenis | 19.57 | 2 jenis | 21.53 | 2 jenis | 23.68 | 2 jenis | 98.75 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 10 lingkungan | 10 lingk | 45.76 | 10 lingk | 50.34 | 10 lingk | 55.37 | 10 lingk | 60.91 | 10 lingk | 67.00 | 10 lingk | 279.39 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam | 5 lembaga | 5 lembaga | 246.29 | 5 lembaga | 231.26 | 5 lembaga | 254.39 | 5 lembaga | 279.83 | 5 lembaga | 307.81 | 5 lembaga | 1,319.57 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan pembinaan kesehatan pemberdayaan masyarakat | 1 jenis | 1 jenis | 22.03 | 1 jenis | 24.24 | 1 jenis | 26.66 | 1 jenis | 29.33 | 1 jenis | 32.26 | 1 jenis | 134.52 | Kelurahan Sempidi |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 6.05 | 1 Tahun | 6.66 | 1 Tahun | 7.32 | 1 Tahun | 30.53 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | jumlah lingkungan yang bersih | 10 lingkungan | 10 lingkungan | 149.35 | 10 lingkungan | 164.29 | 10 lingkungan | 180.72 | 10 lingkungan | 198.79 | 10 lingkungan | 218.67 | 10 lingkungan | 911.82 | Kelurahan Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 10.25 | 7 jenis | 11.28 | 7 jenis | 12.41 | 7 jenis | 13.65 | 7 jenis | 15.01 | 7 jenis | 62.59 | Kelurahan Sempidi |
| | KELURAHAN LUKLUK | | | | 1,483.30 | | 1,504.68 | | 1,547.15 | | 1,731.86 | | 1,842.29 | | 8,109.29 | |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 687.75 | 15 kegiatan | 748.01 | 15 kegiatan | 790.48 | 15 kegiatan | 869.53 | 15 kegiatan | 1,003.96 | 15 kegiatan | 4,099.75 | Kelurahan Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 341.71 | 2 paket | 214.88 | 2 paket | 214.88 | 2 paket | 266.37 | 2 paket | 241.37 | 2 paket | 1,279.23 | Kelurahan Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 60.60 | 2 jenis | 66.06 | 2 jenis | 66.06 | 2 jenis | 72.67 | 2 jenis | 72.67 | 2 jenis | 338.05 | Kelurahan Lukluk |
| | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 11.00 | 3 jenis | 12.00 | 3 jenis | 53.00 | Kelurahan Lukluk |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 19.79 | 1 jenis dokumen | 19.95 | 1 jenis dokumen | 19.95 | 1 jenis dokumen | 21.95 | 1 jenis dokumen | 21.95 | 1 jenis dokumen | 103.58 | Kelurahan Lukluk |
| | PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 25.69 | 2 jenis | 28.06 | 2 jenis | 28.06 | 2 jenis | 30.87 | 2 jenis | 30.87 | 2 jenis | 143.55 | Kelurahan Lukluk |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 9 Lingkungan | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 46.37 | 9 Lingkungan | 46.37 | 9 Lingkungan | 219.20 | Kelurahan Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 110.94 | 4 jenis | 183.64 | 4 jenis | 183.64 | 4 jenis | 202.00 | 4 jenis | 202.00 | 4 jenis | 882.22 | Kelurahan Lukluk |
| | PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar | 1 tahun | 1 tahun | 5.00 | 1 tahun | 5.50 | 1 tahun | 5.50 | 1 tahun | 6.05 | 1 tahun | 6.05 | 1 tahun | 28.10 | Kelurahan Lukluk |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah Lingkungan yang bersih | 9 Lingkungan | 9 Lingkungan | 162.30 | 9 Lingkungan | 167.89 | 9 Lingkungan | 167.89 | 9 Lingkungan | 184.68 | 9 Lingkungan | 184.68 | 9 Lingkungan | 867.43 | Kelurahan Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 17.36 | 7 jenis | 18.53 | 7 jenis | 18.53 | 7 jenis | 20.38 | 7 jenis | 20.38 | 7 jenis | 95.18 | Kelurahan Lukluk |
| | KELURAHAN KAPAL | | | | 2,000.63 | | 1,707.06 | | 1,870.31 | | 1,945.00 | | 2,016.17 | | 9,539.18 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 1,018.49 | 15 kegiatan | 1,088.73 | 15 kegiatan | 1,192.10 | 15 kegiatan | 1,266.80 | 15 kegiatan | 1,337.96 | 15 kegiatan | 5,904.09 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana | 2 paket | 2 paket | 99.43 | 2 paket | 101.92 | 2 paket | 112.12 | 2 paket | 112.12 | 2 paket | 112.12 | 2 paket | 537.71 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 70.15 | 2 jenis | 70.15 | 2 jenis | 77.17 | 2 jenis | 77.17 | 2 jenis | 77.17 | 2 jenis | 371.80 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 2 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 50.00 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.10 | 1 jenis dokumen | 17.45 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 90.23 | Kelurahan Kapal |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 31.44 | 2 jenis | 31.44 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 166.65 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 16 lingkungan | 16 lingkungan | 42.11 | 16 lingkungan | 42.11 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 223.18 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 4 lembaga | 4 lembaga | 132.67 | 4 lembaga | 183.80 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 923.03 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar | 1 Tahun | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.00 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 5.50 | 1 Tahun | 26.50 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 16 lingkungan | 16 lingkungan | 146.29 | 16 lingkungan | 146.29 | 16 lingkungan | 160.92 | 16 lingkungan | 160.92 | 16 lingkungan | 160.92 | 16 lingkungan | 775.35 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 10.17 | 7 jenis | 10.17 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 53.88 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan | 1 paket | 1 paket | 204.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 paket | 204.31 | Kelurahan Kapal |
| | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | Jumlah tapal batas | 0 | 32 unit | 212.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 32 unit | 212.46 | Kelurahan Kapal |
| | KELURAHAN ABIANBASE | | | | 1,334.02 | | 1,397.94 | | 1,532.23 | | 1,601.42 | | 1,666.53 | | 7,532.14 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 829.34 | 15 kegiatan | 893.26 | 15 kegiatan | 977.09 | 15 kegiatan | 1,046.28 | 15 kegiatan | 1,111.39 | 15 kegiatan | 4,857.35 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR. | Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 71.74 | 2 paket | 71.74 | 2 paket | 78.91 | 2 paket | 78.91 | 2 paket | 78.91 | 2 paket | 380.22 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 64.80 | 2 jenis | 64.80 | 2 jenis | 71.28 | 2 jenis | 71.28 | 2 jenis | 71.28 | 2 jenis | 343.44 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 11.00 | 3 jenis | 11.00 | 3 jenis | 11.00 | 3 jenis | 53.00 | Kelurahan Abianbase |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH. | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 17.72 | 2 jenis | 17.72 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 93.92 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. | Jumlah masyarakat/ lingkungan yang menyampaikan usulan | 1 Kelurahan | 1 kel | 20.78 | 1 kel | 20.78 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 110.13 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA. | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 111.35 | 4 jenis | 111.35 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 590.16 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN. | Jumlah lingkungan yang bersih | 13 lingkungan | 13 lingk | 152.37 | 13 lingk | 152.37 | 13 lingk | 167.60 | 13 lingk | 167.60 | 13 lingk | 167.60 | 13 lingk | 807.55 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang di pantau | 13 Lingkungan | 13 Lingk | 42.30 | 13 Lingk | 42.30 | 13 Lingk | 46.54 | 13 Lingk | 46.54 | 13 Lingk | 46.54 | 13 lingk | 224.22 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 1 tahun | 1 tahun | 5.00 | 1 tahun | 5.00 | 1 tahun | 5.50 | 1 tahun | 5.50 | 1 tahun | 5.50 | 1 tahun | 26.50 | Kelurahan Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 8.61 | 7 jenis | 8.61 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 45.66 | Kelurahan Abianbase |
| | KELURAHAN SADING | | | | 1,171.35 | | 1,199.78 | | 1,469.75 | | 1,573.03 | | 1,709.83 | | 7,123.74 | |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran | 15 kegiatan | 15 kegiatan | 593.70 | 15 kegiatan | 664.63 | 15 kegiatan | 725.59 | 15 kegiatan | 802.65 | 15 kegiatan | 876.42 | 15 kegiatan | 3662.986 | Kel. Sading |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---|------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 143.83 | 2 paket | 57.94 | 2 paket | 219.23 | 2 paket | 192.95 | 2 paket | 198.25 | 2 paket | 812.205 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 59.46 | 2 jenis | 65.41 | 2 jenis | 71.95 | 2 jenis | 79.14 | 2 jenis | 87.06 | 2 jenis | 363.009 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 9.55 | 2 jenis | 10.51 | 2 jenis | 11.56 | 2 jenis | 12.72 | 3 jenis | 13.99 | 3 jenis | 58.322 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 14.38 | 1 jenis | 15.82 | 1 jenis | 17.40 | 1 jenis | 19.14 | 1 jenis | 21.05 | 1 jenis | 87.787 | Kel. Sading |
| | Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah | jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 21.01 | 2 jenis | 23.11 | 2 jenis | 25.42 | 2 jenis | 27.96 | 2 jenis | 30.75 | 2 jenis | 128.244 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lokasi yang dipantau | 9 lingkungan | 9 lingkungan | 38.48 | 9 lingkungan | 42.33 | 9 lingkungan | 46.56 | 9 lingkungan | 51.22 | 9 lingkungan | 56.34 | 9 lingkungan | 234.924 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 114.66 | 4 jenis | 126.12 | 4 jenis | 138.73 | 4 jenis | 152.61 | 4 jenis | 167.87 | 4 jenis | 699.980 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | jumlah waktu pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 1 tahun | 1 tahun | 5.00 | 8 hari besar | 5.50 | 1 tahun | 6.05 | 1 tahun | 6.66 | 1 tahun | 7.32 | 1 tahun | 30.526 | Kel. Sading |
| | KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 9 lingkungan | 9 lingkungan | 156.25 | 9 lingkungan | 171.88 | 9 lingkungan | 189.06 | 9 lingkungan | 207.97 | 9 lingkungan | 228.77 | 9 lingkungan | 953.922 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 15.04 | 7 jenis | 16.55 | 7 jenis | 18.20 | 7 jenis | 20.02 | 7 jenis | 22.02 | 7 jenis | 91.839 | Kel. Sading |
| | KANTOR CAMAT ABIANSEMAL | | | | 3,409.48 | | 3,486.44 | | 3,705.59 | | 3,971.73 | | 4,131.80 | | 20,745.53 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran | 16 kegiatan | 16 Kegiatan | 1,720.34 | 16 Kegiatan | 1,895.12 | 16 Kegiatan | 2,070.89 | 16 Kegiatan | 2,274.22 | 16 Kegiatan | 2,401.70 | 16 Kegiatan | 10,362.27 | Kantor Camat Abiansemal |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 2 paket | 461.28 | 2 paket | 323.78 | 2 paket | 323.78 | 2 paket | 323.78 | 2 paket | 323.78 | 2 paket | 1,756.39 | Kantor Camat Abiansemal |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 92.80 | 2 jenis | 92.80 | 2 jenis | 92.80 | 2 jenis | 92.80 | 2 jenis | 92.80 | 2 jenis | 464.00 | Kantor Camat Abiansemal |
| 08 | PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Kegiatan pengembangan nilai budaya | 13 jenis | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 1,696.15 | Kantor Camat Abiansemal |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Dokumen perencanaan | 3 jenis | 3 jenis | 10.00 | 3 jenis | 12.00 | 3 jenis | 12.00 | 3 jenis | 12.00 | 3 jenis | 12.00 | 3 jenis | 58.00 | Kantor Camat Abiansemal |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 40.44 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 207.19 | Kantor Camat Abiansemal |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-------------------------|---|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data | 2 jenis | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 16.92 | Kantor Camat Abiansemal |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 18 desa | 18 desa | 86.61 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 426.61 | Kantor Camat Abiansemal |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 5 jenis | 105.87 | 5 jenis | 106.99 | 5 jenis | 70.64 | 5 jenis | 114.62 | 5 jenis | 119.02 | 5 jenis | 2.657.62 | Kantor Camat Abiansemal |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL | Jumlah hari besar yang diperingati | 7 hari besar | 7 hari besar | 131.17 | 7 hari besar | 131.17 | 7 hari besar | 131.17 | 7 hari besar | 131.17 | 7 hari besar | 131.17 | 7 hari besar | 655.83 | Kantor Camat Abiansemal |
| 83 | PROGRAM KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 jenis | 3 jenis | 362.13 | 3 jenis | 398.34 | 3 jenis | 438.17 | 3 jenis | 481.99 | 3 jenis | 530.19 | 3 jenis | 2.210.82 | Kantor Camat Abiansemal |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 8 jenis | 19.90 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 102.36 | Kantor Camat Abiansemal |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Desa yang dilakukan pengentasan kemiskinan | 18 desa | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 32.08 | Kantor Camat Abiansemal |
| 92 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | Perbeker yang terpilih | 3 desa | 3 desa | 5.10 | 2 desa | 5.10 | 9 desa | 45.00 | 4 desa | 20.00 | 0 | 0.00 | 18 desa | 75.20 | Kantor Camat Abiansemal |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | 18 kali | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 24.09 | Kantor Camat Abiansemal |
| KECAMATAN PETANG | | | | | 2,910.97 | 2,884.31 | 3,159.00 | 3,471.14 | 3,803.51 | 16,228.93 | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Perkantoran | 15 Kegiatan | 15 Kegiatan | 1,218.58 | 15 Kegiatan | 1,343.19 | 15 Kegiatan | 1,463.76 | 15 Kegiatan | 1,606.39 | 15 Kegiatan | 1,752.28 | 15 Kegiatan | 7,384.20 | Kec. Petang |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | 2 Paket | 2 Paket | 510.94 | 2 Paket | 275.53 | 2 Paket | 303.08 | 2 Paket | 333.39 | 2 Paket | 366.73 | 2 Paket | 1,789.68 | Kec. Petang |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 2 jenis | 81.60 | 2 jenis | 89.76 | 2 jenis | 98.74 | 2 jenis | 108.61 | 2 jenis | 119.47 | 2 jenis | 498.18 | Kec. Petang |
| 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya | 12 jenis | 12 jenis | 340.53 | 12 jenis | 374.58 | 12 jenis | 412.04 | 12 jenis | 453.24 | 12 jenis | 498.56 | 12 jenis | 2,078.94 | Kec. Petang |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN DAN | Dokumen Perencanaan | 3 Jenis | 3 Jenis | 10.00 | 3 Jenis | 11.00 | 3 Jenis | 12.10 | 3 Jenis | 13.31 | 3 Jenis | 14.64 | 3 Jenis | 61.05 | Kec. Petang |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.15 | 1 Dokumen | 47.47 | 1 Dokumen | 52.22 | 1 Dokumen | 57.44 | 1 Dokumen | 63.18 | 1 Dokumen | 263.46 | Kec. Petang |
| 38 | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Dokumen Data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.97 | 2 Jenis | 4.36 | 2 Jenis | 4.80 | 2 Jenis | 5.28 | 2 Jenis | 5.81 | 2 Jenis | 44.22 | Kec. Petang |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya | 7 Desa | 7 Desa | 91.08 | 7 Desa | 88.18 | 7 Desa | 97.00 | 7 Desa | 106.70 | 7 Desa | 117.37 | 7 Desa | 500.33 | Kec. Petang |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 2 kegiatan | 5 kegiatan | 73.76 | 5 kegiatan | 81.13 | 5 kegiatan | 89.24 | 5 kegiatan | 98.17 | 5 kegiatan | 107.99 | 5 kegiatan | 450.29 | Kec. Petang |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jumlah hari besar yang diorganisasi | 7 hari besar | 7 hari besar | 129.17 | 7 hari besar | 142.08 | 7 hari besar | 156.29 | 7 hari besar | 171.92 | 7 hari besar | 189.12 | 7 hari besar | 788.58 | Kec. Petang |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya | 3 Jenis | 1 Jenis | 355.35 | 1 Jenis | 390.88 | 1 Jenis | 429.97 | 1 Jenis | 472.97 | 1 Jenis | 520.27 | 1 Jenis | 2,169.44 | Kec. Petang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi | 7 jenis | 7871 kk, 28.720 jiwa | 15.95 | 7 jenis | 17.55 | 7 jenis | 19.30 | 7 jenis | 21.23 | 7 jenis | 23.35 | 7 jenis | 97.39 | Kec. Petang |
| 86 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Karang Taruna/PSM yang dibina | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 6.70 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 7.37 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 8.11 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 8.92 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 9.82 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 40.93 | Kec. Petang |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan | 392 RTM | 392 RTM | 4.48 | 392 RTM | 4.92 | 392 RTM | 5.42 | 392 RTM | 5.96 | 392 RTM | 6.55 | 392 RTM | 27.33 | Kec. Petang |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | JumlahDesayang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 7 desa | 7 desa | 5.72 | 7 desa | 6.29 | 7 desa | 6.92 | 7 desa | 7.61 | 7 desa | 8.37 | 7 desa | 34.92 | Kec. Petang |

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | 2,167,349.12 | |
| 01 | URUSAN PENDIDIKAN | | | 397,020.65 | |
| | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH | | | 397,020.65 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 1 Paket | 20,520.53 | DISDIKPORA |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 2,377.37 | DISDIKPORA |
| | 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur | 1 Paket | 3,825.60 | DISDIKPORA |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Paket | 370.27 | DISDIKPORA |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | 1 Paket | 9.76 | DISDIKPORA |
| | 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | APK TK | 1 Paket | 536.80 | DISDIKPORA |
| | 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | APK SD | 1 Paket | 353,343.63 | DISDIKPORA |
| | 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH | APK SM | 1 Paket | 10,070.49 | DISDIKPORA |
| | 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal | 1 Paket | 4,834.91 | DISDIKPORA |
| | 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Peningkatan Kualifikasi Guru S.1 | 1 Paket | 1,131.28 | DISDIKPORA |
| 02 | URUSAN KESEHATAN | | | 338,403.19 | |
| | DINAS KESEHATAN | | | 145,554.78 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD | 1 Paket | 9,412.12 | DISKES |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 8,847.79 | DISKES |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Paket | 338.68 | DISKES |
| | 15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar | 100% | 3,774.12 | DISKES |
| | 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat | 100% | 40,417.91 | DISKES |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar | 100% | 85.23 | DISKES |
| 20 | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | Cakupan anak balita gizi buruk | 100% | 526.54 | DISKES |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | Cakupan Rumah Sehat | 100% | 375.02 | DISKES |
| | | Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat | 100% | | DISKES |
| 22 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA+ | 100% | 16,157.75 | DISKES |
| 23 | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan | 100% | 5,374.31 | DISKES |
| 25 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/BKIA | 100% | 46,549.17 | DISKES |
| 28 | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan | 100% | 37.68 | DISKES |
| 29 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA | Angka kematian balita per 1.000 Balita | 100% | 165.88 | DISKES |
| 30 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA | Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan | 100% | 1,225.20 | DISKES |
| 32 | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 0 | 4,049.49 | DISKES |
| 36 | PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS | Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis | 6 Kecamatan | 7,968.50 | DISKES |
| 37 | PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN | Jumlah alkes puskesmas yang | 13 Puskesmas, 54 Pustu | 249.38 | DISKES |
| | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) | | | 192,848.41 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 1 paket | 16,740.14 | RSUD |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit | 100% | 47,035.16 | RSUD |
| 26 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit | 100% | 1,873.51 | RSUD |
| 40 | PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD | Meningkatnya kemampuan BLUD untuk membiaya operasionalnya secara mandiri | | 127,199.60 | RSUD |
| 03 | URUSAN PEKERJAAN UMUM | | | 683,912.41 | |
| | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN | | | 604,127.51 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar | 100% | 4,090.86 | DINAS BMP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang | 1 Paket | 1,716.32 | DINAS BMP |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 807.39 | DINAS BMP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 07 PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN | Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap | 1 paket | 442,667.57 | DINAS BMP |
| | 09 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA) | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 1 Paket | 10.00 | DINAS BMP |
| | 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terbangun | 1 Paket | 373.25 | DINAS BMP |
| | 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Badung | 1 Paket | 38,990.45 | DINAS BMP |
| | 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | Tersedianya prasarana dan sarana kebinamargaan yang memadai | 1 Paket | 1,127.31 | DINAS BMP |
| | 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik | 1 Paket | 114,344.36 | DINAS BMP |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | 79,784.89 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar | 100% | 1,296.59 | DCK |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan | 1 paket | 983.44 | DCK |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 1 Paket | 805.23 | DCK |
| | 09 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 3 laporan | 9.98 | DCK |
| | 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 8 buku | 3.09 | DCK |
| | 35 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN | Tercapainya sarana prasarana air bersih dengan spam untuk perluasan cakupan layanan 80% (30 paket pekerjaan) th 2014 | 1 Paket | 34,635.99 | DCK |
| | 37 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG | Jumlah fasilitas umum yang tertata | 1 paket | 42,038.98 | DCK |
| | 38 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL | Meningkatnya sistem pengawasan internal keciptakaryaan | 1 Paket | 11.60 | DCK |
| | 04 URUSAN PERUMAHAN | | | 212,133.10 | |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | 203,408.82 | |
| | 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai | 1 Paket | 203,408.82 | DCK |
| | DINAS PEMADAM KEBAKARAN | | | 8,724.28 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 12 Bulan. | 1,876.52 | DISDAMKAR |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran | 12 Bulan | 653.86 | DISDAMKAR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 12 Bulan | 98.60 | DISDAMKAR |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN | Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung | 12 Bulan. | 6,085.30 | DISDAMKAR |
| 23 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung | 12 Bulan | 10.00 | DISDAMKAR |
| 05 | URUSAN PENATAAN RUANG | | | 14,615.50 | |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | 13,301.15 | |
| 16 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung | 1 paket | 13,193.55 | DCK |
| 17 | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | Terwujudnya pengendalian ruang di Kab. Badung | 1 paket | 107.60 | DCK |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 1,314.35 | |
| 18 | PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG | Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan | 1 Paket | 1,314.35 | BAPPEDA LITBANG |
| 06 | URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | 9,116.43 | |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 9,116.43 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD | 1 Paket | 1,037.17 | BAPPEDA LITBANG |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 2,470.12 | BAPPEDA LITBANG |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12 bulan | 362.23 | BAPPEDA LITBANG |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD | 95% | 31.32 | BAPPEDA LITBANG |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | Tersedianya data | 1 Paket | 573.58 | BAPPEDA LITBANG |
| 21 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD | 95% | 3,934.49 | BAPPEDA LITBANG |
| 22 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi | 6 Kecamatan | 394.47 | BAPPEDA LITBANG |
| 24 | PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 1 Paket | 145.24 | BAPPEDA LITBANG |
| 26 | PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan | 12 Bulan. | 83.09 | BAPPEDA LITBANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|---|--|-----------|----------------------------------|-----------------|
| | | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | Terbinanya ilmu pengetahuan dan teknologi | 12 Bulan. | 84.71 | BAPPEDA LITBANG |
| | 07 | URUSAN PERHUBUNGAN | | | 58,980.73 | |
| | | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 58,980.73 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran | 1 paket | 22,025.82 | DISHUBKOMINFO |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 1,034.98 | DISHUBKOMINFO |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 384.29 | DISHUBKOMINFO |
| | 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai | 1 paket | 29,198.25 | DISHUBKOMINFO |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan | 1 paket | 6,327.40 | DISHUBKOMINFO |
| | 23 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan penganggaran SKPD sesuai dengan Rencana | 1 paket | 9.99 | DISHUBKOMINFO |
| 08 | URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP | | | 52,423.60 | |
| | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | | | 49,345.80 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar | 100% | 3,481.00 | DKP |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | 930.57 | DKP |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 195.40 | DKP |
| | 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | persentase penanganan sampah | 100% | 36,243.94 | DKP |
| | 24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | terpeliharanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung | 100% | 8,484.88 | DKP |
| | 28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA) | tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra) | 100% | 10.00 | DKP |
| | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | 3,077.81 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | meningkatnya kinerja pelayanan | 100% | 791.38 | BLH |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 247.29 | BLH |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 106.18 | BLH |
| | 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | nilai baku mutu kualitas air, udara, dan air laut | 20 lokasi | 835.61 | BLH |
| | 18 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM | terlaksananya pelestarian sumber daya alam | 100% | 238.81 | BLH |
| | 19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | Ketersediaan database lingkungan hidup di Kabupaten Badung | 1 paket | 698.85 | BLH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 27 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | jumlah kelompok masyarakat yang terbina dibidang lingkungan hidup | 1 paket | 149.69 | BLH |
| | 28 PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA,RKA) | tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD | 1 dokumen | 10.00 | BLH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 09 | URUSAN PERTANAHAN | | | 910.36 | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | 910.36 | |
| | 16 PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Tertanganinya permasalahan tanah | 100% | 892.66 | BAG ADM PEM UMUM |
| | 17 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN | Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan | 4 kasus | 17.70 | BAG ADM PEM UMUM |
| 10 | URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | 5,779.02 | |
| | DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL | | | 5,779.02 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai | 12 bulan | 1,360.72 | DISDUKCAPIL |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 12 bulan | 2,965.83 | DISDUKCAPIL |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 12 bulan | 97.06 | DISDUKCAPIL |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 1 Paket | 10.00 | DISDUKCAPIL |
| | 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan pelayanan kependudukan | 12 bulan | 1,345.41 | DISDUKCAPIL |
| 11 | URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | 2,083.71 | |
| | KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | 2,083.71 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 12 bulan | 389.83 | KPP |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 79.15 | KPP |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 68.49 | KPP |
| | 09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 1 paket | 9.99 | KPP |
| | 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | Terwujudnya kualitas keluarga dan institusi masvarakat | 1 paket | 548.98 | KPP |
| | 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) | Terlaksananya pemberdayaan perempuan< PUG dan perlindungan anak | 1 paket | 797.11 | KPP |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Terbangunnya kesepahaman perlindungan perempuan dan anak | 1 paket | 154.31 | KPP |
| | 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM | Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender | 1 paket | 35.86 | KPP |
| 12 | URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | | | 4,237.39 | |
| | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA | | | 4,237.39 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD | 1 Paket | 931.07 | BKBKS |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 454.50 | BKBKS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terlaksananya kegiatan yang berorientasi peningkatan wawasan bidang keluarga berencana | 1 kali | 17.60 | BKBKS |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Paket | 101.56 | BKBKS |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program SKPD | 3 jenis dokumen | 9.45 | BKBKS |
| 15 | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | Meningkatnya cakupan jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif | 100% | 1,322.32 | BKBKS |
| 16 | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | Meningkatnya cakupan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja | 100% | 448.66 | BKBKS |
| 23 | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | Terwujudnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga | 1 Paket | 210.79 | BKBKS |
| 26 | PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT | Terpenuhinya jumlah kader yang secara suka rela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ kelurahan. | 1 Paket | 132.42 | BKBKS |
| 31 | PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA | Cakupan wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan | 1 Paket | 609.01 | BKBKS |
| 13 | URUSAN WAJIB SOSIAL | | | 5,310.50 | |
| | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | | | 5,310.50 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tuboksi SKPD | 1 paket | 1,001.67 | DISOSNAKER |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 790.34 | DISOSNAKER |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan kualitas yang baik | 4 Hari besar nasional | 2,017.67 | DISOSNAKER |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Paket | 153.50 | DISOSNAKER |
| 08 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI | Peningkatan Kualitas Bursa Kerja | 1 Paket | 42.20 | DISOSNAKER |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Persentase kesesuaian antara Renja SKPD | 1 Paket | 9.80 | DISOSNAKER |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA | Peningkatan kemandirian Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya | 1 Paket | 257.32 | DISOSNAKER |
| 16 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Peningkatan UEP dan RTM | 1 Paket | 774.07 | DISOSNAKER |
| 21 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 1 Paket | 263.93 | DISOSNAKER |
| 14 | URUSAN KETENAGAKERJAAN | | | 4,347.88 | |
| | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | | | 4,347.88 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|-------------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 100% | 3,136.38 | DISOSNAKER |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Terkendalinya angka pengangguran | 1 Paket | 494.80 | DISOSNAKER |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|---|-------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja | 1 Paket | 716.69 | DISOSNAKER |
| | 15 | URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | 4,643.03 | |
| | | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN | | | 4,643.03 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 12 bulan | 929.00 | DISKOPERINDAG |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang | 12 bulan | 1,016.79 | DISKOPERINDAG |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 12 bulan | 147.17 | DISKOPERINDAG |
| | 15 | PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF | Meningkatnya produktifitas, kualitas, kuantitas, pemasaran, pendapatan dan daya saing bagi UMKM | 3 koperasi | 122.06 | DISKOPERINDAG |
| | 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk jiwa kewirausahaan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi UKM | 12 bulan | 1,153.92 | DISKOPERINDAG |
| | 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas | 12 bulan | 971.38 | DISKOPERINDAG |
| | 19 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen yang disusun perencanaan | 12 bulan | 9.99 | DISKOPERINDAG |
| | 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ INFORMASI | Tersedianya buku profil dan buku laporan kegiatan SKPD | 62 buku | 292.72 | DISKOPERINDAG |
| | 16 | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | 52.57 | |
| | | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | 52.57 | |
| | 17 | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH | Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah | 6 Kecamatan | 32.44 | BAG. PEREKONOMIAN |
| | 18 | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI | Terciptanya iklim investasi yang kondusif | 6 Kecamatan | 20.13 | BAG. PEREKONOMIAN |
| | 17 | URUSAN KEBUDAYAAN | | | 26,066.38 | |
| | | DINAS KEBUDAYAAN | | | 26,066.38 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 1 Paket | 1,951.66 | KEBUDAYAAN |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 570.42 | KEBUDAYAAN |
| | 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur | 1 paket | 14.95 | KEBUDAYAAN |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 138.57 | KEBUDAYAAN |
| | 09 | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penanganannya | 100% | 9.29 | KEBUDAYAAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan adat dan budaya Bali | 1 paket | 22,553.66 | KEBUDAYAAN |
| 16 | PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA | Terinventarisasinya produk budaya masyarakat melalui Museum Yadnya | 1 paket | 827.84 | KEBUDAYAAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | 8,997.77 | |
| | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH | | | 8,997.77 | |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kepeloporan | 1 Paket | 796.39 | DISDIKPORA |
| 20 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga | 1 Paket | 8,201.37 | DISDIKPORA |
| 19 | Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 8,644.37 | |
| | Satuan Polisi Pamong Praja | | | 3,107.90 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 12 bln | 971.33 | SATPOLPP |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 307.64 | SATPOLPP |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan mengenakan kelengkapan pakaian serta atribut | 100% | 307.67 | SATPOLPP |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota satpol. PP | 100% | 79.14 | SATPOLPP |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 102.82 | SATPOLPP |
| 08 | PROGRAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI | Tersedianya informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di | 1 paket | 6.95 | SATPOLPP |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya sistem pelaporan perencanaan dan penqanqqaran | 1 paket | 9.88 | SATPOLPP |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Badung | 100% | 321.58 | SATPOLPP |
| 16 | PROGRAM PEMELIHARAAN KANKAMTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak kriminal melalui penegakan Perda dan Perbup | 100% | 1,000.89 | SATPOLPP |
| | Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas | | | 1,380.57 | KESBANG LINMAS |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 1 paket | 616.70 | KESBANG LINMAS |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 133.32 | KESBANG LINMAS |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia | 1 paket | 37.99 | KESBANG LINMAS |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 81.35 | KESBANG LINMAS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten | 1 paket | 114.85 | KESBANG LINMAS |
| 19 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan | 1 paket | 170.79 | KESBANG LINMAS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT | Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik | 1 paket | 75.65 | KESBANG LINMAS |
| 37 | PROGRAM Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Terlaksananya Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 1 paket | 149.93 | KESBANG LINMAS |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | 4,155.90 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 100 % | 1,176.51 | BPBD |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai | 100 % | 482.45 | BPBD |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100 % | 135.39 | BPBD |
| 34 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI | jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, sekolah aman bencana dan pusat pemerintahan siaga bencana yang terbentuk | 100 % | 10.66 | BPBD |
| 35 | PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK | Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana | 100 % | 135.82 | BPBD |
| 39 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA | Meningkatnya Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana | 1 paket | 89.76 | BPBD |
| 40 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana | 1 paket | 206.54 | BPBD |
| 41 | PROGRAM KESIAPSIAGAAN | | | 28.38 | BPBD |
| 42 | PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA | Meningkatnya Penanganan Darurat Kebencanaan | 1 paket | 1,862.92 | BPBD |
| 43 | PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA | Terlaksananya pemulihan pasca bencana | 100 % | 27.47 | BPBD |
| 20 | URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PRANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN | | | 262,427.68 | |
| | SEKERTARIAT DAERAH | | | 116,891.80 | |
| | BAGIAN UMUM | | | 73,369.59 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 1 Paket | 49,756.14 | BAG. UMUM |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 1 Paket | 12,657.37 | BAG. UMUM |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas | 1 paket | 9,867.52 | BAG. UMUM |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran | 688.56 | BAG. UMUM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA | Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi kepala | 1 Paket | 400.00 | BAG. UMUM |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | 7,928.15 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai | 4 Paket | 919.46 | HUMAS DAN PROTOKOL |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 Paket | 606.32 | HUMAS DAN PROTOKOL |
| 35 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI | Meningkatnya Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa | 12 bulan | 950.15 | HUMAS DAN PROTOKOL |
| 36 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA | Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa | 12 Bulan | 659.99 | HUMAS DAN PROTOKOL |
| 37 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Meningkatnya komunikasi Informasi Dengan Media Massa | 12 bulan | 4,792.23 | HUMAS DAN PROTOKOL |
| | BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH | | | 16,877.99 | |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 Paket | 12,199.57 | BAG. ASSET DAERAH |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terlaksananya Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 1 Paket | 1,628.46 | BAG. ASSET DAERAH |
| 33 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET | Terlaksananya peningkatan dan pengembangan asset daerah | 12 Bulan | 849.29 | BAG. ASSET DAERAH |
| 34 | PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH | Terasuransinya gedung - gedung yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kab Badung | 1 Paket | 2,200.67 | BAG. ASSET DAERAH |
| | BAGIAN ADMINISTRASI KESRA | | | 3,536.91 | |
| 91 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Terlaksananya jumlah Proporsal yang diproses tepat waktu | 100% | 3,536.91 | BAG KESRA |
| | BAGIAN KEUANGAN | | | 6,601.49 | |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan | 53 SKPD | 57.44 | BAG.KEUANGAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel | 2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran | 235.54 | BAG.KEUANGAN |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah | 12 bulan | 6,191.26 | BAG.KEUANGAN |
| 18 | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA | Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada | 1572 SPMUP/GU/TU | 117.25 | BAG.KEUANGAN |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | 752.98 | |
| 56 | PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD | 122 LPD | 406.10 | BAG.PEREKONOMIA N |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 75 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Tercapainya produktivitas pertanian yang memadai | 6 Kecamatan | 138.18 | BAG.PEREKONOMIA N |
| | 92 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan | 6 Kecamatan | 104.64 | BAG.PEREKONOMIA N |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Meningkatnya Profesionalisme Organisasi KTNA | 60 Orang | 27.41 | BAG.PEREKONOMIA N |
| | 11 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 6 kecamatan | 19.38 | BAG.PEREKONOMIA N |
| | 12 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 12 bulan | 57.27 | BAG.PEREKONOMIA N |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | 317.06 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran | 1 Paket | 25.08 | BAG ADM PEM UMUM |
| | 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 225.68 | BAG ADM PEM UMUM |
| | 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | 24 kunjungan | 19.60 | BAG ADM PEM UMUM |
| | 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU | Tertatanya Daerah Otonomi Baru | 6 Lokasi | 46.71 | BAG ADM PEM UMUM |
| | BAGIAN HUKUM DAN HAM | | | 1,907.48 | |
| | 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 1 Paket | 1,900.38 | BAG. HUKUM DAN HAM |
| | 03 PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM | Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum | 1 Paket | 7.11 | BAG. HUKUM DAN HAM |
| | BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA | | | 832.00 | |
| | 01 ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas | 4 Paket | 10.00 | BAG.ORTAL |
| | 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah SKPD yang ditingkatkan sumber daya aparaturnya | 53 SKPD | 28.74 | BAG.ORTAL |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran | 403.16 | BAG.ORTAL |
| | 28 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Jumlah SKPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya | 6 SKPD | 359.18 | BAG.ORTAL |
| | 39 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL | Jumlah SKPD yang ditingkatkan kualitas pelayanan minimal | 16 SKPD/Unit Kerja | 30.92 | BAG.ORTAL |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | 4,768.14 | |
| | 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa | 53 SKPD | 214.98 | BAG. ADM PEMBANGUNAN |
| | 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH | 6 Kecamatan | 298.82 | BAG. ADM PEMBANGUNAN |
| | 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN | Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik | 53 SKPD | 4,242.77 | BAG. ADM PEMBANGUNAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 89 | PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Pelaksanaan operasional administrasi pembangunan | 100 % | 11.57 | BAG. ADM PEMBANGUNAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | 65,813.25 | |
| 01 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 3,735.58 | SEKWAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 paket | 16,270.40 | SEKWAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya dokumen pelaporan dan capaian kinerja | 1 paket | 163.18 | SEKWAN |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Terwujudnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 100% | 45,405.18 | SEKWAN |
| 26 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN | Tertatanya Peraturan Perundang - Undangan | 100% | 238.92 | SEKWAN |
| | INSPEKTORAT | | | 3,943.02 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran | 1 Paket | 771.33 | INSPEKTORAT |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 1 Paket | 295.46 | INSPEKTORAT |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS | Terlaksananya TOT dan | 1 Paket | 27.43 | INSPEKTORAT |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Tersedianya honor pelaksana kegiatan | 1 Paket | 202.80 | INSPEKTORAT |
| 09 | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 3 Dokumen | 8.38 | INSPEKTORAT |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif terhadap 5 aspek pemeriksaan | 12 Obrik | 1,923.71 | INSPEKTORAT |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Terlaksananya pelatihan tenaga tenaga pemeriksa dan pengawas | 1 Paket | 37.88 | INSPEKTORAT |
| 22 | PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | Terlaksananya Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga terjamin adanya pelaksanaan tertib administrasi keuangan | 100% | 676.02 | INSPEKTORAT |
| | DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG | | | 14,325.12 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 12 Bulan | 2,180.98 | DISPENDA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 12 Bulan | 816.64 | DISPENDA |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan | 12 Bulan | 187.96 | DISPENDA |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Meningkatnya Subak Abian/yeh di Kab. Badung yang memiliki Awig-Awig | 12 Bulan | 2,212.18 | DISPENDA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 12 Bulan | 10.00 | DISPENDA |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 12 Bulan | 8,917.35 | DISPENDA |
| | KECAMATAN KUTA | | | 5,075.53 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 1 paket | 1,410.73 | KEC KUTA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 1,074.85 | KEC KUTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 87.25 | KEC KUTA |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 paket | 1,530.83 | KEC KUTA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 1 paket | 9.45 | KEC KUTA |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 1 paket | 35.49 | KEC KUTA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.10 | KEC KUTA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 5 kelurahan | 25.71 | KEC KUTA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 66.77 | KEC KUTA |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat | 1 paket | 44.40 | KEC KUTA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI | 8 hari besar | 109.18 | KEC KUTA |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 410.55 | KEC KUTA |
| 85 | PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1867 KK, 4284 KTP | 56.30 | KEC KUTA |
| 86 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 kegiatan | 4.57 | KEC KUTA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 7.54 | KEC KUTA |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 5 kelurahan | 3.34 | KEC KUTA |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 5 kelurahan | 4.71 | KEC KUTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG | Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor | 2 unit | 190.78 | KEC KUTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | KECAMATAN KUTA UTARA | | | 4,133.89 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 1,205.74 | KEC KUTA UTARA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 402.77 | KEC KUTA UTARA |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 84.98 | KEC KUTA UTARA |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 paket | 1,544.62 | KEC KUTA UTARA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tersusunnya dokumen Renstra | 1 paket | 9.54 | KEC KUTA UTARA |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 6 kali | 28.64 | KEC KUTA UTARA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.27 | KEC KUTA UTARA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 paket | 22.10 | KEC KUTA UTARA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 120.61 | KEC KUTA UTARA |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan promosi kesehatan dari pemberdayaan masyarakat | 1 paket | 72.87 | KEC KUTA UTARA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terperingatinya hari besar nasional | 8 peringatan | 109.31 | KEC KUTA UTARA |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 390.06 | KEC KUTA UTARA |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1 paket | 85.14 | KEC KUTA UTARA |
| 86 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 paket | 5.01 | KEC KUTA UTARA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 8.76 | KEC KUTA UTARA |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 1 paket | 4.42 | KEC KUTA UTARA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor | 1 paket | 36.04 | KEC KUTA UTARA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | KECAMATAN KUTA SELATAN | | | 4,161.70 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 100 % | 917.19 | KEC KUTA SELATAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 697.51 | KEC KUTA SELATAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 87.21 | KEC KUTA SELATAN |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 8 Kegiatan | 1,559.24 | KEC KUTA SELATAN |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 1 paket | 9.99 | KEC KUTA SELATAN |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 1 paket | 31.65 | KEC KUTA SELATAN |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.37 | KEC KUTA SELATAN |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 6 desa /kelurahan | 27.28 | KEC KUTA SELATAN |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 105.11 | KEC KUTA SELATAN |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat | 1 paket | 67.27 | KEC KUTA SELATAN |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI | 7 hari besar | 108.37 | KEC KUTA SELATAN |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 363.62 | KEC KUTA SELATAN |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1 paket | 94.82 | KEC KUTA SELATAN |
| 86 | PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 paket | 4.34 | KEC KUTA SELATAN |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 46.01 | KEC KUTA SELATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 1 paket | 4.50 | KEC KUTA SELATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-------------------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 6 desa /kelurahan | 34.22 | KEC KUTA SELATAN |
| KECAMATAN MENGWI | | | | 5,160.34 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 1 paket | 1,270.41 | KEC MENGWI |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 1,253.86 | KEC MENGWI |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 84.59 | KEC MENGWI |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 paket | 1,557.03 | KEC MENGWI |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 1 paket | 10.00 | KEC MENGWI |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 1 paket | 46.50 | KEC MENGWI |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.17 | KEC MENGWI |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 paket | 25.90 | KEC MENGWI |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 171.81 | KEC MENGWI |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat | 1 paket | 81.35 | KEC MENGWI |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI | 1 paket | 114.53 | KEC MENGWI |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 419.80 | KEC MENGWI |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1 paket | 51.52 | KEC MENGWI |
| 86 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 paket | 36.59 | KEC MENGWI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 11.32 | KEC MENGWI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|-----------------------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 1 paket | 6.48 | KEC MENGWI |
| 98 | PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa | 1 paket | 6.65 | KEC MENGWI |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 paket | 8.82 | KEC MENGWI |
| KECAMATAN ABIANSEMAL | | | | 4,722.71 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 1 paket | 1,151.64 | KEC ABIANSEMAL |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 992.79 | KEC ABIANSEMAL |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 92.39 | KEC ABIANSEMAL |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 paket | 1,556.42 | KEC ABIANSEMAL |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 1 paket | 9.99 | KEC ABIANSEMAL |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 1 paket | 28.73 | KEC ABIANSEMAL |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.08 | KEC ABIANSEMAL |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 paket | 32.00 | KEC ABIANSEMAL |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 144.07 | KEC ABIANSEMAL |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat | 1 paket | 69.63 | KEC ABIANSEMAL |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI | 1 paket | 103.33 | KEC ABIANSEMAL |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 446.13 | KEC ABIANSEMAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1 paket | 62.92 | KEC ABIANSEMAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 86 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 paket | 4.31 | KEC ABIANSEMAL |
| | 87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 10.63 | KEC ABIANSEMAL |
| | 90 PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 1 paket | 5.06 | KEC ABIANSEMAL |
| | 98 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa | 1 paket | 4.65 | KEC ABIANSEMAL |
| | 99 PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 paket | 4.96 | KEC ABIANSEMAL |
| | KECAMATAN PETANG | | | 4,489.34 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran | 1 paket | 1,467.75 | KEC PETANG |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 525.21 | KEC PETANG |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 73.92 | KEC PETANG |
| | 08 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 paket | 1,547.67 | KEC PETANG |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD | 1 paket | 9.87 | KEC PETANG |
| | 29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan | 1 paket | 36.78 | KEC PETANG |
| | 38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah | 1 paket | 3.97 | KEC PETANG |
| | 78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 1 paket | 36.20 | KEC PETANG |
| | 79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 124.17 | KEC PETANG |
| | 81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat | 1 paket | 65.99 | KEC PETANG |
| | 82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI | 1 paket | 103.77 | KEC PETANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat | 1 paket | 408.64 | KEC PETANG |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 1 paket | 54.20 | KEC PETANG |
| 86 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan | 1 paket | 9.94 | KEC PETANG |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan | 1 paket | 11.04 | KEC PETANG |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan | 1 paket | 2.78 | KEC PETANG |
| 98 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA | terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa | 1 paket | 4.58 | KEC PETANG |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa | 1 paket | 2.86 | KEC PETANG |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT | | | | 7,777.34 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 1 Tahun | 870.68 | BKD DIKLAT |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 1 Server, 3 Printer, 1 laptop, 9 UPS | 1,113.07 | BKD DIKLAT |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja | 500 orang | 82.05 | BKD DIKLAT |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Baduna | 10 orang | 4,327.61 | BKD DIKLAT |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai akuntabilitas kinerja | 1 LS | 122.89 | BKD DIKLAT |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 3 dokumen | 9.99 | BKD DIKLAT |
| 69 | PROGRAM PENINGKATAN SDM | Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu | 12 bulan | 1,208.73 | BKD DIKLAT |
| 96 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | Persentase update database kepegawaian | 1 LS | 42.31 | BKD DIKLAT |
| KELURAHAN KUTA | | | | 1,766.46 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 931.49 | KEL KUTA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 7 kegiatan | 327.39 | KEL KUTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 65 | 63.74 | KEL KUTA |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 10.00 | KEL KUTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 100 Usulan | 19.32 | KEL KUTA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah | 2 Dokumen | 43.23 | KEL KUTA |
| 73 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Jumlah lokasi fogging masal | 2 kegiatan | 42.36 | KEL KUTA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 8 kali | 73.86 | KEL KUTA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 13 Lingkungan, 4 Duta | 91.20 | KEL KUTA |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1Kali | 3.45 | KEL KUTA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL KUTA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 13 Lingkungan | 148.09 | KEL KUTA |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan | 13 Lingkungan | 7.34 | KEL KUTA |
| KELURAHAN LEGIAN | | | | 1,197.78 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 425.32 | KEL LEGIAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 Paket | 215.87 | KEL LEGIAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 62.85 | KEL LEGIAN |
| 08 | PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Jenis pengembangan Nilai Budaya | 2 Jenis | 162.89 | KEL LEGIAN |
| 09 | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 10.00 | KEL LEGIAN |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 dokumen | 15.33 | KEL LEGIAN |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi Statistik Daerah | 2 Jenis | 15.63 | KEL LEGIAN |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 3 Lingkungan | 33.64 | KEL LEGIAN |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 91.86 | KEL LEGIAN |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 2 Jenis | 2.42 | KEL LEGIAN |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 Hari Basar | 5.00 | KEL LEGIAN |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 3 Klingkungan | 150.34 | KEL LEGIAN |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan | 7 Jenis | 6.63 | KEL LEGIAN |
| KELURAHAN SEMINYAK | | | | 1,131.21 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 kegiatan | 436.91 | KEL SEMINYAK |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 1 paket | 270.68 | KEL SEMINYAK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------------------------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 66.90 | KEL SEMINYAK |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terlaksannya perencanaan dan penganggaran SKPD yang baik | 3 dokumen | 10.00 | KEL SEMINYAK |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Terlaksannya perencanaan pembangunan daerah yang baik | 1 paket | 17.23 | KEL SEMINYAK |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 dokumen | 13.36 | KEL SEMINYAK |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan | 6 lingkungan | 59.66 | KEL SEMINYAK |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 paket | 86.99 | KEL SEMINYAK |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 Jenis | 3.33 | KEL SEMINYAK |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL SEMINYAK |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 2 lingkungan | 146.23 | KEL SEMINYAK |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 2 Lingkungan | 14.93 | KEL SEMINYAK |
| KELURAHAN TUBAN | | | | 1,352.69 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 546.43 | KEL TUBAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 300.76 | KEL TUBAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 jenis | 62.10 | KEL TUBAN |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 10.00 | KEL TUBAN |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Jenis | 16.90 | KEL TUBAN |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 1 dokumen | 21.91 | KEL TUBAN |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 4 Lingkungan | 35.18 | KEL TUBAN |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 169.78 | KEL TUBAN |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL TUBAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 4 Lingkungan | 154.29 | KEL TUBAN |
| 94 | PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 Jenis | 30.34 | KEL TUBAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | KELURAHAN KEDONGANAN | | | 1,177.46 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 684.56 | KEL KEDONGANAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan | 2 paket | 86.65 | KEL KEDONGANAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 62.85 | KEL KEDONGANAN |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 9.96 | KEL KEDONGANAN |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Jenis | 16.55 | KEL KEDONGANAN |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 18.73 | KEL KEDONGANAN |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 6 Lingkungan | 33.61 | KEL KEDONGANAN |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 95.79 | KEL KEDONGANAN |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 kegiatan | 6.06 | KEL KEDONGANAN |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL KEDONGANAN |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 6 Lingkungan | 144.47 | KEL KEDONGANAN |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 13.24 | KEL KEDONGANAN |
| | KELURAHAN KEROBOKAN | | | 1,301.25 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 597.81 | KEL KEROBOKAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 209.67 | KEL KEROBOKAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 1 paket | 69.10 | KEL KEROBOKAN |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 10.00 | KEL KEROBOKAN |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 19.61 | KEL KEROBOKAN |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 25.32 | KEL KEROBOKAN |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 10 lingkungan | 33.76 | KEL KEROBOKAN |
| 79 | PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 96.23 | KEL KEROBOKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 81 | PROGRAM PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 10 Lingkungan | 44.65 | KEL KEROBOKAN |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL KEROBOKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 1 Paket | 158.32 | KEL KEROBOKAN |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 31.77 | KEL KEROBOKAN |
| KELURAHAN KEROBOKAN KAJA | | | | 1,624.06 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 1,078.43 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 73.22 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 64.70 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 10.00 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 19.26 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 44.18 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 23 lingkungan | 34.84 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 116.73 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 1 Paket | 154.46 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 23.25 | KEL KEROBOKAN KAJA |
| KELURAHAN KEROBOKAN KELOD | | | | 1,322.64 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 729.00 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 158.17 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 50.35 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 10.00 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 16.97 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 32.89 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 13 lingkungan | 33.62 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 105.27 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 13 lingkungan | 3.75 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 Paket | 5.00 | KEL KEROBOKAN KELOD |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 1 Paket | 154.85 | KEL KEROBOKAN KELOD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 22.76 | KEL KEROBOKAN KELOD |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | KELURAHAN BENOA | | | 1,625.95 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 1,020.63 | KEL BENOA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 126.41 | KEL BENOA |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 65.83 | KEL BENOA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 9.94 | KEL BENOA |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 18.07 | KEL BENOA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 81.32 | KEL BENOA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 33.68 | KEL BENOA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 101.08 | KEL BENOA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar nasional | 5.00 | KEL BENOA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 16 Lingkungan | 145.98 | KEL BENOA |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 18.00 | KEL BENOA |
| | KELURAHAN TANJUNG BENOA | | | 1,779.48 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 699.00 | KEL TANJUNG BENOA |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 436.55 | KEL TANJUNG BENOA |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 75.23 | KEL TANJUNG BENOA |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 9.00 | KEL TANJUNG BENOA |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 17.42 | KEL TANJUNG BENOA |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 18.46 | KEL TANJUNG BENOA |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 33.61 | KEL TANJUNG BENOA |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 99.42 | KEL TANJUNG BENOA |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL TANJUNG BENOA |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 6 Lingkungan | 151.94 | KEL TANJUNG BENOA |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 6 Lingkungan | 36.87 | KEL TANJUNG BENOA |
| 06 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG | jumlah bangunan/gedung yang ditata | 1 paket | 196.99 | KEL TANJUNG BENOA |
| | KELURAHAN JIMBARAN | | | 1,476.36 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 899.09 | KEL JIMBARAN |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 121.96 | KEL JIMBARAN |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 61.63 | KEL JIMBARAN |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 9.53 | KEL JIMBARAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 16.53 | KEL JIMBARAN |
| | 38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 34.15 | KEL JIMBARAN |
| | 78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 33.63 | KEL JIMBARAN |
| | 79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 126.38 | KEL JIMBARAN |
| | 82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL JIMBARAN |
| | 87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 1 Paket | 142.92 | KEL JIMBARAN |
| | 94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 25.54 | KEL JIMBARAN |
| | KELURAHAN SEMPIDI | | | 1,321.21 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 645.89 | KEL SEMPIDI |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 215.61 | KEL SEMPIDI |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 66.91 | KEL SEMPIDI |
| | 08 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 kegiatan | 27.48 | KEL SEMPIDI |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Jenis | 10.00 | KEL SEMPIDI |
| | 29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 32.24 | KEL SEMPIDI |
| | 38 PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 16.09 | KEL SEMPIDI |
| | 78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 34.36 | KEL SEMPIDI |
| | 79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 114.82 | KEL SEMPIDI |
| | 82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 8 hari besar | 5.00 | KEL SEMPIDI |
| | 87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 10 lingkungan | 146.72 | KEL SEMPIDI |
| | 94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 6.08 | KEL SEMPIDI |
| | KELURAHAN LUKLUK | | | 1,324.57 | |
| | 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 671.53 | KEL LUKLUK |
| | 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 206.20 | KEL LUKLUK |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 65.52 | KEL LUKLUK |
| | 09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 10.00 | KEL LUKLUK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------------------------|---|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 18.14 | KEL LUKLUK |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 25.51 | KEL LUKLUK |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 33.73 | KEL LUKLUK |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 121.79 | KEL LUKLUK |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL LUKLUK |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 9 lingkungan | 160.57 | KEL LUKLUK |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 6.58 | KEL LUKLUK |
| KELURAHAN KAPAL | | | | 1,904.56 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 965.01 | KEL KAPAL |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 221.66 | KEL KAPAL |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 77.05 | KEL KAPAL |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 10.00 | KEL KAPAL |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 16.52 | KEL KAPAL |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 31.36 | KEL KAPAL |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 16 Lingkungan | 33.86 | KEL KAPAL |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 175.96 | KEL KAPAL |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 16 lingkungan | 11.94 | KEL KAPAL |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL KAPAL |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 16 lingkungan | 144.91 | KEL KAPAL |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 7.00 | KEL KAPAL |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN | Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan | 1 paket | 204.30 | KEL KAPAL |
| KELURAHAN ABIANBASE | | | | 1,376.97 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 803.07 | KEL ABIANBASE |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 133.56 | KEL ABIANBASE |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 67.68 | KEL ABIANBASE |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 9.97 | KEL ABIANBASE |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|--|---|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 18.41 | KEL ABIANBASE |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 18.35 | KEL ABIANBASE |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 13 lingkungan | 33.91 | KEL ABIANBASE |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 124.68 | KEL ABIANBASE |
| 81 | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 16 lingkungan | 7.40 | KEL ABIANBASE |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL ABIANBASE |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 16 lingkungan | 150.78 | KEL ABIANBASE |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 4.16 | KEL ABIANBASE |
| KELURAHAN SADING | | | | 1,263.55 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran | 15 Kegiatan | 580.25 | KEL SADING |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 2 paket | 211.48 | KEL SADING |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 2 Jenis | 61.92 | KEL SADING |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA. | Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya | 1 Paket | 43.46 | KEL SADING |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah dokumen perencanaan | 3 Dokumen | 9.95 | KEL SADING |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 Paket | 12.62 | KEL SADING |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai | 2 jenis | 20.30 | KEL SADING |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 1 Paket | 34.06 | KEL SADING |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 1 Paket | 123.65 | KEL SADING |
| 82 | PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL | Jenis hari besar yang diperingati | 1 paket | 5.00 | KEL SADING |
| 87 | PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang bersih | 16 lingkungan | 155.58 | KEL SADING |
| 94 | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 1 Paket | 5.26 | KEL SADING |
| BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | | | | 2,987.44 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah izin yang diterbitkan | 100% | 1,560.54 | BPPT |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang | 1 paket | 1,194.38 | BPPT |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar | 100% | 93.34 | BPPT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | Jumlah pengaduan yang tertangani | 100% | 47.32 | BPPT |
| 37 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan | 1 paket | 81.94 | BPPT |
| 09 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA) | tersusunnya laporan hasil kinerja SKPD | 1 paket | 9.93 | BPPT |
| 21 | URUSAN KETAHANAN PANGAN | | | 26,967.17 | |
| 01 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | 26,967.17 | |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) | Produktivitas bahan pangan Utama (padi) | 6 Kecamatan | 26,967.17 | DISTANBUNHUT |
| 22 | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | 5,234.88 | |
| | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES | | | 5,234.88 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai | 12 bulan | 747.92 | BPMD DAN PEMDES |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 12 bulan | 444.27 | BPMD DAN PEMDES |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 12 bulan | 116.30 | BPMD DAN PEMDES |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 12 bulan | 10.00 | BPMD DAN PEMDES |
| 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang berlaku | 12 bulan | 143.65 | BPMD DAN PEMDES |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA | Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 12 bulan | 1,268.70 | BPMD DAN PEMDES |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat di | 12 bulan | 1,983.26 | BPMD DAN PEMDES |
| 23 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tersalurnya beras untuk RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan | 9043 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin | 171.11 | BPMD DAN PEMDES |
| 24 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | 12 bulan | 198.92 | BPMD DAN PEMDES |
| 25 | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa | 12 bulan | 150.74 | BPMD DAN PEMDES |
| 24 | URUSAN KEARSIPAN | | | 4,794.57 | |
| | KANTOR ARSIP DAERAH | | | 4,794.57 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai | 12 bulan | 646.78 | K. ARSIP DAERAH |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 12 bulan | 3,289.77 | K. ARSIP DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|-----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Terwujudnya tatakelola kearsipan di kab. Badung | 129 orang | 68.30 | K. ARSIP DAERAH |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan | 12 bulan | 68.30 | K. ARSIP DAERAH |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 12 BULAN | 10.00 | K. ARSIP DAERAH |
| 15 | PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN | Terwujudnya penataan arsip unit kerja peserta lomba | 12 bulan | 158.14 | K. ARSIP DAERAH |
| 16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH | Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan arsip statis | 12 bulan | 447.47 | K. ARSIP DAERAH |
| 17 | PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN | Tertata dan terpeliharanya arsip SKPD pada KAD Badung | 12 bulan | 67.28 | K. ARSIP DAERAH |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI | Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab Badung | 12 bulan | 38.54 | K. ARSIP DAERAH |
| 25 | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 28,310.87 | |
| | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | 28,310.87 | |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Cakupan pelayanan komunikasi, informasi media komunikasi, informasi media massa | 31 % | 28,310.87 | |
| 26 | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | 1,935.35 | |
| | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | | | 1,935.35 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD | 12 bulan | 555.01 | K. PERPUSTAKAAN D. |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang | 12 bulan | 339.83 | K. PERPUSTAKAAN D. |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|---|------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka | 12 bulan | 43.22 | K. PERPUSTAKAAN D. |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 12 bulan | 69.20 | K. PERPUSTAKAAN D. |
| | 19 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan | 12 bulan | 918.09 | K. PERPUSTAKAAN D. |
| | 20 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 12 bulan | 10.00 | K. PERPUSTAKAAN D. |
| 2 | | URUSAN PILIHAN | | | 50,190.27 | |
| 01 | | URUSAN PERTANIAN | | | 25,880.43 | |
| | 01 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | 14,429.22 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien | 12 Bulan | 2,645.72 | DISTANBUNHUT |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur | 12 bulan | 1,186.29 | DISTANBUNHUT |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD | 12 bulan | 216.83 | DISTANBUNHUT |
| | 15 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Terwujudnya Pembinaan dan pelatihan keterampilan | 12 Bulan | 190.09 | DISTANBUNHUT |
| | 17 | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | Terseleenggaranya promosi pemasaran hasil pertanian/perkebunan | 6 Kecamatan | 1,267.94 | DISTANBUNHUT |
| | 19 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | Terwujudnya peningkatan luas tanam padi | 100000 Ha | 2,085.60 | DISTANBUNHUT |
| | 20 | PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh | 63 Penyuluh | 6,611.31 | DISTANBUNHUT |
| | 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Tersedianya pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan | 3 Jenis | 7.69 | DISTANBUNHUT |
| | 27 | PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS | Terwujudnya Pengembangan agribisnis | 4 Kecamatan | 18.21 | DISTANBUNHUT |
| | 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | Tersedianya data pola harapan ketersediaan pangan di kabupaten | 3 Jenis | 199.54 | DISTANBUNHUT |
| | 02 | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | 11,451.21 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 1 tahun anggaran | 2,090.96 | DISNAKANLUT |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional kantor | 1 SKPD | 2,035.52 | DISNAKANLUT |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1 tahun anggaran | 188.00 | DISNAKANLUT |
| | 21 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit | 1 tahun anggaran | 2,564.24 | DISNAKANLUT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|---|--|------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | 22 | PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN | Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan | 6 kecamatan | 3,993.14 | DISNAKANLUT |
| | 23 | PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN | Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan | 1 paket | 259.33 | DISNAKANLUT |
| | 26 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD | 1 Tahun anggaran | 10.00 | DISNAKANLUT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|---|------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | 5 | 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| | 30 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN | Tersedianya data/informasi peternakan | 1 paket | 213.41 | DISNAKANLUT |
| | 31 | PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH | Tersedianya bahan pangan ternak yang bermutu | 1 Tahun Anggaran | 96.62 | DISNAKANLUT |
| | 02 | URUSAN KEHUTANAN | | | 118.77 | |
| | 01 | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | 118.77 | |
| | 16 | PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis) | 6 Kecamatan | 109.58 | DISTANBUNHUT |
| | 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN | Terciptanya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan | 1767.87 Ha | 5.11 | DISTANBUNHUT |
| | 19 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN | Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil | 10 Desa | 4.09 | DISTANBUNHUT |
| | 03 | URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | 661.59 | |
| | | DINAS CIPTA KARYA | | | 661.59 | |
| | 15 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN | Tercapainya Upaya Pembinaan bidang SDA | 1 paket | 146.13 | DCK |
| | 16 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN | Tertibnya Kegiatan Pertambangan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat | 1 Paket | 505.84 | DCK |
| | 17 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN | Tercapainya Upaya Pembinaan bidang energi | 1 Paket | 9.62 | DCK |
| | 04 | URUSAN PARIWISATA | | | 16,090.87 | |
| | | DINAS PARIWISATA | | | 16,090.87 | |
| | 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar | 100% | 1,774.85 | DIPARDA |
| | 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang | 100% | 1,372.35 | DIPARDA |
| | 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN | Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan | 100% | 153.25 | DIPARDA |
| | 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN | Meningkatnya promosi | 100% | 10,277.54 | DIPARDA |
| | 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | Berkembangnya Destinasi Pariwisata | 1 paket | 2,025.41 | DIPARDA |
| | 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN | Berkembangnya Kemitraan dalam bidang kepariwisataan | 1 paket | 427.35 | DIPARDA |
| | 18 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA | Meningkatnya kualitas Produk wisata | 1 paket | 50.13 | DIPARDA |
| | 19 | PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA) | tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra) | 100% | 10.00 | DIPARDA |
| | 05 | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | 5,496.43 | |
| | 02 | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | 5,496.43 | |
| | 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | Peningkatan produksi hasil perikanan laut | 2 Kelompok | 69.02 | DISNAKANLUT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|----------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN | Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya | 1 tahun anggaran | 46.43 | DISNAKANLUT |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA | Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara | 4 kecamatan | 3.44 | DISNAKANLUT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------------|--|---|--|---------------------|----------------------------------|
| | | | Target | Rp. Juta | |
| | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | peningkatan produksi budidaya perikanan | 1 Paket | 443.10 | DISNAKANLUT |
| | 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP | Peningkatan produksi perikanan tangkap | 1 Paket | 4,805.99 | DISNAKANLUT |
| | 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN | Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan | 1 Paket | 4.15 | DISNAKANLUT |
| | 29 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan | 1 tahun anggaran | 26.79 | DISNAKANLUT |
| | 30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN | Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan | 1 Paket | 92.41 | DISNAKANLUT |
| | 34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan | 1 Paket | 5.08 | DISNAKANLUT |
| 06 | URUSAN PERDAGANGAN | | | 1,457.17 | |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 1,457.17 | |
| | 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen | 12 bulan | 438.23 | DISKOPERINDAG |
| | 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi | 12 bulan | 1,018.94 | DISKOPERINDAG |
| 07 | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | 485.01 | |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | 485.01 | |
| | 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Untuk menumbuh kembangkan produktifitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang muktahir dan akurat | 12 bulan | 329.16 | DISKOPERINDAG |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI | Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan peningkatan mutu dan produktifitas | 12 bulan | 155.85 | DISKOPERINDAG |
| JUMLAH | | | | 2,217,539.39 | |

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | URUSAN PENDIDIKAN | | | | 355,209.67 | | 386,831.42 | | 449,180.42 | | 501,247.23 | | 565,134.36 | | 2,232,868.21 | Disdikpora |
| | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | 355,209.67 | | 386,831.42 | | 449,180.42 | | 501,247.23 | | 565,134.36 | | 2,232,868.21 | Disdikpora |
| | 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Persentase warga Kab. Badung usia 1-6 Tahun berhak mendapat pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional pendidikan | 100% | 100% | 6,095.36 | 100% | 5,246.09 | 100% | 5,457.27 | 100% | 785.18 | 100% | 14,477.19 | 100% | 32,061.09 | Disdikpora |
| | 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN | Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan | 100% | 100% | 229,495.04 | 100% | 363,986.70 | 100% | 435,505.45 | 100% | 491,864.39 | 100% | 541,646.03 | 100% | 2,041,483.28 | Disdikpora |
| | | Anaka Lulusan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Disdikpora |
| | | Anaka Lulusan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Disdikpora |
| | 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL | Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyertaan Paket C | 60% | 80% | 573.24 | 85% | 4,364.27 | 90% | 706.86 | 95% | 775.94 | 100% | 852.54 | 100% | 3,552.27 | Disdikpora |
| | | Pengelola pendidikan non formal yang terlatih | 60% | 80% | | 85% | | 90% | | 95% | | 100% | | 100% | | Disdikpora |
| | | Persentase warga Kab. Badung buta aksara (nir aksara) usia >15 tahun mampu membaca, menulis dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Tenaga pendidik yang bersertifikasi | 47% | 55% | 4,282.03 | 60% | 2,939.37 | 65% | 3,227.85 | 70% | 3,538.71 | 75% | 3,875.61 | 75% | 17,863.57 | Disdikpora |
| | 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI | Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi | - | 271 sekolah | 114,764.00 | 271 sekolah | 10,295.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 4,283.00 | 271 sekolah | 137,908.00 | Disdikpora |
| 02 | URUSAN KESEHATAN | | | | 330,465.29 | | 447,733.63 | | 486,262.71 | | 545,723.80 | | 474,853.31 | | 2,277,967.03 | Diskes |
| | DINAS KESEHATAN | | | | 184,053.15 | | 240,233.63 | | 262,362.71 | | 255,223.80 | | 263,553.31 | | 1,198,354.89 | Diskes |
| | 15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN | Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas | 78,70% | 100% | 3,777.50 | 100% | 4,042.94 | 100% | 4,045.34 | 100% | 4,047.04 | 100% | 4,049.54 | 100% | 19,962.37 | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Kepesertaan JKN | 70,97% | 80% | 103,377.12 | 90% | 150,159.86 | 100% | 166,329.70 | 100% | 185,959.49 | 100% | 201,044.71 | 100% | 806,614.58 | Diskes |
| | | Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam | 46,15% | 46,15 % | | 46,15% | | 46,66% | | 46,66% | | 52,94% | | 52,95 | | Diskes |
| | | Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap | 50% | 50% | | 50% | | 66,67% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Persentase Desa Siaga Aktif purnama dan mandiri | 5% | 25% | | 35% | | 45% | | 50% | | 55% | | 55% | | Diskes |
| | | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat | 80,16 % | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | 86% | | 86% | | Diskes |
| | | Prosentase siswa sehat | 85% | 90% | | 92% | | 94% | | 96% | | 96% | | 96% | | Diskes |
| | | Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat | 62,70% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan penjangkaran pendidikan dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 0% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar | 75% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 17 | PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN | Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar | 85% | 90% | 88.95 | 95% | 97.76 | 97% | 106.59 | 100% | 115.95 | 100% | 126.25 | 100% | 535.50 | Diskes |
| 20 | PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT | Persentase Kekurangan gizi pada balita | 12,5% (Riskasdas) | 12,3% | 1,295.02 | 12,1% | 487.19 | 11,0% | 553.02 | 10,0% | 614.07 | 10,00% | 614.07 | 10,00% | 2,335.63 | Diskes |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT | Persentase Kekurangan gizi pada balita Persentase desa yang melaksanakan STBM | 20,97% | 58,25% | 546.29 | 62,35% | 637.84 | 65,40% | 679.13 | 68,12% | 724.54 | 68,12% | 774.49 | 68,12% | 3,362.29 | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 22 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Angka Kematian Demam Berdarah Denque (DBD) | 0.27% | 0.25% | 17,744.74 | 0.24% | 18,481.03 | 0.23% | 20,356.12 | 0.22% | 22,439.03 | 0.22% | 24,237.58 | 0.22% | 103,258.49 | Diskes |
| | | Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) | 25% | 35% | | 40% | | 45% | | 50% | | 50% | | | | Diskes |
| | | Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah | 24 Jam | 21 Jam | | 17 Jam | | 14 Jam | | 12 Jam | | 12 Jam | | 12 Jam | | Diskes |
| | | Cakupan penganan penderita hipertensi | 30% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan penanganan penderita diabetes | 30% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan penemuan penderita TB Paru | 52,73% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| | | Cakupan kesembuhan penderita TB Paru | 87,82% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 23 | PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN | Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan | 75% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | Diskes | |
| | | Persentase Puskesmas Terakreditasi | 0.00 | 100,0% | 3,743.27 | 100,0% | 2,859.54 | 100,0% | 3,193.99 | 100,0% | 4,989.89 | 100,0% | 3,618.72 | 100,0% | 18,405.41 | Diskes |
| 25 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 2 | Pustu 54, Puskesmas 13 dan RS 3 | 42,965.00 | Pustu 58, Puskesmas 15 dan RS 3 | 53,342.67 | Pustu 62, Puskesmas 17 dan RS 3 | 56,439.95 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 | 24,731.00 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 | 16,829.00 | Pustu 66, Puskesmas 18 dan RS 3 | 191,297.43 | Diskes |
| | | Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) | 80% | 90% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 28 | PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN | Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif | 35% | 50% | 41.90 | 65% | 46.05 | 75% | 54.13 | 85% | 59.54 | 100% | 60.91 | 100% | 262.52 | Diskes |
| 29 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA | Angka Kematian Balita (AKABA) | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 3,74 per 1000 Kelahiran Hidup | 54.40 | 3,37 per 1000 Kelahiran Hidup | 58.04 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 58.04 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 389.85 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 92.10 | 2,99 per 1000 Kelahiran Hidup | 652.43 | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita | 80% | 81% | | 82% | | 83% | | 84% | | 85% | | 85% | | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan kesehatan balita | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Diskes |
| 30 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA | Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan | 50% | 54% | 1,581.14 | 56% | 1,897.21 | 58% | 2,028.60 | 60% | 2,105.20 | 60% | 2,105.20 | 60% | 8,136.21 | Diskes |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------------------------------|---|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 32 | PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK | Angka Kematian Ibu Melahirkan | 99.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 93.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,162.20 | 90.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,121.04 | 87.83 per 100.000 Kelahiran Hidup | 968.03 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,008.12 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 1,476.66 | 85 per 100.000 Kelahiran Hidup | 4,739.70 | Diskes |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih | 98,66% | 92% | 93% | 94% | 95% | 97% | | | | | | | | Diskes |
| | | Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker) | 18,2% | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | | | | | | | | Diskes |
| | | Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat | 54,86 | 56% | 58% | 60% | 61% | 62,5% | | | | | | | | Diskes |
| | | Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | Diskes |
| | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | Diskes |
| | | Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | Diskes |
| 36 | PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS | Persentase kecukupan bahan penunjang medis | 100% | 100% | 7,425.65 | 100% | 6,727.10 | 100% | 7,250.07 | 100% | 7,690.08 | 100% | 8,174.09 | 100% | 37,266.99 | Diskes |
| 37 | PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN | Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik | 100% | 100% | 249.98 | 100% | 275.35 | 100% | 300.00 | 100% | 350.00 | 100% | 350.00 | 100% | 1,525.34 | Diskes |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | | | | | 146,412.14 | | 207,500.00 | | 223,900.00 | | 290,500.00 | | 211,300.00 | | 1,079,612.14 | RSUD |
| 26 | PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA | Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit | 80% | 82% | 31,412.14 | 85% | 87,500.00 | 90% | 98,900.00 | 95% | 150,500.00 | 100% | 61,300.00 | 100% | 429,612.14 | RSUD |
| 40 | PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD | Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat | 75% | 76% | 115,000.00 | 77% | 120,000.00 | 78% | 125,000.00 | 79% | 140,000.00 | 80% | 150,000.00 | 80% | 650,000.00 | RSUD |
| | | Indeks Kinerja Pelayanan | 65% | 76% | | 77% | | 78% | | 79% | | 80% | | 80% | | RSUD |
| | | Indeks Kinerja Keuangan | 76.50% | 80% | | 81% | | 82% | | 83% | | 85% | | 80% | | RSUD |
| 03 | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | 825,971.70 | | 1,217,720.04 | | 1,143,484.88 | | 1,280,597.39 | | 1,702,130.16 | | 6,182,604.56 | DBMP |
| | PEKERJAAN UMUM | | | | 788,849.17 | | 1,177,537.26 | | 1,100,598.83 | | 1,233,196.53 | | 1,650,194.82 | | 5,964,351.99 | DBMP |
| | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN | | | | 395,344.40 | | 826,419.96 | | 714,673.70 | | 808,975.59 | | 1,183,852.28 | | 4,017,640.68 | DBMP |
| 07 | PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 94,5 % | 96,75 % | 266,859.74 | 98.00% | 309,665.48 | 99.25% | 340,632.02 | 100.00% | 374,695.22 | 100.00% | 412,164.75 | 100% | 1,720,379.03 | DBMP |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah Perencanaan dan Penqanqqaran SKPD | 100% | 100% | 9.99 | 100% | 10.99 | 100% | 12.09 | 100% | 13.29 | 100% | 14.62 | 100% | 60.98 | DBMP |
| 15 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Baru Yang Terbanqun | 100% | 100% | 1,419.40 | 100% | 280,004.89 | 100% | 131,512.34 | 100% | 152,247.28 | - | 481,135.89 | 100% | 1,045,320.65 | DBMP |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|---|--------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | Prosentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik | 94,5 % | 96,75 % | 33,982.81 | 98.00% | 124,008.04 | 99.25% | 136,408.84 | 100.00% | 150,049.72 | 100.00% | 165,054.70 | 100% | 688,255.87 | DBMP |
| 23 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai | 100% | 100% | 1,179.20 | 100% | 1,455.54 | 100% | 1,601.10 | 100% | 1,761.20 | 100% | 1,937.33 | 100% | 8,268.42 | DBMP |
| 24 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA | Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik | 94,72 % | 96% | 91,893.26 | 96,83% | 111,275.03 | 97,89% | 104,507.32 | 98,94% | 130,208.86 | 100.00% | 123,545.01 | 100% | 555,355.74 | DBMP |
| DINAS CIPTA KARYA | | | | | 393,504.76 | 351,117.30 | 385,925.13 | 424,220.94 | 466,342.53 | 1,946,711.31 | DCK | | | | | |
| 17 | PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | Terpantainya kondisi pantai | 1 Paket | 1 laporan | 3.05 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 1 laporan | 7.00 | 5 laporan | 31.05 | DCK |
| 35 | PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN | Peningkatan derajat | | 89.67% | 121,791.71 | 91.67% | 128,470.88 | 93.92% | 141,317.97 | 96.47% | 155,449.77 | 98.60% | 170,994.74 | 98.60% | 713,025.08 | DCK |
| 37 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG | Peningkatan performance gedung | 7 Paket | 49% | 271,686.16 | 53% | 180,968.39 | 57% | 199,065.23 | 61% | 218,971.75 | 65% | 240,868.92 | 65% | 1,004,391.00 | DCK |
| 38 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL | Meningkatnya sistem pengawasan internal | 1 Paket | 100% | 11.92 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 15.00 | 100% | 71.92 | DCK |
| PENATAAN RUANG | | | | | 37,122.54 | 40,182.78 | 42,886.05 | 47,400.86 | 51,935.35 | 218,252.57 | DCK | | | | | |
| DINAS CIPTA KARYA | | | | | 36,322.54 | 38,572.78 | 42,416.05 | 46,640.86 | 51,295.35 | 213,972.57 | DCK | | | | | |
| 01 | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | Peningkatan fasilitas umum/ publik | 1 Paket | 16 kegiatan | 35,959.34 | 10 kegiatan | 38,152.78 | 7 kegiatan | 41,968.05 | 6 kegiatan | 46,164.86 | 5 kegiatan | 50,781.35 | 44 kegiatan | 211,751.38 | DCK |
| 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung | 2 Paket | 4 laporan | 363.20 | 4 laporan | 420.00 | 4 laporan | 448.00 | 4 laporan | 476.00 | 4 laporan | 514.00 | 20 laporan | 2,221.20 | DCK |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | 800.000 | 1,610.000 | 470.000 | 760.000 | 640.000 | 4,280.000 | Bappeda Litbang | | | | | |
| 01 | PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang | 14.55% | 16.36% | 800.000 | 20.00% | 1,610.000 | 23.64% | 470.000 | 27.27% | 760.000 | 30.91% | 640.000 | 30.91% | 4,280.000 | Bappeda Litbang |
| 04 | URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | 217,918.56 | | 202,129.10 | | 222,302.01 | | 244,482.21 | | 268,870.43 | | 1,120,264.74 | DCK |
| DINAS CIPTA KARYA | | | | | 217,918.56 | 202,129.10 | 222,302.01 | 244,482.21 | 268,870.43 | 1,120,264.74 | DCK | | | | | |
| 01 | PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN | Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik | 1 paket | 70.02% | 216,811.26 | 77.51% | 199,355.74 | 85% | 219,251.32 | 92.49% | 241,126.45 | 100% | 265,179.09 | 100% | 1,104,872.37 | DCK |
| 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN | Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai | - | 100% | 103.28 | 100% | 113.61 | 100% | 124.97 | 100% | 137.47 | 100% | 151.22 | 100% | 630.56 | DCK |
| 03 | PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN | Tercapainya sarana yang memadai | - | 100% | 1,004.02 | 100% | 2,659.74 | 100% | 2,925.71 | 100% | 3,218.29 | 100% | 3,540.11 | 100% | 14,761.80 | DCK |
| DINAS PEMADAM KEBAKARAN | | | | | 19,931.20 | 6,137.75 | 6,524.32 | 6,879.49 | 7,300.34 | 46,411.13 | Disdamkar | | | | | |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN | Cakupan pelayanan kebakaran | 100% | 100% | 19,931.20 | 100% | 6,137.75 | 100% | 6,524.32 | 100% | 6,879.49 | 100% | 7,300.34 | 100% | 46,411.13 | Disdamkar |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05 | URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 1.009.47 | | 1.110.42 | | 1.221.46 | | 1.343.61 | | 1.489.97 | | 6.174.92 | Kesbang |
| | BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS | | | | 1.009.47 | | 1.110.42 | | 1.221.46 | | 1.343.61 | | 1.489.97 | | 6.174.92 | Kesbang |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, | 100% | 100% | 282.20 | 100% | 310.42 | 100% | 341.46 | 100% | 375.61 | 100% | 413.17 | 100% | 1.722.87 | Kesbang |
| 19 | PRGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN | keberdayaan masyarakat desa/Kelurahan dalam menjaga ketertiban dan keamanan | 31 orang | 31 orang | 233.03 | 31 orang | 256.34 | 31 orang | 281.97 | 31 orang | 310.17 | 31 orang | 341.18 | 31 orang | 1.422.68 | Kesbang |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) | Persentase pemberantasan penyakit masyarakat | 100% | 100% | 164.44 | 100% | 180.88 | 100% | 198.97 | 100% | 218.86 | 100% | 240.75 | 100% | 1.003.89 | Kesbang |
| 21 | PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT | Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 112.87 | 4 kegiatan | 124.15 | 4 kegiatan | 136.57 | 4 kegiatan | 150.23 | 4 kegiatan | 165.25 | 4 kegiatan | 689.07 | Kesbang |
| 37 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN | Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP | 7 kegiatan | 7 kegiatan | 216.93 | 7 kegiatan | 238.63 | 7 kegiatan | 262.49 | 7 kegiatan | 288.74 | 7 kegiatan | 329.61 | 7 kegiatan | 1.336.40 | Kesbang |
| | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | 3.809.16 | | 6.817.08 | | 6.471.39 | | 6.756.13 | | 7.431.75 | | 31.016.38 | BPBD |
| 34 | PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | Cakupan Layanan Informasi titik rawan bencana | 55% | 9.43% | 752.99 | 42.95% | 3.751.33 | 59.80% | 3.099.07 | 79.80% | 3.046.58 | 100% | 3.351.24 | 100% | 14.001.21 | BPBD |
| | | Cakupan layanan sarana dan prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA | Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani | 100% | 100% | 3.016.58 | 100% | 3.022.20 | 100% | 3.324.42 | 100% | 3.656.86 | 100% | 4.022.54 | 100% | 16.773.46 | BPBD |
| 43 | PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA | Persentase kerusakan/kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi | 100% | 100% | 39.59 | 100% | 43.55 | 100% | 47.91 | 100% | 52.70 | 100% | 57.97 | 100% | 241.71 | BPBD |
| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | 2.383.47 | | 2.621.82 | | 2.884.00 | | 3.172.40 | | 3.489.64 | | 14.551.35 | SATPOL PP |
| 44 | PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL | Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban | 65% | 75% | 2.383.47 | 80% | 2.621.82 | 85% | 2.884.00 | 90% | 3.172.40 | 95% | 3.489.64 | 95% | 14.551.35 | SATPOL PP |
| 01 | URUSAN SOSIAL | | | | 2.320.70 | | 1.280.15 | | 1.408.91 | | 1.552.80 | | 1.706.14 | | 7.108.35 | Disosnaker |
| | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | | | | 2.320.70 | | 1.280.15 | | 1.408.91 | | 1.552.80 | | 1.706.14 | | 7.108.35 | Disosnaker |
| 08 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI | Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi | 100% | 100% | 79.27 | 100% | 87.20 | 100% | 95.92 | 100% | 105.51 | 100% | 107.18 | 100% | 475.08 | Disosnaker |
| 15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) | Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat | 56.34% | 68.81% | 289.41 | 76.61% | 318.35 | 84.41% | 350.18 | 92.20% | 385.20 | 100% | 423.72 | 100% | 1.766.87 | Disosnaker |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | 1,678.83 | 100% | 1,854.25 | 100% | 2,041.17 | 100% | 2,251.29 | 100% | 2,481.42 | 100% | 10,306.95 | Disosnaker |
| | | Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | Disosnaker |
| | | Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | Disosnaker |
| | | Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | Disosnaker |
| | | Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | Disosnaker |
| 21 | PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan | 100% | 100% | 273.18 | 100% | 300.50 | 100% | 330.55 | 100% | 363.60 | 100% | 399.97 | 100% | 1,667.80 | Disosnaker |

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | URUSAN TENAGA KERJA | | | | 6,017.13 | | 8,152.46 | | 9,019.82 | | 9,824.48 | | 10,879.25 | | 43,729.33 | Disosnaker |
| | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | | | | 6,017.13 | | 8,152.46 | | 9,019.82 | | 9,824.48 | | 10,879.25 | | 43,729.33 | Disosnaker |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uii kompetensi | 35.74% | 35.74% | 4,433.37 | 41.39% | 4,797.33 | 47.48% | 5,329.17 | 54.00% | 5,764.77 | 60.96% | 6,413.56 | 60.96% | 26,738.20 | Disosnaker |
| | | Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan | 9% | 23% | | 39% | | 57% | | 77% | | 100% | | 100% | | Disosnaker |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA | Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan | 50% | 50% | 719.56 | 50% | 2,569.78 | 50% | 2,826.76 | 50% | 3,109.44 | 50% | 3,420.38 | 50% | 12,645.93 | Disosnaker |
| 17 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN | Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama | 50% | 52% | 864.20 | 54% | 785.35 | 56% | 863.88 | 58% | 950.27 | 60% | 1,045.30 | 60% | 4,345.20 | Disosnaker |
| 02 | URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | 2,034.89 | | 2,070.78 | | 2,250.87 | | 2,454.83 | | 2,669.23 | | 11,480.60 | KPP |
| | KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | 2,034.89 | | 2,070.78 | | 2,250.87 | | 2,454.83 | | 2,669.23 | | 11,480.60 | KPP |
| 15 | PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan | 85.71% | 100% | 768.19 | 100% | 764.99 | 100% | 821.29 | 100% | 889.42 | 100% | 954.77 | 100% | 4,198.67 | KPP |
| 16 | PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) | Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif | 100% | 100% | 922.83 | 100% | 1,008.64 | 100% | 1,102.72 | 100% | 1,205.86 | 100% | 1,318.96 | 100% | 5,559.02 | KPP |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat | 1 paket | 1 paket | 249.27 | 1 paket | 193.08 | 1 paket | 212.39 | 1 paket | 233.63 | 1 paket | 256.99 | 1 paket | 1,145.36 | KPP |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN | Perempuan di lembaga pemerintah | 11,32 | 30% | 94.60 | 30% | 104.06 | 30% | 114.47 | 30% | 125.92 | 30% | 138.51 | 30% | 577.56 | KPP |
| 03 | URUSAN PANGAN | | | | 1,443.98 | | 3,617.86 | | 3,431.90 | | 3,475.58 | | 3,517.48 | | 15,486.80 | Distanbunhut |
| | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 1,443.98 | | 3,617.86 | | 3,431.90 | | 3,475.58 | | 3,517.48 | | 15,486.80 | Distanbunhut |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) | Jumlah luas tanam padi pertahun | 17.245 Ha | 17.500 Ha | 1,443.98 | 17.750 Ha | 3,617.86 | 18.000 Ha | 3,431.90 | 18.250 Ha | 3,475.58 | 18.500 Ha | 3,517.48 | 18.500 Ha | 15,486.80 | Distanbunhut |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 04 | URUSAN PERTANAHAN | | | | 260.29 | | 277.47 | | 305.22 | | 335.74 | | 368.57 | | 1,547.29 | BAGIAN APU |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | | 260.29 | | 277.47 | | 305.22 | | 335.74 | | 368.57 | | 1,547.29 | BAGIAN APU |
| | 01 PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah | 100% | 100% | 233.31 | 100% | 247.97 | 100% | 272.77 | 100% | 300.05 | 100% | 329.31 | 100% | 1,383.41 | BAGIAN APU |
| | 02 PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN | Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan | 100% | 100% | 26.98 | 100% | 29.50 | 100% | 32.45 | 100% | 35.69 | 100% | 39.26 | 100% | 163.88 | BAGIAN APU |
| 05 | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 45,130.68 | | 64,745.42 | | 72,375.39 | | 93,870.99 | | 61,082.68 | | 337,335.98 | BLH |
| | DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | | | | 42,120.15 | | 49,638.46 | | 56,756.15 | | 73,852.49 | | 56,570.55 | | 278,937.80 | DKP |
| | 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase Penanganan Sampah | 78,5 % | 89,8 % | 33,923.26 | 91,1 % | 36,145.56 | 92,1 % | 38,511.93 | 93,3% | 41,095.84 | 94,4 % | 43,238.01 | 94,4 % | 192,914.60 | DKP |
| | 05 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) | Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau | 123.087,14 m2 | 126.597,14 m2 (0,0171%) | 8,196.88 | 127.283,84 m2 (0,0172%) | 13,492.91 | 130.844,40 m2 (0,1777%) | 18,244.22 | 140.364,44 m2 (0,1899%) | 32,756.65 | 145.364,44 m2 (0,1967%) | 13,332.54 | 145.364,44 m2 (0,1967%) | 86,023.20 | DKP |
| | BADAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 3,010.53 | | 15,106.95 | | 15,619.24 | | 20,018.50 | | 4,512.13 | | 58,398.18 | BLH |
| | 04 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 2,045.31 | 100% | 2,200.70 | 100% | 2,411.00 | 100% | 2,676.08 | 100% | 2,969.06 | 100% | 12,302.16 | BLH |
| | 05 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM | Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi | 100% | 100% | 267.14 | 100% | 12,309.80 | 100% | 12,349.57 | 100% | 16,380.15 | 100% | 480.00 | 100% | 41,940.36 | BLH |
| | 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup | 9 paket | 10 paket | 532.63 | 8 paket | 418.12 | 8 paket | 650.22 | 8 paket | 717.33 | 8 paket | 793.40 | 42 paket | 3,088.82 | BLH |
| | 07 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup | 100% | 100% | 165.45 | 100% | 178.33 | 100% | 208.44 | 100% | 244.94 | 100% | 269.68 | 100% | 1,066.84 | BLH |
| 06 | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 1,707.46 | | 1,878.21 | | 2,066.03 | | 2,272.63 | | 2,499.89 | | 10,424.22 | Disduk |
| | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL | | | | 1,707.46 | | 1,878.21 | | 2,066.03 | | 2,272.63 | | 2,499.89 | | 10,424.22 | Disduk |
| | 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan | 90,02% | 92% | 2,395.73 | 94% | 1,878.21 | 95% | 2,066.03 | 97% | 2,272.63 | 98% | 2,499.89 | 98% | 10,424.22 | Disduk |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|--|--|--|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---|----------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 07 | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 3,873.45 | | 4,970.17 | | | 6,143.05 | | 7,349.75 | | | 5,565.12 | | 27,901.53 | BPMD dan Pemdes |
| | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 3,873.45 | | 4,970.17 | | | 6,143.05 | | 7,349.75 | | | 5,565.12 | | 27,901.53 | BPMD dan Pemdes |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 775.38 | 100% | 831.03 | 100% | 854.23 | 100% | 888.65 | 100% | 915.52 | 100% | 4,264.81 | | | BPMD dan Pemdes |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 137.59 | 100% | 610.54 | 100% | 418.60 | 100% | 460.46 | 100% | 506.50 | 100% | 2,133.69 | | | BPMD dan Pemdes |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM SISTEM PELAPORAN CAPIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 116.10 | 100% | 127.11 | 100% | 139.22 | 100% | 152.54 | 100% | 167.20 | 100% | 702.17 | | | BPMD dan Pemdes |
| 09 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD | Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD | 3 dokumen | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 10.00 | 3 dokumen | 50.00 | | | BPMD dan Pemdes |
| 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif | 32 Pasar, 13 BUMDesa | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 33.89 | 7 Pasar, 10 BUMDesa | 119.00 | 7 Pasar, 8 BUMDesa | 129.80 | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 128.80 | 6 Pasar, 13 BUMDesa | 145.68 | 32 Pasar, 46 BUMDesa | 557.17 | | | BPMD dan Pemdes |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA | Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik | 262 orang | 210 orang | 430.26 | 200 orang | 693.64 | 200 orang | 1,803.77 | 200 orang | 2,694.89 | 200 orang | 558.72 | 1,010 orang | 6,181.28 | | | BPMD dan Pemdes |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan | 62 Desa/Kelurahan | 62 ds/kel. | 1,635.79 | 62 ds/kel. | 1,807.37 | 62 ds/kel. | 1,977.04 | 62 ds/kel. | 2,163.12 | 62 ds/kel. | 2,367.23 | 62 ds/kel. | 9,950.56 | | | BPMD dan Pemdes |
| x | PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN | Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan | 0 | 100% | 287.49 | 100% | 301.87 | 100% | 316.96 | 100% | 332.81 | 100% | 349.45 | 100% | 1,588.57 | | | BPMD dan Pemdes |
| 23 | PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL | Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 9.883 RTS-PM | 9,041 | 168.31 | 9,041 RTS-PM | 176.73 | 9,041 RTS-PM | 185.56 | 9,041 RTS-PM | 194.84 | 9,041 RTS-PM | 204.58 | 9,041 RTS-PM | 930.02 | | | BPMD dan Pemdes |
| 24 | PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Jumlah kelompok posyandu aktif | 68 kelompok | 12 kelompok | 278.64 | 12 kelompok | 292.88 | 12 kelompok | 307.87 | 12 kelompok | 323.64 | 10 kelompok | 340.24 | 58 kelompok | 1,543.27 | | | BPMD dan Pemdes |
| 08 | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | 3,319.54 | | 2,487.42 | | | 2,585.93 | | 2,695.91 | | | 2,815.31 | | 13,172.23 | KBKS |
| | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERAH | | | | 3,265.72 | | 2,487.42 | | | 2,585.93 | | 2,695.91 | | | 2,815.31 | | 13,172.23 | KBKS |
| 06 | PROGRAM KELUARGA BERENCANA | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif Angka Kelahiran Total/Total Fertilitv Rate (TFR) | 75.05 | 75,26 | 1,937.78 | 75,52 | 1,025.36 | 76,03 | 1,037.94 | 76,40 | 1,053.39 | 77,24 | 1,068.81 | 77,24 | 5,391.40 | | | KBKS |
| 07 | PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA | Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun | 0,22 % | 0.19 % | 645.09 | 0.18 % | 711.00 | 0.17 % | 727.40 | 0.16 % | 745.44 | 0,15 % | 765.29 | 0,15 % | 3,648.06 | | | KBKS |
| 08 | PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA | Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 51.99% | 53.62% | 218.16 | 55.14% | 239.90 | 56.56% | 258.32 | 57.88% | 278.58 | 59.12% | 300.87 | 59.12% | 1,295.82 | | | KBKS |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 10 | PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA | Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif | 100% | 100% | 464.69 | 100% | 511.15 | 100% | 562.27 | 100% | 618.50 | 100% | 680.35 | 100% | 2,836.95 | KBKS |
| 09 | URUSAN PERHUBUNGAN | | | | 18,858.63 | | 31,919.71 | | 28,683.17 | | 28,945.06 | | 25,061.65 | | 133,468.22 | Dishub |
| | DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO | | | | 18,858.63 | | 31,919.71 | | 28,683.17 | | 28,945.06 | | 25,061.65 | | 133,468.22 | Dishub |
| 15 | PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN | Terwujudnya Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 88,75% | 100% | 12,525.870 | 100% | 24,906.689 | 100% | 20,968.843 | 100% | 20,459.301 | 100% | 15,727.315 | 100% | 94,588.018 | Dishub |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN | Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal | 99,65% | 100% | 6,332.758 | 100% | 7,013.025 | 100% | 7,714.327 | 100% | 8,485.760 | 100% | 9,334.336 | 100% | 38,880.205 | Dishub |
| 10 | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | 9,171.16 | | 23,291.71 | | 3,780.58 | | 3,949.81 | | 3,232.37 | | 43,425.61 | Dishub |
| | DINAS PERHUBUNGAN KOMINFO | | | | 9,171.16 | | 23,291.71 | | 3,780.58 | | 3,949.81 | | 3,232.37 | | 43,425.61 | Dishub |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif | 64,92% | 100% | 9,171.16 | 100% | 23,291.71 | 100% | 3,780.58 | 100% | 3,949.81 | 100% | 3,232.37 | 100% | 43,425.61 | Dishub |
| 11 | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 2,244.90 | | 2,469.39 | | 2,716.33 | | 2,987.96 | | 3,286.76 | | 13,705.35 | Diskopperindag |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 2,244.90 | | 2,469.39 | | 2,716.33 | | 2,987.96 | | 3,286.76 | | 13,705.35 | Diskopperindag |
| 16 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM | Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM | 200 UMKM | 30 UMKM | 11.53 | 30 UMKM | 12.69 | 30 UMKM | 13.95 | 30 UMKM | 15.35 | 30 UMKM | 16.88 | 120 UMKM | 70.40 | Diskopperindag |
| 15 | PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF | Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif | 2 koperasi | 2 koperasi | 474.40 | 2 koperasi | 521.84 | 2 koperasi | 574.02 | 2 koperasi | 631.42 | 2 koperasi | 694.57 | 2 koperasi | 2,896.25 | Diskopperindag |
| 17 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH | Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah | 8 UMKM 4 koperasi | 13 UMKM | 541.40 | 13 UMKM | 595.54 | 13 UMKM | 655.10 | 13 UMKM | 720.61 | 13 UMKM | 792.67 | 65 UMKM | 3,305.32 | Diskopperindag |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI | Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | 3.920 orang 1.271 koperasi | 12 bulan | 1,192.40 | 12 bulan | 1,311.64 | 12 bulan | 1,442.80 | 12 bulan | 1,587.08 | 12 bulan | 1,745.79 | 60 bulan | 7,279.72 | Diskopperindag |
| 21 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI | Tercapainya pengembangan sistem data/informasi | 156 buku | 62 buku | 25.17 | 62 buku | 27.69 | 62 buku | 30.45 | 62 buku | 33.50 | 62 buku | 36.85 | 310 buku | 153.66 | Diskopperindag |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | 174.41 | | 191.86 | | 211.04 | | 232.15 | | 255.36 | | 1,064.82 | Bag.Adm |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 174.41 | | 191.86 | | 211.04 | | 232.15 | | 255.36 | | 1,064.82 | Bag.Adm Perekonomian |
| 17 | PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH | Tersedianya Informasi Produk Unggulan Daerah | 6 Kecamatan | 6 kecamatan | 42.47 | 6 kecamatan | 46.71 | 6 kecamatan | 51.39 | 6 kecamatan | 56.53 | 6 kecamatan | 62.18 | 6 Kecamatan | 259.27 | Bag.Adm Perekonomian |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI | Tersedianya Informasi Peluang Investasi | - | 6 kecamatan | 104.89 | 6 kecamatan | 115.38 | 6 kecamatan | 126.91 | 6 kecamatan | 139.61 | 6 kecamatan | 153.57 | 6 Kecamatan | 640.35 | Bag.Adm Perekonomian |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI | Tersedianya informasi peluang investasi | - | 6 kecamatan | 27.06 | 6 kecamatan | 29.76 | 6 kecamatan | 32.74 | 6 kecamatan | 36.01 | 6 kecamatan | 39.62 | 6 Kecamatan | 165.19 | Bag.Adm Perekonomian |
| 13 | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 14,991.32 | | 10,980.30 | | 11,578.39 | | 12,486.13 | | 13,485.44 | | 63,521.58 | Disdikpora |
| | DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | 14,991.32 | | 10,980.30 | | 11,578.39 | | 12,486.13 | | 13,485.44 | | 63,496.08 | Disdikpora |
| 1 | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional | 60% | 70% | 743.18 | 75% | 855.40 | 80% | 938.96 | 80% | 1,032.86 | 80% | 1,136.14 | 80% | 4,706.54 | Disdikpora |
| 2 | Program Pembinaan dan Pemasvarakatan Olah Raga | Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan nasional | 11 Cabang | 16 Cabang | 14,248.14 | 16 Cabang | 10,124.90 | 16 Cabang | 10,639.43 | 16 Cabang | 11,453.27 | 16 Cabang | 12,349.30 | 16 Cabang | 58,789.54 | Disdikpora |
| 16 | URUSAN KEBUDAYAAN | | | | 40,144.09 | | 58,152.76 | | 263,401.06 | | 60,721.76 | | 267,145.48 | | 689,565.15 | Disbud |
| | DINAS KEBUDAYAAN | | | | 40,094.07 | | 58,152.76 | | 263,401.06 | | 60,721.76 | | 267,145.48 | | 689,315.15 | Disbud |
| 06 | PROGRAM : PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | 1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan | 108 upacara keagamaan | 114 upacara keagamaan | 38,741.52 | 114 upacara keagamaan | 56,482.99 | 114 upacara keagamaan | 262,007.70 | 114 upacara keagamaan | 59,199.28 | 114 upacara keagamaan | 265,662.76 | 114 upacara keagamaan | 682,238.51 | Disbud |
| | | 2. Desa Adat yang dibina | 10 Desa Adat | 40 Desa Adat | | 40 Desa Adat | | 42 Desa Adat | | 0 | | 0 | | 122 Desa Adat | | |
| | | 3. kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | |
| | | 4. Karya seni yang di revitalisasi | 98 karya seni | 104 sekaa | | 110 sekaa | | 114 sekaa | | 118 sekaa | | 123 sekaa | | 123 sekaa | | |
| 07 | PROGRAM : PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA | 1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi | 70 cakep | 90 cakep | 1,352.55 | 110 cakep | 1,669.77 | 125 cakep | 1,393.36 | 140 cakep | 1,522.48 | 150 cakep | 1,482.71 | 615 cakep | 7,076.64 | Disbud |
| | | 2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi | 52 situs | - | - | 54 situs | - | - | - | 56 situs | - | 58 situs | - | 58 situs | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Strategis Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|--|--|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | 666.12 | | 707.18 | | 753.26 | | 802.38 | | 842.74 | | 3,771.68 | Kantor |
| | KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH | | | | 746.86 | | 707.18 | | 753.26 | | 802.38 | | 842.74 | | 3,771.68 | Kantor Perpusda |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 300 Orang | 60 Orang | 37.73 | 60 Orang | 39.61 | 60 Orang | 41.59 | 60 Orang | 43.67 | 60 Orang | 45.85 | 300 Orang | 208.45 | Kantor Perpusda |
| 19 | PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Kunjungan ke Perpustakaan | 12,305 Orang | 5,100 Orang | 709.14 | 5,600 Orang | 667.57 | 6,200 Orang | 711.67 | 6,800 Orang | 758.71 | 7,500 Orang | 796.88 | 31,200 Orang | 3,563.23 | Kantor Perpusda |
| 18 | URUSAN KEARSIPAN | | | | 1,371.84 | | 1,509.02 | | 1,659.93 | | 1,825.92 | | 2,008.51 | | 8,375.22 | Ktr. Arsip |
| | KANTOR ARSIP DAERAH | | | | 1,102.71 | | 1,509.02 | | 1,659.93 | | 1,825.92 | | 2,008.51 | | 8,375.22 | Ktr. Arsip Daerah |
| 15 | PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN | Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku | 98 SKPD/Desa | 36 SKPD/Desa | 87.71 | 36 SKPD/Desa | 96.48 | 36 SKPD/Desa | 106.12 | 36 SKPD/Desa | 116.74 | 36 SKPD/Desa | 128.41 | 98 SKPD/Desa | 535.45 | Ktr. Arsip Daerah |
| 16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH | Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan | 5 jenis arsip | 5 jenis arsip | 387.69 | 5 jenis arsip | 722.50 | 5 jenis arsip | 794.75 | 5 jenis arsip | 874.22 | 5 jenis arsip | 961.64 | 5 jenis arsip | 4,009.93 | Ktr. Arsip Daerah |
| 18 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI | Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan | 5 Materi | 5 Materi | 627.32 | 5 Materi | 690.05 | 5 Materi | 759.06 | 5 Materi | 834.96 | 5 Materi | 918.46 | 5 Materi | 3,829.84 | Ktr. Arsip Daerah |

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp.Juta | |
| | | | | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 8,968.64 | | 11,679.35 | | 12,972.40 | | 20,870.07 | | 22,951.48 | | 77,441.93 | Dinas PPK |
| | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | 8,968.64 | | 11,679.35 | | 12,972.40 | | 20,870.07 | | 22,951.48 | | 77,441.93 | Dinas PPK |
| | 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR | Jumlah produksi perikanan | 155.646,48 ton | 7,021.00 ton | 36.89 | 7,154.00 ton | 37.96 | 7,293.0 ton | 41.76 | 7,433.0 ton | 45.94 | 7,575.0 ton | 50.53 | 36,476.00 ton | 213.08 | Dinas PPK |
| | 16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN | Jumlah pokmaswas yang dibina dan | 5 kelompok | 4 kelompok | 82.26 | 3 kelompok | 90.48 | 3 kelompok | 99.53 | 3 kelompok | 109.49 | 3 kelompok | 120.43 | 16 kelompok | 502.19 | Dinas PPK |
| | 19 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT | Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim | 5 kali | 1 kali | 1,689.85 | 1 kali | 3,500.00 | 1 kali | 4,000.00 | 1 kali | 4,400.00 | 1 kali | 4,840.00 | 5 kali | 18,429.85 | Dinas PPK |
| | 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN | Produksi perikanan budidaya | 586.80 ton | 598 ton | 402.87 | 603.00 ton | 424.69 | 611.00 ton | 447.77 | 617.00 ton | 472.20 | 623.00 ton | 519.42 | 3,052.00 ton | 2,266.94 | Dinas PPK |
| | 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi perikanan tangkap | 6.890,70 ton | 6,423.00 ton | 646.00 | 6,551.00 ton | 728.75 | 6,682.00 ton | 801.63 | 6,816.00 ton | 7,509.18 | 6,952.00 ton | 8,260.10 | 33,424.00 ton | 17,945.66 | Dinas PPK |
| | 23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 4.866,22 ton | 5,062 ton | 8.78 | 5,164 ton | 24.65 | 5,267 ton | 26.62 | 5,372 ton | 27.68 | 5,480 ton | 29.85 | 26,345 ton | 117.58 | Dinas PPK |
| | 30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN | Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan | 155 exp | 105 exp | 225.94 | 105 exp | 50.00 | 105 exp | 50.00 | 105 exp | 50.00 | 105 exp | 50.00 | 525 exp | 425.94 | Dinas PPK |
| | 34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan | 4.866,22 ton | 5,062.820 ton | 5.46 | 5,164.076 ton | 6.00 | 5,267.358 ton | 6.60 | 5,372.705 ton | 7.26 | 5,480.159 ton | 7.99 | 5,480.159 | 33.32 | Dinas PPK |
| | xx PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA bahari | Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari | - | 1 kawasan | 5,870.59 | 1 kawasan | 6,816.80 | 1 kawasan | 7,498.48 | 1 kawasan | 8,248.33 | 2 kawasan | 9,073.16 | 6 kawasan | 37,507.36 | Dinas PPK |
| 02 | URUSAN PARIWISATA | | | | 15,065.49 | | 19,189.50 | | 20,334.79 | | 20,429.97 | | 22,672.46 | | 97,692.21 | Dinas Pariwisata |
| | DINAS PARIWISATA | | | | 15,065.49 | | 19,189.50 | | 20,334.79 | | 20,429.97 | | 22,672.46 | | 97,692.21 | Dinas Pariwisata |
| | 01 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA | prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara | 3,934,384 | 5% | 11,172.51 | 5% | 14,952.36 | 5% | 15,968.59 | 5% | 15,668.67 | 5% | 17,068.01 | 25% | 74,830.14 | Dinas Pariwisata |
| | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | Prosentase DTW yang ditata | 58% | 64% | 3,241.13 | 66% | 3,707.37 | 69% | 3,648.85 | 72% | 4,178.62 | 72% | 4,814.34 | 72% | 19,590.30 | Dnas Pariwisata |
| | 03. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN | jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan | 488 orang | 245 orang | 435.54 | 170 orang | 302.27 | 235 orang | 478.85 | 170 orang | 333.25 | 220 orang | 527.16 | 1,210 orang | 2,077.07 | Dinas Pariwisata |
| | 04. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA | jumlah produk wisata yang dibina | 180 usaha + 4 obyek | 255 usaha + 6 obyek | 216.33 | 255 usaha + 6 obyek | 227.50 | 255 usaha + 6 obyek | 238.50 | 255 usaha + 6 obyek | 249.42 | 255 usaha + 6 obyek | 262.94 | 1,500 usaha + 36 obyek | 1,194.69 | Dinas Pariwisata |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|---|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp.Juta | |
| | | | | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | URUSAN PERTANIAN | | | | 15,208.33 | | 16,177.76 | | 18,836.11 | | 17,996.52 | | 21,084.43 | | 89,303.14 | Distanbunhut |
| | DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 6,210.71 | | 6,505.11 | | 7,844.24 | | 6,626.96 | | 8,617.39 | | 35,804.40 | Distanbunhut |
| | 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Jumlah peserta pelatihan pertanian | 280 orang | 345 orang | 444.83 | 345 orang | 401.91 | 345 orang | 419.65 | 345 orang | 503.30 | 345 orang | 563.62 | 1.725 orang | 2,333.319 | Distanbunhut |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN | jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan | 15 kali | 4 Kali | 1,452.18 | 5 kali | 1,568.36 | 5 kali | 1,760.93 | 5 kali | 1,979.91 | 5 kali | 2,229.35 | 24 Kali | 8,990.730 | Distanbunhut |
| | 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN | Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun | 120,972 ton | 122.500 ton | 2,735.22 | 125.000 ton | 4,092.52 | 127.500 ton | 4,047.54 | 130.000 ton | 3,607.80 | 132.500 ton | 3,868.07 | 132.500 ton | 18,351.149 | Distanbunhut |
| | 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN | Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan | 52 orang | 52 orang | 1,267.27 | 52 orang | 247.49 | 52 orang | 1,401.47 | 52 orang | 299.46 | 52 orang | 1,695.78 | 52 orang | 4,911.459 | Distanbunhut |
| | 27 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS | Jumlah komoditi yang dibina | 5 komoditi | - | 0.00 | 5 komoditi | 12.04 | 5 komoditi | 13.57 | 5 komoditi | 15.31 | 5 komoditi | 17.28 | 25 komoditi | 58.207 | Distanbunhut |
| | 28 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA /INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | jumlah data yang informatif | 3 jenis | 5 jenis | 311.21 | 3 jenis | 182.79 | 3 jenis | 201.07 | 3 jenis | 221.18 | 3 jenis | 243.29 | 3 jenis | 1,159.538 | Distanbunhut |
| | DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN | | | | 8,997.62 | | 9,672.65 | | 10,991.87 | | 11,369.56 | | 12,467.04 | | 53,498.74 | Dinas PPK |
| | 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK | Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit | 65.427 ekor | 65500 ekor | 2,354.33 | 66300 ekor | 2,589.76 | 67300 ekor | 2,848.74 | 68800 ekor | 3,133.61 | 70000 ekor | 3,446.97 | 71000 ekor | 14,373.40 | Dinas PPK |
| | 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN | Jumlah Populasi ternak | 1.486.869 ekor | 1501775 ekor | 6,084.27 | 1509284 ekor | 6,679.51 | 1516831 ekor | 7,197.17 | 1524914 ekor | 7,759.73 | 15320361 ekor | 7,906.87 | 15320361 ekor | 35,627.54 | Dinas PPK |
| | 23 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN | Jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan | 4.579 ton | 4764 ton | 51.00 | 4859.28 ton | 56.10 | 4,956.466 ton | 61.07 | 5,055.595 ton | 66.50 | 5,156.707 ton | 73.15 | 24,792 ton | 307.82 | Dinas PPK |
| | 25 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN | Jumlah Populasi ternak | 1.494.309 ekor | 1,501,775 ekor | 24.40 | 1,509,284 ekor | 26.84 | 1,516,831 ekor | 29.52 | 1,524,914 ekor | 32.48 | 1,532,036 ekor | 31.94 | 1,532,036 ekor | 145.18 | Dinas PPK |
| | 30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN | Jumlah dokumen data/informasi peternakan yang disusun | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 308.12 | 1 jenis dokumen | 185.45 | 1 jenis dokumen | 199.00 | 1 jenis dokumen | 213.90 | 1 jenis dokumen | 213.90 | 1 jenis dokumen | 1,120.38 | Dinas PPK |
| | 31 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH | Jumlah produksi daging | 16.037 ton | 16.679 ton | 97.56 | 16.694 ton | 107.31 | 16.728 ton | 118.04 | 16.862 ton | 129.85 | 16.947 ton | 142.83 | 83,911 | 595.60 | Dinas PPK |
| | 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN | Jumlah Penyuluh dan petugas lapangan yang berkinerja | 39 orang | 33 orang | 77.94 | 33 orang | 27.68 | 33 orang | 538.33 | 33 orang | 33.49 | 33 orang | 651.38 | 33 orang | 1,328.83 | Dinas PPK |
| 05 | URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | 300.55 | | 150.18 | | 165.20 | | 181.72 | | 199.89 | | 997.52 | DCK |
| | DINAS CIPTA KARYA | | | | 300.55 | | 150.18 | | 165.20 | | 181.72 | | 199.89 | | 997.52 | DCK |
| | 15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN | Terlaksananya pembinaan Usaha SDA | 6 Paket | 16.38% | 290.57 | 25.74% | 139.20 | 35.05% | 153.12 | 44.36% | 168.43 | 53.62% | 185.28 | 53.62% | 936.60 | DCK |
| | 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN | Terlaksananya pembinaan Usaha Energi | 1 Paket | 44.50% | 9.98 | 49.50% | 10.98 | 54.50% | 12.07 | 59.50% | 13.28 | 64.50% | 14.61 | 64.50% | 60.92 | DCK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp.Juta | |
| | | | | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | Target | Rp.Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 06 | URUSAN PERDAGANGAN | | | | 2.303.42 | | 1.986.49 | | 3.854.64 | | 1.490.11 | | 1.639.12 | | 11.273.78 | Diskopperindag |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 2.303.42 | | 1.986.49 | | 3.854.64 | | 1.490.11 | | 1.639.12 | | 11.273.78 | Diskopperindag |
| | 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN | Tercapainya peningkatan perlindungan terhadap konsumen | 5.600 timbangan | 3500 UTTP | 1.343.35 | 3500 UTTP | 934.03 | 3500 UTTP | 257.44 | 3500 UTTP | 283.18 | 3500 UTTP | 311.50 | 3500 UTTP | 3.129.51 | Diskopperindag |
| | 18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri | 480 perusahaan 192 kali 113 perajin 4.500 rumah tangga 3 pameran | 12 bulan | 960.06 | 12 bulan | 1.052.46 | 12 bulan | 3.597.20 | 12 bulan | 1.206.93 | 12 bulan | 1.327.62 | 60 bulan | 8.144.27 | Diskopperindag |
| 07 | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | | 1.079.42 | | 1.129.14 | | 1.242.06 | | 1.366.26 | | 1.502.89 | | 6.319.76 | Diskopperindag |
| | DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | 1.079.42 | | 1.129.14 | | 1.242.06 | | 1.366.26 | | 1.502.89 | | 6.319.76 | Diskopperindag |
| | 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah | 1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha | 408 IKM | 982.18 | 408 IKM | 1.022.18 | 408 IKM | 1.124.40 | 408 IKM | 1.236.84 | 408 IKM | 1.360.53 | 2.040 IKM | 5.726.14 | Diskopperindag |
| | 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI | Mendayagunakan secara maksimal proses produksi | 17 gugus 40 orang | 1 gugus | 97.23 | 1 gugus | 106.96 | 1 gugus | 117.65 | 1 gugus | 129.42 | 1 gugus | 142.36 | 5 gugus | 593.62 | Diskopperindag |

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | FUNGSI PERENCANAAN | | | | 6,029.52 | | 4,692.64 | | 5,147.80 | | 5,715.84 | | 6,271.88 | | 27,744.10 | Bappeda Litbang |
| 01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 6,029.52 | | 4,692.64 | | 5,147.80 | | 5,715.84 | | 6,271.88 | | 27,744.10 | Bappeda Litbang |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI | Tersedianya data dan informasi yang memadai | 1 paket | 1 paket | 241.72 | 1 paket | 265.887 | 1 paket | 292.476 | 1 paket | 321.723 | 1 paket | 353.896 | 1 paket | 1,475.698 | Bappeda Litbang |
| 21 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD | 100% | 100% | 5,067.82 | 100% | 3,648.40 | 100% | 3,999.14 | 100% | 4,384.25 | 100% | 4,807.13 | 100% | 21,793.15 | Bappeda Litbang |
| 22 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI | Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 594.572 | 6 Kecamatan | 640.39 | 6 Kecamatan | 704.43 | 6 Kecamatan | 774.87 | 6 Kecamatan | 852.36 | 6 Kecamatan | 3566.63 | Bappeda Litbang |
| 24 | PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM | Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam | 1 paket | 1 paket | 125.42 | 4 paket | 137.96 | 3 paket | 151.75 | 3 paket | 235.00 | 2 paket | 258.50 | 15 paket | 908.63 | Bappeda Litbang |
| 02 | FUNGSI KEUANGAN | | | | 21,487.97 | | 27,060.69 | | 29,766.75 | | 32,743.43 | | 36,017.77 | | 147,076.61 | Dispenda |
| | DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG | | | | 21,487.97 | | 27,060.69 | | 29,766.75 | | 32,743.43 | | 36,017.77 | | 147,076.61 | Dispenda |
| 08 | PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Berkembangnya nilai budaya | 60 bulan | 12 bulan | 13,536.92 | 12 bulan | 14,890.61 | 12 bulan | 16,379.67 | 12 bulan | 18,017.64 | 12 bulan | 19,819.40 | 60 bulan | 82,644.23 | Dispenda |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah | 60 bulan | 12 bulan | 7,951.05 | 12 bulan | 12,170.08 | 12 bulan | 13,387.08 | 12 bulan | 14,725.79 | 12 bulan | 16,198.37 | 60 bulan | 64,432.38 | Dispenda |
| | BAGIAN KEUANGAN | | | | 10,127.03 | | 11,139.73 | | 12,253.70 | | 13,479.07 | | 14,826.98 | | 61,826.51 | Bag. Keuangan |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel | 1610 bk | 495 bk | 302.20 | 495 bk | 332.42 | 495 bk | 365.66 | 495 bk | 402.23 | 495 bk | 442.45 | 2475 bk | 1,844.95 | Bag. Keuangan |
| 17 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penanganannya, penatausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah | 20635 | 4679 | 9,690.88 | 4679 | 10,659.97 | 4679 | 11,725.97 | 4679 | 12,898.56 | 4679 | 14,188.42 | 23395 | 59,163.81 | Bag. Keuangan |
| 18 | PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA | Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung | 6900 SPM/UP/ GU/TU | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 133.95 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 147.34 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 162.07 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 178.28 | 1572 SPM/UP/ GU/TU | 196.11 | 7860 SPM/UP/ GU/TU | 817.75 | Bag. Keuangan |
| 03 | FUNGSI KEPEGAWAIN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | 5,305.69 | | 6,139.95 | | 6,753.94 | | 7,429.33 | | 8,172.27 | | 33,801.17 | BKD,DIKLAT |
| | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIKLAT | | | | 5,305.69 | | 6,139.95 | | 6,753.94 | | 7,429.33 | | 8,172.27 | | 33,801.17 | BKD,DIKLAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--|--|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|---|------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung | 5% | 12% | 5,305.69 | 12.5% | 6,139.95 | 13% | 6,753.94 | 13.5% | 7,429.33 | 14% | 8,172.27 | 14% | 33,801.17 | BKD,DIKLAT |
| 04 | FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 168.221 | | 185.043 | | 203.548 | | 223.902 | | 246.293 | | 1,027.007 | Bappeda Litbang |
| | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 168.221 | | 185.043 | | 203.548 | | 223.902 | | 246.293 | | 1,027.007 | Bappeda Litbang |
| 26 | PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan | 12 Bulan. | 12 Bulan. | 83.507 | 12 Bulan. | 91.858 | 12 Bulan. | 101.043 | 12 Bulan. | 111.148 | 12 Bulan. | 122.262 | | 509.818 | Bappeda Litbang |
| 28 | PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI | Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi | 12 Bulan. | 12 Bulan. | 84.714 | 12 Bulan. | 93.186 | 12 Bulan. | 102.504 | 12 Bulan. | 112.755 | 12 Bulan. | 124.030 | 12 Bulan. | 517.189 | Bappeda Litbang |
| 05 | URUSAN FUNGSI LAINNYA | | | | 276.01 | | 258.01 | | 281.35 | | 306.56 | | 387.93 | | 1,509.87 | Bagian APU |
| | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | | | | 276.01 | | 258.01 | | 281.35 | | 306.56 | | 387.93 | | 1,509.87 | Bagian APU |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah pembayaran iuran anggota APKASI | 1 kali | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 25.08 | 1 kali | 125.38 | Bagian APU |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR | - Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan | 3 Hari besar | 3 Hari besar 6 Kec. | 107.26 | 3 Hari besar 6 Kec. | 67.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 72.87 | 3 Hari besar 6 Kecamatan | 77.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 82.87 | 3 Hari besar 6 Kec. | 408.73 | Bagian APU |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN | Persentase kunjungan | 100% | 100% | 23.23 | 1.000 | 21.60 | 100% | 23.60 | 100% | 25.60 | 100% | 27.60 | 100% | 121.64 | Bagian APU |
| 27 | PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU | Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung | 100% | 100% | 396.45 | 100% | 401.49 | 100% | 441.15 | 100% | 484.59 | 100% | 640.32 | 100% | 2,364.00 | Bagian APU |
| | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 10,667.694 | | 10,723.669 | | 10,786.080 | | 10,855.669 | | 10,933.260 | | 53,966.372 | Kesra |
| 01 | Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | Proposal yang diverifikasi administratif | 100% | 100% | 10,667.694 | 100% | 10,723.669 | 100% | 10,786.080 | 100% | 10,855.669 | 100% | 10,933.260 | 100% | 53,966.372 | Kesra |
| | | Laporan Pertanggung jawaban pemanfaatan dana hibah yang sesuai ketentuan | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Kesra |
| | | Penerima hibah yang dimonitoring seni budaya | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Kesra |
| | BAGIAN HUKUM DAN HAM | | | | 2,657.40 | | 2,930.72 | | 3,247.23 | | 3,598.68 | | 3,958.54 | | 16,392.58 | Hukum dan HAM |
| 01 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | | 2000 Produk Hukum Daerah | 2,657.40 | 2000 Produk Hukum Daerah | 2,930.72 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,247.23 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,598.68 | 2000 Produk Hukum Daerah | 3,958.54 | 10.000 Produk Hukum Daerah | 16,392.58 | Hukum dan HAM |
| | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | | 4,803.60 | | 5,174.78 | | 5,692.26 | | 6,261.49 | | 6,887.64 | | 28,819.77 | Bagian Administrasi Pembangunan |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|--|---|---|--|--|----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 01 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna | 3 paket | 3 paket | 4,425.27 | 3 paket | 4,791.77 | 3 paket | 5,270.94 | 3 paket | 5,798.04 | 3 paket | 6,377.84 | 3 paket | 26,663.86 | Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 02 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH | 1 paket | 1 paket | 99.75 | 1 paket | 108.70 | 1 paket | 119.58 | 1 paket | 131.53 | 1 paket | 144.69 | 1 paket | 604.25 | Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 2 paket | 2 paket | 259.56 | 2 paket | 253.86 | 2 paket | 279.25 | 2 paket | 307.17 | 2 paket | 337.89 | 2 paket | 1,437.73 | Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 04 | PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Meningkatnya kapasitas aparaturnya pemerintah | 1 Paket | 1 Paket | 19.03 | 1 Paket | 20.45 | 1 Paket | 22.49 | 1 Paket | 24.74 | 1 Paket | 27.22 | 1 Paket | 113.94 | Bagian Administrasi Pembangunan | |
| BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | | | 655.64 | | 823.48 | | 677.31 | | 860.09 | | 1,068.84 | | 4,085.36 | Bagian Adm. Perekonomian |
| 56 | PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN | Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa | 122 LPD | 122 LPD | 301.07 | 122 LPD | 331.18 | 122 LPD | 364.30 | 122 LPD | 400.73 | 122 LPD | 440.80 | 122 LPD | 1,838.08 | Bagian Adm. Perekonomian | |
| 75 | PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | Terkoordinasinya Ketahanan Pangan | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 232.74 | 6 Kecamatan | 358.30 | 6 Kecamatan | 165.61 | 6 Kecamatan | 297.22 | 6 Kecamatan | 449.68 | 6 Kecamatan | 1,503.54 | Bagian Adm. Perekonomian | |
| 00 | PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI | Mengoptimalkan Profesionalisme Organisasi KTNA | 60 orang KTNA | 60 orang KTNA | 40.51 | 60 orang KTNA | 44.56 | 60 orang KTNA | 49.01 | 60 orang KTNA | 53.91 | 60 orang KTNA | 59.31 | 300 orang KTNA | 247.30 | Bagian Adm. Perekonomian | |
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI | Terkoordinasinya Pengendalian Inplasi Daerah | 6 Kecamatan | 6 Kecamatan | 24.19 | 6 Kecamatan | 26.61 | 6 Kecamatan | 29.27 | 6 Kecamatan | 32.20 | 6 Kecamatan | 35.42 | 6 Kecamatan | 147.68 | Bagian Adm. Perekonomian | |
| 12 | PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI | Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung | 12 Bulan | 12 Bulan | 57.13 | 12 Bulan | 62.84 | 12 Bulan | 69.12 | 12 Bulan | 76.03 | 12 Bulan | 83.64 | 12 Bulan | 348.76 | Bagian Adm. Perekonomian | |
| BAGIAN UMUM | | | | | | 300.00 | | 330.00 | | 363.00 | | 399.30 | | 439.23 | | 1,831.53 | Bagian Umum |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH | Jumlah pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah | 36 kunjungan | 36 kunjungan | 300.00 | 36 kunjungan | 330.00 | 36 kunjungan | 363.00 | 36 kunjungan | 399.30 | 36 kunjungan | 439.23 | 180 kunjungan | 1,831.53 | Bagian Umum | |
| BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH | | | | | | 14,385.06 | | 15,370.24 | | 22,681.89 | | 24,147.58 | | 26,432.98 | | 103,094.63 | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah |
| 01 | Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah | Jumlah SKPD dan UPT yang melakukan Rekonsiliasi | 73 Unit Kerja | 74 Unit Kerja | 800.58 | 74 Unit Kerja | 963.86 | 74 Unit Kerja | 1,058.86 | 74 Unit Kerja | 1,163.31 | 74 Unit Kerja | 1,278.17 | 74 Unit Kerja | 5,341.67 | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah | |
| 02 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya | Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan | 4 Paket | 4 Paket | 9,965.31 | 4 Paket | 10,690.43 | 4 Paket | 17,803.09 | 4 Paket | 19,053.30 | 4 Paket | 21,105.27 | 24 Paket | 78,617.40 | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah | |
| 03 | Program Asuransi Barang Milik Daerah | Jumlah barang milik daerah yang terasuransikan | 55 Gedung dan Bangunan | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.68 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 2,000.00 | 57 Gedung dan Bangunan | 10,000.68 | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah | |
| 04 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Jumlah Informasi E-Proc. Melalui LPSE | 459 Paket | 482 Paket | 1,618.48 | 506 Paket | 1,715.95 | 531 Paket | 1,819.95 | 558 Paket | 1,930.96 | 586 Paket | 2,049.54 | 2,663 Paket | 9,134.87 | Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah | |
| BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL | | | | | | 7,720.69 | | 8,891.58 | | 9,213.71 | | 9,562.21 | | 9,939.41 | | 45,295.21 | Bagian Humas & Protokol |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|---|---|---|--|--|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 21 jenis koran dan 4 majalah | 21 jenis koran dan 4 majalah | 942.37 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 955.47 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1,003.24 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1,053.40 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 1,106.07 | 21 jenis koran dan 4 majalah | 5,028.16 | Bagian Humas & Protokol | |
| 02 | PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA | Jumlah Jumpa Pers | 12 Kali | 12 Kali | 692.80 | 12 Kali | 736.94 | 12 Kali | 784.22 | 12 Kali | 834.92 | 12 Kali | 889.30 | 60 kali | 3,938.18 | Bagian Humas & Protokol | |
| 03 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI | Jumlah Pelayanan Media Elektronik | 253 Liputan | 340 Liputan | 1,267.23 | 350 Liputan | 1,393.95 | 350 Liputan | 1,533.35 | 350 Liputan | 1,686.68 | 350 Liputan | 1,855.35 | 350 Liputan | 7,736.55 | Bagian Humas & Protokol | |
| 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | Jumlah Berita pada media massa | 3036 Adv | 3600 Adv. | 4,022.52 | 3650 adv | 4,521.31 | 3700 adv | 4,522.38 | 3750 adv | 4,523.50 | 3800 adv | 4,524.67 | 18500 adv | 22,114.38 | Bagian Humas & Protokol | |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 'APARATUR NEGARA | Jumlah Sarana dan Prasarana penunjang keprotokolan | 1 paket | 1 paket | 795.77 | 1 paket | 835.55 | 1 paket | 877.33 | 1 paket | 921.20 | 1 paket | 967.26 | 5 Paket | 4,397.11 | Bagian Humas & Protokol | |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah tenaga protokol yang meningkat kemampuannya | - | - | - | 30 orang | 448.36 | 30 orang | 493.20 | 30 orang | 542.52 | 30 orang | 596.77 | 150 orang | 2,080.84 | Bagian Humas & Protokol | |
| BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | | | | | 1,389.15 | | 896.71 | | 986.38 | | 1,056.27 | | 1,203.72 | | 5,532.23 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
| 06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Nilai Hasil evaluasi Lakip Kabupaten | 75.89 | 77.00 | 199.91 | 78.00 | 178.09 | 79.00 | 195.90 | 80.00 | 215.48 | 81.00 | 278.85 | 81.00 | 1,068.23 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | |
| 28 | PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya | 53 SKPD | 53 SKPD | 1,145.79 | 53 SKPD | 670.83 | 53 SKPD | 737.91 | 53 SKPD | 782.95 | 53 SKPD | 861.25 | 53 SKPD | 4,198.73 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | |
| 39 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL | Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi | - | 100% | 18.74 | 100% | 20.62 | 100% | 22.68 | 100% | 24.95 | 100% | 27.44 | 100% | 114.44 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | |
| 05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Jumlah Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya | 53 SKPD | 53 SKPD | 24.71 | 53 SKPD | 27.18 | 53 SKPD | 29.89 | 53 SKPD | 32.88 | 53 SKPD | 36.17 | 53 SKPD | 150.83 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana | |
| SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 43,393.11 | | 47,732.42 | | 52,505.66 | | 57,756.23 | | 63,531.85 | | 264,919.27 | Sekwan |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakvat daerah | 100% | 100% | 43,157.57 | 100% | 47,473.33 | 100% | 52,220.67 | 100% | 57,442.73 | 100% | 63,187.00 | 100% | 263,481.31 | Sekwan | |
| 26 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui | 100% | 100% | 235.53 | 100% | 259.09 | 100% | 285.00 | 100% | 313.50 | 100% | 344.85 | 100% | 1,437.96 | Sekwan | |
| INSPEKTORAT | | | | | | 2,066.65 | | 2,265.02 | | 2,491.53 | | 2,740.68 | | 3,014.75 | | 12,578.63 | Inspektorat |
| 20 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH | Persentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa | 5% | 4% | 1,531.10 | 3% | 1,675.93 | 2% | 1,843.52 | 2% | 2,027.87 | 1% | 2,230.66 | 1% | 9,309.07 | Inspektorat | |
| 21 | PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN | Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional | 100% | 100% | 139.44 | 100% | 153.38 | 100% | 168.72 | 100% | 185.60 | 100% | 204.16 | 100% | 851.30 | Inspektorat | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 22 | PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN | Persentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan | 90% | 100% | 396.10 | 100% | 435.71 | 100% | 479.29 | 100% | 527.21 | 100% | 579.94 | 100% | 2,418.25 | Inspektorat |
| | BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU | | | | 1,032.92 | | 1,218.08 | | 1,322.73 | | 1,439.24 | | 1,567.39 | | 6,557.48 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 23 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK | prosentase kapasitas pelayanan publik | 100% | 100% | 781.77 | 100% | 809.24 | 100% | 888.80 | 100% | 977.68 | 100% | 1,075.44 | 100% | 4,532.94 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 24 | PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT | prosentase Pengaduan yang tertangani Oleh BPPT | 100% | 100% | 70.86 | 100% | 77.95 | 100% | 85.73 | 100% | 94.31 | 100% | 103.74 | 100% | 432.60 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| 37 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA | prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung | 100% | 100% | 180.28 | 100% | 330.89 | 100% | 348.20 | 100% | 367.25 | 100% | 388.21 | 100% | 1,591.95 | BPPT KABUPATEN BADUNG |
| | KECAMATAN KUTA | | | | 988.88 | | 1,087.77 | | 1,196.54 | | 1,316.20 | | 1,447.82 | | 6,037.20 | Kec. Kuta |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya | 12 jenis | 12 jenis | 340.28 | 12 jenis | 374.31 | 12 jenis | 411.74 | 12 jenis | 452.91 | 12 jenis | 498.20 | 60 jenis | 2,077.45 | Kec. Kuta |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 1 dokumen | 1 dokumen | 48.15 | 1 dokumen | 52.96 | 1 dokumen | 58.26 | 1 dokumen | 64.09 | 1 dokumen | 70.49 | 1 dokumen | 293.95 | Kec. Kuta |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH | Jenis dokumen Data | 2 jenis | 2 jenis | 24.02 | 2 jenis | 26.42 | 2 jenis | 29.06 | 2 jenis | 31.97 | 2 jenis | 35.17 | 2 jenis | 146.64 | Kec. Kuta |
| 78 | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah wilayah kelurahan yang dijaqa ketertibannya | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 95.83 | 5 kelurahan | 105.41 | 5 kelurahan | 115.95 | 5 kelurahan | 127.54 | 5 kelurahan | 140.30 | 5 kelurahan | 585.03 | Kec. Kuta |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masvarakat | 2 kegiatan | 3 kegiatan | 17.91 | 3 kegiatan | 19.70 | 3 kegiatan | 21.67 | 3 kegiatan | 23.84 | 3 kegiatan | 26.22 | 15 kegiatan | 109.34 | Kec. Kuta |
| 83 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 jenis | 1 jenis | 369.16 | 1 jenis | 406.07 | 1 jenis | 446.68 | 1 jenis | 491.35 | 1 jenis | 540.48 | 5 jenis | 2,253.74 | Kec. Kuta |
| 85 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 85.23 | 7 jenis | 93.76 | 7 jenis | 103.13 | 7 jenis | 113.44 | 7 jenis | 124.79 | 7 jenis | 520.36 | Kec. Kuta |
| 90 | PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan | 106 RTM, 101 RTS | 106 RTM, 101 RTS | 3.82 | 106 RTM, 101 RTS | 4.20 | 106 RTM, 101 RTS | 4.62 | 106 RTM, 101 RTS | 5.09 | 106 RTM, 101 RTS | 5.59 | 106 RTM, 101 RTS | 23.33 | Kec. Kuta |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 4.48 | 5 kelurahan | 4.93 | 5 kelurahan | 5.42 | 5 kelurahan | 5.97 | 5 kelurahan | 6.56 | 5 kelurahan | 27.37 | Kec. Kuta |
| | KELURAHAN KUTA | | | | 329.00 | | 361.90 | | 398.10 | | 437.90 | | 481.70 | | 2008.60 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 21.94 | 1 jenis dokumen | 24.13 | 1 jenis dokumen | 26.55 | 1 jenis dokumen | 29.20 | 1 jenis dokumen | 32.12 | 1 jenis dokumen | 133.95 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 41.54 | 2 jenis | 45.69 | 2 jenis | 50.26 | 2 jenis | 55.29 | 2 jenis | 60.81 | 2 jenis | 253.59 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR | Jumlah lingkungan yang mendapat pelayananan | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 33.90 | 13 lingkungan | 37.29 | 13 lingkungan | 41.02 | 13 lingkungan | 45.13 | 13 lingkungan | 49.64 | 13 lingkungan | 206.99 | Kel.Kuta |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 42.32 | 13 lingkungan | 46.56 | 13 lingkungan | 51.21 | 13 lingkungan | 56.33 | 13 lingkungan | 61.97 | 13 lingkungan | 258.40 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 lembaga | 5 lembaga | 132.54 | 5 lembaga | 145.80 | 5 lembaga | 160.38 | 5 lembaga | 176.42 | 5 lembaga | 194.06 | 5 lembaga | 809.19 | Kel.Kuta |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 56.75 | 7 jenis | 62.43 | 7 jenis | 68.67 | 7 jenis | 75.54 | 7 jenis | 83.09 | 7 jenis | 346.49 | Kel.Kuta |
| | KELURAHAN LEGIAN | | | | 464.07 | | 510.48 | | 561.53 | | 617.68 | | 679.45 | | 2833.21 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jenis Pengembangan Nilai Budaya | 2 Jenis | 2 Jenis | 217.40 | 2 Jenis | 239.14 | 2 Jenis | 263.05 | 2 Jenis | 289.36 | 2 Jenis | 318.29 | 2 Jenis | 1327.25 | Kel Legian |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 16.92 | 1 jenis dokumen | 18.61 | 1 jenis dokumen | 20.47 | 1 jenis dokumen | 22.52 | 1 jenis dokumen | 24.77 | 1 jenis dokumen | 103.28 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 16.25 | 2 jenis | 17.88 | 2 jenis | 19.66 | 2 jenis | 21.63 | 2 jenis | 23.79 | 2 jenis | 99.21 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 3 lingkungan | 3 lingkungan | 42.09 | 3 lingkungan | 46.30 | 3 lingkungan | 50.93 | 3 lingkungan | 56.02 | 3 lingkungan | 61.62 | 3 lingkungan | 256.97 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 jenis | 5 jenis | 138.57 | 5 jenis | 152.43 | 5 jenis | 167.67 | 5 jenis | 184.44 | 5 jenis | 202.88 | 5 jenis | 845.98 | Kel Legian |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 2 jenis | 2 jenis | 17.88 | 2 jenis | 19.67 | 2 jenis | 21.64 | 2 jenis | 23.80 | 2 jenis | 26.18 | 2 jenis | 109.16 | Kel Legian |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 14.96 | 7 jenis | 16.46 | 7 jenis | 18.11 | 7 jenis | 19.92 | 7 jenis | 21.91 | 7 jenis | 91.36 | Kel Legian |
| | KELURAHAN SEMINYAK | | | | 236.25 | | 222.05 | | 244.26 | | 268.69 | | 295.55 | | 1,266.81 | Kel.Seminyak |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 paket | 20.85 | 1 paket | 22.94 | 1 paket | 25.23 | 1 paket | 27.76 | 1 paket | 30.53 | 1 jenis dokumen | 127.31 | Kel.Seminyak |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis dokumen | 2 dokumen | 13.87 | 2 dokumen | 15.25 | 2 dokumen | 16.78 | 2 dokumen | 18.46 | 2 dokumen | 20.30 | 2 jenis dokumen | 84.66 | Kel.Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 2 lingkungan | 2 lingkungan | 41.93 | 2 lingkungan | 46.13 | 2 lingkungan | 50.74 | 2 lingkungan | 55.81 | 2 lingkungan | 61.39 | 2 lingkungan | 256.00 | Kel.Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 4 jenis | 4 jenis | 130.80 | 4 jenis | 106.06 | 4 jenis | 116.66 | 4 jenis | 128.33 | 4 jenis | 141.16 | 4 jenis | 623.02 | Kel.Seminyak |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 28.80 | 7 jenis | 31.68 | 7 jenis | 34.85 | 7 jenis | 38.33 | 7 jenis | 42.16 | 7 jenis | 175.82 | Kel.Seminyak |
| | KELURAHAN TUBAN | | | | 233.39 | | 252.32 | | 304.36 | | 334.80 | | 368.28 | | 1,493.15 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.84 | 1 jenis dokumen | 20.73 | 1 jenis dokumen | 22.80 | 1 jenis dokumen | 25.08 | 1 jenis dokumen | 27.59 | 1 jenis dokumen | 115.03 | Kel.Tuban |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 22.24 | 2 jenis | 24.46 | 2 jenis | 26.91 | 2 jenis | 29.60 | 2 jenis | 32.56 | 2 jenis | 135.75 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 4 lingkungan | 4 lingkungan | 43.96 | 4 lingkungan | 48.35 | 4 lingkungan | 53.19 | 4 lingkungan | 58.51 | 4 lingkungan | 64.36 | 4 lingkungan | 268.37 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 3 jenis | 3 Jenis | 91.82 | 3 jenis | 96.60 | 3 Jenis | 133.06 | 3 Jenis | 146.37 | 3 Jenis | 161.01 | 3 Jenis | 628.87 | Kel.Tuban |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayananan | 7 jenis | 7 jenis | 56.53 | 7 jenis | 62.18 | 7 jenis | 68.40 | 7 jenis | 75.24 | 7 jenis | 82.77 | 7 jenis | 345.13 | Kel.Tuban |
| | KELURAHAN KEDONGANAN | | | | 224.85 | | 247.33 | | 198.02 | | 198.02 | | 214.17 | | 1,082.39 | Kel. Kedonganan |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.50 | 1 jenis dokumen | 20.35 | 1 jenis dokumen | 18.21 | 1 jenis dokumen | 18.21 | 1 jenis dokumen | 20.03 | 1 jenis dokumen | 95.30 | Kel. Kedonganan |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 18.73 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 20.60 | 2 jenis | 22.66 | 2 jenis | 103.19 | Kel. Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 6 lingk. | 6 lingk. | 68.84 | 6 lingk. | 75.73 | 6 lingk. | 36.97 | 6 lingk. | 36.97 | 6 lingk. | 40.67 | 6 lingk. | 259.18 | Kel. Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 3 jenis | 3 jenis | 96.79 | 3 jenis | 106.47 | 3 jenis | 98.05 | 3 jenis | 98.05 | 3 jenis | 104.20 | 3 jenis | 503.55 | Kel. Kedonganan |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayananan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 21.99 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 24.19 | 7 jenis | 26.61 | 7 jenis | 121.16 | Kel. Kedonganan |
| | KECAMATAN KUTA UTARA | | | | 987.14 | | 1,085.85 | | 1,194.44 | | 1,313.88 | | 1,445.27 | | 6,026.57 | Kec. Kuta Utara |
| 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya | | 4 jenis | 347.95 | 4 jenis | 382.75 | 4 jenis | 421.02 | 4 jenis | 463.12 | 4 jenis | 509.44 | 20 jenis | 2,124.28 | Kec. Kuta Utara |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 Dokumen | 1 dokumen | 40.09 | 1 dokumen | 44.10 | 1 dokumen | 48.51 | 1 dokumen | 53.37 | 1 dokumen | 58.70 | 1 dokumen | 244.78 | Kec. Kuta Utara |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ | Jumlah dokumen data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.35 | 2 Jenis | 25.68 | 2 Jenis | 28.25 | 2 Jenis | 31.07 | 2 Jenis | 34.18 | 2 Jenis | 142.53 | Kec. Kuta Utara |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi yang dipantau | 6 desa/kel | 6 Desa/Kel | 79.44 | 6 Desa/Kel | 87.39 | 6 Desa/Kel | 96.13 | 6 Desa/Kel | 105.74 | 6 Desa/Kel | 116.31 | 6 Desa/Kel | 485.00 | Kec. Kuta Utara |
| 79 | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 6 desa & kel | 3 desa | 47.02 | 3 desa | 51.72 | 3 desa | 56.89 | 3 desa | 62.58 | 3 desa | 68.84 | | 287.03 | Kec. Kuta Utara |
| 83 | PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 1 Jenis | 3 Jenis | 391.15 | 3 Jenis | 430.26 | 3 Jenis | 473.29 | 3 Jenis | 520.62 | 3 Jenis | 572.68 | 3 Jenis | 2,387.99 | Kec. Kuta Utara |
| 85 | PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 48.73 | 7 Jenis | 53.60 | 7 Jenis | 58.96 | 7 Jenis | 64.85 | 7 Jenis | 71.34 | 7 Jenis | 297.48 | Kec. Kuta Utara |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah RTM yang Didata | 462 RTM | 462 RTM | 4.95 | 462 RTM | 5.44 | 462 RTM | 5.99 | 462 RTM | 6.58 | 462 RTM | 7.24 | 462 RTM | 30.20 | Kec. Kuta Utara |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | 6 desa/Kel | 6 Desa/Kelurahan | 4.47 | 6 Desa/Kelurahan | 4.91 | 6 Desa/Kelurahan | 5.40 | 6 Desa/Kelurahan | 5.95 | 6 Desa/Kelurahan | 6.54 | 6 Desa/Kelurahan | 27.27 | Kec. Kuta Utara |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN KEROBOKAN | | | | 343.54 | | 322.22 | | 334.60 | | 357.90 | | 387.30 | | 1,745.56 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | jumlah Jenis Pengembangan Nilai Budaya | 0 | 1 Jenis | 21.85 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 Jenis | 0.00 | 1 jenis | 21.85 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 21.08 | 1 jenis | 21.52 | 1 jenis | 24.40 | 1 jenis | 28.40 | 1 jenis | 33.50 | 1 jenis | 128.90 | Kel Kerobokan |
| | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 24.39 | 2 jenis | 26.50 | 2 jenis | 27.20 | 2 jenis | 29.40 | 2 jenis | 30.20 | 2 jenis | 137.69 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lingkungan Yang Dijaga ketertibannya | 10 lingkungan | 10 lingkungan | 83.73 | 10 lingkungan | 92.10 | 10 lingkungan | 87.40 | 10 lingkungan | 92.00 | 10 lingkungan | 98.80 | 10 lingkungan | 454.03 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam | 3 jenis | 4 jenis | 144.44 | 4 jenis | 149.70 | 4 jenis | 160.80 | 4 jenis | 172.70 | 4 jenis | 187.30 | 4 jenis | 814.94 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jumlah jenis Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan | 2 jenis | 2 jenis | 15.27 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 0.00 | 2 jenis | 15.27 | Kel Kerobokan |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 32.78 | 7 jenis | 32.40 | 7 jenis | 34.80 | 7 jenis | 35.40 | 7 jenis | 37.50 | 7 jenis | 172.88 | Kel Kerobokan |
| | KELURAHAN KEROBOKAN KAJA | | | | 306.60 | | 299.44 | | 329.38 | | 362.32 | | 355.70 | | 1,653.43 | Kel Kerobokan kaja |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Jenis Dokumen | 1 Jenis Dokumen | 21.67 | 1 Jenis Dokumen | 23.83 | 1 Jenis Dokumen | 26.21 | Paket | 28.84 | 1 Jenis Dokumen | 31.72 | 1 Jenis Dokumen | 132.27 | Kel Kerobokan kaja |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INPORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah data informasi statistik daerah disusun | 2 Jenis | 2 Jenis | 45.52 | 2 Jenis | 50.07 | 2 Jenis | 55.08 | 2 Jenis | 60.59 | 2 Jenis | 66.65 | 2 Jenis | 277.91 | Kel Kerobokan kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah Lokasi Yang Dipantau dijaga ketertibannya | 23 Lingkungan | 23 lingkungan | 83.03 | 23 lingkungan | 91.33 | 23 lingkungan | 100.46 | 23 lingkungan | 110.51 | 23 lingkungan | 78.71 | 23 lingkungan | 464.03 | Kel Kerobokan kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam | 4 Jenis | 4 Jenis | 132.91 | 4 Jenis | 108.37 | 4 Jenis | 119.21 | 4 Jenis | 131.13 | 4 Jenis | 144.25 | 4 Jenis | 635.87 | Kel Kerobokan kaja |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 23.48 | 7 Jenis | 25.83 | 7 Jenis | 28.41 | 7 Jenis | 31.25 | 7 Jenis | 34.38 | 7 Jenis | 143.35 | Kel Kerobokan kaja |
| | KELURAHAN KEROBOKAN KELOD | | | | 327.19 | | 298.96 | | 328.86 | | 328.86 | | 361.74 | | 1,645.60 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | jumlah pengembangan nilai | 1 jenis | 1 jenis | 28.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 jenis | 28.23 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 19.75 | 1 jenis dokumen | 19.75 | 1 jenis dokumen | 21.73 | 1 jenis dokumen | 21.73 | 1 jenis dokumen | 23.90 | 1 jenis dokumen | 106.85 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik disusun | 2 jenis | 2 jenis | 33.24 | 2 jenis | 33.24 | 2 jenis | 36.57 | 2 jenis | 36.57 | 2 jenis | 40.23 | 2 jenis | 179.85 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 82.29 | 13 lingkungan | 82.29 | 13 lingkungan | 90.52 | 13 lingkungan | 90.52 | 13 lingkungan | 99.57 | 13 lingkungan | 445.18 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 3 jenis | 3 jenis | 112.72 | 3 jenis | 112.72 | 3 jenis | 123.99 | 3 jenis | 123.99 | 3 jenis | 136.39 | 3 jenis | 609.81 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan promosi kesehatan dan | 3 jenis | 3 jenis | 24.28 | 3 jenis | 24.28 | 3 jenis | 26.70 | 3 jenis | 26.70 | 3 jenis | 29.37 | 3 jenis | 131.33 | Kel Kerobokan kelod |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jenis pelayanan adminitrasi kependudukan | 13 lingkungan | 13 lingkungan | 26.68 | 13 lingkungan | 26.68 | 13 lingkungan | 29.35 | 13 lingkungan | 29.35 | 13 lingkungan | 32.29 | 13 lingkungan | 144.35 | Kel Kerobokan kelod |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KECAMATAN KUTA SELATAN | | | | 1,103.22 | | 1,213.55 | | 1,294.55 | | 1,424.01 | | 1,566.41 | | 6,601.74 | Kec. Kuta Selatan |
| 22 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya | 11 Jenis | 11 Jenis | 341.53 | 11 Jenis | 375.68 | 11 Jenis | 413.25 | 11 Jenis | 454.57 | 11 Jenis | 500.03 | 11 Jenis | 2,085.05 | Kec. Kuta Selatan |
| 33 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.94 | 1 Dokumen | 48.34 | 1 Dokumen | 53.17 | 1 Dokumen | 58.49 | 1 Dokumen | 64.34 | 5 dokumen | 268.28 | Kec. Kuta Selatan |
| 29 | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah Dokumen Data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.93 | 2 Jenis | 26.32 | 2 Jenis | 28.95 | 2 Jenis | 31.85 | 2 Jenis | 35.03 | 10 jenis | 146.08 | Kec. Kuta Selatan |
| 46 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi Yang Dipantau | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 112.55 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 123.81 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 136.19 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 149.81 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 164.79 | 3 Desa dan 3 Kelurahan | 687.13 | Kec. Kuta Selatan |
| 38 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 66.20 | 3 kegiatan | 72.82 | 3 kegiatan | 39.76 | 3 kegiatan | 43.73 | 3 kegiatan | 48.10 | 15 kegiatan | 270.61 | Kec. Kuta Selatan |
| 78 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya | 1 jenis | 1 Jenis | 407.27 | 1 Jenis | 448.00 | 1 Jenis | 492.80 | 1 Jenis | 542.07 | 1 Jenis | 596.28 | 1 Jenis | 2,486.42 | Kec. Kuta Selatan |
| 79 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis Pelayanan Admistrasi Kependudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 101.64 | 7 Jenis | 111.80 | 7 Jenis | 122.98 | 7 Jenis | 135.28 | 7 Jenis | 148.81 | 7 Jenis | 620.51 | Kec. Kuta Selatan |
| 81 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah Desa/kelurahan yang dilaksanakan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan | 6 desa/ kel | 6 desa/ kel | 6.17 | 6 desa/ kel | 6.79 | 6 desa/ kel | 7.46 | 6 desa/ kel | 8.21 | 6 desa/ kel | 9.03 | 6 desa/ kel | 37.66 | Kec. Kuta Selatan |
| | KELURAHAN BENOA | | | | 314.92 | | 346.41 | | 381.05 | | 419.15 | | 461.07 | | 1,922.59 | Kelurahan Benoa |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.90 | 1 jenis dokumen | 20.78 | 1 jenis dokumen | 22.86 | 1 jenis dokumen | 25.15 | 1 jenis dokumen | 27.66 | 1 jenis dokumen | 115.36 | Kelurahan Benoa |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 81.34 | 2 jenis | 89.47 | 2 jenis | 98.42 | 2 jenis | 108.26 | 2 jenis | 119.09 | 2 jenis | 496.57 | Kelurahan Benoa |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 16 Lingkungan | 16 Lingkungan | 37.66 | 16 Lingkungan | 41.42 | 16 Lingkungan | 45.57 | 16 Lingkungan | 50.12 | 16 Lingkungan | 55.14 | 16 Lingkungan | 229.91 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 115.18 | 4 jenis | 126.70 | 4 jenis | 139.37 | 4 jenis | 153.30 | 4 jenis | 168.63 | 4 jenis | 703.18 | Kelurahan Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan kependudukan | 8 jenis | 8 jenis | 61.85 | 8 jenis | 68.03 | 8 jenis | 74.83 | 8 jenis | 82.32 | 8 jenis | 90.55 | 8 jenis | 377.57 | Kelurahan Benoa |
| 28 | KELURAHAN TANJUNG BENOA | | | | 361.45 | | 397.59 | | 437.35 | | 481.09 | | 529.19 | | 2,206.67 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 19.13 | 1 jenis | 21.04 | 1 jenis | 23.14 | 1 jenis | 25.46 | 1 jenis | 28.00 | 1 jenis | 116.76 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 18.46 | 2 jenis | 20.31 | 2 jenis | 22.34 | 2 jenis | 24.58 | 2 jenis | 27.03 | 2 jenis | 112.72 | Kel. Tanjung Benoa |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lokasi yang dipantau | 6 lingkungan | 6 lingkungan | 41.80 | 6 lingkungan | 45.98 | 6 lingkungan | 50.58 | 6 lingkungan | 55.64 | 6 lingkungan | 61.20 | 6 lingkungan | 255.20 | Kel. Tanjung Benoa |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 157.59 | 4 jenis | 173.34 | 4 jenis | 190.68 | 4 jenis | 209.75 | 4 jenis | 230.72 | 4 jenis | 962.07 | Kel. Tanjung Bena |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 1 jenis | 1 jenis | 87.07 | 1 jenis | 95.77 | 1 jenis | 105.35 | 1 jenis | 115.88 | 1 jenis | 127.47 | 1 jenis | 531.54 | Kel. Tanjung Bena |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 37.41 | 7 jenis | 41.15 | 7 jenis | 45.26 | 7 jenis | 49.79 | 7 jenis | 54.77 | 7 jenis | 228.37 | Kel. Tanjung Bena |
| | KELURAHAN JIMBARAN | | | | 336.94 | | 336.94 | | 370.63 | | 370.63 | | 407.69 | | 1,822.83 | Kel. Jimbaran |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 17.32 | 1 jenis dokumen | 17.32 | 1 jenis dokumen | 19.05 | 1 jenis dokumen | 19.05 | 1 jenis dokumen | 20.95 | 1 jenis dokumen | 93.68 | Kel. Jimbaran |
| | PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 34.18 | 2 jenis | 34.18 | 2 jenis | 37.60 | 2 jenis | 37.60 | 2 jenis | 41.36 | 2 jenis | 184.91 | Kel. Jimbaran |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 14 lingkungan | 14 lingkungan | 38.81 | 14 lingkungan | 38.81 | 14 lingkungan | 42.69 | 14 lingkungan | 42.69 | 14 lingkungan | 46.96 | 14 lingkungan | 209.97 | Kel. Jimbaran |
| | PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 5 lembaga | 5 lembaga | 121.90 | 5 lembaga | 121.90 | 5 lembaga | 134.09 | 5 lembaga | 134.09 | 5 lembaga | 147.50 | 5 lembaga | 659.49 | Kel. Jimbaran |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan promosi kesehatan dan | 1 jenis | 1 jenis | 52.49 | 1 jenis | 52.49 | 1 jenis | 57.74 | 1 jenis | 57.74 | 1 jenis | 63.51 | 1 jenis | 283.96 | Kel. Jimbaran |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan adminitrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 72.24 | 7 jenis | 72.24 | 7 jenis | 79.46 | 7 jenis | 79.46 | 7 jenis | 87.41 | 7 jenis | 390.81 | Kel. Jimbaran |
| | KECAMATAN MENGWI | | | | 1,161.33 | | 1,274.64 | | 1,399.28 | | 1,536.39 | | 1,687.20 | | 7,058.84 | Kec. Mengwi |
| 15 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan Pengembangan Nilai Budaya | 13 Jenis | 13 Jenis | 437.84 | 13 Jenis | 481.62 | 13 Jenis | 529.79 | 13 Jenis | 582.76 | 13 Jenis | 641.04 | 13 Jenis | 2,673.06 | Kec. Mengwi |
| 29 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 53.02 | 1 Dokumen | 58.32 | 1 Dokumen | 64.15 | 1 Dokumen | 70.57 | 1 Dokumen | 77.62 | 1 Dokumen | 323.67 | Kec. Mengwi |
| 38 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah Dokumen data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.37 | 2 Jenis | 23.71 | 2 Jenis | 24.08 | 2 Jenis | 24.49 | 2 Jenis | 24.94 | 2 Jenis | 120.60 | Kec. Mengwi |
| 78 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah Lokasi Yang dipantau | 20 Desa/Kel | 20 Desa/Kel | 95.23 | 20 Desa/Kel | 104.75 | 20 Desa/Kel | 115.22 | 20 Desa/Kel | 126.75 | 20 Desa/Kel | 139.42 | 20 Desa/Kel | 581.37 | Kec. Mengwi |
| 79 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah Jenis Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa | 3 Jenis | 3 Jenis | 119.53 | 3 Jenis | 130.66 | 3 Jenis | 142.90 | 3 Jenis | 156.37 | 3 Jenis | 171.18 | 3 Jenis | 720.64 | Kec. Mengwi |
| 83 | PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis-jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 Jenis | 3 Jenis | 393.90 | 3 Jenis | 433.29 | 3 Jenis | 476.62 | 3 Jenis | 524.28 | 3 Jenis | 576.71 | 3 Jenis | 2,404.80 | Kec. Mengwi |
| 85 | PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jenis pelayanan administrasi pendudukan | 7 Jenis | 7 Jenis | 15.89 | 7 Jenis | 17.48 | 7 Jenis | 19.23 | 7 Jenis | 21.16 | 7 Jenis | 23.27 | 7 Jenis | 97.04 | Kec. Mengwi |
| 90 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan penentasan kemiskinan | 3701 RTM | 3701 RTM | 11.28 | 3701 RTM | 12.41 | 3701 RTM | 13.65 | 3701 RTM | 15.02 | 3701 RTM | 16.52 | 3701 RTM | 68.88 | Kec. Mengwi |
| 99 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN | Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kel | 20 desa / kelurahan | desa / kelurah | 11.27 | desa / kelurah | 12.39 | desa / kelurah | 13.63 | desa / kelurah | 15.00 | desa / kelurah | 16.50 | desa / kelurah | 68.79 | Kec. Mengwi |
| | KELURAHAN SEMPIDI | | | | 376.04 | | 373.99 | | 411.39 | | 452.52 | | 497.78 | | 2,111.71 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah Dokumen Perencanaan | 2 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 35.53 | 2 jenis dokumen | 39.08 | 2 jenis dokumen | 42.99 | 2 jenis dokumen | 47.28 | 2 jenis dokumen | 52.01 | 2 jenis dokumen | 216.89 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 16.18 | 2 jenis | 17.79 | 2 jenis | 19.57 | 2 jenis | 21.53 | 2 jenis | 23.68 | 2 jenis | 98.75 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya | 10 lingkungan | 10 lingk | 45.76 | 10 lingk | 50.34 | 10 lingk | 55.37 | 10 lingk | 60.91 | 10 lingk | 67.00 | 10 lingk | 279.39 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam | 5 lembaga | 5 lembaga | 246.29 | 5 lembaga | 231.26 | 5 lembaga | 254.39 | 5 lembaga | 279.83 | 5 lembaga | 307.81 | 5 lembaga | 1,319.57 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | jenis kegiatan pembinaan kesehatan pemberdayaan masyarakat | 1 jenis | 1 jenis | 22.03 | 1 jenis | 24.24 | 1 jenis | 26.66 | 1 jenis | 29.33 | 1 jenis | 32.26 | 1 jenis | 134.52 | Kel Sempidi |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 10.25 | 7 jenis | 11.28 | 7 jenis | 12.41 | 7 jenis | 13.65 | 7 jenis | 15.01 | 7 jenis | 62.59 | Kel Sempidi |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN LUKLUK | | | | 215.93 | | 292.33 | | 292.33 | | 321.57 | | 321.57 | | 1,443.73 | Kel Lukluk |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 19.79 | 1 jenis dokumen | 19.95 | 1 jenis dokumen | 19.95 | 1 jenis dokumen | 21.95 | 1 jenis dokumen | 21.95 | 1 jenis dokumen | 103.58 | Kel Lukluk |
| | PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 25.69 | 2 jenis | 28.06 | 2 jenis | 28.06 | 2 jenis | 30.87 | 2 jenis | 30.87 | 2 jenis | 143.55 | Kel Lukluk |
| | PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 9 Lingkungan | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 42.15 | 9 Lingkungan | 46.37 | 9 Lingkungan | 46.37 | 9 Lingkungan | 219.20 | Kel Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 110.94 | 4 jenis | 183.64 | 4 jenis | 183.64 | 4 jenis | 202.00 | 4 jenis | 202.00 | 4 jenis | 882.22 | Kel Lukluk |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 17.36 | 7 jenis | 18.53 | 7 jenis | 18.53 | 7 jenis | 20.38 | 7 jenis | 20.38 | 7 jenis | 95.18 | Kel Lukluk |
| | KELURAHAN KAPAL | | | | 651.26 | | 284.97 | | 312.50 | | 312.50 | | 312.50 | | 1,873.74 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis dokumen | 1 jenis dokumen | 18.10 | 1 jenis dokumen | 17.45 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 18.23 | 1 jenis dokumen | 90.23 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data / informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 31.44 | 2 jenis | 31.44 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 34.59 | 2 jenis | 166.65 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 16 lingkungan | 16 lingkungan | 42.11 | 16 lingkungan | 42.11 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 46.32 | 16 lingkungan | 223.18 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan | 4 lembaga | 4 lembaga | 132.67 | 4 lembaga | 183.80 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 202.18 | 4 lembaga | 923.03 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 10.17 | 7 jenis | 10.17 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 11.18 | 7 jenis | 53.88 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN | Jumlah ruas jalan yang ditingkatkan | 1 paket | 1 paket | 204.31 | | - | | - | | - | | - | 1 paket | 204.31 | Kel Kapal |
| | PROGRAM PEMANFAATAN RUANG | Jumlah tapal batas lingkungan yang dibangun | - | 32 unit | 212.46 | | - | | - | | - | | - | 32 unit | 212.46 | Kel Kapal |
| | KELURAHAN ABIANBASE | | | | 200.77 | | 200.77 | | 220.85 | | 220.85 | | 220.85 | | 1,064.08 | Kel Abianbase |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data/informasi statistik dhaer | 2 jenis | 2 jenis | 17.72 | 2 jenis | 17.72 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 19.49 | 2 jenis | 93.92 | Kel Abianbase |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah masyarakat/ lingkungan yang | 1 Kelurahan | 1 kel | 20.78 | 1 kel | 20.78 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 22.86 | 1 kel | 110.13 | Kel Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 111.35 | 4 jenis | 111.35 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 122.49 | 4 jenis | 590.16 | Kel Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang di pantau | 13 Lingkungan | 13 Lingk | 42.30 | 13 Lingk | 42.30 | 13 Lingk | 46.54 | 13 Lingk | 46.54 | 13 Lingk | 46.54 | 13 lingk | 224.22 | Kel Abianbase |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 8.61 | 7 jenis | 8.61 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 9.48 | 7 jenis | 45.66 | Kel Abianbase |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--|--|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | KELURAHAN SADING | | | | 203.56 | | 223.92 | | 246.31 | | 270.94 | | 298.04 | | 1,242.77 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 1 jenis | 1 jenis | 14.38 | 1 jenis | 15.82 | 1 jenis | 17.40 | 1 jenis | 19.14 | 1 jenis | 21.05 | 1 jenis | 87.787 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | jumlah dokumen data/informasi statistik daerah | 2 jenis | 2 jenis | 21.01 | 2 jenis | 23.11 | 2 jenis | 25.42 | 2 jenis | 27.96 | 2 jenis | 30.75 | 2 jenis | 128.244 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN. | Jumlah lokasi yang dipantau | 9 lingkungan | 9 lingkungan | 38.48 | 9 lingkungan | 42.33 | 9 lingkungan | 46.56 | 9 lingkungan | 51.22 | 9 lingkungan | 56.34 | 9 lingkungan | 234.924 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | jumlah partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 4 jenis | 4 jenis | 114.66 | 4 jenis | 126.12 | 4 jenis | 138.73 | 4 jenis | 152.61 | 4 jenis | 167.87 | 4 jenis | 699.980 | Kel. Sading |
| | PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 7 jenis | 15.04 | 7 jenis | 16.55 | 7 jenis | 18.20 | 7 jenis | 20.02 | 7 jenis | 22.02 | 7 jenis | 91.839 | Kel. Sading |
| | KECAMATAN ABIANSEMAL | | | | 988.80 | | 1,026.48 | | 1,029.96 | | 1,117.76 | | 1,170.36 | | 7,373.83 | Kec Abiansemal |
| 11 | PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Kegiatan pengembangan nilai budaya | 13 jenis | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 339.23 | 13 jenis | 1,696.15 | Kec Abiansemal |
| 43 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Jumlah dokumen perencanaan | 1 dokumen | 1 dokumen | 40.44 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 41.69 | 1 dokumen | 207.19 | Kec Abiansemal |
| 33 | PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH | Jumlah dokumen data | 2 jenis | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 23.38 | 2 jenis | 16.92 | Kec Abiansemal |
| 22 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah lokasi yang dipantau | 18 desa | 18 desa | 86.61 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 85.00 | 18 desa | 426.61 | Kec Abiansemal |
| 12 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa | 5 jenis | 5 jenis | 105.87 | 5 jenis | 106.99 | 5 jenis | 70.64 | 5 jenis | 114.62 | 5 jenis | 119.02 | 5 jenis | 2,657.62 | Kec Abiansemal |
| 14 | PROGRAM KERAGAMAN BUDAYA | Jenis pengelolaan keragaman budaya | 3 jenis | 3 jenis | 362.13 | 3 jenis | 398.34 | 3 jenis | 438.17 | 3 jenis | 481.99 | 3 jenis | 530.19 | 3 jenis | 2,210.82 | Kec Abiansemal |
| 16 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi kependudukan | 7 jenis | 8 jenis | 19.90 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 20.61 | 8 jenis | 102.36 | Kec Abiansemal |
| 17 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Desa yang dilakukan pengentasan kemiskinan | 18 desa | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 6.42 | 18 desa | 32.08 | Kec Abiansemal |
| 18 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | 18 kali | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 4.82 | 18 kali | 24.09 | Kec Abiansemal |
| | KECAMATAN PETANG | | | | 960.68 | | 1,022.74 | | 1,125.02 | | 1,237.52 | | 1,361.27 | | 5,707.24 | Kec. Petang |
| 09 | PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA | Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya | 12 jenis | 12 jenis | 340.53 | 12 jenis | 374.58 | 12 jenis | 412.04 | 12 jenis | 453.24 | 12 jenis | 498.56 | 12 jenis | 2,078.94 | Kec. Petang |
| 10 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Dokumen Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 43.15 | 1 Dokumen | 47.47 | 1 Dokumen | 52.22 | 1 Dokumen | 57.44 | 1 Dokumen | 63.18 | 1 Dokumen | 263.46 | Kec. Petang |
| 13 | PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI | Dokumen Data | 2 Jenis | 2 Jenis | 23.97 | 2 Jenis | 4.36 | 2 Jenis | 4.80 | 2 Jenis | 5.28 | 2 Jenis | 5.81 | 2 Jenis | 44.22 | Kec. Petang |
| 15 | PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN | Jumlah wilayah desa yang diajaga ketertibannya | 7 Desa | 7 Desa | 91.08 | 7 Desa | 88.18 | 7 Desa | 97.00 | 7 Desa | 106.70 | 7 Desa | 117.37 | 7 Desa | 500.33 | Kec. Petang |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021) | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--|--|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|---|----------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Target | Rp. Juta | |
| | | | | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | Target | Rp. Juta | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA | Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat | 2 kegiatan | 5 kegiatan | 73.76 | 5 kegiatan | 81.13 | 5 kegiatan | 89.24 | 5 kegiatan | 98.17 | 5 kegiatan | 107.99 | 5 kegiatan | 450.29 | Kec. Petang |
| 17 | PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA | Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya | 3 Jenis | 1 Jenis | 355.35 | 1 Jenis | 390.88 | 1 Jenis | 429.97 | 1 Jenis | 472.97 | 1 Jenis | 520.27 | 1 Jenis | 2,169.44 | Kec. Petang |
| 18 | PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Jenis pelayanan administrasi | 7 jenis | 7871 kk, 28.720 jiwa | 15.95 | 7 jenis | 17.55 | 7 jenis | 19.30 | 7 jenis | 21.23 | 7 jenis | 23.35 | 7 jenis | 97.39 | Kec. Petang |
| 19 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN | Karang Taruna/PSM yang dibina | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 6.70 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 7.37 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 8.11 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 8.92 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 9.82 | 1 Karang Taruna, 1 orang PSM | 40.93 | Kec. Petang |
| 10 | PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN | Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan | 392 RTM | 392 RTM | 4.48 | 392 RTM | 4.92 | 392 RTM | 5.42 | 392 RTM | 5.96 | 392 RTM | 6.55 | 392 RTM | 27.33 | Kec. Petang |
| 19 | PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH | Jumlah Desayang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 7 desa | 7 desa | 5.72 | 7 desa | 6.29 | 7 desa | 6.92 | 7 desa | 7.61 | 7 desa | 8.37 | 7 desa | 34.92 | Kec. Petang |

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah berkenaan.

Tabel 9.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | |
| | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Pertumbuhan PDRB | 7.07 | 7.64 | 6.82 | 6.97 | 6,24 - 6,58 | 7,2 - 7,6 | 7,75 - 8,18 | 7,91 - 8,35 | 8,2 - 8,65 | 8,5 - 8,97 | 8,5 - 8,97 |
| 1.2. | Laju inflasi provinsi | 3.75 | 4.71 | 7.35 | 8.03 | 2.70 | 4,38 - 4,85 | 4,3 - 4,75 | 4,21 - 4,65 | 4,12 - 4,55 | 4,03 - 4,45 | 4,03 - 4,45 |
| 1.3. | PDRB per kapita | 39.80 | 41.79 | 43.58 | 45.56 | 44,97 - 49,7 | 49,3 - 54,49 | 52,05 - 57,53 | 55,07 - 60,87 | 58,48 - 64,63 | 62,3 - 68,86 | 62,3 - 68,86 |
| 1.4. | Indeks Gini | 0.3385 | 0.3258 | 0.3468 | 0.3404 | 0,3694 - 0,4082 | 0,3377 - 0,3732 | 0,31 - 0,3427 | 0,3251 - 0,3593 | 0,3319 - 0,3669 | 0,3379 - 0,3735 | 0,3379 - 0,3735 |
| 1.5. | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia | 19.20 | 19.75 | 15.12 | 18.64 | 18,8 - 20,78 | 19,46 - 21,51 | 20,04 - 22,15 | 20,43 - 22,58 | 20,9 - 23,09 | 21,35 - 23,6 | 21,35 - 23,6 |
| 1.6. | Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan | 2.62 | 2.16 | 2.46 | 2.54 | 2,39 - 2,64 | 2,34 - 2,59 | 2,31 - 2,56 | 2,29 - 2,53 | 2,27 - 2,51 | 2,24 - 2,48 | 2,24 - 2,48 |
| 1.7. | Pertumbuhan ekonomi (%) | 7.07 | 7.64 | 6.82 | 6.97 | 6,24 - 6,58 | 7,2 - 7,6 | 7,75 - 8,18 | 7,91 - 8,35 | 8,2 - 8,65 | 8,5 - 8,97 | 8,5 - 8,97 |
| 1.8. | Laju inflasi (%) | 2.33 | 3.59 | 7.67 | 7.31 | 2,34 - 2,58 | 3,99 - 4,41 | 3,91 - 4,32 | 3,83 - 4,23 | 3,75 - 4,14 | 3,67 - 4,06 | 3,67 - 4,06 |
| 1.9. | PDRB Konstan Th. 2010 (Triliyun) | 22.32 | 24.03 | 25.67 | 27.46 | 27,72 - 30,64 | 31,72 - 35,06 | 34,19 - 37,79 | 36,91 - 40,8 | 39,95 - 44,16 | 43,36 - 47,93 | 43,36 - 47,93 |
| 1.10. | PDRB berlaku (Triliyun) | 31.79 | 27.20 | 31.79 | 37.06 | 39,22 - 43,35 | 50,99 - 56,35 | 58,44 - 64,59 | 67,01 - 74,06 | 76,94 - 85,04 | 88,48 - 97,79 | 88,48 - 97,79 |
| 1.11. | PDRB per kapita (ADHB) | 41.91 | 47.31 | 53.97 | 61.49 | 66,64 - 67,31 | 82,99 - 83,82 | 93,18 - 94,12 | 104,72 - 105,77 | 117,95 - 119,14 | 133,15 - 134,49 | 133,15 - 134,49 |
| | Fokus Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | |
| 1. | IPM | 76.66 | 77.26 | 77.63 | 77.98 | 78,14 - 82,08 | 78,76 - 82,74 | 79,06 - 83,06 | 79,38 - 83,39 | 79,71 - 83,73 | 80,05 - 84,1 | 80,05 - 84,1 |
| 2. | Angka usia harapan hidup | 73.91 | 74.05 | 74.19 | 74.30 | 74,31 - 78,03 | 74,5 - 78,23 | 74,58 - 78,31 | 74,65 - 78,38 | 74,73 - 78,47 | 74,81 - 78,56 | 74,81 - 78,56 |
| 3. | Pengeluaran per Kapita (Rp. 000) | 15,507.72 | 15,794.76 | 16,024.52 | 16,080.47 | 16326,87 - 17229,36 | 17024,24 - 17965,28 | 17612,16 - 18585,7 | 18007,89 - 19003,31 | 18512,87 - 19536,19 | 18935,29 - 19981,96 | 18935,29 - 19981,96 |
| 4. | IPG | 93.25 | 93.89 | 94.68 | 94.88 | 95,09 - 95,61 | 95,9 - 96,43 | 96,23 - 96,76 | 96,62 - 97,15 | 97,02 - 97,56 | 97,45 - 97,98 | 97,45 - 97,98 |
| 5. | IDG | | | | 55.24 | 55,37 - 58,16 | 55,84 - 58,66 | 56,03 - 58,86 | 56,26 - 59,1 | 56,49 - 59,35 | 56,74 - 59,61 | 56,74 - 59,61 |
| | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Angka melek huruf (BPS) | 92.96 | 93.01 | 93.93 | 95.71 | | | | | | | |
| 1.2. | Angka rata-rata lama sekolah (BPS) | 8.96 | 9.07 | 9.18 | 9.29 | | | | | | | |
| 1.3. | Angka partisipasi kasar | 115.01 | 129.23 | 117.73 | 120.37 | 118.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Angka pendidikan yang ditamatkan | 99.95 | 99.96 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Angka Partisipasi Murni | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 96.87 | 103.67 | 98.62 | 99.12 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.2. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 91.28 | 101.62 | 91.59 | 92.1 | 109.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.3. | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C | 78.04 | 91.09 | 83.69 | 83.72 | 104.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | PAUD : | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | APK PAUD (laki-laki dan perempuan) | 96.02 | 96.46 | 100.45 | 102.93 | 103.06 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Pendidikan Dasar 9 Tahun : | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1. | APK SD/MI (%) | 110.04 | 117.84 | 112.31 | 113.16 | 113.57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.2. | APM SD/MI (%) | 96.87 | 103.67 | 98.62 | 99.12 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.3. | Angka Putus Sekolah SD/MI (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4. | Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%) | 100 | 94.6 | 97.91 | 96.99 | 99.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.5. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.6. | Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.7.7. | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.8. | Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%) | 55.71782288 | 60.14586716 | 64.57391144 | 69.00195572 | 73.43 | 82.42804428 | 86.85608856 | 91.28413284 | 95.71217712 | 100 | 100 |
| 1.7.9. | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 86 | 88 | 92 | 96 | 99 | 100 |
| 1.7.10. | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7.11. | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 36 | 37 | 38 | 39 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.7.12. | Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.7.13. | APK SMP/MTs (%) | 122.57 | 137.63 | 125.12 | 128.14 | 123.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.14. | APM SMP/MTs (%) | 91.28 | 101.62 | 91.59 | 92.19 | 109.95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.15. | Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.16. | Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%) | 89.27 | 94.89 | 98.44 | 100 | 95.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.17. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.18. | Rasio Rombel / Kelas 1:1 (%) | 1.4 | 1.38 | 1.36 | 1.33 | 1.3 | 1.15 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 |
| 1.7.19. | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.20. | Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%) | 99.89 | 99.97 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.21. | Setiap sekolah memiliki Lab ipa lengkap dengan prabotnya (%) | 99.98 | 99.99 | 99.76 | 98.97 | 98.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.22. | Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) | 99.79 | 99.88 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7.23. | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 84 | 86 | 90 | 95 | 97 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 | 100 |
| 1.7.24. | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7.25. | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 48 | 49 | 50 | 55 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.7.26. | Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.8. | Pendidikan Menengah : | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | APK SMA/MA/SMK (%) | 112.42 | 132.21 | 115.75 | 119.81 | 119.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2. | APM SMA/MA/SMK (%) | 78.04 | 91.09 | 83.69 | 83.72 | 104.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.3. | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.4. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.5. | Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%) | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.26 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.6. | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.7. | Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%) | 81 | 81.85 | 81.95 | 81.99 | 82.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.8. | Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%) | 80.97 | 80.49 | 81.75 | 81.99 | 82.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.9. | Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.10. | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 99.06 | 99.99 | 99.99 | 99.87 | 99.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.11. | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.12. | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.13. | Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Pendidikan Non Formal : | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1. | Angka Kelulusan Paket A (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9.2. | Angka Kelulusan Paket B (%) | 100 | 100 | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9.3. | Angka Kelulusan Paket C (%) | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10. | Manajemen Pelayanan Pendidikan : | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1. | Persentase Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10.2. | Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10.3. | Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.10.4. | Persentase SMA/SMK/MA Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan : | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1. | Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 82.50 | 89.19 | 92.50 | 94.40 | 91.22 | 96.00 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|-------|-------|-------|--------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.11.2. | Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%) | 85.90 | 88.00 | 90.00 | 93.30 | 91.81 | 95.00 | 96.00 | 97.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1.11.3. | Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) | 88.00 | 89.50 | 90.00 | 90.90 | 92.63 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Kesehatan : | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Angka kelangsungan hidup bayi | 0,951/1000 | 0,997/ 1000 | 0,997/ 1000 | 0,995/ 1000 | | | | | | | |
| 2.2. | Angka usia harapan hidup | 71.85 | 71.9 | 71.91 | 74.3 | 74,3 | 74,6 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 75 | 75 |
| 2.3. | Prevalensi balita gizi buruk | 0.21 | 0.11 | 0.42 | 0.25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.4. | Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya : | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Persentase Puskesmas kondisi baik (%) | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4.2 | Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk) | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 |
| 2.5. | Pengelolaan BLUD RSUD : | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat | - | 85% | 87.50% | 90% | 90% | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% |
| 2.5.2. | Kinerja Pelayanan | - | 61.75% | 66.13% | 61.63% | 65% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 80% |
| 2.5.3. | Kinerja Keuangan | - | 83% | 74.50% | 79% | 76.50% | 80% | 81% | 82% | 83% | 85% | 85% |
| 2.6. | Pengawasan Obat dan Makanan : | | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%) | 90,50 | 91,75 | 92,15 | 92,50 | 93,75 | 94,75 | 95,20 | 96 | 96,50 | 96,75 | 96,75 |
| 2.7. | Pengembangan Tenaga Kesehatan : | | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk) | 36.5 | 26.2 | 55.3 | 110 | 110 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,24 |
| 2.7.2. | Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk) | 78.2 | 73.5 | 73.3 | 61.72 | 61.72 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,24 |
| 2.9. | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | |
| 2.9.1. | Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.2. | Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS | 0 | 0 | 0 | 40% | 45% | 50% | 55% | 80% | 90% | 100% | 100% |
| 2.10. | Upaya Kesehatan Masyarakat : | | | | | | | | | | | |
| 2.10.1. | Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 2.11. | Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 74.5 | 77.39 | 78 | 79 | 80.16 | 80.25 | 80.5 | 80.75 | 81 | 81 | 81 |
| 2.11.1 | Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%) | 0 | 0 | 0 | 2% | 3% | 20% | 30% | 40% | 50% | 53% | 53% |
| 2.11.2. | Cakupan Desa Siaga Aktif (%) | 0 | 0 | 0 | 2% | 3% | 20% | 30% | 40% | 50% | 53% | 53% |
| 2.12. | Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12.1. | Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%) | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.12.2. | AFP rate per 10.000 penduduk < 15 tahun | 2.13 | 1.46 | 6.8 | 1.5 | 2.5 | | | | | | |
| 2.12.3. | Penemuan penderita Pneumonia balita (%) | 48.9 | 40.2 | 45.2 | 53.8 | 45.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12.4. | Penemuan pasien baru TB BTA positif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12.5. | Penderita DBD yang ditangani (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12.6. | Penemuan penderita Diare (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.43 | 0.43 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 2.12.7. | Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.43 | 0.43 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.6 |
| 2.13. | Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | | | | | | | | | | | |
| 2.13.1. | Angka usia harapan hidup (tahun) | 106.7 | 132 | 98.91 | 43.7 | 99.89 | 93.83 | 90.83 | 87.83 | 85 | | |
| 2.13.2. | Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH | 4.27 | 2.83 | 2.54 | 4.09 | 2.99 | 3.74 | 3.37 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 2.13.3. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH | 5.1 | 5.2 | 3.1 | 2.8 | 4.7 | 3.62 | | | | | |
| 2.13.4. | Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran) | 96.14 | 90.34 | 93.28 | 95.3 | 90.36 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 2.13.5. | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%) | 60.34 | 54.93 | 60.62 | 73.23 | 74.21 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.13.6. | Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%) | 99.09 | 92.03 | 95.7 | 99.72 | 94.24 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 | 97 |
| 2.13.7. | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang | 97.77 | 90.44 | 99.97 | 95.66 | 93.76 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| 2.13.8. | Cakupan pelayanan ibu nifas (%) | 65.43 | 50.73 | 80.76 | 87.77 | 71.98 | 72.5 | 73 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 2.13.9. | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%) | 105,87 | 96,42 | 96,77 | 97,88 | 96,57 | 96,62 | 96,64 | 96,65 | 96,67 | 96,97 | 96,97 |
| 2.13.10. | Cakupan kunjungan bayi (%) | 105,87 | 96,42 | 96,77 | 97,88 | 96,57 | 96,62 | 96,64 | 96,65 | 96,67 | 96,97 | 96,97 |
| 2.14. | Perbaikan Gizi Masyarakat | 3.79 | 3.27 | 3.85 | 3.01 | 2.97 | 12.3 | 12.1 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 2.14.1. | Persentase Balita gizi kurang (%) | 13.1 | 9.96 | 8.69 | 8.39 | 10.53 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.14.2. | Prevalensi Balita Stunting (%) | 76.29 | 78.06 | 80.77 | 84.44 | 86.02 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.14.3. | Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%) | 0.21 | 0.11 | 0.42 | 0.16 | 0.21 | 12.3 | 12.1 | 11 | 10 | | |
| 2.14.4. | Persentase Balita Gizi Buruk (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14.5. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) | 61.34 | 64.54 | 66.69 | 68.2 | 70.29 | 44 | 47 | 50 | 50 | | |
| 2.14.6. | Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14.7. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.14.8. | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2.14.9. | Rasio Posyandu per 1.000 balita | 90,91 | 92,92 | 93,29 | 94,35 | 95,91 | 95,92 | 99,29 | 99,35 | 99,45 | 100 | 100 |
| 2.15. | Pengembangan Lingkungan Sehat | 99,88 | 99,88 | 99,89 | 99,92 | 99,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15.1. | Persentase Keluarga memiliki Jamban (%) | 90,91 | 92,92 | 93,29 | 94,35 | 95,91 | 95,92 | 99,29 | 99,35 | 99,45 | 100 | 100 |
| 2.15.2. | Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%) | 99,88 | 99,88 | 99,89 | 99,92 | 99,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.16 | Persentase Sarana dan Prasarana sesuai standar kelas rumah sakit | - | - | - | - | 80% | 82% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% |
| 3. | Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Rasio penduduk yang bekerja | 54.53 | 54.49 | 56.18 | 53.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Perumahan (Bidang Praswil) | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | pengembangan perumahan : | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Rumah layak huni (%) | 74.67% | 75.36% | 76.05% | 76.74% | 77.43% | 79,50% | 80,19% | 80,88% | 81,57% | 82,26% | 82,26% |
| 4.3. | Lingkungan sehat perumahan | | | | | | 91.90% | 92.90% | 94.40% | 96.50% | 97.20% | 97.20% |
| 4.3.1. | Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%) | 75,80% | 73,00% | 76,80% | 76,29% | 76,29% | 91,90% | 92,90% | 94,40% | 96,50% | 97,20% | 97,20% |
| 4.3.2. | Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi (%) | 88,00% | 86,00% | 86,96% | 82,77% | 75,62% | 87,43% | 90,43% | 93,43% | 96,43% | 100% | 100% |
| 5. | Penataan Ruang (Bidang Praswil) : | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Perencanaan Tata Ruang : | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah) | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.2. | Terlaksananya per jaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang. | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5.2. | Pemanfaatan Ruang: | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya | - | - | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| 6. | Perencanaan : | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan : | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Hasil Evaluasi RKPD (dokumen) | - | - | - | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6.1.2. | Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen) | - | - | Ada | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Perencanaan Pembangunan Daerah : | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen) | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.2.2 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen) | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.2.3 | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen) | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 6.2.4 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7. | Perhubungan : | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan : | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Jumlah Terminal Bis | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7.2. | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ : | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%) | 87,0% | 87,2% | 87,4% | 88,6% | 89,9% | 92,0% | 93,8% | 95,2% | 96,8% | 98,4% | 98,4% |
| 7.3. | Peningkatan Pelayanan Angkutan : | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 372750 | 1552142 | 1307679 | 1279597 | 695433 | 920000 | 966000 | 1014300 | 1065015 | 1118265.75 | 1118265.75 |
| 7.3.2. | Rasio ijin trayek per jumlah penduduk | 0,0000075 | 0,0000071 | 0,0000051 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 |
| 7.3.3. | Persentase Angkutan darat terhadap penumpang (%) | 44.5% | 37.0% | 59.0% | 64.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% | 37.0% |
| 7.4. | Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor : | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KTR) | 46 menit | 46 menit | 46 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit |
| 7.4.2. | Jumlah uji kir angkutan umum (buah) | 7138 | 10500 | 12285 | 13689 | 13655 | 15055 | 15808 | 16598 | 17428 | 18300 | 18300 |
| 8. | Lingkungan Hidup (Bidang Praswil) : | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup : | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|----------|----------|---------|----------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 8.1.2. | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1.3. | Pencemaran status mutu air (%) | 73.33 | 92.86 | 79.22 | 76.25 | 75.00 | 77.00 | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| 8.1.4. | Penegakan hukum lingkungan (%) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.2. | Peningkatan Pengendalian Polusi : | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.3. | Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam : | | | | | | | | | | | |
| 8.3.2. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.3.3. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : | | | | | | | | | | | |
| 8.4.1. | Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha) | 8,47 Ha | 8,54 Ha | 10,58 Ha | 12,20 Ha | 12,30 Ha | 12,65 Ha | 12,72 Ha | 13,08 Ha | 14,03Ha | 14,50 Ha | 14,50 Ha |
| 8.5. | Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup : | | | | | | | | | | | |
| 8.5.1. | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | - | - | - | 42.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.6. | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan : | | | | | | | | | | | |
| 8.6.1. | Prosentase Cakupan pelayanan sampah | 25.00% | 25.00% | 27.00% | 26.00% | 30.00% | 37.00% | 42.00% | 47.00% | 52.00% | 57.00% | 57.00% |
| 8.6.2. | Prosentase Sampah yang Tertangani | 72,9 | 89,3 | 97,3 | 97,9 | 78,5 | 89,8 | 91.1 | 92.1 | 93.3 | 94.4 | 94.4 |
| 9. | Pertanahan : | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah : | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | - | 148115 bidang | 161592 bidang | 175626 bidang | 189148 bidang | | | | | | |
| 9.2. | Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan : | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 9.2.1. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 10. | Kependudukan Dan Catatan Sipil | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Penataan administrasi kependudukan : | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | Kepemilikan KTP (%) | 99% | 99% | 98% | 99% | 90.02% | 92% | 94% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| 10.1.2. | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%) | - | 97% | 98% | 99% | 100% | | | | | | |
| 10.1.3. | Kepemilikan Kartu Keluarga (%) | 99.43% | | 98% | 99% | 100% | | | | | | |
| 10.1.4. | Rasio bayi berakte kelahiran | 70% | 86% | 90% | 92% | 84.33% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% |
| 10.1.5. | Rasio pasangan berakte nikah (%) | 74% | 77% | 60% | 10% | 80% | 85% | 90% | 93% | 89% | 95% | 95% |
| 10.1.6. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 99% | 99% | 98% | 99% | 90% | 94% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| 11. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang) | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan : | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Jumlah organisasi perempuan aktif (%) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11.2. | penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak : | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 11.2.2. | Keterampilan perencanaan SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 11.2.3. | Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok) | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11.2.4. | Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 11.3. | keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak : | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah) | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 11.3.2. | Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah) | 6 | 57 | 67 | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 11.4. | Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak : | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1. | Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit) | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 35 | 40 | 50 | 55 | 63 | 63 |
| 11.4.2. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) | 0.45% | 0.48% | 0.50% | | | | | | | | |
| 11.4.3. | Rasio KDRT | 0.011% | 0.023% | 0.012% | 0.015% | 0.012% | | | | | | |
| 11.4.4. | Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) | 0.44% | 0.42% | 0.43% | 0.31% | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|---|-----------------|-------|-------|-------|---|----------------|--------|--------|-------|-------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 11.4.5. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.4.6 | IPG | 74.31 | 75.27 | - | 75.30 | 75.47 | 75.48 | 75.49 | 75.50 | 75.51 | 75.52 | 75.52 |
| 12. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Keluarga Berencana : | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang) | 2,14 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,1 | 2,07 | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 2,00 |
| 12.1.2. | Rasio akseptor KB (%) | 85,26 | 85,31 | 85,32 | 84,31 | 78,64 | 78,76 | 78,82 | 78,86 | 78,90 | 78,94 | 78,94 |
| 12.1.3. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| 12.1.4. | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) | 82,21 | 85,49 | 85,57 | 88,91 | 75,05 | 75,26 | 75,52 | 76,03 | 76,40 | 77,24 | 77,24 |
| 12.1.5. | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%) | 1,75 | 1,79 | 1,67 | 1,86 | 1,52 | 2,39 | 2,35 | 2,3 | 2,25 | 2,15 | 2,15 |
| 12.1.6. | Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan | 2,00 | 1,09 | 1,07 | 1,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.1.7. | Ratio PembantuPembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.1.8. | Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.1.9. | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan setiap tahun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2. | Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU : | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1. | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) | 92,56 | 90,89 | 88,28 | 88,55 | 91,31 | 89,16 | 89,23 | 89,30 | 89,36 | 89,43 | 89,43 |
| 12.2.2. | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%) | 79,63 | 85,46 | 87,55 | 84,28 | 94,83 | 75,73 | 75,77 | 75,81 | 75,84 | 75,87 | 75,87 |
| 12.3. | Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR : | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1. | Jumlah kelompok PIK KRR aktif (unit) | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 19 | 21 | 87 |
| 12.3.2. | Cakupan tenaga terlatih aktif pada kelompok PIK KRR (Pelatih Sebaya dan Konselor Sebaya) | 10 | 28 | 15 | 18 | 78 | 24 | 56 | 68 | 76 | 80 | 320 |
| 13. | Sosial (Bidang Kersos) : | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya : | | | | | | | | | | | |
| 13.1.1. | Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 100% | 75% | 81,25% | 81,25% | 87,5% | 100% | 100% |
| 13.1.2. | Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 87,5% | 100% | 75% | 81,25% | 81,25% | 87,5% | 100% | 100% |
| 13.2. | Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial : | | | | | | | | | | | |
| 13.2.1. | Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13.2.2. | Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13.2.3. | Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13.2.4. | Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13.2.5. | Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13.3. | Pembinaan anak terlanjar : | | | | | | | | | | | |
| 13.4. | Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1. | Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 87,5% | 87,5% | 100% | 100% | 100% |
| 13.5. | Pembinaan panti asuhan/ panti jompo : | | | | | | | | | | | |
| 13.5.1. | Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 13.6. | Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) : | 758 | 2082 | 1585 | 1899 | 2004 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 100% |
| 13.6.1. | Jumlah Pengemis yang terbina (jiwa) | 556 | 410 | 430 | 346 | 239 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13.7. | Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial : | | | | | | | | | | | |
| 14. | Ketenagakerjaan (Bidang Kersos) | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja : | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.1.2. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.1.3. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.2. | Peningkatan Kesempatan Kerja : | | | | | | | | | | | |
| 14.2.3. | Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang) | 1583 | 1223 | 451 | 653 | 401 | 600 | 650 | 675 | 700 | 725 | #REF! |
| 14.3. | Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan : | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1. | Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek (orang) | - | - | - | 19100 | 13102 | | | | | | |
| 14.3.4. | Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 17 | 13 | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 14.3.5. | Persentase perusahaan menerapkan Keselamatan dan perlindungan (%) | 100 | 100 | 92,57 | 89,22 | 65,45 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14.3.6. | Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%) | 100 | 100 | 86,11 | 76,47 | 83,24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15. | Koperasi Dan Usaha Kecil menengah : | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah : | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | Jumlah orang yang dilatih pelatihan kewirausahaan | 40 UKM | 40 UKM | 40 UKM | 80 Orang | - | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 30 Orang |
| 15.1.2. | Jumlah koperasi dan UMKM bermitra (unit) | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15.2. | Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah : | | | | | | | | | | | |
| 15.2.1. | Jumlah UMKM yang telah memiliki ijin usaha (unit) | 980 | 1,053 | 377 | 1,163 | 1,108 | 1,218 | 1,273 | 1,328 | 1,383 | 1,438 | 1,438 |
| 15.2.2. | Jumlah UMKM yang mampu mengakses permodalan usaha (unit) | 61 | 92 | 236 | 225 | 230 | 240 | 242 | 246 | 248 | 250 | 250 |
| 15.3. | Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif : | | | | | | | | | | | |
| 15.3.1. | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | 14,754 | 15,862 | 17,162 | 18,366 | 19,173 | 21,327 | 22,404 | 23,481 | 24,558 | 25,635 | 25,635 |
| 15.3.2. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UMKM (%) | 84,74 | 85,95 | 89,18 | 66,83 | 81,99 | 83,05 | 83,65 | 83,90 | 84,35 | 85,10 | 85,10 |
| 15.4. | Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi : | | | | | | | | | | | |
| 15.4.1. | Persentase koperasi aktif (%) | 88,87 | 90,00 | 78,00 | 78,92 | 81,51 | 81 koperasi | 81 koperasi | 81 koperasi | 81 koperasi | 81 koperasi | 81 koperasi |
| 15.4.2. | Persentase koperasi sehat (%) | 14,81 (40) | 14,81 (40) | 18,51 (50) | 14,81 (40) | 37,03 (100) | 60 koperasi | 60 koperasi | 60 koperasi | 60 koperasi | 60 koperasi | 60 koperasi |
| 15.4.3. | Jumlah koperasi yang telah dilatih prinsip-prinsip koperasi (koperasi) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 16. | Penanaman Modal (Bidang Ekonomi) : | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi : | | | | | | | | | | | |
| 16.1.1. | Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 10 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 10 kali |
| 16.1.2. | Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan | 25 buku | 15 buku | 15 buku | 15 buku | 85 buku | 15 buku | 15 buku | 15 buku | 15 buku | 15 buku | 75 buku |
| 16.2. | Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi : | | | | | | | | | | | |
| 16.2.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor) | 689 | 777 | 785 | 1,459 | 5,739 | 2,231 | 2,357 | 2,496 | 2,649 | 2,817 | 12,550 |
| 16.2.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah) | 3,173,814,437,239.00 | 7,180,810,126,088.00 | 6,147,499,450,989.00 | 2,618,136,988,815.00 | 6,329,353,227,774.00 | 2,419,842,370.05 | 2,871,927,176.75 | 3,359,197,642.05 | 3,899,203,310.35 | 4,493,089,023.15 | 17,043,259,522.35 |
| 16.2.3. | Jumlah tenaga kerja terserap | 4.33 | 8.73 | 21.68 | 6.49 | 6.34 | 9,514 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 17. | Kebudayaan (Bidang Kersos) : | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Pengembangan Nilai Budaya : | | | | | | | | | | | |
| 17.1.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 5 kali |
| 17.2. | Pengelolaan Kekayaan Budaya : | | | | | | | | | | | |
| 17.2.1. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | - | - | 52 situs | 52 situs | 52 situs | 52 situs | 54 situs | 54 situs | 56 situs | 58 situs | 58 situs |
| 17.3. | Pengelolaan Keragaman Budaya : | | | | | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 17.3.1. | Jumlah Kelompok Seni | 2334 sekaa/klp | 2334 sekaa/klp | 2334 sekaa/klp | 2334 sekaa/klp | 2334 sekaa/klp | 2353 sekaa/klp | 2359 sekaa/klp | 2365 sekaa/klp | 2371 sekaa/klp | 2378 sekaa/klp | 2378 sekaa/klp |
| 17.3.3. | Cakupan Kajian Seni | 46 sekaa | 46 sekaa | 58 sekaa | 70 sekaa | 86 sekaa | 104 sekaa | 110 sekaa | 114 sekaa | 118 sekaa | 123 sekaa | 123 sekaa |
| 17.3.4. | Cakupan Fasilitas Seni | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat | 700 tempat |
| 17.3.5. | Cakupan Gelar Seni | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 25 Kegiatan |
| 17.3.6. | Misi Kesenian | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 2 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 5 Kegiatan |
| 17.3.7. | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 15 orang | 75 orang |
| 17.3.8. | Cakupan Organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi | 3 organisasi |
| 18. | Pemuda Dan Olah Raga : | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda : | | | | | | | | | | | |
| 18.1.1. | Jumlah organisasi pemuda | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18.1.2. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 18.4. | Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga : | | | | | | | | | | | |
| 18.4.1. | Jumlah organisasi olahraga | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 18.4.2. | Jumlah kegiatan olahraga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18.4.3. | Jumlah prestasi olahraga | 11 Cabor | 11 Cabor | 11 Cabor | 11 Cabor | 11 Cabor | 16 Cabor | 16 Cabor | 16 Cabor | 16 Cabor | 16 Cabor | 16 Cabor |
| 18.5. | Peningkatan sarana dan prasarana olah raga : | | | | | | | | | | | |
| 18.5.1. | Gelanggan / balai remaja (selain milik swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.5.2. | Jumlah Lapangan olahraga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19. | Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Bidang Stamonev): | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang) | 60 | 46 | 40 | 40 | 40 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 375 |
| 19.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah (orang) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19.4. | Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%) | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19.5. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 33.01 | 33.18 | 33.47 | 31.71 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 155.9 |
| 19.6. | Jumlah kasus Penegakan PERDA | 1712 pelanggaran | 1660 pelanggaran | 1608 pelanggaran | 1560 pelanggaran | 1500 pelanggaran | 1000 pelanggaran | 900 pelanggaran | 800 pelanggaran | 700 pelanggaran | 600 pelanggaran | 600 pelanggaran |
| 19.7. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| 20. | Otonomi Daerah : | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | 16.66% | 16.66% | 33.33% | 67.00% | 67.00% | 67.00% | 83.33% | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 20.2. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) | 80.40% | 88.14% | 88.32% | 96.33% | 91.95% | 92.05% | 92.10% | 92.15% | 92.20% | 92.25% | 92.25% |
| 20.3. | Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan | 2 | 3 | 5 | 7 | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 20.4. | Masyarakat (unit) | 22 Desa | 32 Desa | 42 Desa | 54 Desa | 62 Desa | 62 Desa | 62 Desa | 62 Desa | 62 Desa | 62 Desa | 62 Desa |
| 20.7. | Persentase SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%) | | | | 0.056603774 | 0.377358491 | 0.679245283 | 0.849056604 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20.8. | Status audit Keuangan BPK | WTP | WTP | OTW | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 20.9. | Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 20.10. | Tersusunnya LKJP Bupati | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 20.11. | Tersusunnya LPPD Bupati | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku | 70 buku |
| 20.12. | Persentase Desa tertib administrasi ADD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20.13. | Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%) | 100 | 98 | 97 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 20.14. | Inteprestasi evaluasi AKIP Kabupaten | C | CC | CC | B | BB | BB | BB | BB | BB | A | A |
| 20.16. | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (trilyun rupiah) | 1406 | 1868 | 2279 | 2720 | 2938 | 3413 | 3695 | 3978 | 4261 | 4544 | 5000 |
| 21. | Ketahanan Pangan : | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Peningkatan Ketahanan Pangan : | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1. | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) | 68,95 | 62,92 | 49,12 | 41,03 | 33,24 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 21.1.2. | Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) | 2246,00 | 2145,00 | 2058,00 | 2160,00 | 2093,00 | 210,00 | 2150,00 | 2200,00 | 2225,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| 21.1.3. | Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 40,96 | 42,28 | 38,66 | 46,03 | 45,58 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 |
| 21.1.4. | Penguatan Cadangan Pangan (%) | 68.45 | 62.96 | 49.12 | 41.03 | 33.24 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 21.1.5. | Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) | 93.88 | 95.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.6. | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) | 0 | 0 | 100 | 100 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.7. | Stor Pola Pangan Harapan (SPPH) | 0 | 0 | 78.16 | 95.91 | 51 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 | 98.5 |
| 21.1.8. | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%) | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.1.10. | Regulasi ketahanan pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21.1.11. | Ketersediaan pangan utama (%) | 68.95 | 62.92 | 49.12 | 41.03 | 33.24 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| 21.1.12. | Konsumsi Energi Per Kapita (kcal/kap/hr) | 0 | 0 | 2115 | 2167 | 2067 | 2125 | 2150 | 2175 | 2200 | 2225 | 2225 |
| 21.1.13. | Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 0 | 0 | 65 | 76.1 | 66.88 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 80 |
| 22. | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bidang Litbang): | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa |
| 22.2. | Tersusunnya RPJMDes | 43 desa | 43 desa | 43 desa | 43 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa |
| 22.3. | Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa | 12 desa/kel. | 24 desa/kel. | 37 desa/kel. | 47 desa/kel. | 52 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. |
| 22.4. | Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan | 12 desa/kel. | 24 desa/kel. | 37 desa/kel. | 40 desa/kel. | 42 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. | 62 desa/kel. |
| 22.5. | Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22.6. | Meningkatnya kualitas pembangunan desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa | 46 Desa |
| 22.7. | Meningkatnya LKM berprestasi | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel | 4 Desa, 1 Kel |
| 22.8. | Terbangunnya infrastruktur desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa |
| 22.9. | Terbangunnya kantor desa yang layak | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa |
| 22.10. | Terbentuknya BUMDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 BUMDesa | 13 BUMDesa | 10 BUMDesa | 8 BUMDesa | 6 BUMDesa | 9 BUMDesa | 46 BUMDesa |
| 23. | Statistik (Bidang Stamonev): | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Buku "Kabupaten dalam Angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 23.2. | Buku "PDRB kabupaten" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 23.3. | Indeks Harga Konsumen dan Inflasi | 2.33 | 3.59 | 7.67 | 7.31 | 2.7 | | | | | | |
| 23.4. | Sistem Informasi Profil Daerah | | | | | | | | | | | |
| 23.5. | Buku "Kecamatan dalam Angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 24. | Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil): | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa : | | | | | | | | | | | |
| 24.1.1. | Jumlah Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun) | 1196 adv | 1646 adv | 2064 adv | 2472 adv | 3036 adv | 3600 adv | 3650 adv | 3700 adv | 3750 adv | 3800 adv | 18500 adv |
| 24.1.2. | Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari) | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari | rata-rata 2 kegiatan/hari |
| 24.2. | Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi : | | | | | | | | | | | |
| 24.3. | Kerjasama informasi dan media massa : | | | | | | | | | | | |
| 24.3.1. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24.3.2. | Jumlah surat kabar nasional/lokal (media) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 24.3.3. | Jumlah Web site milik pemerintah daerah | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 25. | Perpustakaan (Bidang Litbang) : | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan: | | | | | | | | | | | |
| 25.1.1. | Jumlah perpustakaan | 336 | 336 | 428 | 440 | 438 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 25.1.2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 817 | 1024 | 4621 | 3507 | 1396 | 5100 | 5600 | 6200 | 6800 | 7500 | 31200 |
| 25.1.3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 31118 | 34579 | 43684 | 50043 | 52633 | 65819 | 69969 | 74269 | 78769 | 83469 | 83469 |
| 26. | Pertanian : | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Produktivitas Padi | 42.78 | 49.66 | 56.49 | 57.27 | 36.19 | 47.4 | 47.41 | 47.42 | 47.43 | 47.44 | 47.44 |
| 26.2. | Produktivitas Jagung | 12.93 | 12.53 | 13.65 | 14.48 | 15.12 | 15.10 | 15.15 | 15.18 | 15.20 | 15.20 | 15.2 |
| 26.3. | Produktivitas Kedelai | 18.50 | 14.88 | 12.30 | 12.86 | 12.76 | 13.32 | 13.33 | 13.35 | 13.38 | 13.40 | 13.4 |
| 26.4. | Produktivitas K.Tanah | 10.00 | - | 8.57 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 26.5. | Produktivitas K.Hijau | 209.84 | 124.78 | 213.37 | 218.46 | 243.51 | 153.55 | 153.56 | 153.57 | 153.6 | 153.6 | 153.6 |
| 26.6. | Produktivitas Ubi Kayu | 155.31 | 181.79 | 186.19 | 240.35 | 174.76 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 154.5 |
| 26.7. | Produktivitas Ubi jalar | 235 | 228 | 227 | 226 | 362 | 398 | 414 | 430 | 447 | 465 | 2154 |
| 26.8. | Produksi Kakao | 1954 | 2149 | 1977 | 1977 | 2167 | 2388 | 2627 | 2685 | 2792 | 3071 | 13563 |
| 26.9. | Produksi kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10. | Produksi tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.11. | Produksi kapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.12. | Produksi kemiri | 17 | 22 | 23 | 23 | 29 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 172.5 |
| 26.13. | Produksi cengkeh | 30 | 32 | 61 | 77 | 93 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 26.14. | Cakupan bina kelompok petani (kelompok) | 30 klp | 33 klp | 36 klp | 39 klp | 42 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 48 klp |
| 26.15. | Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.16. | Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok) | - | 1 | 4 | 17 | - | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26.17. | Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%) | | | | | | | | | | | |
| 26.18. | Jumlah populasi sapi | 48,049 | 49,051 | 38,128 | 37,862 | 30,771 | 31,079 | 31,235 | 31,391 | 31,548 | 31,706 | 31,706 |
| 26.19. | Jumlah populasi kambing | 897 | 620 | 720 | 807 | 893 | 902 | 906 | 911 | 916 | 921 | 921 |
| 26.20. | Jumlah populasi itik | - | - | 92,173 | 97,332 | 90,971 | 91,883 | 92,342 | 92,804 | 93,268 | 93,734 | 93,734 |
| 26.21. | Jumlah populasi ayam | 1,361,246 | 1,092,246 | 1,102,948 | 1,197,465 | 1,208,581 | 1,220,697 | 1,226,801 | 1,232,935 | 1,239,099 | 1,245,294 | 1,245,294 |
| 26.25. | Angka Kesakitan Ternak | 6,500 | 6,500 | 7,500 | 15,000 | 6,750 | 6,750 | 6,500 | 6,300 | 6,000 | 5,000 | 37,550 |
| 26.26. | Jumlah Ternak yang diberikan vaksin | 21,000 | 21,000 | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | 45,000 | 47,000 | 50,000 | 258,000 |
| 26.27. | Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak | 6,750 | 6,500 | 7,500 | 15,000 | 12,000 | 6,750 | 6,500 | 6,300 | 6,000 | 5,000 | 37,550 |
| 27. | Kehutanan : | | | | | | | | | | | |
| 27.2. | Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Ha) | 1,683.66 | 642.68 | 1,500.50 | 599.53 | 33.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 27.3. | Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Unit) | 331,496.00 | 127,436.00 | 297,100.00 | 112,575.00 | 2,200.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 200,000 |
| 27.6. | Tertanamnya bibit tanaman kehutanan dalam rangka penghijauan lingkungan | 15044 | 23150 | 525 | 4000 | 1000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 120,000 |
| 27.9. | Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27.10. | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang dampak kebakaran | 830 Orang | 831 Orang | 832 Orang | 833 Orang | 3.320 Orang | 2.616 Orang | 2.616 Orang | 2.616 Orang | 2.616 Orang | 13.080 Orang | 13.080 Orang |
| 28. | Pariwisata : | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Kunjungan wisata (orang) | 2,756,579 | 2,892,019 | 3,148,443 | 3,681,342 | 3,934,384 | 4,200,000 | 4,410,000 | 4,630,500 | 4,862,025 | 5,105,126 | 5,105,126 |
| 29. | Perikanan Kelautan: | | | | | | | | | | | |
| 29.1. | Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 4,551.40 | 4,632.40 | 4,765.10 | 6,112.50 | 6,173.90 | 6,423.33 | 6,551.79 | 6,682.83 | 6,816.48 | 6,952.81 | 33,427.24 |
| 29.2. | Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB) | 41 | 43 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 29.3. | Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 33,834.90 | 43,931.60 | 44,334.20 | 507.10 | 586.80 | 598.59 | 604.58 | 610.63 | 616.73 | 622.90 | 3,053.43 |
| 29.4. | Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat sarana Produksi Budidaya (Pokdakan) | 24 | 11 | 16 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 29.5. | Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton) | 3,420 | 3,780 | 4,140 | 4,500 | 4,860 | 5,056 | 5,157 | 5,260 | 5,365 | 5,472 | 26,310.00 |
| 29.6. | Jumlah Poklamsar yang berkembang (kelompok) | 7 | 7 | 13 | 18 | 23 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 |
| 29.7. | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) aktif | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| 29.8. | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Unit) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 30. | Perdagangan : | | | | | | | | | | | |
| 30.3. | Data Pengawasan UTTP | - | - | - | - | 3500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2400 | 2400 |
| 30.4.1. | Unit Usaha | 732 | 766 | 284 | 877 | 871 | 871 | 910 | 949 | 988 | 1027 | 1027 |
| 30.4.2. | Tenaga Kerja | 3660 | 3830 | 1420 | 3560 | 4355 | 4330 | 4500 | 4670 | 4840 | 5010 | 5010 |
| 30.4.3. | Modal | 85,104,534,660 | 524,853,101,211 | 252,413,559,153 | 161,170,291,869 | 117,060,303,908 | 228,120,358,160 | 239,526,376,068 | 250,932,393,976 | 262,338,411,884 | 273,744,429,792 | 273,744,429,792 |
| 30.5.1. | Unit Usaha | 141 | 141 | 39 | 209 | 197 | 215 | 233 | 251 | 259 | 287 | 287 |
| 30.5.2. | Tenaga Kerja | 1410 | 2115 | 702 | 5635 | 3940 | 4085 | 4180 | 4267 | 4304 | 4592 | 4592 |
| 30.5.3. | Modal | 666,416,944,408 | 222,955,729,211 | 216,400,000,000 | 239,892,005,840 | 294,911,615,703 | 344,521,021,984 | 360,926,784,936 | 377,332,547,888 | 393,738,310,840 | 410,144,073,792 | 410,144,073,792 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 30.6.1. | Unit Usaha | 10 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 30.6.2. | Tenaga Kerja | 200 | 160 | 50 | 37 | 150 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 397 |
| 30.6.3. | Modal | 538,659,294,408 | 100,991,986,327 | 170,000,000,000 | 397,646,017,794 | 124,747,132,665 | 158,784,759,216 | 198,480,949,020 | 238,177,138,824 | 277,873,328,628 | 17,569,518,432 | 17569518432 |
| 30.7. | Kontribusi Perdagangan dalam PDRB (%) | 7,39 | 7,28 | 7,42 | 7,56 | 7,60 | 7,63 | 7,65 | 7,67 | 7,69 | 7,71 | 7,71 |
| 30.8. | Perdagangan | 883 | 915 | 325 | 1102 | 1071 | 1770 | 1864 | 1214 | 1244 | 1300 | 1300 |
| 30.9. | Dagang Besar | 10 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 30.10. | Dagang Menengah | 141 | 141 | 39 | 377 | 197 | 758 | 785 | 200 | 210 | 220 | 220 |
| 30.11. | Dagang Kecil | 732 | 766 | 284 | 712 | 871 | 1005 | 1072 | 1139 | 1205 | 1073 | 1073 |
| 30.12. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Perindustrian : | | | | | | | | | | | |
| 31.1. | Perkembangan IKM | 54 | 56 | 58 | 28 | 29 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 53 |
| 31.2. | Jumlah Unit Usaha (unit) | 1055 | 1111 | 1148 | 1176 | 1205 | 132753 | 133025 | 1313 | 1340 | 1367 | 1367 |
| 31.3. | Jumlah Tenaga Kerja (orang) | 11282 | 11690 | 12393 | 12665 | 12937 | 1154646110 | 1154646110 | 133297 | 133569 | 133841 | 133841 |
| 31.4. | Nilai Produksi (000) | 959049793 | 1001948167 | 1072840966 | 1093292252 | 1113743538 | 1154646110 | 1154646116 | 11175097396 | 1195548682 | 1215999968 | 1215999968 |
| 31.5. | Nilai Investasi (000) | 4699752 | 4890528 | 4959392 | 492409765 | 133511884 | 143321310 | 148226023 | 153130736 | 158035449 | 162940162 | 162940162 |
| 31.6. | Sentra IK | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 31.7. | KUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.8. | Kontribusi Perindustrian dalam PDRB | 4,59 | 4,47 | 4,53 | 4,67 | 4,72 | 4,81 | 4,84 | 4,87 | 4,91 | 4,95 | 4,95 |
| 31.9. | Industri | 815 | 859 | 904 | 297 | 948 | 978 | 1065 | 1152 | 1239 | 1326 | 1326 |
| 31.10. | Industri Besar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.11. | Industri Menengah | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 31.12. | Industri Kecil | 802 | 844 | 886 | 909 | 929 | 961 | 1048 | 1135 | 1222 | 1309 | 1309 |
| | Fokus Seni Budaya | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah klub olahraga | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Jumlah gedung olahraga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | |
| | Fokus Layanan Urusan Wajib | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pendidikan : | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Pendidikan dasar: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Angka partisipasi sekolah | 108.07 | 115.87 | 111.37 | 113.13 | 105.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah | 49 | 52 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1.1.3. | Rasio guru/murid | 58 | 57 | 57 | 59 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.1.4. | Rasio guru/murid per kelas rata-rata | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 |
| 1.2. | Pendidikan menengah: | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Angka partisipasi sekolah | 117.54 | 133.5 | 118.19 | 123.19 | 122.35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2. | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.2.3. | Rasio guru terhadap murid | 67 | 68 | 65 | 66 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| 1.2.4. | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 1.3. | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 269 | 271 | 272 | 274 | 275 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| 1.3.2. | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 85 | 87 | 87 | 91 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.4. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 320 | 320 | 320 | 320 | 338 | 350 | 365 | 370 | 380 | 390 | 390 |
| 1.5. | Angka Putus Sekolah: | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.5.2. | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Angka Kelulusan: | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 100 | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.3. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | 100 | 100 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.4. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 100 | 94.6 | 97.91 | 96.93 | 99.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.5. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 89.27 | 94.89 | 98.44 | 103.49 | 95.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.6. | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 61.04 | 62.56 | 80.32 | 81.61 | 91.81 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Kesehatan : | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Rasio posyandu per satuan balita | 80.8 | 53.2 | 59 | 60 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50 |
| 2.2. | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.9 | 1,23 | 1,33 | 1,44 | 1,45 | 1,71 | 1,86 | 1,86 |
| 2.3. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0.07 | 0.069 | 0.1 | 0.116 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 2.4. | Rasio dokter per satuan penduduk | 36.5 | 26.2 | 55.3 | 110 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 1,24 |
| 2.5. | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 78.2 | 73.5 | 73.3 | 61.72 | 0,70 | 0,84 | 0,93 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,24 |
| 2.6. | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 60.3 | 54.9 | 80.6 | 72.99 | 74,41 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| 2.7. | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 99.09 | 92 | 95.7 | 99.72 | 98,68 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| 2.8. | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive | 8.49 | 43 | 45.2 | 51.8 | 45.6 | 59 | 61.5 | 66 | 66.5 | 69 | 69 |
| 2.11. | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.12. | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.13. | Cakupan kunjungan bayi | 105.87 | 104.3 | 96.77 | 93.86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14. | Jumlah puskesmas | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 2.15. | Jumlah pembantu puskesmas | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3. | Pekerjaan Umum : | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 62.79% | 84.22% | 89.07% | 91.39% | 91.39% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.2. | Rasio Jaringan Irigasi | 57 | 57.1 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 3.3. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 88,00% | 86,00% | 86,96% | 82,77% | 75,62% | 87,43% | 90,43% | 93,43% | 96,43% | 100% | 100% |
| 3.5. | Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3.7. | Rasio rumah layak huni | 81,136 | 81,886 | 82,636 | 83,386 | 84,136 | 86,386 | 87,136 | 87,886 | 88,636 | 89,386 | 89,386 |
| 3.8. | Rasio permukiman layak huni | 58.83% | 62.39% | 65.06% | 65.06% | 65.06% | 96.35% | 97.08% | 97.81% | 98.54% | 99.27% | 99.27% |
| 3.9. | Panjang jalan dilalui Roda 4 | 565,981 | 628,744 | 628,744 | 628,744 | | | | | | | |
| 3.10. | Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) | | | | | | | | | | | |
| 3.11. | Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 355,353 | 529,517 | 560,018 | 574,626 | 625,274 | 96.75% | 98.00% | 99.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.12. | Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | - | - | - | - | 259.7495 | 39.15% | 44.07% | 44.07% | 44.07% | 44.07% | 44.07% |
| 3.15. | Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | - | - | - | - | 259.7495 | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% | 45.12% |
| 3.16. | Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota | | | | | | | | | | | |
| 3.17. | Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 10,272.39 | 10,345.77 | 10,685.17 | 10,829.64 | 10860.59 | 96.45% | 97.50% | 98.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3.18. | Lingkungan Pemukiman | | | | | | | | | | | |
| 4. | Perumahan : | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Rumah tangga pengguna air bersih | 64,025.50 | 63,025.50 | 83,002.67 | 86,667.00 | 97,066.83 | 92,313,550 | 93,318,050 | 94,824,800 | 96,934,250 | 97,637,400 | 97,637,400 |
| 4.3. | Rumah tangga ber-Sanitasi | 86,519 | 868.580 | 89,035 | 105,154 | 105,154 | 87,823,435 | 90,836,935 | 93,850,435 | 96,863,935 | 100,450,000 | 100,450,000 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|---|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 4.5. | Rumah layak huni | 85,636 | 85,636 | 85,636 | 85,636 | 85,636 | 86,386 | 87,136 | 87,886 | 88,636 | 89,386 | 89,386 |
| 5. | Perencanaan Pembangunan : | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 5.4. | Penjabaran RPJMD kedalam RKPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Perhubungan : | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 372,750 | 1,552,142 | 1,307,679 | 1,279,597 | 695433 | 920000 | 966000 | 1,014,300 | 1,065,015 | 1,118,266 | 1,118,266 |
| 6.2. | Rasio ijin trayek | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,376 |
| 6.3. | Jumlah uji kir angkutan umum | 7,138 | 10,500 | 12,285 | 13,689 | 13655 | 15055 | 15808 | 16,598 | 17,428 | 18,300 | 18,300 |
| 6.4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.5. | Angkutan darat | 319322 | 308939 | 232568 | 461359 | 484426.95 | 560,785 | 588,824 | 618265.1847 | 649178.4439 | 681637.3661 | 715719.2344 |
| 6.6. | Kepemilikan KIR angkutan umum | 7,150 | 7,464 | 8,909 | 10,316 | 10145 | 11834 | 12781 | 13,803 | 14,907 | 16,100 | 16,100 |
| 6.7. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) | 46 menit | 46 menit | 46 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit | 48 menit |
| 6.8. | Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 6.9. | Pemasangan Rambu-rambu | 4861 | 4969 | 5088 | 5508 | 5553 | 6453 | 6753 | 7053 | 7353 | 7653 | 7953 |
| 7. | Lingkungan Hidup : | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Persentase penanganan sampah | 72.9 | 89.3 | 97.3 | 97.9 | | | | | | | |
| 7.2. | Persentase Penduduk berakses airminum | 75,80% | 73,00% | 76,80% | 76,29% | 76,29% | 91,90% | 92,90% | 94,40% | 96,50% | 97,20% | 97,20% |
| 7.3. | Persentase Luas pemukiman yang tertata | 67.24% | 71.32% | 75.44% | 80.29% | 85.15% | 89.03% | 90.97% | 92.91% | 94.86% | 96.80% | 96.80% |
| 7.4. | Pencemaran status mutu air | 73.33 | 92.86 | 79.22 | 76.25 | 75.00 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 7.5. | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air | | | | | | | | | | | |
| 7.6. | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.7. | Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
| 7.8. | Penegakan hukum lingkungan | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8. | Pertahanan : | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | - | 67.6 | 73.75 | 80.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | 18 | 22 | 24 | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Penyelesaian izin lokasi | 31.58% | 45.83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Kependudukan dan Catatan Sipil : | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Rasio penduduk berkTP per satuan penduduk | 99% | 99% | 98% | 99% | 90.02% | 92% | 94% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| 9.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | 70% | 86% | 90% | 92% | 84.33% | 85% | 87% | 89% | 90% | 92% | 92% |
| 9.3. | Rasio pasangan berakte nikah | 74% | 77% | 60% | 10% | 80% | 85% | 90% | 93% | 89% | 95% | 95% |
| 9.5. | Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk | 700 | 800 | 900 | 920 | | | | | | | |
| 9.6. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | | | | | | | | | | | |
| 9.7. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 99% | 99% | 98% | 99% | 90% | 94% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| 10. | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 44.69% | 45.12% | 44.31% | 46.56% | 48.81% | 51.06% | 53.31% | 55.56% | 57.81% | 60.06% | 62.31% |
| 10.2. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rasio KDRT | 0.5 | 0.071 | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.044 |
| 10.4. | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | | | | | | | | | | | |
| 10.5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | | | | | | | | | | | |
| 10.6. | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 6 Kasus | 13 Kasus | 12 Kasus | 6 Kasus | 6 Kasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7. | Persentase Penanganankasus KDRT yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11. | Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : | | | | | | | | | | | |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 11.1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,14 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,1 | 2,07 | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 2,00 | 2,00 |
| 11.2. | Rasio akseptor KB | 85,26 | 85,31 | 85,32 | 84,31 | 78,64 | 78,76 | 78,82 | 78,86 | 78,90 | 78,94 | 78,94 |
| 11.3. | Cakupan peserta KB aktif | 82,21% (65.885) | 85,46% (67.070) | 85,57% (67.145) | 88,91% (70.384) | 88,91% (70.384) | 89,02 (73623) | 89,13 (76862) | 89,24 (80101) | 89,35 (83340) | 89,46 (86579) | 89,57 (89818) |
| 12. | Ketenagakerjaan : | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Angka partisipasi angkatan kerja | 2.36 | 1.63 | 2.2 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 51 | 54 | 54 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 77.8 | 72.92 | 73.04 | 73.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4. | Pencari kerja yang ditempatkan | 1,251 | 1,396 | 1,312 | 1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5. | Tingkat pengangguran terbuka | 2.3 | 1.6 | 0.77 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Koperasi Usaha Kecil dan Menengah : | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Persentase koperasi aktif | 88,87 | 90,00 | 78,00 | 78,92 | 81,51 | 7,75% | 8,45% | 9,50% | 10,21% | 11,27% | 11,27% |
| 13.2. | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | 14,754 | 15,862 | 17,162 | 18,366 | 19173 | 21327 | 22404 | 23,481 | 24,558 | 25635 | 25635 |
| 13.3. | Jumlah BPR/LKM | 607 | 629 | 639 | 663 | 666 | 702 | 732 | 762 | 792 | 822 | 822 |
| 13.4. | Usaha Mikro dan Kecil | 839 | 912 | 338 | 953 | 911 | 831 | 871 | 911 | 951 | 991 | 991 |
| 14. | Penanaman Modal : | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 689 | 777 | 785 | 1,459 | 5,739 | 2,231 | 2,357 | 2,496 | 2,649 | 2,817 | 12,550 |
| 14.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 3,173,814,437,239.00 | 7,180,810,126,088.00 | 6,147,499,450,989.00 | 2,618,136,988,815.00 | 6,329,353,227,774.00 | 2,419,842,370.05 | 2,871,927,176.75 | 3,359,197,642.05 | 3,899,203,310.35 | 4,493,089,023.15 | 17,043,259,522.35 |
| 14.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | 4.33 | 8.73 | 21.68 | 6.49 | 6.34 | 9.514 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 14.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 1,740.50 | 1,355.46 | 27.46 | -1,467.29 | 1,308.02 | | 322.20 | 376.05 | 424.59 | 487.23 | |
| 15. | Kebudayaan : | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 5 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 1 Kali | 5 Kali |
| 15.2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15.3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | - | 23 Situs | 52 Situs | - | 52 Situs | 52 Situs | 54 Situs | 54 Situs | 56 Situs | 58 Situs | 58 Situs |
| 16. | Kepemudaan dan Olahraga : | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Jumlah organisasi pemuda | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.2. | Jumlah organisasi olahraga | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 16.3. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16.4. | Jumlah kegiatan olahraga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16.5. | Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.6. | Lapangan olahraga | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17. | Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri : | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 60 | 46 | 40 | 40 | 40 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 375 |
| 17.2. | Kegiatan pembinaan politik daerah | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 18. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | | | | | | | |
| 18.2. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 33.01 | 33.18 | 33.47 | 31.71 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 31.18 | 155.9 |
| 18.3. | Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 1890 |
| 18.4. | Pertumbuhan ekonomi | 7.07 | 7.64 | 6.82 | 6.97 | 6.27 | | | | | | |
| 18.7. | Penegakan PERDA | 105.23 | 113.43 | 104.88 | 106.88 | 104.48 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| 18.8. | Cakupan patroli petugas Satpol PP | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam sehari | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam | 2 kali patroli dalam |
| 18.9. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 55% | 65% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| 18.10. | Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
| 18.11. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | 84.20% | 84.20% | 295.4% | 295.4% | 295.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18.12. | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) | 84.20% | 84.20% | 295.4% | 295.4% | 295.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18.13. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 80.40% | 88.14% | 88.32% | 96.33% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 18.14. | Sistim Informasi Manajemen Pemda | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 46 desa | 47 desa | 48 desa | 49 desa | 50 desa | 51 desa | 52 desa | 53 desa |
| 18.15. | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | - | - | - | 74,9 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 78,9 | 79,9 | 80,9 | 81,9 |
| 19. | Ketahanan Pangan : | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Regulasi ketahanan pangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19.2. | Ketersediaan pangan utama | 68.95% | 62.92% | 49.12% | 41.03% | 33% | 34% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% |
| 20. | Pemberdayaan Masyarakat Desa : | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok | 8 kelompok |
| 20.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok |
| 20.3. | Jumlah LSM | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 20.4. | LPM Berprestasi | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok | 1 kelompok |
| 20.5. | PKK aktif | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok | 606 Kelompok |
| 20.6. | Posyandu aktif | 572 Kelompok | 572 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok | 573 Kelompok |
| 20.7. | Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat | 93.50% | 79.40% | 89.30% | 93.90% | 94.30% | | | | | | |
| 20.8. | Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat | 62 Kelompok | 62 Kelompok | 62 Kelompok | 62 Kelompok | 63 Kelompok | 64 Kelompok | 65 Kelompok | 66 Kelompok | 67 Kelompok | 68 Kelompok | 69 Kelompok |
| 21. | Statistik : | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Buku "kabupaten dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 21.2. | Buku "PDRB kabupaten" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 22. | Kearsipan : | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Pengelolaan arsip secara baku | 30 SKPD | 30 SKPD | 15 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 30 SKPD | 180 SKPD |
| 22.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 40 Orang | 40 Orang | 104 Orang | 132 Orang | 129 Orang | 139 Orang | 139 Orang | 139 Orang | 139 Orang | 139 Orang | 824 Orang |
| 23. | Komunikasi dan Informatika : | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Jumlah jaringan komunikasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23.2. | Rasio wartel/warnet terhadap penduduk | 0.000567697 | 0.00054038 | 0.000358234 | 0.000350091 | 0.000197037 | 0.000127551 | 0.0000995605 | 0.0000837943 | 0.0000680913 | 0.0000547912 | 0.0000547912 |
| 23.3. | Jumlah surat kabar nasional/lokal | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23.4. | Jumlah penyiaran radio/TV lokal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23.5. | Web site milik pemerintah daerah | 43 | 43 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 23.6. | Pameran/expo | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket |
| 24. | Perpustakaan : | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Jumlah perpustakaan | 336 | 336 | 428 | 440 | 438 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| 24.2. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 817 | 1,024 | 4,621 | 3,507 | 2,336 | 5,100 | 5,600 | 6,200 | 6,800 | 7,500 | 31,200 |
| 24.3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 31,118 | 34,579 | 43,684 | 50,043 | 52,633 | 65,819 | 69,969 | 74,269 | 78,769 | 83,469 | 83,469 |
| | Fokus Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pertanian : | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | 62.88 | 63.2 | 64.61 | 62.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 12,91 M | 13,43 M | 14,21 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | 666,32 M | 693,76 M | 744,55 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Cakupan bina kelompok petani | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp | 9 klp |
| 1.7. | Jumlah Populasi Ternak | 1,661,692 | 1,357,001 | 1,366,005 | 1,476,035 | 1,486,869 | 1,501,775 | 1,509,284 | 1,516,831 | 1,524,414 | 1,532,036 | 1,532,036 |
| 1.8. | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1. | Produksi perikanan | 38,386.30 | 48,563.50 | 49,099 | 6,619.60 | 6,724.65 | 5,335.96 | 5,389.32 | 5,443 | 5,497.62 | 5,552.60 | 27,219 |
| 1.8.2. | Konsumsi ikan | 30.91 | 31.1 | 32.2 | 32.87 | 32.89 | 32.96 | 33.01 | 33.06 | 33.11 | 33.15 | 33.15 |
| 1.8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | 150 | 169 | 167 | 167 | 149 | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp |
| 1.8.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | 4,467.9 | 4,570.30 | 4,748.40 | 6,094.70 | 6,137.81 | 4,737.32 | 4,784.69 | 4,832.54 | 4,880.86 | 4,929.66 | 24,165 |
| 2. | Kehutanan : | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 331496 | 127436 | 297100 | 112575 | 2200 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 240000 |

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Capaian Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Tahun 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2.2. | Kerusakan Kawasan Hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | |
| 4. | Pariwisata | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Kunjungan wisata | 2,756,579 | 2,892,019 | 3,148,443 | 3,681,342 | 3934384 | 4,200,000.00 | 4,410,000.00 | 4,630,500 | 4,862,025 | 5105126 | 5105126 |
| 4.2. | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 5,948,208.92 | 7,186,658.79 | 8,807,667.89 | 10,815,279.76 | | | | | | | |
| 4.3. | Persentase DTW yang ditata | 30% | 30% | 42% | 44% | 55% | 64% | 66% | 69% | 72% | 72% | 72% |
| 4.4. | Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara | 2,756,579 | 2,892,019 | 3,148,443 | 3,681,342 | 3,934,384 | 4,200,000 | 4,410,000 | 4,630,500 | 4,862,025 | 5,105,126 | 5,105,126 |
| 4.5. | Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5. | Kelautan dan Perikanan : | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Produksi perikanan | 38,386.30 | 48,563.50 | 49,099 | 6,619.60 | 6,724.65 | 5,335.96 | 5,389.32 | 5,443 | 5,497.62 | 5,552.60 | 27,219 |
| 5.2. | Konsumsi ikan | 30.91 | 31.1 | 32.2 | 32.87 | 32.89 | 32.96 | 33.01 | 33.06 | 33.11 | 33.15 | 33.15 |
| 5.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | 150 | 169 | 167 | 167 | 149 | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp | 14 klp |
| 5.4. | Produksi perikanan kelompok nelayan | 4,467.9 | 4,570.30 | 4,748.40 | 6,094.70 | 6,137.81 | 4,737.32 | 4,784.69 | 4,832.54 | 4,880.86 | 4,929.66 | 24,165 |
| 6. | Perdagangan : | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 9.30% | 10.30% | 9.82% | 8.68% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 6.2. | Ekspor Bersih Perdagangan | 128,296,174.45 | 64,119,363.27 | 57,770,469.90 | 63,675,447.62 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.3. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | | | | | | | | | | | |
| 7. | Perindustrian : | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 4.58% | 4.36% | 4.21% | 4.01% | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Pertumbuhan Industri. | 54 | 41 | 50 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | | | | | |
| | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pertanian : | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Nilai tukar petani | 1.103 | 1 | 0.98 | 1.265 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perhubungan : | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 1.77 | 2.04 | 2.7 | 1.36 | 1.292 | 1 | 1 | 0.999724971 | 0.949738723 | 0.902251787 | 0.857139197 |
| 1.2. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | 372,750 | 1,552,142 | 1,307,679 | 1,279,597 | 695433 | 920000 | 966000 | 1,014,300 | 1,065,015 | 1,118,266 | 1,118,266 |
| 1.3. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | 334677 | 1447702 | 1176531 | 1156821 | 561527 | 98155 | 100118.1 | 102120.462 | 104162.8712 | 106246.1287 | 108371.0512 |
| 2. | Lingkungan Hidup : | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih | 75,80% | 73,00% | 76,80% | 76,29% | 76,29% | 91,90% | 92,90% | 94,40% | 96,50% | 97,20% | 97,20% |
| 3. | Komunikasi dan Informatika : | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 12,32% | 12,06% | 8,86% | 0.0891 | 0.093555 | 0.108301607 | 0.113716687 | 0.119402522 | 0.125372648 | 0.13164128 | 0.138223344 |
| | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | | | | | | |
| 1. | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Angka kriminalitas | 0.11% | 0.09% | 0.13% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Jumlah demo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Lama proses perijinan | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah | 9 Pajak dan 13 Retribusi | 10 Pajak dan 14 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi | 10 Pajak dan 17 Retribusi |
| 1.5. | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 1 | 3 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2016 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang telah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Badung dengan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait;

- 2) Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar betul-betul melaksanakan program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 4) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung;
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Badung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- 7) RKPD Kabupaten Badung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Badung merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- 9) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Kabupaten Badung yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung, berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. Hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI BADUNG,

ttd.

I NYOMAN GIRI PRASTA